

AZAKI KHOIRUDIN

'DEMI PENA'

**Sejarah dan Dinamika Ikatan Pelajar Muhammadiyah
(1961-2016)**



DEMI PENA:
Sejarah dan Dinamika Ikatan Pelajar Muhammadiyah
(1961-2016)

PENULIS:
Azaki Khoirudin

Desain Cover:
Care Media

Cetakan I November 2016

Cetakan II Juli 2017

PENERBIT:
Pimpinan Pusat
Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Jl. KH. Ahmad Dahlan 103
Yogyakarta
Website: www.ipm.or.id

Penerbit Horizon
Karang Tengah RT 03/ RW 05
Ngadirejo, Kartasura, Sukohrajo
email : lembagahorison@gmail.com

ISBN : 978-602-61493-1-2

Segores Pena

Nuun, Demi Pena dan Segala yang Dituliskan.

Alhamdulillah, akhirnya terbit juga buku ini. Buku yang berjudul *Demi Pena: Sejarah dan Dinamika IPM 1961-2016*. Buku ini berisi tentang sejarah kelahiran IPM, dinamika perubahan paradigma IPM, dan kodifikasi system perkaderan IPM. Bahwa sudah sekian lama, kita menantikan buku yang mengupas tentang sejarah IPM. Tanpa sejarah, kita tidak akan punya kesamaan rasa yang menjadi pengikat solidaritas kolektif dalam ber-IPM. Karena itu, penulis mencoba memberanikan diri untuk menuliskan buku ini, meskipun penulis bukan ahli sejarah. Terus terang, penulis dipicu oleh tuntutan teman-teman di IPM, tepatnya pada saat Konpiwil (Konferensi Pimpinan Wilayah) yang diselenggarakan oleh PP. IPM di Padang tahun 2013. Dimana pada saat sidang komisi yang membahas *Gerakan Pelajar-Berkemajuan: Paradigma Gerakan Ilmu*, kebetulan penulis adalah tim materinya. Dalam forum itu memberikan pekerjaan rumah, bahwa diperlukan sebuah karya akademik-ilmiah untuk menuliskan sejarah perubahan paradigma dan sistem perkaderan IPM. Sejak itu, saya kemudian tergerak untuk menelusuri dokumen-dokumen lama di kantor PP IPM Jl. KH. Ahmad Dahlan 103 Yogyakarta. Dan ternyata, banyak sekali dokumen lama hasil pemikiran aktivis IPM terdahulu yang tidak diketahui oleh generasi masa kini. Dari sinilah penulis semakin tergerak hati untuk mengumpulkannya, hingga kumpulan keputusan ideologis tersebut sekarang penulis himpun menjadi sebuah buku yang berjudul *Ideologi Gerakan IPM*.

Tidak sampai di situ, kegelisahan akademik sekaligus kegelisahan sebagai seorang aktivis IPM yang merasa a-sejarah (untuk tidak mengatakan buta sejarah pergerakannya sendiri), terus menyelimuti hati dan pikiran penulis. Penulis berpikiran, bahwa menulis ini bukan pekerjaan mudah. Di samping penulis juga memiliki beban untuk menyelesaikan tesis sebagai syarat Studi S-2. Maka jalan tengahnya adalah menjadikan IPM sebagai obyek penelitian. Tetapi, dalam hati penulis, apakah bisa posisi penulis yang masih aktif di IPM ini menulis tentang IPM? Dimanakah letak obyektivitasnya? Akhirnya, penulis pun memutuskan memosisikan diri sebagai *insider* (meneliti dari kaca mata orang dalam). Kebetulan konsentrasi S-2 penulis adalah "Pemikiran Pendidikan Islam", maka penulis memutuskan untuk menulis tesis yang berjudul "Genealogi Pemikiran Pendidikan dalam Sistem Perkaderan IPM: 1961-2015). Yang kemudian, penulis sedikit edit dan menambahkan beberapa informasi untuk keperluan kontekstualisasi, akhirnya tesis ini diterbitkan menjadi buku ini.

Sudah seharusnya penulis bersyukur, karena Allah telah mentakdirkan semua berjalan seiring dan lancer, serta berahir pada waktunya. Pada akhir tahun ini, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan studi S-2, pada waktu yang hampir berdekatan penulis juga harus mengakhiri masa jabatan di Pimpinan Pusat IPM periode 2014-2016, sekaligus mengahiri pengabdian menjadi aktivis IPM sejak 2002 hingga 2016, 14 (empat belas) tahun merupakan waktu yang cukup lama berjuang dalam IPM. Penulis mengucapkan **#TerimakasihIPM**. Banyak ilmu, hikmah, pelajaran, pengalaman, dan segudang memori kehidupan telah mengisi perjalanan hidup penulis. Jadi, dapat dikatakan buku ini adalah **#KadoMuktamarXX** IPM yang insya Allah diselenggarakan pada 12-16 November 2016 di Samarinda. Buku ini juga merupakan kado terahir, yang dapat penulis berikan untuk mengahiri pengabdian di IPM, kemudian menjadi **#AlumniIPM**.

Penulis merasa harus berterimakasih kepada beberapa pihak yang berkontribusi dan membantu penerbitan dan penulisan buku ini. Kepada Profesor Abdul Munir-Mulkhan

yang telah bersedia membimbing penulisan tesis yang dibukukan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya. Meski tergolong sudah sangat senior usia 70- tahun (lahir di Jember pada tanggal 13 November 1946), namun Syaikh Munir (Penggilan Akrabnya) masih sangat aktif menulis dan memiliki komitmen sangat tinggi untuk memikirkan Muhammadiyah. Penulis bersyukur mendapat pembimbing yang serius dan tekun dalam membimbing mahasiswanya. Bimbingan dilakukan di rumah beliau di Kotagede-Yogyakarta, sekitar jam 8 malam hingga jam 10 malam. Tidak cukup di situ, bimbingan juga lewat email. Beliau begitu teliti membaca dan memberi tanda warna merah untuk masukan dan perbaikan bagi penulis. Selain itu, beliau juga memberikan catatan dalam print-out tulisan ini. Lalu, ketika penulis tidak dapat membaca tulisan beliau, tulisan tersebut penulis foto lalu penulis kirimkan melalui *WhatsApp* (WA), beliau pun dengan ringan tangan dan ringan hati langsung membalas dan menuliskan ulang tulisan beliau yang penulis tidak dapat membacanya. Selain itu, beliau juga tidak segan memberikan buku-bukunya untuk referensi penulisan bukunya. Di sela-sela bimbingan, beliau juga banyak berbicara tentang dinamika Muhammadiyah yang tidak semua orang mendapatkannya.

Tentu saja penulis juga harus mengucapkan terimakasih kepada Velandani Prakoso (Ketua LaPSI PP IPM 2014-2016, yang kini menjadi Ketua Umum PP IPM 2016-2018) yang bersedia menjadi teman setia menemani dan mengantar saya ketika bimbingan di rumah Syaikh Munir. Sampai-sampai, Andan pun rela mengambil koreksian tesis (buku ini) ke rumah Syaikh Munir, kemudian membawanya ke Taruna Melati III di Madiun, untuk dititipkan Haqiqie (kader IPM Gresik), sehingga saya dapat merevisi hasil koreksian Syaikh Munir di rumah Gresik. Selain itu, penulis sangat berterima kasih kepada Mas Adim (Adim Paknala). Di tengah kesibukannya menggarap banyak buku, ia masih bersedia untuk meluangkan waktu membantu mempersiapkan penerbitan buku ini. Terimakasih juga Fauzan Anwar Sandiah (Kurator dan Pegiat Rumah Baca Komunitas) yang menjadi teman diskusi penulisan buku ini, yang selalu bersedia memberikan masukan berharga kepada

penulis, baik itu metode penulisan, maupun membantu analisis ketika penulis sedang mengalami kesulitan. Bagi penulis, beliau adalah pembimbing kedua saya. Kepada Bapak Haedar Nashir (Ketua Umum PP. Muhammadiyah 2015-2020), M. Izzul Muslimin (Ketua Umum PP IRM 1996-1998) dan Moh. Mudzakkir (Ketua Umum IRM 2006-2008) yang quotes-nya diambil untuk cover bagian belakang buku ini, penulis mengucapkan terima kasih atas izinya.

Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada istri penulis MH. Muflihatul Ulfa, atas segala pengorbanan dan pengertiannya yang memungkinkan saya untuk fokus dalam menekuni amanah sebagai Sekretaris Jenderal PP IPM 2014-2016 sekaligus menyelesaikan Studi S-2 di UIN Sunan Kalijaga. Kepada putra penulis, "Adzkia Irfani Mafaza" yang lahir pada 30 Mei 2016, terimakasih atas kehadiranmu yang selalu pengertian dan mau berkerja sama baik dengan Bunda maupun Ayah. Sejak dalam kandungan, masa kelahiran, hingga sekarang di usiamu yang ke-4 bulan di saat penerbitan buku ini, engkau selalu memberikan semangat hidup dan bekerja itu naik dan turun, tetapi kehadiranmu selalu menjadi penggerak dan pendorong untuk terus maju. Semoga engkau menjadi pribadi sebagaimana namamu. Amin.

Yogyakarta, 30 Mei 2017

Senarai Pena

Segores Pena	i
<i>Pena 1</i>	
PENDAHULUAN : DEMI PENA DAN SEGALA YANG DITULISKAN	1
A. Mengapa Buku Ini Ditulis?.....	1
B. Jelajah Pustaka	8
C. Bingkai Teori.....	11
1. Genealogi.....	12
2. Filsafat Pendidikan.....	14
3. Sosiologi Pengetahuan	16
D. Pena Metodologis.....	17
<i>Pena 2</i>	
DUA FUNGSI STRATEGIS IPM	25
A. IPM sebagai Aksentuator	
Gerakan Muhammadiyah.....	26
1. Posisi IPM sebagai Ortom Muhammadiyah	26
2. Pendidikan sebagai Lokus Gerak IPM.....	29
B. IPM sebagai Organisasi Kader Muhammadiyah.....	35
1. Muhammadiyah dan Pendidikan Kader	35
2. IPM sebagai Gerakan Perkaderan	46
<i>Pena 3</i>	
SEJARAH KELAHIRAN IPM.....	53
A. Konteks Sejarah Kelahiran IPM	53
1. Berakhirnya Deklarasi Panca Cita.....	55
2. Eksistensi PII di Sekolah Muhammadiyah	58
3. Maraknya Ideologi Komunis	62
B. IPM Didirikan oleh Pemuda Muhammadiyah.....	66

C. Konsolidasi Ideologis IPM (1961-1969)	71
<i>Pena 4</i>	
DINAMIKA IPM DI ERA ORDE BARU	
(1966-1998).....	79
A. Corak Developmementalis (1969-1992)	79
1. IPM dan Asas Tunggal	81
2. Paradigma Tri Tertib: (Ibadah, Belajar dan Organisasi).....	86
B. Corak Pragmatis-Inklusif (1992-1998)	90
1. Perubahan Nama IPM ke IRM	91
2. Kritik atas Paradigma "Tri Tertib"	99
<i>Pena 5</i>	
DINAMIKA IPM PASCA REFORMASI	
(1998-2016).....	103
A. Corak Populis (1998-2008).....	104
1. Wacana Pengembalian Nama IRM ke IPM	104
2. Gerakan Advokatif Tanpa Kekerasan (GATK)..	107
3. Manifesto Gerakan Kritis-Transformatif	110
4. Kritik atas Paradigma GKT	115
B. Corak Kosmopolitanisme (2008-2016)	118
1. Pengembalian Nama IRM ke IPM.....	119
2. Gerakan Pelajar Kreatif: <i>Unfinished Paradigm</i>	124
3. Gerakan Pelajar Berkemajuan.....	128
<i>Pena 6</i>	
KODIFIKASI SISTEM PERKADERAN IPM	
A. SPI Merah (1986).....	138
B. SPI Biru (1994).....	142
C. SPI Hijau (2002).....	147
D. SPI Kuning (2014).....	150
<i>Pena 7</i>	
DISKURSUS FILSAFAT PERKADERAN IPM.....	
A. Madzhab SPI Merah: Perenialisme	157
B. Madzhab SPI Biru: Esensialisme	161
C. Madzhab SPI Hijau: Progresivisme.....	165
D. Madzhab SPI Kuning: Rekonstruksionisme	168
<i>Pena 8</i>	
PROFIL KADER IPM	
A. Generasi Militan	178

B. Generasi Kreatif.....	181
C. Generasi Kritis.....	184
D. Generasi Berkemajuan.....	188
<i>Pena 9</i>	
PENUTUP: DEMI MASA.....	197
Sumber Pena	209
Sang Pena	219

Pena 1

PENDAHULUAN : DEMI PENAN DAN SEGALA YANG DITULISKAN

A. Mengapa Buku Ini Ditulis?

Buku *Demi Pena : Sejarah dan Dinamika Ikatan Pelajar Muhammadiyah (1961-2016)* ini ditulis berangkat dari asumsi dasar bahwa sejarah berdirinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah tidak terlepas dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amal makruf nahi munkar. Selain itu, sebagai konsekuensi dari banyaknya sekolah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah untuk membina dan mendidik kader-kadernya, maka¹ Muhammadiyah menyadari sepenuhnya, bahwa untuk meneruskan dan menyempurnakan amal usahanya, diperlukan kader-kader penerus yang berkualitas dan penuh pengabdian, serta memahami arah dan tujuan yang diemban oleh persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri menegaskan, salah satu fungsi lembaga pendidikan Muhammadiyah adalah sebagai lembaga pembibitan kader.²

Sejak berdirinya, secara spesifik IPM menjadikan surat Al-

1 Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah. *Ensiklopedi Muhammadiyah*. (Jakarta: Rajawali Press. 2005).

2 Ahmad Adaby Darban dan Musthafa Kamal Pasha. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam; dalam Perspektif Historis dan Ideologis*. (Yogyakarta: LPPI UMY. 2002), 3-4

Qolam ayat 1 sebagai dasar nilai dari sistem gerakannya yang dimaknai sebagai "kesadaran mendasar" yang dimiliki oleh setiap aktivis IPM. Surat Al-Qolam ayat 1 berbunyi "*Nûn, Wal-Qalami Wamâ Yasthurûn*". Nun dapat dimaknai sebagai "nur" atau "cahaya". Dengan sumpah "Demi Pena" sebagai media untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pengalaman dalam ber-IPM. Al-Qolam menjadi simbol pencerahan bagi akal dan nurani manusia (*tanwir al-uqul wa al-qulub*) untuk mendorong transformasi sosial. Namun dalam perjalanannya, dengan semangat al-Qalam, IPM menemukan dinamikanya sendiri ketika berhadapan dengan zaman yang selalu berubah dinamis. Wacana demi wacana, gerakan demi gerakan, dan aksi-aksi kreatif telah dilakukan IPM sepanjang zaman.

Walaupun demikian, kiprah gerakan sosial berbasis pelajar IPM ini, baik aksi maupun pemikirannya belum banyak menjadi perhatian oleh para peneliti, akademisi, maupun aktivis untuk menuliskannya. Lebih-lebih, ternyata organisasi pelajar ini memiliki pemikiran gerakan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik dan wacana yang berkembang, di saat yang sama pemikiran itu sangat berpengaruh kepada pola pendidikan atau system perkaderan kepada para anggotanya. Selama ini kelas sosial pelajar masih dijadikan obyek dari pendidikan, bukan subyek pendidikan.³ Pertanyaannya apakah mungkin sebuah pemikiran muncul dari organisasi pelajar? Kalau pun mungkin, apakah pemikiran itu benar-benar muncul dari aktivis pelajar yang tergabung dari sebuah organisasi tersebut. Lalu bagaimana pemikiran pendidikan muncul dan dapat berkembang pada organisasi kepelajaran ini? Pertanyaan ini membutuhkan jawaban akademik, bahwa ternyata ada organisasi pelajar Islam di Indonesia yang mampu memproduksi dan mengembangkan wacana dan pemikiran pendidikan.⁴

3 Roem Topatimasang, Toto rahadjo, dan Mansour Fakhri, *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis* (Yogyakarta: Insist Press, 2010) Cet. ke-4, 32.

4 Anggaran Dasar IPM pasal 3 dalam Pimpinan Pusat IPM, *Tanfidz Mukhtamar XIX* (Jakarta, 16-19 Nopember 2014), 56.

Menariknya, IPM sebagai gerakan sosial berbasis massa pelajar ini, secara historis dibangun oleh berbagai rezim intelektual. Hal tersebut direpresentasikan melalui diskursus dari pra-Muktamar, pasca-Muktamar, aksi sosial, hingga sistem perkaderan yang senantiasa berubah sesuai dengan dinamika zaman. Menurut Fauzan Anwar, IPM termasuk sebagai gerakan sosial berbasis pelajar yang mudah mendiskusikan berbagai kemungkinan teoritik dalam mengembangkan paradigma gerakan. Hal ini tentu saja menjadi suatu kenyataan yang menarik, tentang bagaimana IPM yang sejak awal didisain sebagai sub-gerakan Muhammadiyah, tetapi berhasil mengolah diskursus. Perjalanan pemikiran di IPM merupakan suatu manifestasi dari kemampuan para aktivisnya dalam mengelola diskursus eksternal ke dalam wacana internal IPM.⁵

Dalam Muhammadiyah, IPM dikenal sebagai organisasi kader yang berfungsi sebagai pelopor, pelangsup dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah (AUM). Kader dalam IPM didefinisikan "anggota yang telah mengikuti perkaderan serta mampu dan pernah menjadi penggerak inti organisasi".⁶ Sebagaimana keberadaan `Aisyiyah (1917), Kepanduan Hizbul Wathan (1918), Nasyiatul `Aisyiyah (1931), Pemuda Muhammadiyah (1932), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (1961), Tapak Suci Putra Muhammadiyah (1963) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (1964), juga menjadi wadah pendidikan dan pembinaan kader yang disebut dengan organisasi otonom Muhammadiyah (ortom).⁷ Karena itu, masing-masing ortom mempunyai sistem perkaderan yang berfungsi sebagai pedoman pelatihan dan pendidikan karakter dan identitas kader dan anggotanya.⁸ Sistem perkaderan

5 Fauzan Anwar Sandiah, "IPM dan Sejarah Ideologi" dalam *Ideologi Gerakan IPM* (Yogyakarta: PPIPM, 2016).

6 Anggaran Dasar Pasal 11 dalam Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, *Tanfidz Muktamar XVIII Palembang* (Yogyakarta: PPIPM, 2012), 44.

7 Norma Sari, "Kaderisasi di Muhammadiyah antara Rekrutmen dan Sistem Perkaderan", *Buletin Transformasi*, Edisi III Tahun IV/ 2004, 14.

8 Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan Muhammadiyah* (Yogyakarta: MPK PPM, 2015), 44.

sebagai seperangkat unsur dan keseluruhan komponen yang saling berkaitan secara teratur SPI berfungsi sebagai pedoman usaha penanaman nilai, sikap dan cara berpikir segenap pimpinan, kader dan anggota IPM.⁹ Karena itu SPI berfungsi sebagai pedoman kaderisasi untuk mewujudkan paradigma gerakan dan tujuan IPM.

Sejak era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, IPM terlahir dan mampu melewati dinamika sosial politik, ekonomi, budaya dengan melakukan kontekstualisasi paradigma gerakan, pemikiran dan SPI-nya. Pasca kelahirannya 1961, Orde Baru I gerakan dan aktivitas perkaderan IPM berorientasi pada penguatan ideologi dan pembentukan karakter pelajar. Dengan "Paradigma Tri Tertib" (Ibadah, Belajar, dan Organisasi), pendidikan anggota menggunakan pedoman SPI Merah. Perkembangan hingga Orde Baru II, atas paksaan rezim Soeharto, IPM terpaksa harus berubah nama menjadi IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah) tahun 1992. Perubahan basis masa dari "Pelajar" menjadi "Remaja" membuat gerakan IPM cenderung inklusif sekaligus pragmatis. Corak gerakan berubah menjadikan IPM merekonstruksi sistem perkaderannya, lalu lahirlah SPI Biru, sehingga muncul mainstream paradigma GATK (Gerakan Aktif Tanpa Kekerasan). Namun, di era Reformasi muncul gugatan bahwa nama IRM adalah produk Orde Baru. Karena Orde Baru tumbang, maka nama IRM harus dikembalikan menjadi IPM. Perubahan nama memang tidak berhasil, tetapi di era Reformasi IPM (saat itu IRM) mengalami perubahan revolusioner paradigma gerakannya menjadi bercorak populis.

⁹ Dalam Muhammadiyah, kader (Perancis: *cadre* atau *les cadres*) adalah anggota inti yang menjadi bagian terpilih dalam lingkup dan lingkungan pimpinan serta mendampingi (tokoh-tokoh) di sekitar kepemimpinan. Dalam pengertian lain, kader (Latin: *quadrum*) berarti empat persegi panjang atau kerangka. Dengan demikian kader dapat didefinisikan sebagai kelompok manusia yang terbaik karena terpilih, yaitu merupakan tulang punggung (kerangka) dari kelompok yang lebih besar dan terorganisasi secara permanen. Dalam Pedoman Majelis Pendidikan Kader (2010) Pasal 1 Ayat 4 ditegaskan bahwa, "Kader adalah anggota inti yang terlatih serta memiliki komitmen terhadap perjuangan dan cita-cita Persyarikatan." Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan Muhammadiyah*, 39-40.

Dengan masuknya pendidikan kritis sejak tahun 2000, maka digagaslah paradigma yang dikenal dengan "Manifesto GKT" (Gerakan Kritis-Transformatif) SPI Hijau yang bercorak partisipatoris. Pasca Reformasi, hingga tahun 2008, akhirnya nama IRM berubah kembali menjadi IPM. Perubahan IRM ke IPM menegaskan bahwa IPM harus kembali ke sekolah atau kembali ke pelajar. Sejak perubahan ini IPM menegaskan jatidirinya sebagai gerakan ilmu (iqra) yang dibingkai dalam paradigma GPB (Gerakan Pelajar Berkemajuan) dengan SPI Kuning.¹⁰ Dengan suasana sosial politik seperti itulah, IPM melahirkan produk intelektual mulai dari SPI Merah (1985), SPI Biru (1994), SPI Hijau (2002), dan SPI Kuning (2014).

Yang perlu mendapat perhatian adalah, bahwa perubahan SPI tersebut tidak sekedar berubah warna sampul, melainkan juga disertai dengan perubahan "paradigma gerakan" dan "orientasi pendidikan".¹¹ Pertanyaannya, mengapa SPI terus mengalami perubahan? Pemikiran pendidikan apa yang mendasari perubahan paradigma pendidikan dalam SPI?

Sebagai sebuah produk pemikiran, beragam paradigma dan SPI tersebut tidak lahir di ruang hampa. Mereka selalu bersentuhan erat dengan berbagai dimensi di sekitarnya. Karena sebuah generasi dalam IPM tentu mengalami dinamika dan perubahan dalam memproduksi wacana, ideologi, termasuk konsep kaderisasi kepada anggotanya. Eyerman dan Jamison menyebutnya sebagai 'minat pengetahuan' (*knowledge interest*) dari suatu generasi intelektual tertentu.¹² Di setiap zaman selalu ada "diskursus yang dominan' atau 'rezim kebenaran' (*regime of truth*).

¹⁰ *Ibid*, 130.

¹¹ Paradigma gerakan adalah "Suatu perangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan dan atau masalah yang dihadapi. Jadi dalam konteks IPM, paradigma dapat didefinisikan sebagai konsep IPM yang digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan realitas sosial." Ahimsa-Putra, Heddy Shri, "Paradigma Profetik Mungkinkah? Perluakah?", makalah disampaikan dalam Sarasehan yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana UGM, di Yogyakarta, 10 Februari 2011.

¹² Eyerman, R. & Jamison, A. *Social Movements: A Cognitive Approach*, (Pennsylvania: the Pennsylvania State University Press, 1991), 38.

Rezim ini menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Bukan hanya mengenai kebenaran moral, melainkan juga kebenaran epistemologis.¹³ SPI sebagai pedoman dapat berfungsi sebagai alat untuk melanggengkan rezim kebenaran dalam tubuh IPM kepada para anggotanya. Dengan analisis genealogis perspektif Michael Foucault berfungsi untuk membongkar rezim (intelektual) ini, menunjukkan proses dominasinya, dan mengevaluasi agenda dan kepentingan politik di belakangnya.

Dalam konteks genealogi pemikiran tidak dapat dilepaskan dari dinamika pemikiran dalam tubuh IPM. Oleh karena itu, penting untuk meneliti formasi ideologis IPM pada periode tertentu untuk memahami konteks lahirnya sebuah kodifikasi sistem perkaderan. Untuk melakukannya perlu dilakukan penelitian terhadap teks-teks dan serpihan-serpihan pemikiran yang dihasilkan IPM (baik personal maupun institusional) pada periode tertentu.¹⁴ Dalam hal ini, analisis dapat dilakukan terhadap produk pemikiran individu-individu (aktivis dan alumni IPM, baik *governing elite* maupun *non-governing elite*,¹⁵ yang memiliki pengaruh dalam pemikiran IPM. Sampai derajat tertentu, kebanyakan individu yang menjadi elite menghasilkan pemikiran yang mengalami pelembagaan sebagai pemikiran resmi. Sedangkan pemikiran yang dihasilkan oleh individu yang *non-governing elite* dalam beberapa kasus dapat mempengaruhi konstruksi pemikiran dalam IPM.

Berangkat dari asumsi bahwa tidak ada teori atau pemikiran yang independen. Paradigma pendidikan yang ada di balik beragam SPI tersebut bermuara pada konstruksi (aliran) pemikiran filosofis tertentu. Jika temuan George R.

13 B. Hari Juliawan, "Genealogi Michel Foucault" *Majalah Basis*, Nomor. 11-12, Tahun ke-64, 2015, 54.

14 Subhan Purno Aji, "Falsafah dan Genealogi Perkaderan IPM" dalam <http://pelajarberkemajuan.blogspot.co.id/2014/02/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>. (11 Maret 2016).

15 Ahmad Nur Fuad, "Kontinuitas dan Diskontinuitas Pemikiran Keagamaan Dalam Muhammadiyah (1923-2008): Tinjauan Sejarah Intelektual" (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2010).

Knight menyatakan bahwa pemikiran pendidikan dibetuk oleh aliran filsafat, maka buku ini akan menunjukkan logika terbalik bahwa "pemikiran pendidikan" dapat ditemukan sistem dan praktik pendidikan. Dalam hal ini paradigma didapatkan sistem perkaderan IPM yang meliputi: hakekat perkaderan, tujuan, kurikulum, metode, dan hingga output pendidikan.¹⁶ Pemikiran (filsafat) pendidikan George R. Knight akan membantu menemukan gagasan pendidikan dalam SPI akan diketahui kemana arah gerakan IPM berpihak pada siapa dan untuk kepentingan apa.¹⁷

Berdasarkan pemikiran di atas, studi tentang penulisan buku ini penting dilakukan setidaknya-tidaknya karena tiga alasan. *Pertama*, sejarah dan dinamika pemikiran paradigma IPM berkembang sepanjang sejarahnya tidak tunggal. Adanya berbagai varian pemikiran IPM tidak dapat dilepaskan dari diskursus "rezim intelektual", baik pada level global maupun lokal, serta dinamika internal IPM, Muhammadiyah, dan bangsa. Karena itu, telaah tentang genealogi perpektif Foucauldian memiliki urgensinya.¹⁸ *Kedua*, terdapat banyak tipe pemikiran dalam tubuh gerakan IPM yang tidak hanya berbeda, tetapi bahkan saling bertentangan. Orientasi pemikiran itu kemudian berpengaruh pada paradigma dan praktik perkaderan IPM. Dengan filsafat pendidikan Knight membantu menemukan gagasan pendidikan di balik empat SPI. *Ketiga*, perubahan konsep SPI yang berbeda mempengaruhi pembentukan karakter pelajar Islam. Dengan pendekatan "Sosiologi Pengetahuan" Peter L. Berger dan Thomas Luckmann untuk melihat orientasi pendidikan dalam SPI yang pada dasarnya merupakan hasil konstruksi masyarakat IPM (melalui mekanisme eksternalisasi dan objektivasi), "berbalik" membentuk karakter anggota IPM (melalui mekanisme internalisasi).¹⁹

16 George R. Knight, *Filsafat Pendidikan Isu-Isu Kontemporer & Solusi Alternatif*; (terj.) oleh Mahmud Arif, (Yogyakarta: Idea-/Press, 2004), 61.

17 *Ibid*, 61.

18 *Ibid*, 55

19 Hanneman Samuel, *Peter Berger: Sebuah Pengantar Ringkas* (Depok:

Dari latar belakang di atas tampak dinamika sejarah IPM yang sarat dengan berbagai orientasi pemikiran paradigma yang tidak lahir di ruang hampa. Perubahan paradigme gerakan dan orientasi pendidikan dalam perkaderan IPM tentu dipengaruhi oleh situasi sosial ekonomi, politik dan budaya yang dinamis. Oleh karena itu, perlu ada pembatasan ranah penulisan buku ini untuk fokus kajian. Penulisan buku ini akan menekankan kajian secara mendalam dalam tiga hal, pertama latar belakang sejarah kelahiran Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kedua, dinamika paradigma pemikiran dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah (1961-2016). Ketiga, menjelaskan bagaimana perubahan paradigma dapat berpengaruh orientasi sistem perkaderan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Asumsi inilah yang mendasari penulisan buku "*Demi Pena: Sejarah dan Dinamika Ikatan Pelajar Muhammadiyah (1961-2016)*."

B. Jelajah Pustaka

Dalam kajian pustaka ini ditelaah tidak hanya skripsi, tesis atau disertasi, tetapi juga semua jenis pustaka yang relevan bagi "pemecahan masalah". Kajian pustaka ini akan mengurai maksud dan tujuan pustaka itu ditulis atau diteliti, bagaimana penulisan buku itu dilakukan, hasilnya apa, dan apa manfaat metodologi dan kegunaannya bagi penulis.

Buku yang bertajuk "Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20" karya Yudi Latif diterbitkan oleh Mizan. Buku ini adalah disertasi doktoralnya S3 dalam bidang Sosiologi Politik dan Komunikasi dari Australian National University (2004). Fokus penelitiannya adalah pada "inteligensia" Muslim Indonesia. Teori-teori yang digunakan Yudi Latif antara lain 'sosiologi pengetahuan' Karl Mannheim, 'hegemoni' Antonio Gramsci, 'genealogi' Michel Foucault, dan 'ruang publik' Jurgen Habermas. Kajian sejarah intelektual ini, bertitik tolak dari abad ke-19, bahwa individu-individu intelektual Muslim menciptakan ruang aktualisasi bagi diri mereka sendiri di tengah masyarakat kolonial. Pembahasan bergerak ke abad ke-20 dengan kemunculan

Kepik, 2012), 16.

“inteligensia” dan pelbagai pergulatannya dalam mencari pengakuan dan otoritas politik. Penelitian genealogi Yudi Latif berguna untuk memperhatikan dinamika, transformasi dan diskontinuitas dalam gerak perkembangan pemikiran pendidikan dalam tubuh IPM. Eksplorasi kerangka teoretis dengan menggabungkan perspektif Foucault, bahwa dinamika pemikiran pendidikan dalam SPI dipengaruhi oleh faktor relasi sosial, ekonomi, politik dan kuasa yang sangat kompleks.²⁰ Identitas-identitas kolektif IPM yang terbentuk secara historis dan diwarisi dari generasi-generasi sebelumnya menjadi pijakan bagi upaya reproduksi dan reformulasi oleh generasi IPM berikutnya.

Selanjutnya disertasi yang berjudul “Kontinuitas dan Diskontinuitas Pemikiran Keagamaan Dalam Muhammadiyah (1923-2008): Tinjauan Sejarah Intelektual” karya Ahmad Nur Fuad di UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam menjelaskan perkembangan pemikiran keagamaan Muhammadiyah, Fuad menggunakan kerangka teoretis kontinuitas dan diskontinuitas Harry J. Benda, epistêmê (sistem relasi pengetahuan dan kekuasaan) dan epistemic community (komunitas epistemik) Michel Foucault, serta historical bloc (blok historis) Antonio Gramsci. Hasil penelitian Fuad menunjukkan terjadinya transformasi pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah setelah Ahmad Dahlan yang terbuka-toleran menjadi purifikasionis, dogmatis dan juristik (skolastik), serta pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah tidak berwajah tunggal.²¹ Dari obyek penelitian, penulisan buku ini berbeda dengan Ahmad Nur Fuad. Jika Fuad mengambil obyek “pemikiran keagamaan”, maka buku ini mengambil obyek “pemikiran pendidikan”. Teori Foucault epistêmê, membantu untuk melihat genealogi pemikiran pendidikan IPM, khususnya transformasi (transformation), pergeseran (shift) dan keterputusan epistemik (epistemic rupture) dalam pemikiran IPM.

²⁰ Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20* (Bangung: Mizan, 2005).

²¹ Ahmad Nur Fuad, “Kontinuitas dan Diskontinuitas...,”

Adapun beberapa penelitian yang membahas tentang IPM diantaranya sebuah tesis yang ditulis oleh Untung Cahyono, yang berjudul "Angkatan Muda Muhammadiyah dalam Dinamika Muhammadiyah 1918-1967". Penelitian Untung tersebut, meski tidak fokus meneliti tentang IPM, tetapi IPM termasuk dalam penelitiannya karena termasuk dalam Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) meski tidak begitu lengkap. Karena IPM pada tahun tersebut masih tergolong baru berdiri, (IPM berdiri pada tahun 1961) sedangkan penelitian Untung hanya dalam batas tahun 1967. Tetapi yang penting dari temuan Untung adalah sejarah kelahiran IPM walau tidak begitu lengkap. Penelitian Untung tersebut berbeda dengan buku ini, karena penulis hanya memfokuskan penelitian pada salah satu Angkatan Muda Muhammadiyah, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Dan lebih memfokuskan pada pemikiran pendidikan yang ada dalam sistem perkaderan IPM (1961-2015).

Studi tentang sejarah IPM pernah dilakukan oleh Amalia Destika melalui skripsinya yang berjudul "Ikatan Pelajar Muhammadiyah (1961-1998)". Pada skripsi ini, kajian terhadap gerakan pelajar Muhammadiyah difokuskan pada perkembangan IPM sejak kelahirannya pada tahun 1961 sampai masa reformasi pada tahun 1998. Penelitian ini mengangkat dua hal. Pertama, proses pendirian IPM, yang mencakup uraian tentang proses kelahiran IPM, usaha para pendiri IPM tersebut sehingga benar-benar bisa mewujudkan sebuah organisasi khusus pelajar Muhammadiyah, para tokoh di balik pendirian organisasi pelajar Muhammadiyah tersebut, serta alasan mengapa Pimpinan Pusat Muhammadiyah menentang didirikannya organisasi pelajar Muhammadiyah ini. Kedua, perkembangan IPM sejak lahirnya 1961-1998. Kajian ini mencakup kronologis perkembangan IPM dari tiap periode, sampai akhir tahun 1998 yaitu tahun berakhirnya pemerintahan Orde Baru yaitu rezim yang mengakibatkan bergantinya nama organisasi IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) menjadi IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah) serta alasan mengapa IPM bersedia mengganti asas organisasinya menjadi "Pancasila" dan alasan mengapa IPM juga bersedia mengganti nama

organisasinya menjadi IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah). Kajian Amalia, sangat membantu untuk membaca perkembangan dan dinamika IPM dari masa ke masa, yang sangat membantu untuk melihat konteks sosial perubahan paradig IPM, khususnya dari periode 1961-1998.

Penelitian tentang IPM selanjutnya adalah "Sejarah dan Kiprah Ikatan Remaja Muhammadiyah Jawa Timur di Era Reformasi Tahun 1998-2008" karya M. Mashudah.²² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Talcott Parsons tentang Fungsional Struktural. Menurut Parsons, masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri dari banyak lembaga, di mana masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Talcott Parsons konsep rational barat (yang berisi system of values) pada dua tingkat yaitu tataran individu (the structure of social action) dan tataran kelembagaan. Teori ini digunakan untuk memberikan sudut pandang baru tentang sejarah Ikatan Remaja Muhammadiyah Jawa Timur khususnya kepada Muhammadiyah, dan masyarakat pada umumnya. Selain itu juga untuk memperkaya wawasan penulis tentang arti penting kiprah Ikatan Remaja Muhammadiyah Jawa Timur di era reformasi tahun 1998-2008.

Terlepas dari penelitian di atas, sebenarnya penulisan tentang sejarah dan dinamika IPM jauh sebelum penelitian itu, Agung Danarta telah menuliskan kerangka tulisan yang berjudul "Dinamika IPM Dari Masa ke Masa"²³ yang cukup membantu penulis untuk membuat pembabakan sejarah IPM pada setiap masa.

C. Bingkai Teori

Kerangka teori untuk membingkai pembahasan buku ini untuk membedah persoalan/ menemukan data, menganalisa dan menyimpulkan, tentang "Genealogi Pemikiran Pendidikan dalam Sistem Perkaderan IPM (1961-2015)". Karena itu, untuk

²² M. Mashudah (Skripsi, UIN Sunan Ampel: 2009) "Sejarah dan Kiprah Ikatan Remaja Muhammadiyah Jawa Timur di Era Reformasi Tahun 1998-2008."

²³ Dokumen Organisasi yang ditulis oleh Agung Danarta, "Dinamika IPM dari Masa ke Masa" (Yogyakarta: PPIPM, 1992).

menjawab rumusan masalah pada buku ini menggunakan tiga teori, yaitu: genealogi Michael Foucault, gagasan pendidikan George R. Knight, dan sosiologi pengetahuan Peter L. Berger dan Thomas Luckmann.

1. Genealogi

Gagasan dan praktik pendidikan adalah produk konstruksi sosial yang berakar pada agenda politik dan sosial yang akan terus berubah, seiring perubahan masyarakat dalam sejarah. Kajian konstruksi sosial semacam ini dipelopori oleh Michael Foucault, yakni metodenya yang dikenal dengan istilah "genealogi".²⁴ Dengan genealogi' berguna untuk melihat dari setiap perubahan orientasi pemikiran pendidikan IPM dalam sistem perkadern IPM (1961-2015). Dalam perspektif Foucault kajian genealogi pemikiran terkait dengan pembentukan 'makna' atau 'proses diskursif'. Seluruh proses diskursif ini disebut dengan 'diskusus' atau 'wacana'. Karena tindakan sosial IPM yang melibatkan 'makna', maka di dalamnya selalu ada aspek diskursif.

Proses diskursif dalam IPM sejak tahun 1961 hingga 2015 mengalami dinamika tersendiri. Paradigma gerakan IPM berubah seiring kondisi sosial masyarakat. Pada era Orde Baru, di tubuh IPM telah muncul berbagai paradigma "Paradigma Tiga Tertib", kemudian pasca Reformasi muncul Manifesto Gerakan Kritis-Transformatif, dan "Gerakan Pelajar Berkemajuan". Uniknyanya adalah setiap perubahan orientasi paradigma gerakan atau wacana dalam tubuh IPM ini diikuti dengan perubahan sistem perkaderan IPM.

Wacana atau diskursus yang dominan' disebut rezim kebenaran (*regime of truth*). Wacana membentuk sebuah paradigma yang menjadi ruh sistem perkaderan IPM. Dari paradigma gerakan itulah, muncul SPI Merah (1985), SPI Biru (1994), SPI Hijau (2002) dan SPI Kuning

²⁴ Michael Foucault, 'Genealogy and Social Criticism' in *The Postmodern Turn: New Perspectives on Social Theory*, ed S. Seidman, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), 39-45.

(2014) dengan orientasi pendidikan yang berbeda. Dapat dikatakan, bahwa SPI merupakan alat untuk melanggengkan rezim kebenaran. Rezim ini menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Bukan hanya mengenai kebenaran moral, melainkan juga kebenaran epistemologis. Analisis genealogis bertugas untuk membongkar rezim (intelektual) ini, menunjukkan proses dominasinya, dan mengevaluasi agenda dan kepentingan politik di belakangnya.

Genealogi' dalam artian ini berguna untuk memperhatikan dinamika, transformasi dan diskontinuitas dalam gerak perkembangan historis dari sistem perkaderan IPM.²⁵ Maka, dengan menerapkan pembacaan secara genealogis, buku ini akan menempatkan keadaan-keadaan sinkronik (perubahan pada saat-saat tertentu) dalam kerangka waktu yang diakronik (lama-sinambung). Penekanan Foucauldian mengenai pentingnya mempelajari momen-momen yang bersifat sinkronik, dalam buku ini akan diimbangi dengan memberikan perhatian kepada sebuah proses diakronik yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Fokus perhatian kepada perubahan-perubahan sinkronik akan memperlihatkan bahwa gagasan pendidikan dalam sistem perkaderan IPM tidak merupakan konstruksi yang bersifat baku (*fixed*) dan stabil, yang bertahan sejak awal sampai akhir melewati segenap perkembangan sejarah tanpa ada perubahan.²⁶ 'Setiap kondisi historis memunculkan polarisasi yang bersifat dialektis dan menjadi sebuah medan kekuatan (*kraftfeld*) dimana di dalamnya berlangsung konflik antara masa lalu (*forehistory*) dan masa depan (*after-history*).

2. Filsafat Pendidikan

Gagasan pendidikan tidak terlepas dari landasan pemikiran filsafatnya. Karena itu, gagasan pendidikan

²⁵ Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, 7.

²⁶ *Ibid*, 10.

berbeda dengan pemikiran filsafat. Abd. Rachman Assegaf menjelaskan bahwa gagasan filosofis menjadi dasar dan sumber gagasan pendidikan.²⁷ Menurut Muarif suatu gagasan pendidikan itu terbangun dari paradigma pendidikan, sedangkan paradigma pendidikan dibangun dari filsafat.²⁸

Asumsi dasar tentang gagasan pendidikan yang dibangun dari filsafat dikemukakan oleh George R. Knight. Menurutnya pendidikan adalah proses disengaja dengan suatu tujuan spesifik yang meniscayakan untuk berpijak pada pandangan filosofis yang meliputi serangkaian kepercayaan tentang hakikat realitas, esensi kebenaran, dan landasan pembentukan nilai yang merupakan kandungan isi filsafat. Dengan demikian filsafat adalah kerangka dasar yang melandasi praktik pendidikan.²⁹

Dengan menggunakan logika terbalik, tesis ini akan membaca gagasan pendidikan, bukan dari filsafat. Tetapi berdasarkan paradigma dan praktik pendidikan dalam sistem perkaderan IPM. Dengan ditemukannya gagasan filosofis pendidikan dalam SP IPM, maka dengan sendirinya akan ditemukan landasan filosofisnya.³⁰ Karena itu gagasan pendidikan yang melatarbelakangi perubahan orientasi pemi-kiran pendidikan dan perbedaan sistem perkaderan IPM (SPI Merah, SPI Biru, SPI Hijau, dan SPI Kuning) akan dibaca dengan filsafat pendidikan George R. Knight. Apakah pendidikan dalam SPI IPM bercorak esensialis, perenialis, progresif, atau rekonstruksi sosial.

Pertama, pandangan esensialisme-perenialisme menyatakan, pendidikan berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai dalam komunitas. Knight menggolongkan perenialisme dan essensialisme ke dalam filsafat

²⁷ Abd. Rachman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif* (Jakarta: PT Radjagrafindo Persada, 2011), 175

²⁸ Muarif, *Liberalisasi Pendidikan*, 66.

²⁹ George R. Knight, *Filsafat Pendidikan*, 39.

³⁰ *Ibid.*

pendidikan tradisional. Teori ini digunakan untuk membaca SPI Merah dan SPI Biru yang dikenal dengan paradigma Tri Tertib masuk aliran pendidikan ini. Karena ajaran Tiga Tertib (Beribadah, Belajar, dan Berorganisasi) paradigma yang menekankan kesalehan individu, bukan dinamisasi kehidupan sosial.³¹

Kedua, pandangan progresivisme, pendidikan yang berakar pada pragmatisme.³² Pendidikan menekankan pada *learning by doing* sekaligus *problem solving* dapat dilihat dalam SPI Hijau.³³ Perhatian pendidikan progresif banyak difokuskan pada sekolah yang mengutamakan dinidik (*child-centered school*) dan menekankan kurikulum yang mengutamakan aktivitas (*activity-centered curriculum*).³⁴ Dalam aliran progresivisme, hakikat pendidikan adalah menumbuhkan kesadaran realitas dan proses penggalian pengalaman terus-menerus menghadapi masalah.³⁵ Teori ini untuk membaca SPI Hijau yang dikenal dengan paradigma Gerakan Kritis Transformatif.

Ketiga, pandangan rekonstruksionisme yang merupakan perkembangan dari aliran pendidikan aliran progresivisme yang hanya memperhatikan problem-problem masyarakat yang aktual saja. Padahal yang diperlukan pada abad 'kemajuan' teknologi yang pesat ini adalah "rekonstruksi masyarakat dan penciptaan tatanan dunia baru secara menyeluruh".³⁶ Teori digunakan untuk membaca SPI Kuning IPM yang dikenal dengan "Gerakan

31 Jalaludin Idi & Abdullah, *Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat, dan Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 100.

32 Pandangan pragmatisme memiliki tiga ciri, yaitu: (1) pengetahuan berakar dari pengalaman (2) kebenaran adalah apa yang berguna atau berfungsi, dan (3) manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai dalam masyarakat. George R. Knight, *Filsafat Pendidikan*, 64.

33 *Ibid.*, 82-86.

34 Abd. Rachman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam*, 204.

35 *Ibid.*, 203.

36 *Ibid.*, 206.

Pelajar-Berkemajuan” sebagai paradigma kader.³⁷ Perspektif rekonstruksio-nisme, pendidikan adalah reorganisasi pengalaman untuk meningkatkan kesadaran peserta didik tentang problem sosial, politik, ekonomi dan budaya yang dihadapi masyarakat secara global.³⁸

3. Sosiologi Pengetahuan

Dengan mengacu pada gerak dialektik relasi antar manusia (anggota, kader, pimpinan IPM) dan konteks sosial (masyarakat IPM), maka buku ini meminjam kerangka sosiologi pengetahuan Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, yang berasumsi bahwa “manusia dalam masyarakat,” dan “masyarakat dalam manusia”. “Realitas” dan “pengetahuan” adalah dialektis,³⁹ dan realitas adalah dibentuk oleh masyarakat” (*social construction of reality*).⁴⁰ Teori ini menjadi asumsi dasar penelitian ini bahwa wacana, ideologi, dan paradigma dalam IPM adalah hasil konstruksi sosial oleh masyarakat IPM..⁴¹ Pendekatan sosiologi pengetahuan (*sociology of knowledge*) Berger dan Luckmann akan *membantu menemukan*: apa sebabnya “pemikiran pendidikan” dapat diterima sebagai dalam masyarakat IPM? bagaimana pemikiran yang telah menjadi “kenyataan” dipertahankan dalam masyarakat IPM ? bagaimana “pemikiran pendidikan” bisa hilang dan berganti di tubuh IPM?

Berdasarkan pendekatan Berger dan Luckmann,

³⁷ John Dewey, *Democracy and Education*, (New York: The MacMillan Company), 81.

³⁸ “Education is that reconstruction or reorganization of experience which adds to the meaning of experience, and which increases ability to direct the course of subsequent experience” (Pendidikan adalah rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman yang menambah makna pengalaman, dan meningkatkan kemampuan untuk mengarahkan jalannya pengalaman berikutnya). Abd. Rachman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam*, 208.

³⁹ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 2012), 19.

⁴⁰ *Ibid*, 22.

⁴¹ *Ibid*, 72.

rumusan konseptual tentang dimensi sosial pengetahuan yang berkembang di masyarakat berawal dari proses eksternalisasi (*externalization*) kemudian beranjak ke dalam proses obyektivasi (*objectication*) dan berahir menuju proses internalisasi (*internalization*).⁴² Dalam buku ini eksternalisasi digunakan untuk melihat proses masuknya rezim intelektual atau discourse yang terjadi dalam IPM, sehingga mempengaruhi orientasi gerakan dan pendidikan kader dalam IPM. Selanjutnya, obyektivasi adalah proses produksi pengetahuan di IPM yang di sini terhadai penandaan. Proses pendandaan ini merupakan proses habituasasi kolektif masyarakat yang terinstitusionalisasi melalui proses pengulangan. Proses ini dipahami sebagai tahap terinstitusionalisasi wacana atau gagasan dalam perumusan paradigma gerakan dan pendidikan dalam SP IPM (Merah, Biru, Hijau, dan Kuning) yang mengalami perubahan dalam interval sekirar 10 tahun. Adapun, internalisasi merupakan pemahaman subyektif dan sekaligus penangkapan atas dunia sebagai sesuatu yang bermakna dan sekaligus sebagai realitas sosial. Oleh karena itu, penumpukkan wacana dalam IPM dan pemahaman individu yang disosialisasikan melalui proses perkaderan (habituasasi), yang termodivikasi secara kreatif, di sinilah terjadi internalisasi dalam seluruh anggota, kader, dan pimpinan IPM.

Pendekatan triadik sosiologi pengetahuan Berger dan Luckmann (eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi), digunakan untuk membaca "genealogi perubahan SP IPM (Merah, Biru, Hijau, dan Kuning" sebagai obyektivasi, "gagasan pendidikan" sebagai eksternalisasi, dan "karakter pelajar" sebagai internalisasi.

D. Pena Metodologis

Penulisan buku ini menggunakan pendekatan 'sejarah pemikiran' (*history of ideas*) dengan kajian teks. Dalam teori studi teks, menurut Asma Barlas, ada beberapa istilah: teks,

⁴² *Ibid*, 52.

tekstualitas, intertekstualitas, dan ekstratektulitas. Teks ialah "wacana apa pun yang dibakukan dalam bentuk tulisan"; tekstualitas ialah "bagaimana sebuah teks dibaca (model pembacaan)"; intertekstualitas ialah "hubungan antara satu teks dengan teks lainnya"; dan ekstratektulitas ialah "konteks pembacaannya".⁴³ Sementara itu Kuntowijoyo, menyatakan bahwa suatu pemikiran pasti dipengaruhi pemikiran sebelumnya dan konteks sejarahnya.⁴⁴ Karena itu, penulisan buku ini berkaitan dengan tiga hal: (1) suasana intelektual dan fenomena politik, ekonomi, sosial, pemikiran ilmiah, teologi, nilai, dan asumsi; (2) kekuatan ide yang membentuk arah dan tujuan hidup manusia, seperti pemikiran tentang kebangsaan, negara, konstitusi, dan agama; (3) asal-usul konsep-konsep tertentu sejak awal hingga kontemporer.⁴⁵

Dengan demikian, dalam penelitian genealogi pemikiran pendidikan dalam sistem perkaderan IPM sebagai produk pemikiran berposisi sebagai 'teks' utama yang dipengaruhi pemikiran-pemikiran sebelumnya dan konteks sejarahnya. Pemikiran-pemikiran sebelumnya dalam penelitian ini terpilah menjadi dua. Pertama, pemikiran tentang "IPM dan hubungannya dengan Muhammadiyah". Karena pemikiran pendidikan dalam IPM tidak dapat ditemukan secara mendasar tanpa mengetahui terlebih dahulu kaitan IPM dengan Muhammadiyah. Kedua, pemikiran yang terkait dengan nilai-nilai dan pengalaman historis formasi sosial IPM periode formatif. Hubungan antar pemikiran tersebut berperan sebagai 'intertekstualitas'.

Adapun konteks sejarahnya berposisi sebagai 'ekstratektulitas', yakni berupa *setting* sosio-politik kelahiran, perkembangan dan wacana yang muncul setiap perubahan paradigma gerakan yang mempengaruhi

⁴³ Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan* (Jakarta: Serambi, 2003), 83-84.

⁴⁴ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Edisi Kedua (Yogyakarta, PT Tiara Wacana Yogya, 2003), 191-192.

⁴⁵ Waryani Fajar Riyanto, *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan Birografi Intelektual M. Amin Abdullah (1953-...)* *Person, Knowledge, and Institution*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2013), 38.

perubahan sistem perkaderan IPM, yaitu *setting* sosio-politik rezim Orde Baru, fase pertama (1966-1988) maupun pada fase kedua (1988-1998), dan era Reformasi baik fase pertama (1998-2008) maupun fase kedua (2008-2015/batas penulisan buku),. Adapun 'tekstualitas' penelitian ini, yaitu model pembacaan terhadap teks dalam penelitian ini, yakni "SPI Merah, SPI Biru, SPI Hijau, dan SPI Kuning" dengan analisis wacana (Foucault), filsafat pendidikan (Knight) dan sosiologi pengetahuan (Berger dan Luckmann). Akhirnya genealogi pemikiran pendidikan dan perubahan SPI akan membawa pengaruh terhadap karakter kader Muhammadiyah.

Di antara keragaman model kajian teks,⁴⁶ penulisan buku ini memfokuskan diri pada model genesis pemikiran dan evolusi pemikiran untuk menjelaskan "genealogi pemikiran" dan "paradigma" IPM, dan pada model perkembangan dan perubahan pemikiran, varian pemikiran, untuk menjelaskan "pemikiran pendidikan dalam SPI". Kuntowijoyo,⁴⁷ mengutip Roland N. Stromberg, menyatakan bahwa sejarah pemikiran adalah kajian tentang peranan gagasan dalam peristiwa dan proses sejarah. Tugas sejarah pemikiran adalah: (1) membicarakan pemikiran-pemikiran besar yang berpengaruh pada kejadian sejarah; (2) melihat konteks sejarahnya tempat ia muncul, tumbuh, dan berkembang; dan (3) pengaruh pemikiran pada masyarakat bawah.⁴⁸ Dengan kata lain, "sejarah intelktual" tidak dapat mengklaim sebagai satu-satunya sejarah. Sejarah intelektual hanya ada dalam kaitan dengan kekuatan sosial, politik dan ekonomi yang melingkupinya dinamika pemikiran dalam IPM." Karena itu ruang lingkup penulisan buku ini dari dimensi waktu ialah mulai 1961, tahun berdirinya IPM hingga periode kontemporer (2016).

46 Menurut Kuntowijoyo, ada delapan model kajian teks, yaitu genesis pemikiran, konsistensi pemikiran, evolusi pemikiran, sistematika pemikiran, perkembangan dan perubahan pemikiran, varian pemikiran, komunikasi pemikiran, dan *internal dialectics* dan kesinambungan pemikiran. Lihat *ibid*, 192-195.

47 *Ibid*, 189.

48 *Ibid*, 191.

Penulisan buku ini termasuk jenis riset kualitatif. Sebagaimana dijelaskan Miles dan Huberman, yakni riset yang menggunakan data yang muncul berwujud *kata-kata* dan bukan rangkaian angka. Karena itu, jenis data yang dikumpulkan dan diperoleh dalam buku ini adalah data-data kualitatif. Adapun data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Dengan riset kualitatif dapat memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pemikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan komprehensif.⁴⁹

Data kualitatif dalam buku ini diperoleh melalui teks, baik berupa sumber-sumber primer maupun sumber-sumber sekunder. Sumber utama (*primary sources*) penulisan buku ini ialah tulisan-tulisan (teks-teks) resmi organisasi yang diproduksi oleh IPM. Tulisan-tulisan tersebut meliputi buku (tanfidz keputusan, pedoman organisasi dan pedoman sistem perkaderan), artikel dalam majalah atau buletin, dan makalah yang disampaikan dalam seminar, diskusi, atau forum-forum resmi IPM (Muktamar, Konpiwil, Pelatihan, Lokakarya dan lain-lain). Data sekunder adalah tulisan dari alumni atau aktivis IPM, juga rekaman forum-forum atau kegiatan IPM yang relevan dengan topik penulisan buku. Wawancara tidak dilakukan dalam penulisan buku ini dengan pertimbangan bahwa masalah yang diteliti merupakan wacana yang terjadi dalam periode waktu di masa lalu (1961-2016). Bila dilakukan wawancara, diasumsikan akan terjadi bias terhadap wacana yang terjadi dalam periode waktu tertentu, karena pengaruh konteks sosio-politik yang berbeda dan dinamis.

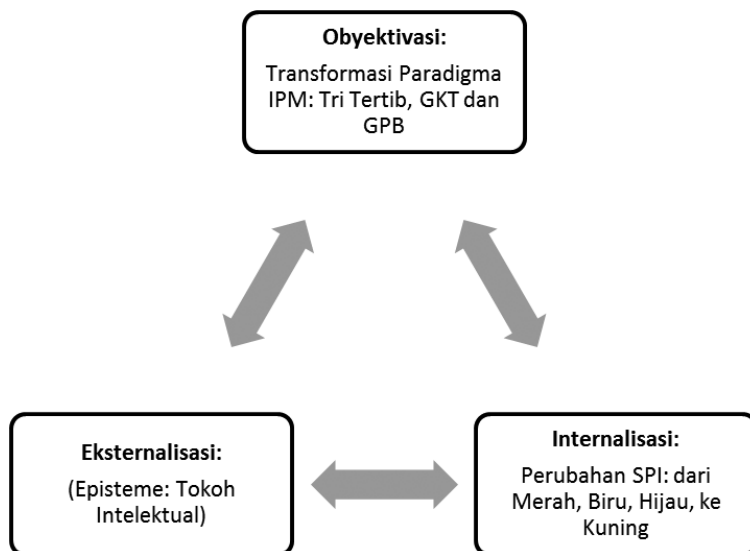
Dengan menggunakan klasifikasi James H Mc. Millah dan Sally Schumacher,⁵⁰ buku ini menggunakan metode *inquiry non-interaktif*, yang merujuk pada analisis fakta dan konsep melalui analisis dokumen, seperti keputusan organisasi, tanfidz, modul pelatihan, buku, makalah, artikel, *slide power*

⁴⁹ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992).

⁵⁰ James H Mc. Millah dan Sally Schumacher, *Research in Education: A Conceptual Introduction* (New York: Longman, 1987), 59.

point (ppt), rekaman video, kurikulum perkaderan dan lain-lain. Metode *inquiry non-interaktif* menurut Waryani memiliki kemiripan dengan metode *deskriptif-analitis* Winarno Surakhmad.⁵¹ Bedanya, kalau metode deskriptif-analitis kurang mempertimbangkan sumber data tertulis dan lebih banyak memusatkan pada data-data dalam bentuk peristiwa yang nyata dalam kehidupan sosial, sedangkan *inquiry non-interaktif* memusatkan sumber data pada penyelidikan fakta IPM dan konsep “pemikiran pendidikan” melalui analisis dokumen

Teknik pengumpulan data buku ini dilakukan dengan studi literatur dan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data utama.⁵² Dalam buku ini, data teks dan informan “dianyam” secara sirkularistik, bukan strukturalistik. Hal ini, karena sumber pustaka dipandang sebagai sumber data yang paling relevan-akademik-ilmiah, karena dapat diukur faktanya. Karena itu, buku ini menggunakan metode “anyaman” (triangulation). Hal ini karena sumber pustaka (buku, artikel, makalah dan lain-lain) dipandang sebagai sumber data yang paling relevan dan dapat dipertanggung-jawabkan secara akademis-ilmiah. Untuk skema penulisan buku ini dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Pelajar. 2009), 120.

Gambar 1. Triangulation/ Hermeneutical Circle

Triangulasi bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas data. Menurut Devon Jensen triangulasi dilakukan berdasarkan beberapa hal.⁵³ Pertama, waktu keterlibatan penulis dalam memahami berbagai konteks IPM. Kedua, ketekunan penulis dalam melakukan proses penulisan. Ketiga, proses mengecek kebenaran dengan menggali informasi dari berbagai pihak, dengan tujuan memverifikasi dan mengkonfirmasi informasi tentang SPI Merah, SPI Biru, SPI Hijau dan SPI Kuning. Keempat, pemeriksaan sejawat dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir dalam bentuk diskusi.

Data yang diperoleh dari pelbagai sumber tersebut kemudian diverifikasi, baik orisinalitas, kredibilitas maupun relevansinya. Data yang orisinal, kredibel dan relevan dengan fokus penulisan buku ini, kemudian ditafsirkan dan dianalisis. Meskipun riset kualitatif pada umumnya menjadikan sumber tertulis atau dokumen sebagai sumber kedua, namun dalam buku ini penggunaan dokumen menjadi teknis pengumpulan data utama. Dalam buku ini analisis dilakukan terhadap teks atau analisis tekstual (*textual analysis*), dan analisis intertekstual atau antar-teks (*inter-textual analysis*) dilakukan untuk mengaitkan satu teks dengan teks yang lain agar diketahui relasi dan interrelasi dan kemungkinan adanya saling pengaruh mempengaruhi. Selain itu, analisis konteks (*contextual analysis*) juga dilakukan untuk meletakkan teks-teks yang menjadi data dalam konteks sejarah, sosial dan politiknya. Data yang terkumpul kemudian dipaparkan dan dianalisis dengan model-model kajian teks yang telah dipilih di atas, yaitu genesis pemikiran, evolusi pemikiran, perkembangan dan perubahan pemikiran, varian pemikiran, baik dalam analisis eksplanasi maupun analisis sintesis.

⁵³ Devon Jensen, "Credibility", dalam Lisa M Given (ed.), *The Sage Encyclopedia of Quantitative Research Methods* (California: Sage Publication Inc., 2008), 139.

Pena 2

DUA FUNGSI STRATEGIS IPM

Sejatinya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) merupakan organisasi otonom yang memiliki fungsi strategis dalam organisasi induknya yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang lahir di Yogyakarta pada 9 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi. Pendiri gerakan ini adalah KH Ahmad Dahlan, seorang ketib Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang tinggal di kampung Kauman, Yogyakarta. Muhammadiyah sebagai organisasi modern yang besar, tidak mungkin menjalankan seluruh aspek bidang yang dinaunginya. Muhammadiyah memerlukan pembagian tugas dari tiap bidang binaannya sehingga tercapai hasil yang maksimal untuk mewujudkan cita-citanya, termasuk dalam wilayah pelajar.

Karena itu, di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar IPM, dikatakan bahwa Kelahiran IPM memiliki dua nilai strategis. *Pertama*, IPM sebagai aksentuator gerakan dakwah amar makruf nahi munkar Muhammadiyah di kalangan pelajar (bermuatan pada membangun kekuatan pelajar menghadapi tantangan eksternal). *Kedua*, IPM sebagai lembaga kaderisasi Muhammadiyah yang dapat membawakan misi Muhammadiyah di masa yang akan datang.¹ Maka dari itu, bab ini akan membahas dua fungsi strategis ini sebagai

1 Pimpinan Pusat IPM, "Muqadimah Anggaran Dasar", dalam *Tanfidz Muktamar XVI IPM* (Surakarta: PP IPM, 2008), 10.

bingkai membicarakan dinamika IPM sepanjang sejarah.

A. IPM sebagai Aksentuator Gerakan Muhammadiyah

1. Posisi IPM sebagai Ortom Muhammadiyah

Organisasi Otonom Muhammadiyah ialah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Muhammadiyah dengan bimbingan dan pengawasan, yang diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina anggota Muhammadiyah tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah. Ortom sebagai badan, mempunyai otonomi dalam mengatur rumah tangga sendiri, mempunyai jaringan struktur sebagaimana halnya dengan Muhammadiyah, mulai dari tingkat pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa, dan kelompok-kelompok atau jama'ah-jama'ah.²

Ortom dibentuk oleh Muhammadiyah jika dengan syarat berikut: a) Mempunyai fungsi khusus dalam Muhammadiyah; b). mempunyai potensi dan ruang lingkup nasional; dan c) merupakan kepentingan Muhammadiyah. Pembentukan Ortom ditetapkan oleh Tanwir Muhammadiyah (lembaga permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar Muhammadiyah) dan dilaksanakan dengan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Adapun tujuan pembentukan Ortom Muhammadiyah adalah sebagai berikut: a) efisiensi dan efektifitas gerakan Muhammadiyah; b). pengembangan organisasi Muhammadiyah; c). dinamika organisasi Muhammadiyah; dan d). kaderisasi organisasi Muhammadiyah.³

Dalam kedudukannya yang otonom dan mempunyai kewenangan mengatur rumah tangga sendiri, Ortom mempunyai hak dan kewajiban dalam Muhammadiyah

² Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 2005*, Cetakan ke-5 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), 16.

³ *Ibid.*

antara lain: a) melaksanakan keputusan Muhammadiyah; b). menjaga nama baik Muhammadiyah; c) membina anggota-anggotanya menjadi warga dan anggota Muhammadiyah yang baik; d). membina hubungan dan kerjasama yang baik dengan sesama ortom; e). melaporkan kegiatan-kegiatannya kepada pimpinan Muhammadiyah; dan e). menyalurkan anggota-anggotanya dalam kegiatan gerak dan amal usaha Muhammadiyah sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Adapun hak yang dimiliki oleh Ortom Muhammadiyah ialah: a). mengelola urusan kepentingan, aktivitas dan amal usaha yang dilakukan organisasi otonomnya; b). berhubungan dengan organisasi lain di luar Muhammadiyah; c) memberi saran kepada Muhammadiyah baik diminta atau atas kemauan sendiri; dan d). mengusahakan dan mengelola keuangan sendiri.⁴

Ortom dalam Muhammadiyah mempunyai karakteristik dan spesifikasi bidang tertentu antara lain sebagai berikut: `Aisyiyah (1917), Kepanduan Hizbul Wathan (1918), Nasyiatul `Aisyiyah (1931), Pemuda Muhammadiyah (1932), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (1961), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (1964), dan Tapak Suci Putra Muhammadiyah (1963) menjadi tempat bagi pembinaan kader Muhammadiyah, khususnya yang kemudian dikenal dengan sebutan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM).

Ortom dibagi menjadi dua bagian, yaitu ortom khusus dan ortom umum. Ortom Umum adalah organisasi otonom yang anggotanya belum seluruhnya Muhammadiyah, bergerak dan melakukan kegiatan sesuai bidang tugasnya. Sedangkan ortom khusus adalah ortom yang seluruh anggotanya terdiri dari anggota Muhammadiyah, bergerak dan melakukan kegiatan sesuai bidang tugasnya, dan diberi wewenang menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Muhammadiyah dalam koordinasi

⁴ *Ibid*, 47.

pembantu pimpinan yang membidangnya, sesuai dengan ketentuan amal usaha tersebut.⁵ Ortom khusus yang dimaksud adalah Aisyiyah yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang serta keanggotaan yang berbeda dengan ortom lainnya.

Pada hakikatnya, organisasi otonom seperti Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah (NA), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) adalah lembaga pendidikan non-formal dalam persyarikatan Muhammadiyah. Semua terorganisasi menjadi satu bangunan "organisasi utuh", jadi bukan organisasi seperti unit-unit amal usaha Muhammadiyah seperti sekolah Muhammadiyah yang juga merupakan lembaga pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri dapat disebut lembaga pendidikan besar. Jika Muhammadiyah adalah pendidikan besar, maka yang pendidik adalah Muhammadiyah, yang dididik adalah AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah), dan isi pendidikannya yaitu keislaman dan kemuhammadiyah.⁶ Ortom-ortom AMM sejatinya adalah tempat persemaian dan pembibitan kader. Wadah ini harus dipupuk, disiram, dan disiangi, supaya bibit-bibit itu subur, sehat, dan kuat.⁷

Untuk itu dalam Muhammadiyah diperlukan Sistem Perkaderan Muhammadiyah (SPM).⁸ Dalam

⁵ AD/ART Muhammadiyah Pasal 19

⁶ Sejak Muktamar ke-39 di Padang Muhammadiyah telah menetapkan program periode 1974-1977, yang salah satu isinya adalah tentang "peningkatan pembinaan angkatan muda". Konsep pembinaan AMM diolah melalui rapat-rapat pleno PP Muhammadiyah, konsultasi dengan ortom-ortom AMM dan diputuskan dalam sidang Tanwir 1976 di Yogyakarta. Inti keputusannya antara lain: kaderisasi, peningkatan pendidikan Islam tingkat remaja, menggiatkan olahraga, seni, dan keterampilan, serta membentuk Badan Koordinasi Pembina Angkatan Muda Muhammadiyah (BKP-AMM).H.S. Projokusumo, *Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah* (Jakarta: BPK-AMM PPM, 1977).

⁷ Pembinaan AMM Keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah (Yogyakarta: PPM, 1976), 4.

⁸ Sistem Perkaderan Muhammadiyah (SPM) adalah: "Seperangkat

hal ini, sistem perkaderan yang dimiliki oleh setiap organisasi otonom merupakan bagian dari SPM.⁹ Karena bersifat mengikat dan menyeluruh seperti itu, maka sistem perkaderan yang dimiliki masing-masing ortom (`Aisyiyah, Kepanduan Hizbul Wathan, Nasyiatul `Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, IPM, IMM, dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah) menjadi bagian dari SPM. Masing-masing ortom melaksanakan program dan kegiatan perkaderannya berdasarkan kekhasan masing-masing, sistem perkaderan dengan tetap mengacu dan mengindahkan konsep dasar, prinsip dan kurikulum dalam SPM ini secara konsisten.¹⁰

2. Pendidikan sebagai Lokus Gerak IPM

Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang menonjol dalam bidang pendidikan. Hingga saat ini, lembaga pendidikan Muhammadiyah telah eksis dan bertahan selama seabad yakni sejak 1911. Hingga akhir tahun 2015, Muhammadiyah telah memiliki amal usaha pendidikan berupa 176 Perguruan Tinggi, 14346 TK ABA-PAUD, 2604 SD/MI, 1772 SMP/MTs, 1143 SMA/SMK/MA, 71 SLB, 102 Pondok Pesantren, dan 15 Sekolah Luar Biasa.¹¹ Fakta ini memberikan pelajaran bahwa kemampuan untuk *survive* lembaga pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah dan kontribusinya bagi bangsa Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari model pendidikan yang didasarkan atas nilai-nilai atau etos yang ditanamkan dalam gerakan Muhammadiyah kepada pengikutnya.

unsur dan keseluruhan komponen yang saling berkaitan secara teratur sehingga membentuk suatu totalitas yang berhubungan dengan kader dan kaderisasi di Muhammadiyah.” Lihat Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan Muhammadiyah* (Yogyakarta: MPK PPM, 2015), 45.

9 Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan Muhammadiyah* (Yogyakarta: MPK PPM, 2015), 45.

10 *Ibid*, 55.

11 Hasil Pengolahan Data Sekretariat PP Muhammadiyah dari sebagai Sumber, Sekretariat PP Muhammadiyah, 2015.

Di masa awal, aktivitas pendidikan Muhammadiyah dilakukan di Langgar Kidul¹², Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, Al-Qismul Arqa' dan Pondok Muhammadiyah. Berdasarkan catatan Kyai Syuja', Kyai Dahlan mulai giat mengajar setelah pulang Haji pertamanya. Kyai Dahlan menggantikan ayahnya Kyai Haji Abu Bakar mengajar para santri di Langgar Kidul. Metode mengajarnya masih menggunakan sorogan (satu per satu). Kyai Dahlan sepulang haji kedua, ia mengajar di Pondoknya tahun 1905.¹³

Di saat para Kyai masih menganggap sekolah yang memakai kursi dan meja untuk belajar itu merupakan sekolah orang kafir, Ahmad Dahlan melampaui pemikiran itu dengan mendirikan sekolah yang bahkan tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum. Tepatnya pada tahun 1910, Kyai Dahlan mulai menjalankan sekolah tersebut. Dengan jumlah siswa 8 orang, sekolah itu diselenggarakan di ruang tamu kediaman Kyai Dahlan. Kemudian pada 1 Desember 1911, sekolah yang didirikan Kyai Dahlan itu diresmikan. Dengan menggunakan nama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, jumlah murid saat diresmikan 29 orang.¹⁴ Inilah sekolah Muhammadiyah pertama yang didirikan Kyai Dahlan pada tahun 1911 di Kauman, Yogyakarta dan disebut sebagai *Sekolah Kyai* atau *Madrasah Diniyah Ibtidaiyah*.¹⁵

Ketika seorang muridnya bertanya tentang bentuk sekolah tersebut, Kyai Dahlan menjawab: "...ini *Madrasah Ibtidaiyyah* Islam untuk memberi pelajaran agama Islam dan pengetahuan umum bagi anak-anak kita di Kauman".¹⁶ Sebagai perluasan sekolah itu, didirikan

12 Kiai Syuja', *Islam Berkemajuan...*, 15.

13 MT Arifin, "*Gerakan Pembaharuan...*", 67.

14 100 Tahun Menyinari Negeri..., 19.

15 Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, disebut juga Sekolah Kiai Adabi Darban dan Muarif, atau *Standartschool Muhammadiyah*, (Sekolah Rakyat) oleh Yusron Asyrofi.

16 Kiai Syuja', *Islam Berkemajuan* (Jakarta: al-Wasath, 2009), 64. Di samping mendirikan sekolah, Kiai Dahlan melakukan

Standartschool Muhammadiyah di Suronatan. Akhirnya, sekolah di Kauman khusus untuk anak putri, sedangkan di Suronatan khusus untuk putra. Kemudian Muhammadiyah mengembangkan Sekolah Dasar di daerah Yogyakarta.¹⁷

Pada tahun 1912, Kyai Dahlan mendirikan sekolah Rakyat yang bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Waktu itu anak-anak santri Kauman masih asing dengan cara sekolah. Sekolah itu menempati kamar tamunya dengan ukuran sekitar panjang enam meter dan lebar setengah meter, berisi meja tiga dan dingklik (kursi panjang) serta papan tulis. Sekolah ini didirikan tanpa bantuan orang lain. Jumlah murid pertama sebanyak 9 anak. Dalam setengah tahun bertambah menjadi 20 anak. Pada bulan ke-7 mendapat bantuan guru umum dari Budi Utomo.¹⁸

Sejak Anggaran Dasar Muhammadiyah 1914 berubah, ruang lingkup gerakan yang dipelopori Kyai Dahlan mulai menembus ke luar Yogyakarta. Sekolah-sekolah Muhammadiyah mulai membutuhkan tenaga guru yang disebar ke daerah-daerah. Kyai Dahlan memanfaatkan sejumlah pemuda-pemudi lulusan *Standaardchool Muhammadiyah*. Untuk mempersiapkan guru-guru agama tingkat lanjutan, tahun 1919 terbentuklah kelas Al-Qismul Arqa,¹⁹ yang juga didirikan di rumah Kyai Dahlan sendiri.²⁰ Al-Qismul Arqa belum mengenal pembagian kelas. Materi yang diajarkan adalah pelajaran agama. Jadi tidak jauh berbeda dengan pondok pesantren pada umumnya.

pendekatan pada guru sekolah pemerintah dalam organisasi Budi Utomo. Hal ini dilakukan supaya pendidikan agama bisa masuk di sekolah Belanda. Akhirnya sekolah pemerintah seperti *Kweekschool* di Jetis, Yogyakarta dan MOSVIA di Magelang diajarkan pelajaran agama melalui co-kurikuler.

17 MT Arifin, "Gerakan Pembaruan...", 77-78.

18 Kiai Soeja', *Islam Berkemajuan...*, 16; Yusron Asyrofi, *Kiai Haji Ahmad Dahlan...*, 40.

19 Muarif, *Modernisasi Pendidikan Islam: Sejarah dan Perkembangan Kweekschool Moehammadijah 1923-1932* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), 88.

20 Yusron Asyrofi, *Kiai Haji Ahmad Dahlan*, 80.

Hanya media pembelajaran berupa papan tulis yang membedakan dengan Pondok Pesantren waktu itu.²¹

Pola manajemen masih terpusat pada Hoofdbestuur Muhammadiyah yang dipimpin Kyai Dahlan. Pada tahun 1920, ketika empat bagian Muhammadiyah dibentuk (Bagian Sekolahan, Bagian Tabligh, Bagian PKO, dan Bagian Taman Pustaka), manajemen *Al-Qismul Arqa'* di bawah Bagian Sekolahan yang dipimpin oleh Haji Hisyam. *Al-Qismul Arqa'* di bawah kepemimpinan Kyai Dahlan berlangsung hingga tahun 1921. Kepemimpinan Kyai Dahlan di *Al-Qismul Arqa'* hanya tiga tahun (1918-1920). Dalam buku *Peringatan 40 Tahun Muhammadiyah*, Aminullah Lewa N. menjelaskan bahwa kepemimpinan Pondok Muhammadiyah yang bernama *Al-Qismul Arqa'* di bawah kendali Siradj Dahlan.²²

Sistem Madrasah tingkat menengah Muhammadiyah dinamakan *Al-Qismul Arqa'* ini tahun 1920 berubah menjadi "Pondok Muhammadiyah"²³. Di kemudian hari berubah menjadi *Kweekschool* pada tahun 1923. Pada tahun 1932 berubah lagi menjadi "Madrasah Muallimin Muhammadiyah" bagi anak laki-laki dan Madrasah Muallimat Muhammadiyah" bagi perempuan.²⁴

Tiga tahun di bawah binaan Kyai Dahlan, kelas *Al-Qismul Arqa'* mulai berkembang. Kyai Dahlan memindah *Al-Qismul Arqa'* ke tempat lain. Dibangunlah sebuah gedung

21 Muarif, *Modernisasi Pendidikan Islam...*, 89.

22 Peringatan 40 Tahun Muhammadiyah. Yogyakarta: Panitia Peringatan 40 Th. Muhammadiyah Bg. Penerangan Kotapradja Yogyakarta, 1952, h. 41. Lihat juga dalam Muarif, *Modernisasi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), 56.

23 Perlu dicatat di sini, *al-Qismul Arqa'* di bawah kepemimpinan Kiai Dahlan hanya berlangsung hingga 1921. Penelitian Karel A. Steenbring yang dikutip oleh Muarif bahwa sejak 8 Desember 1921 nama *al-Qismul Arqa'* sudah berubah menjadi "Pondok Muhammadiyah". Kepemimpinan Pondok ini, sudah tidak lagi di tangan Kiai Dahlan, tetapi sudah dikendalikan oleh puteranya sendiri KH. Siradj Dahlan. Lihat Muarif, *Modernisasi Pendidikan Islam...*, 56.

24 MT Arifin, *Gerakan Pembaruan...*, 6.

baru yang pada 8 Desember 1921 diresmikan menjadi sekolah dengan nama "Pondok Muhammadiyah"²⁵. Gedung ini terletak di depan rumah Kyai Syuja'.²⁶ Meskipun menggunakan nama pondok, tetapi hakikat institusi pendidikan eksperimen Kyai Dahlan ini berbeda dengan pondok pesantren pada umumnya.²⁷ Hasil riset Hamzah Wirjosukarto menemukan bahwa Pondok Muhammadiyah adalah lembaga pendidikan Islam modern pertama di Yogyakarta yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum. Peran Ng. Djojosoegito dan R. Soesrosoegondo sangat besar dalam menyusun kurikulum, bahkan ia berperan besar dalam penyiapan Pondok Muhammadiyah menjadi *Kweekschool Islam (1923)*.²⁸

Kolaborasi antara Haji Hisyam (Ketua Bagian Sekolah), Djojosoegito (Juru Tulis I), R. Soesrosoegondo (anggota Bagian Sekolahan), dan Siradj Dahlan (Direktur Pondok Muhammadiyah) menghasilkan sistem pendidikan yang berkemajuan waktu itu. Pondok Muhammadiyah berbeda jauh dengan *Al-Qismul Arqa*. Sejak memiliki gedung baru, sistem pengajaran menggunakan klasikal. Lama pendidikan Pondok Muhammadiyah ditetapkan 5 tahun. Pondok dibagi menjadi 5 kelas. Pada masa akhir studi dilakukan ujian dan mendapatkan ijazah.²⁹ Djojosoegito dan R. Soesrosoegondo inilah yang sebenarnya sangat besar perannya dalam menyiapkan materi-materi pelajaran umum di Pondok Muhammadiyah. Pondok

²⁵ Pondok Muhammadiyah berdiri ketika jajaran *Hoofdbestuur* Muhammadiyah mengalami perubahan besar. Pada mulanya kepengurusan *Hoofdbestuur* Muhammadiyah masih didominasi kaum tua, maka sejak 1920, murid-murid (kader) Kyai Dahlan mulai dilibatkan dalam kepengurusan. Kyai Dahlan juga berhasil mengajak kaum intelektual Bumiputera lulusan sekolah Belanda memajukan pendidikan lewat Muhammadiyah. Masuknya Ng. Djojosoegito dan Moh. Hoesni sebagai juru tulis I dan juru tulis II yang ahli administrasi menambah kekuatan baru dalam Muhammadiyah, lihat Muarif, *Modernisasi Pendidikan Islam...*, 95.

²⁶ Muarif, *Modernisasi Pendidikan Islam...*, 94.

²⁷ Ibid, 57.

²⁸ Ibid, 57.

²⁹ Ibid, 97.

tak hanya menggunakan sistem klasikal, tetapi juga memadukan dengan sistem *internaat* (pondok).³⁰

Awal tahun 1922, Ng. Djojosoegito menulis artikel di Soewara Moehammadijah edisi No. 1 th. ke-3, memberitahukan rencana pendirian *Kweekschool Moehammadijah*. Dalam artikel "Opisial Sekolah Bakal Goeroe" dikatakan bahwa tahun depan (1923), Pondok Muhammadiyah secara resmi berubah menjadi *Kweekschool Islam*. Adapun dalam dokumen "Ma'loemat Pengoeroes Besar Moehammadijah di Djokjakarta" tahun 1923 menerangkan tentang pembentukan Komite Pendirian Roemah Kweekschool Islam (CPRKwI) yang dipimpin oleh Haji Mochtar. Rencana gedung *Kweekschool Islam* tak lagi menempati gedung Pondok Muhammadiyah, tetapi pindah ke Ketanggungan.

Tepatnya dalam Perkumpulan Tahunan Muhammadiyah 30 Maret-2 April 1923 di Yogyakarta, nama institusi Kweekschool Islam mulai disebut-sebut. Menariknya, menurut Muarif nama Kweekschool Islam tak pernah baku bagi pengurus Muhammadiyah kala itu. Beberapa dokumen lain sering menyebutkan nama *Kweekschool Islam Moehammadijah dan Kweekschool Moehammadijah*. Tak jelas entah kapan penggunaan nama *Kweekschool Moehammadijah* mulai dibakukan.³¹ Yang jelas, penggunaan nama Kweekschool Moehammadijah berakhir tahun 1932, setelah keluar kebijakan Ordonansi Sekolah Liar (1932) yang menekan sekolah-sekolah swasta pribumi. Tepatnya pada tanggal 1 Januari 1932, Kweekschool Moehammadijah secara resmi berganti menjadi Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah sebagai sekolah kader Muhammadiyah.

Prestasi pembaruan agama dan pendidikan Muhammadiyah dinilai Kuntowijoyo berhasil memadukan "iman dan kemajuan". Perspektif sejarah menurut

³⁰ Ibid, 98.

³¹ Muarif, *Modernisasi Pendidikan Islam...*,103.

Kuntowijoyo menilai Muhammadiyah telah meletakkan sistem pendidikannya dalam kerangka perubahan sosial ekonomi, politik, dan budaya.³² Kuntowijoyo menegaskan bahwa, “tanpa Muhammadiyah, tidak bisa dibayangkan adanya kelompok terpelajar yang sanggup hidup di tengah-tengah peradaban modern tanpa terpecah kepribadian dan imannya”.³³ Di sinilah letak pentingnya kehadiran IPM sebagai aksentuator gerakan dakwah Muhammadiyah di kalangan pelajar seiring dengan perkembangan pendidikan Muhammadiyah yang semakin pesat. Maka, wilayah dakwah, menjadi tugas IPM sebagai pemukul bunyi irama dakwah Muhammadiyah di bidang pendidikan dan kalangan pelajar.

B. IPM sebagai Organisasi Kader Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, *da`wah amar ma`ruf nahi mungkar* dan *tajdid*, berkepentingan untuk mendidik para calon anggota dan anggota sebagai tenaga-tenaga inti penerus visi-misi Muhammadiyah. Karena itu diperlukan perkaderan sebagai wadah untuk melahirkan tenaga-tenaga (kader) pelopor, pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah secara berkelanjutan.

1. Muhammadiyah dan Pendidikan Kader

Dalam Muhammadiyah, pendidikan kader telah melekat pada K.H. Ahmad Dahlan yang sangat serius dalam

³² Pada waktu itu, Muhammadiyah menghadapi tiga front, yaitu modernisme, tradisionalisme, dan Jawaisme. Modernisme dijawab dengan mendirikan sekolah-sekolah, kependuan dan *voluntary association*. Adapun tradisionalisme dan Jawaisme dijawab dengan gerakan tabligh (penyampaian) dengan cara mengunjungi murid-muridnya. Padahal waktu itu “guru mencari murid” adalah aib sosial-budaya. Untuk menghadapi tradisionalisme dan Jawaisme Kiai Dahlan menggunakan *positive action* atau teologi positif (mengedepankan amar makruf), tidak secara frontal menyerang dengan teologi negatif (*nahi munkar*). Dengan tabligh, agama yang semula menjadi esoteris mistis menjadi agama etis yang sederhana, terbuka, dan *acesible* milik orang awam. Kuntowijoyo, “Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah”, dalam Amin Rais dkk (ed), *Pendidikan Muhammadiyah dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: PLP2M, 1985), 37.

³³ Kuntowijoyo, “Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah”..., 40

memikirkan kelangsungan gerakan Muhammadiyah. Semasa Kyai Dahlan, kegiatan yang dapat dikategorikan perkaderan adalah upaya membina kalangan muda untuk belajar mengembangkan misi gerakan Muhammadiyah ke dalam kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam. Cara yang dipakai waktu itu berupa pembinaan secara langsung dengan membimbing dan sekaligus melibatkan orang muda dalam berbagai aktivitas Muhammadiyah.³⁴ Hasilnya dapat dilihat dengan lahirnya tokoh-tokoh yang kelak menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat (waktu itu namanya Hoofd Bestuur) Muhammadiyah seperti KH Ibrahim (1023-1933); K.H. Hisyam (1934-1936), Ki Bagus Hadikusuma (1942-1953), dan KHA. Badawi (1962-1968). Tokoh Muhammadiyah lainnya yang menimba ilmu pengetahuan dari K.H. Ahmad Dahlan adalah K.H. Mas Mansur, yang dalam masa kepemimpinannya terkenal memiliki bobot keilmuan yang cemerlang dan semangat nasionalisme yang tinggi, yang dikenal luas baik di lingkungan Persyarikatan, umat Islam, maupun dalam percaturan bangsa. Sedangkan tokoh-tokoh Muhammadiyah lainnya—meski bukan sebagai ketua PB—seperti Haji Mukhtar, Haji Syuja', Haji Fachrudin, dan R.H. Hadjid, mereka dulu berasal dari kaum muda yang semuanya sempat dikader oleh pendiri.

Muhammadiyah di masa awal pengajian sebagai wadah pendidikan kader. Kyai Dahlan membina pengajian seperti pengajian Ikhwanul Muslimin, Thaharatul Qulub, Fathul Asror Miftahussa`adah dan Kelompok Wal`ashri, serta kelompok pengajian lainnya. Dalam sejarah Muhammadiyah pengajian yang diselenggarakan secara intensif pernah diperkenalkan oleh Kyai Dahlan dengan nama Fathul Asrar Miftahussa`adah. Jika di masa sekarang dapat disebut dengan "Sekolah Advokasi Anak Jalanan. Dikisahkan bahwa pada waktu itu pengurus Muhammadiyah sibuk dan asyik mengurus organisasi,

³⁴ Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan Muhammadiyah* (Yogyakarta: MPK PPM, 2015), 60.

namun Kyai Dahlan melihat masih banyak pemuda yang belum tertampung, sehingga mereka liar dan nakal. Mereka kemudian diundang oleh Kyai Dahlan, tetapi yang datang hanya separuh. Mereka para anak muda salah menduga karena mengira akan dimarahi. Padahal Kyai Dahlan mengajak mereka berbicara dengan ramah tamah dan bersenda gurau. Peristiwa berlangsung berulang kali dan diberi jamuan makan. Akhirnya mereka tertarik dengan ajaran Kyai Dahlan. Kelompok pemuda ini diberi nama Fathul Asrar Miftahus Sa'adah, yang berarti membuka rahasia dan kunci kebahagiaan. Rahasia mengapa mereka diundang, dibukakan, atau dibeberkan, kemudian diberi ajaran mengenai kunci kebahagiaan.³⁵ Anggota pengajian ini adalah pada umumnya anak-anak muda berandal yang rusak akhlaknya. Mereka kurang terbina akhlak dan mentalnya.³⁶ Pendekatan Kyai Dahlan kepada pemuda dan pemudi Kauman merupakan jalan yang sangat licin bagi perkembangan Muhammadiyah di kemudian hari. Para pemuda sering diundang ke rumahnya, diberi alat-alat hiburan dan olahraga serta dibebaskan tidur di langgarnya. Kemudian bila datang waktu shalat, mereka diajak berjamaah, diberi nasehat, dan diajak berdialog. Pengajian ini merupakan tempat pembinaan yang berhasil bagi kader Muhammadiyah pada masa-masa awal. ³⁷

Selain itu, menurut K.R.H. Hadjid, Kyai Dahlan mengajarkan santri-santrinya surat al-'Ashr secara berulang-ulang hingga lebih dari 8 (delapan) bulan. Dalam tafsir Juz 'Amma karangan Syekh Muhammad Abduh ada 37 surat, akan tetapi yang dipilih oleh Kyai Dahlan hanya satu surat, yaitu surat al-'Ashr.³⁸ Atas permintaan Nyai Walidah, Kyai Ahmad Dahlan mengajarkan surat al-'Ashr kepada para buruh perempuan di Kauman. Pengajiannya

35 Kiai Soedja, *Islam Berkemajuan...*, 37.

36 Abdul Munir Mulkhan, *Warisan Intelektual...*, 65.

37 Ahmad Adaby Darban, *Sejarah Kauman: Mengungkap identitas Kampung Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), 47.

38 KRH Hadjid, *Pelajaran KHA Dahlan...*, 80.

dinamakan pengajian wal-'Ashri. Karena suka mengulang-ulang ketika mengajarkan surat al-'Ashr ini, orang-orang Pekalongan (dulu) memberi julukan Kyai Dahlan dengan julukan Kyai wal-'Ashri.³⁹

Kyai Dahlan mengadakan pengajian wal-'Ashri untuk membina buruh-buruh perempuan (tukang-tukang ngecap, mbatik, ngetel, medel, ngerok, mbironi, dll.) dan anak-anak perempuan yang tidak mampu sekolah.⁴⁰ Dalam catatan Kyai Soedja',⁴¹ Kyai Dahlan membuka "Kursus wal-'Ashri". Karena semakin banyak yang ikut, maka menjadi bagian Aisyiah (Aisyiah urusan wal-'Ashri). Kursus wal-'Ashri itu masih tetap dipegang oleh KHA. Dahlan sendiri. Hanya setapak demi setapak kalau KHA. Dahlan keluar kota atau ke lain daerah kursus itu diserahkan kepada KH. Ibrahim, adik ipar beliau, selama beliau tidak ada.⁴²

39 Informasi dari para tokoh Muhammadiyah Pekajangan/Pekalongan pada 1970-an. Menurut informasi dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Purworejo, KH Djazuli berasal dari Grabag Purworejo, terakhir tinggal di Sangubanyu Kutoarjo. Ia pendiri Poliklinik Muhammadiyah Grabag, di antara juru rawatnya ada yang bernama Sarbini yang kemudian menjadi anggota TNI, pernah menjadi Panglima Divisi Diponegoro, pernah menjadi Menteri Veteran RI di masa Orde Baru. Letjen Sarbini merupakan salah satu inisiator berdirinya Universitas Islam Sultan Agung. Namanya diabadikan menjadi nama Gedung Sarbini di Jakarta.

40 M. Sukriyanto AR., "Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan: Perspektif Pendidikan dan Kebudayaan", Makalah disampaikan dalam Pengajian Ramadhan 1446 h, di UMY (Ahad, 21 Juni 2015)

41 Muhammad Syoedja' adalah murid dan kader langsung KHA. Dahlan, bersama-sama dengan adik dan teman-temannya, seperti Haji Fakhruddin, Ki Bagus Hadikusumo, Haji Muhammad Zain, Haji Muhammad Mokhtar, KHA. Badawi, KRH. Hadjid dan lain-lain. Jika KHA. Dahlan adalah peletak dasar aktivitas amal usaha sosial Muhammadiyah, maka H. Muhammad Syoedja' adalah perumus dan sekaligus penafsirnya dalam realitas gerakan. Ketua Bahagian Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) yang pertama, salah satu perintis RS PKU Muhammadiyah, pendiri rumah miskin, rumah anak yatim, dan pelopor gerakan Persatuan Djemaah Hadji Indonesia (PDHI).

42 M. Soedja', *Cerita Tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan Catatan Haji Muhammad Syoedja'* (Yogyakarta: Rancang Grafis, 2003), 148-149. Kemudian diterbitkan ulang sebagai *Islam Berkemajuan: Kisah Perjuangan K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Masa Awal* (Jakarta: Al-Wasat, 2009).

Pengajian istimewa ini diadakan seminggu sekali setiap Senin sore. Pengajian ini dinamakan Pengajian wal 'Ashri. Muridnya sekitar 30 orang. Adapun yang diterima untuk mengikuti pengajian wal-'Ashri adalah kaum putri muslimah yang sanggup menepati perjanjian-perjanjian, seperti sanggup mendatangi pengajian, jika berhalangan harus izin terlebih dahulu, dan sanggup menutup aurat dengan memakai mahromah, mudawwarah (kerudung), serta memakai kaos kaki.⁴³ Penamaan berdasar surat al-'Ashr ini kemudian diabadikan dalam satu lembaga yaitu Pengajian wal-'Ashri.⁴⁴

Pada masa K.H. Ahmad Dahlan itu juga diadakan perkaderan dalam pendidikan nonformal--yakni melalui gerakan perempuan, pemuda dan kepanduan--yang dapat dikatakan tidak bisa dipisahkan dengan sejarah perkembangan Muhammadiyah sendiri. Kehadiran 'Aisyiyah (1917), Kepanduan Hizbul Wathan (1918), Nasyiatul 'Aisyiyah (1931), Pemuda Muhammadiyah (1932), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (1961), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (1964), dan Tapak Suci Putra Muhammadiyah (1963) menjadi tempat bagi pembinaan kader di organisasi otonom Muhammadiyah, khususnya yang kemudian dikenal dengan sebutan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM). Di antara aspek positif dari gerakan AMM tersebut ialah aktivitasnya yang tetap dalam bidang pelatihan (*training*) dan penalaran. Gerakan angkatan muda itu mempunyai sistem dan perkaderan masing-masing yang disesuaikan dengan sifat dan identitas Muhammadiyah.⁴⁵

Di samping itu, dalam konteks kelembagaan dan pelaksanaan secara formal dan terprogram, langkah

43 KRH. Hadjid, *Pelajaran KHA Dahlan...*, 152–153.

44 Perkumpulan ini khusus mengadakan pengajian untuk wanita yang simpati kepada Muhammadiyah. Yang pada 1922 diubah namanya menjadi Aisyiyah sebagai organisasi otonom pertama. Perkumpulan ini dipimpin oleh istri Kiai Ahmad Dahlan yaitu Nyai Siti Waidah.

45 Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan Muhammadiyah* (Yogyakarta: MPK PPM, 2015), 67.

perkaderan dalam Muhammadiyah dimulai pada tahun 1957, yakni dengan dibentuknya Badan Pendidikan Kader (BPK) sebagai hasil Muktamar ke-33 di Palembang tahun 1956. Walaupun, sebelum tahun 1957, yakni pada tahun 1953, sebenarnya terdapat butir keputusan Muktamar ke-32 di Purwokerto mengenai program perkaderan. Butir program tersebut berbunyi: "*Mendidik kader-kader Muhammadiyah tingkat atas dan menengah untuk mencukupi hajat dan sebagai bibit yang menghasilkan dan membuahkan hasil usaha-usaha Muhammadiyah*".⁴⁶ Sayangnya, keputusan ini dalam pelaksanaannya tidak disertai dengan pedoman dan kerangka operasional.

Dalam hasil seminar Muhammadiyah menyongsong Muktamar ke-34 di Yogyakarta. Konsepsi "Pemeliharaan Keluarga Muhammadiyah" merekomendasikan tentang perlunya Muhammadiyah melaksanakan *kader vorming*.⁴⁷ Konsep *kader vorming* (pembentukan kader) tersebut diusulkan untuk dilaksanakan, dan dimulai di tingkat pusat dalam dua bidang. *Pertama*, adalah kader vorming bidang keagamaan dan umum, yakni dalam bentuk penyempurnaan Madrasah Mu`allimin Yogyakarta dalam rangka pembentukan "Kader Muhammadiyah" yang kurikulumnya disusun oleh suatu badan yang disebut Badan Pemikir Muhammadiyah. *Kedua*, ialah apa yang disebut bidang "Kader Khusus" dalam kaderisasi Kepanduan (HW), Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul `Aisyiyah, Dakwah, Ekonomi, dan Sosial. Terkait dengan bidang kedua ini adalah juga ketika kegiatan kaderisasi untuk pelajar dan mahasiswa terhenti pada tahun 1957, maka setelah itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) berdiri pada 1961 dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) berdiri pada 1964.

Dalam hal perkaderan, Muktamar ke-37 (1968) telah menghasilkan konsep penting, yaitu butir

⁴⁶ Langkah Muhammadiyah Tahun 1953-1956 poin D, Keputusan Muktamar ke-32.

⁴⁷ Tanfidz Keputusan Muktamar ke-34, PP Muhammadiyah, 1960, 16.

Program Kaderisasi Muhammadiyah beserta tahapan operasionalisasinya dalam bentuk Program Tiga Tahun Pembinaan Kader. Keputusan Muktamar ke-37 ini antara lain: 1) Muktamar telah memulai tradisi untuk memproyeksikan pembinaan kader secara terprogram; 2) Istilah Darul Arqam dipakai secara resmi sebagai sistem latihan untuk pembinaan kader di Muhammadiyah; dan 3) Muhammadiyah membentuk badan yang diberi tugas untuk pembinaan kader secara nasional, yang diberi nama Badan Pendidikan Kader (BPK). Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting untuk menyusun sistem perkaderan Muhammadiyah yang efektif. Dalam penyusunan konsep perkaderan dan pengusulan istilah Darul Arqam, peran Moh. Djazman Alkindi tidak bisa dilupakan dalam sejarah perkaderan di Muhammadiyah.⁴⁸

Pada tahun 1971, setelah Muktamar ke-38 di Ujungpandang, perkaderan Muhammadiyah mengalami pembaharuan lagi yang relatif lebih bervariasi. Selain Darul Arqam, juga diprogramkan kegiatan perkaderan dalam bentuk *Refreshing* (Penyegaran), *Up-grading* (Penataran), dan *Job Training* (Pelatihan Jabatan). Perubahan lain terjadi pada Badan Pendidikan Kader itu sendiri yang sifatnya operasional kemudian dilebur menjadi atau ke dalam Biro Organisasi dan Kader dengan gerak konseptualnya yang diketuai oleh Drs. Mohamad Djazman Al-Kindi.

Program perkaderan Muhammadiyah kemudian mengalami penyempurnaan konsep setelah Muktamar ke-40 tahun 1978 (di Surabaya) yang menghasilkan "Program Pembinaan Kader Tahun 1980-1983". Program tersebut menitikberatkan pada pembinaan aspek ideologis, yakni pembinaan kepribadian bermuhammadiyah dan kesadaran berorganisasi. Namun sejak periode itu, yang sebenarnya telah diawali sejak periode Muktamar ke-39 tahun 1974 di Padang (yang

⁴⁸ Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan Muhammadiyah...*, 45.

tidak mengembangkan program perkaderan dan terbatas pada program pembinaan mutu Pimpinan dan Anggota), kegiatan perkaderan dan pelaksanaannya mulai kurang berkembang. Keadaan ini berlangsung sampai Mukhtamar ke-41 tahun 1985 di Solo, ketika Muhammadiyah sudah semakin besar dan problematikanya pun lebih beragam.⁴⁹

Pimpinan Pusat Muhammadiyah terpilih (periode 1985-1990) kemudian membentuk Badan Pendidikan Kader (BPK) di tingkat pusat yang diketuai oleh M. Busyro Muqaddas. Pada periode ini kemudian masalah kaderisasi di kalangan Muhammadiyah ditangani lagi secara seksama serta direncanakan lebih terprogram dan sistematis, baik secara konseptual maupun operasionalnya. Pada periode 1985-1990 ini kemudian disusun Qoidah Badan Pendidikan Kader, dan badan yang sama dibentuk di tingkat Wilayah dan Daerah Muhammadiyah. Pada masa ini disusun dan diterbitkan pula buku-buku pedoman pelaksanaan perkaderan di lingkungan Muhammadiyah, antara lain: Sistem Perkaderan Muhammadiyah; Pedoman Pelaksanaan Perkaderan Muhammadiyah dan Kurikulum Perkaderannya; serta Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan. Pelaksanaan kaderisasi kemudian mulai merebak di wilayah dan daerah. Baitul Arqam dan Darul Arqam dilaksanakan secara terprogram di tingkat daerah, wilayah dan pusat.⁵⁰

Perkembangan selanjutnya Badan Pendidikan Kader ini mendapat pengukuhan kembali pada Mukhtamar ke-42 tahun 1990 di Yogyakarta dengan tetap melaksanakan tugas dan kewenangan yang sama, melanjutkan program-program yang telah dicanangkan pada periode sebelumnya. Periode 1990-1995 badan ini dipimpin oleh M. Dasron Hamid sebagai ketua dan Haedar Nashir sebagai sekretaris. Pada periode ini berhasil disusun dan diterbitkan buku Pedoman Materi Perkaderan Muhammadiyah, Akhlaq Kepemimpinan Muhammadiyah

⁴⁹ *Ibid*, 58.

⁵⁰ *Ibid*, 59.

dan Dialog Kepemimpinan dalam Muhammadiyah.

Sejak Muktamar ke-43 di Aceh (tahun 1995), Badan Pendidikan Kader kemudian disatukan dengan Badan Koordinasi dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah (BKPAMM) sehingga menjadi Badan Pendidikan Kader dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah (BPKPAMM) yang tugas-tugasnya di samping secara konseptual dan operasional menangani masalah-masalah perkaderan di Persyarikatan Muhammadiyah, juga mengoordinasikan dan membina ortom AMM. Pada periode 1995-2000 badan ini diketuai oleh Haedar Nashir dengan sekretaris Immawan Wahyudi.

Selanjutnya karena tugas-tugas perkaderan ini akhirnya lebih banyak menyangkut aspek operasional, maka kedudukan sebagai badan dihapus pada Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta dan dikukuhkan menjadi majelis yang diberi nama Majelis Pengembangan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI). Majelis ini diketuai oleh H. Khoirudin Bashori dan Ismail T. Siregar sebagai sekretaris. Akhirnya setelah Muktamar ke-45 di Malang, 26 Jumadil Awal-1 Jumadil Akhir 1426 H/ 3-8 Juli 2005 M, MPKSDI diubah menjadi Majelis Pendidikan Kader (MPK) dengan Ketua: Taufiqur Rohman dan Sekretaris: Asep Purnama Bahtiar. Perubahan nama ini untuk lebih menegaskan fungsi majelis dalam pendidikan kader dan memfokuskan program perkaderan secara menyeluruh, intensif dan sistemik, baik di Persyarikatan maupun di majelis dan lembaga (unsur pembantu pimpinan), organisasi otonom dan amal usaha Muhammadiyah. Sebagaimana dinyatakan dalam Pedoman Majelis Pendidikan Kader (2010) Pasal 1 Ayat 5: "Pendidikan kader adalah kegiatan pembelajaran, pembinaan, dan pelatihan kader yang diselenggarakan oleh Majelis dan pengkoordinasian kegiatan pembelajaran, pembinaan, dan pelatihan kader yang diselenggarakan oleh Majelis lain, Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha

Muhammadiyah.”⁵¹

Kemudian pasca-Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta, periode 2010-2015 Ketua MPK PP Muhammadiyah diamanahkan kepada Asep Purnama Bahtiar; dan sebagai sekretarisnya dipercayakan kepada Munawar Khalil. Di samping melanjutkan beberapa program yang sama dengan periode sebelumnya, MPK PP Muhammadiyah pasca Muktamar Satu Abad Muhammadiyah ini juga diamanahi tugas tambahan untuk menintegrasikan perkaderan di AUM (pendidikan dan kesehatan) secara sistemik, intensif dan berkesinambungan.⁵² Lalu pada Muktamar ke-47 Makassar MPK PP Muhammadiyah dipimpin oleh Dr. Ari Anshory, M.Ag sebagai Ketua dan Dr. Mutohharun Jinan sebagai Sekretaris. Perkaderan Muhammadiyah diarahkan pada berkembangnya fungsi dan kualitas perkaderan yang sistemik dengan memperteguh militansi, kompetensi dan peran kader Muhammadiyah selaku pelaku gerakan dalam menghadapi kompetisi dan tantangan yang kompleks di tengah dinamika Persyarikatan, umat, bangsa, dan perkembangan global.

Perkaderan Muhammadiyah menjadi upaya penanaman nilai, sikap dan cara berpikir, serta peningkatan kompetensi dan integritas terutama dalam aspek ideologi, ilmu pengetahuan dan wawasan, serta kualitas kepemimpinan dan manajemen organisasi bagi segenap pimpinan, kader dan anggota/warga Muhammadiyah. Dengan kata lain, dalam perkaderan harus terjadi penyadaran, peneguhan dan pengayaan.⁵³

Untuk itu dalam Muhammadiyah diperlukan Sistem Perkaderan Muhammadiyah (SPM). Secara leksikal, sistem berarti seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan

⁵¹ *Ibid*, 61.

⁵² *Ibid.*, 65.

⁵³ Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan Muhammadiyah* (Yogyakarta: MPK PPM, 2015), 30.

atau totalitas (*a set or arrangement of things so related or connected as to form a unity or organic whole*). Dengan demikian, pengertian Sistem Perkaderan Muhammadiyah (SPM) adalah: "Seperangkat unsur dan keseluruhan komponen yang saling berkaitan secara teratur sehingga membentuk suatu totalitas yang berhubungan dengan kader dan kaderisasi di Muhammadiyah." Sebagai sebuah sistem, unsur-unsur yang terkandung dalam SPM ini adalah: visi, misi dan tujuan perkaderan Muhammadiyah; penitikberatan perkaderan; kurikulum perkaderan; profil dan kompetensi kader; pengembangan materi perkaderan; jenis dan bentuk perkaderan; struktur penjenjangan perkaderan; dan pengorganisasian perkaderan. Dalam hal ini, sistem perkaderan yang dimiliki oleh setiap organisasi otonom (SPI: Sistem Perkaderan IPM) merupakan bagian dari SPM.⁵⁴

Sebagai sebuah sistem dan kesatuan yang utuh, maka SPM berlaku menyeluruh bagi semua jajaran dan komponen Persyarikatan. Konsekuensinya SPM juga memuat atau mencakup seluruh bentuk dan jenis kaderisasi dan pelatihan yang diterapkan di Muhammadiyah, baik secara vertikal maupun horizontal. Yang dimaksud dengan vertikal adalah SPM berlaku bagi seluruh pimpinan Muhammadiyah, mulai dari Pusat sampai dengan Ranting, sebagai acuan dan pola dalam pelaksanaan kaderisasi secara optimal sesuai dengan tingkatan masing-masing. Sedangkan yang dimaksud dengan horizontal adalah SPM berlaku dan mengikat seluruh Unsur Pembantu Pimpinan (majelis dan lembaga), organisasi otonom (umum dan khusus), dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di seluruh jenjang kepemimpinan Muhammadiyah untuk dilaksanakan sebagai acuan dan pola kaderisasi.

Karena bersifat mengikat dan menyeluruh seperti itu, maka sistem perkaderan yang dimiliki masing-masing

54. Ibid), 45.

ortom (`Aisyiyah, Kepanduan Hizbul Wathan, Nasyiatul `Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, IPM, IMM, dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah) menjadi bagian dari SPM. Masing-masing ortom melaksanakan program dan kegiatan perkaderannya berdasarkan kekhasan masing-masing, sistem perkaderan dengan tetap mengacu dan mengindahkan konsep dasar, prinsip dan kurikulum dalam SPM secara konsisten.⁵⁵

2. IPM sebagai Gerakan Perkaderan

IPM adalah organisasi kader Muhammadiyah yang bergerak di kalangan pelajar. Karena itu, seluruh pemikiran, aktivitas, dan cita-cita serta implikasinya, termasuk di dalamnya pola kepemimpinan, sistem gerakan, sistem administrasi dan sistem perkaderan dalam bingkai pemikiran Muhammadiyah.⁵⁶ Sebab itu, perkaderan bagi IPM merupakan sesuatu hal mutlak, maka perkaderan sama dengan eksistensi IPM itu sendiri. Jadi, singkatnya tidak disebut IPM kalau tidak ada perkaderan. Sama halnya dengan permainan sepakbola tanpa ada bola tidak dapat disebut sebagai sepakbola. Karena memang sejatinya IPM adalah gerakan kaderisasi, yang semestinya seluruh aktivitas organisasional dan personal bermuara pada kaderisasi. Selain IPM sebagai aksentuator gerakan Muhammadiyah, IPM merupakan organisasi perkaderan Muhammadiyah.⁵⁷

Pada hakikatnya, organisasi otonom seperti Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah (NA), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) adalah lembaga pendidikan non-formal dalam persyarikatan Muhammadiyah. Semua terorganisasi menjadi satu bangunan "organisasi utuh",

⁵⁵ Ibid, 55.

⁵⁶ Asnawi Sarbini, "Peremajaan Pimpinan" Kertas Kerja Regional Meeting se-Jawa dan NTB PW IPM di PP Muhammadiyah Yogyakarta 16-17 Oktober 1976.

⁵⁷ Pimpinan Pusat IPM, "Muqadimah Anggaran Dasar", dalam *Tanfidz Muktamar XVI IPM* (Solo: PP IPM, 2008), 10.

jadi bukan organisasi seperti unit-unit amal usaha Muhammadiyah seperti sekolah Muhammadiyah yang juga merupakan lembaga pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri dapat disebut lembaga pendidikan besar. Jika Muhammadiyah adalah pendidikan besar, maka yang mendidik adalah Muhammadiyah, yang dididik adalah AMM, dan isi pendidikannya yaitu keislaman dan kemuhammadiyah. ⁵⁸ Ortom-ortom AMM sejatinya adalah tempat persemaian dan pembibitan kader. Wadah ini harus dipupuk, disiram, dan disiangi, supaya bibit-bibit itu subur, sehat, dan kuat. ⁵⁹ Muhammadiyah mendidik anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, orang-orang tua, dari sejak kecil hingga tua diberikan pendidikan secara terus menerus. Di dalam Muhammadiyah dikenal pendidikan formal seperti di sekolah-sekolah, dan non-formal di luar sekolah seperti pengajian-pengajian termasuk pembinaan AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah). ⁶⁰

Menurut M. Amien Rais kader adalah *a permanently organized group of person forming the framework of a larger unit* (sekelompok orang yang diorganisasi secara permanen dan membentuk kerangka dari kesatuan). Dari pengetahuan tersebut, Amien Rais mengatakan kader harus terus-menerus aktif memperjuangkan nilai-nilai Muhammadiyah sesuai tuntunan Allah dan selalu "tahan cuaca" sepanjang zaman. Selanjutnya Amien Rais membagi tiga jalur perkaderan dalam Muhammadiyah.

⁵⁸ Sejak Muktamar ke-39 di Padang Muhammadiyah telah menetapkan program periode 1974-1977, yang salah satu isinya adalah tentang "peningkatan pembinaan angkatan muda". Konsep pembinaan AMM diolah melalui rapat-rapat pleno PP Muhammadiyah, konsultasi dengan ortom-ortom AMM dan diputuskan dalam sidang Tanwir 1976 di Yogyakarta. Inti keputusannya antara lain: kaderisasi, peningkatan pendidikan Islam tingkat remaja, menggiatkan olahraga, seni, dan keterampilan, serta membentuk Badan Koordinasi Pembina Angkatan Muda Muhammadiyah (BKP-AMM). H.S. Projokusumo, *Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah* (Jakarta: BPK-AMM PPM, 1977).

⁵⁹ Pembinaan AMM Keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah (Yogyakarta: PPM, 1976), 4.

⁶⁰ *Ibid*, 6.

Pertama, melalui lembaga pendidikan, baik tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi. *Kedua*, melalui training (pelatihan) kepemimpinan dan organisasi dengan waktu dan tempat tertentu. Dalam Muhammadiyah disebut dengan pelatihan "Darul Arqam". *Ketiga*, melalui organisasi otonom mulai dari `Aisyiyah, Kepanduan Hizbul Wathan, Nasyiatul `Aisyiyah (NA), Pemuda Muhammadiyah (PM), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Tapak Suci Putra Muhammadiyah (TSPM) menjadi tempat bagi pembinaan kader Muhammadiyah, khususnya yang kemudian dikenal dengan sebutan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM).⁶¹ Dalam hal ini IPM merupakan sistem perkaderan AMM. Oleh karena itu, perlu dilacak bagaimana sejarah kelahirannya untuk mendapatkan watak dasar IPM.

Karena IPM adalah suatu organisasi kader Muhammadiyah di kalangan pelajar, maka seluruh pemikiran, aktivitas, dan cita-cita serta implikasinya, termasuk di dalamnya pola kepemimpinan, sistem gerakan, sistem administrasi dan sistem perkaderan dalam bingkai pemikiran Muhammadiyah.⁶² Perkaderan bagi IPM adalah hal mutlak. Bahkan saking pentingnya, perkaderan sama dengan eksistensi IPM itu sendiri. Jadi, singkatnya tidak disebut IPM kalau tidak ada perkaderan. Sama halnya dengan permainan sepakbola tanpa ada bola tidak dapat disebut sebagai sepakbola.

Dalam *Dasar-Dasar Gerakan* IPM hasil Muktamar XII, dijelaskan "Kepribadian IPM" antara lain: 1) IPM adalah Gerakan dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar di kalangan pelajar; 2) IPM berfungsi dan berperan aktif sebagai kader persyarikatan, ummat dan bangsa

⁶¹ M. Amin Rais, *Pendidikan Muhammadiyah dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: PLP2M, 1985), 69-70.

⁶² Asnawi Sarbini, "Peremajaan Pimpinan" Kertas Kerja Regional Meeting se-Jawa dan NTB PW IPM di PP Muhammadiyah Yogyakarta 16-17 Oktober 1976

dalam menunjang pembangunan manusia seutuhnya menuju terwujudnya masyarakat madani yang religius dan berkeadilan 3) IPM merupakan organisasi otonom Muhammadiyah yaitu sebuah organisasi yang diberi keleluasaan dalam mengelola rumah tangganya sendiri tanpa campurtangan dan intervensi; 4) IPM adalah organisasi independent, yaitu organisasi mandiri yang berada dalam bingkai kebebasan dan kemerdekaan untuk menentukan sikap dalam berpihak (hanya) kepada kebenaran; dan 5) IPM tidak mengambil bagian dalam kegiatan politik, tetapi akan selalu membawakan kekuatan moralnya, kapan saja dan dimana saja.

Lalu Kepribadian IPM disempurnakan dalam Mukhtamar XVI IPM 2008 di Surakarta. Dalam Mukhtamar Pergantian Nama IRM ke IPM ini, dijelaskan kepribadian IPM antara lain: 1) IPM adalah gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar di kalangan pelajar; 2) IPM berperan aktif sebagai kader persyarikatan, umat, dan bangsa dalam menunjang pembangunan manusia seutuhnya menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya; 3) IPM sebagai gerakan pelajar yang membangun nalar keilmuan dan respon terhadap perkembangan zaman; 4) IPM merupakan organisasi otonom Muhammadiyah yaitu sebuah organisasi yang diberi keleluasaan dalam mengelola rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dan intervensi; 5) IPM adalah organisasi independen yaitu organisasi mandiri yang berada dalam bingkai kebebasan dan kemerdekaan untuk menentukan sikap dalam berpihak (hanya) kepada kebenaran.

Dalam Identitas IPM ditegaskan bahwa IPM sebagai gerakan pelajar Islam, merupakan "eksponen pelajar dalam Muhammadiyah", yang menegaskan beberapa hal yaitu: Pertama, IPM sebagai suatu gerakan pembina kader Muhammadiyah di kalangan pelajar yang terpanggil oleh kebenaran ideologi dan garis-garis perjuangan persyarikatan dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kedua, IPM membawa

fungsi dan peranan aktif sebagai pelopor, pelangsup, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah selalu menitikberatkan pada pembinaan anggota untuk menjadi uswatun khasanah di tengah masyarakat dengan akhlaqul karimah, kekuatan persatuan, ketinggian ilmu, kebijaksanaan serta kelincahan beramal kebajikan. Ketiga, IPM selalu berusaha memperluas dan memperkuat inti-inti masa anggota dengan tiga unsur perjuangan, yakni: Konsolidasi, Kaderisasi dan Kristalisasi Dengan tidak melupakan kegiatan operasional sebagai manifestasi dan eksistensinya dalam masyarakat. Keempat, IPM tidak mengambil bagian dalam kegiatan politik, tetapi akan selalu membawa kekuatan moralnya kapan saja dan di bidang apapun dimana rasa kebenaran dan keadilan menghendaki. Kelima, IPM sebagai sebuah pejuang ideologi tak mengenal putus asa semata-mata mengharap keridhoan Allah dengan selalu mengadakan *self-correction* dalam menjaga keberanian dan kemurnian perjuangannya.

Dalam kepribadian IPM dijelaskan tujuan kader IPM diarahkan kepada kader peryarikatan, umat dan bangsa. Namun, menurut Buya Syafi'i Ma'arif,⁶³ slogan bahwa kader yang hendak dibentuk adalah kader peryarikatan, kader umat, dan kader bangsa. Urutan ini harus dibalik secara radikal menjadi, "kader kemanusiaan, kader bangsa, kader ummat, dan kader persyarikatan. Kader kemanusiaan harus menjadi prioritas. Mengapa harus dibalik? Posisi kemanusiaan ditempatkan sebagai yang pertama dengan beberapa pertimbangan, yaitu: Pertama, misi Islam adalah "rahmat bagi alam semesta", dengan menjadikan kemanusiaan sebagai pintu masuk pertama, pasukan intelektual akan didorong untuk berpikir *mondial*, artinya seluruh umat manusia, siapapun mereka, pada hakikatnya ialah bersahabat dalam bingkai

⁶³ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah refleksi Sejarah*. Bandung: Mizan, 2009, 197-198
199

kemanusiaan. Gerak roda peradaban harus mengarah kepada terciptanya sebuah persaudaraan universal umat manusia.

Kedua, posisi kader kemanusiaan, kita turunkan setapak menjadi kader bangsa, karena kita hidup dalam teritorial Negara-bangsa Indonesia. Pelajar Muslim dan ummat secara keseluruhan tidak boleh mengurung diri dalam lingkungan keumatan dalam makna terbatas. Namun konsep keumatan ditempatkan dalam bingkai kemanusiaan universal. Perumahan kebangsaan adalah pelabuhan awal umat Islam untuk tampil sebagai gerda depan membela dan merawat kepnetingan bangsa bersama umat lain.

Ketiga, kebaragamam sosio-kultural dengan ciri khas masing-masing adalah pertanda bahwa Allah Maha Pencipta, anti-keseragaman, sebab keseragama akan membuat manusia miskin wawasan dan kaku pergaulan. Keimanan kepada Allah tidak menghalani untuk meluaskan radius pergaulan (*lita'arofu*), saling menyapa dan bertukar peradaban. Oleh karena itu, biarkan masing-masing umat untuk mencetak kader-kadernya untuk kepentingan berbeda, namun dibawah tenda kebangsaan dan diatasnya terrbentang tenda kemanusiaan.

Keempat, Muhammadiyah membutuhkan kader persyariikatan untuk melangsungkan gerakan dan misinya secara kreatif. Yakni kader Muhammadiyah wajib memiliki wawasan dan jangkuan pemikiran yang melampaui radius kemuhammadiyah. Itu semua adalah bagian yang menyatu dengan tiga ranah pergaulan, "kemanusiaan, kebangsaan, dan keummatan". Semua ini memerlukan mindset dan sikap mental secara berani dan radikal.

Kaderisasi dalam perspektif umum maupun program, dikatakan oleh Haedar Nashir sebagai suatu “proses pendidikan”, yakni pendidikan khusus, yang didesain untuk kepentingan tertentu. Tujuannya adalah menyiapkan orang atau sekelompok orang yang memiliki kualitas yang disebut dengan kader, sebagai tenaga inti yang berperan mengemban misi organisasi atau gerakan.⁶⁴

⁶⁴ Haedar Nashir, *Kaderisasi dan Kepemimpinan Muhammadiyah* (Ketua BPK PAMM PP Muhammadiyah 1995-2000), 4.

Pena 3

SEJARAH KELAHIRAN IPM

A. Konteks Sejarah Kelahiran IPM

Kelahiran IPM sebagai organisasi kader bukan berada dalam ruang hampa, tetapi ada proses sejarah yang melingkupinya. Pemahaman konteks sejarah itu penting supaya tidak asejarah dalam memaknai historisitas IPM. Eksistensi IPM muncul dari dialektika sosial yang terjadi di lingkungan tahun 1960-an. Dalam pengantarnya di buku "Islam sebagai Ilmu" Kuntowijoyo menjelaskan bahwa periode 1960-an adalah merupakan fase ideologis. Fase ini dicirikan dicirikan pertentangan-pertentangan ideologis di masa Orde Lama. Lahirnya Masyumi sebagai representasi partai politik umat Islam yang memperhadap hadapkan umat Islam dengan pemerintahan Soekarno. Menurut Masmulyadi, dalam perodesasi ideologis inilah IPM lahir, sehingga performa yang ditampilkan IPM pada masa awal adalah performa yang militan, dan relatif "ideologis". Sebab ada lawan ideologis, ada *common sense*, lawan ideologis IPM dan penggiat Islam ketika itu adalah gagasan "komunisme".¹ Corak gerakan yang ditampilkan IPM pada waktu itu, sebagaimana disebut Haedar Nashir IPM adalah "gerakan ideologis".

¹ Masmulyadi, "Menapak Jalan "Kritis Transformatif: Mendekap Realitas Sosial dengan Normativitas Wahyu" www.ipm.or.id (Diakses 25 Agustus 2016)

Kelahiran IPM tidak lepas dari visi dan misi Muhammadiyah serta konteks kehidupan yang mengitarinya. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam *amal makruf nahi munkar* dan sebagai konsekuensi dari banyaknya sekolah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah untuk membina dan mendidik kader. Namun, lembaga pendidikan Muhammadiyah belum secara khusus terdapat pembinaan untuk penyiapan pelajar untuk menjadi kader yang mampu menyerap misi gerakan sekaligus menjadi anak panah organisasi. Dalam bahasa lain, belum terdapat wadah yang menjadi proses penyiapan anggota inti pelajar Muhammadiyah yang mengemban misi dan usaha Muhammadiyah.²

Hal yang perlu digaris-bawahi bahwa pada tahun 1961, Muhammadiyah hampir berusia setengah abad dan belum memiliki sayap gerakan yang secara khusus menggarap kelompok pelajar, di samping juga mahasiswa. Padahal, sejak berdiri Muhammadiyah telah bergerak dalam bidang pendidikan, yang secara langsung dan utama membina pelajar sebagai sumber daya generasi umat dan bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia.³ Dalam kaitan itu, maka dipandang penting lahirnya sebuah organisasi otonom yang menggarap secara khusus dunia pelajar yang disiapkan menjadi anggota inti penggerak Muhammadiyah, sehingga dari situlah kemudian digagas dan dilahirkan Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau disingkat IPM.⁴

Dalam dokumen resmi, IPM dinyatakan telah didirikan tepat pada tanggal 18 Juli 1961. Akan tetapi jika dilacak jauh ke belakang, sebenarnya upaya para pelajar Muhammadiyah untuk mendirikan organisasi pelajar Muhammadiyah sudah dimulai jauh sebelum IPM berdiri pada tahun 1961 sebagaimana akan dijelaskan beberapa kondisi yang mengharuskan IPM ada. Ada dua kondisi sosial politik yang mengharuskan IPM ada, yakni berahirnya deklarasi panca

² Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah. *Ensiklopedi Muhammadiyah* (Jakarta: Rajawali Press, 2005).

³ Haedar Nashir, "IPM Gerakan Ideologis" dalam *Manifesto Gerakan Perlawanan Pelajar* (Yogyakarta: PP IPM, 2011).

⁴ Haedar Nashir, "IPM Gerakan Ideologis"..., 10.

cita dan maraknya ideologi komunis yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. Berakhirnya Deklarasi Panca Cita

Benih-benih spirit pendirian sebuah organisasi khusus yang berfungsi sebagai wadah pembinaan siswa Muhammadiyah sebenarnya telah tumbuh sejak awal. Bahwa di masa Kiai Haji Ahmad Dahlan masih hidup, perkumpulan pelajar Muhammadiyah pernah dipelopori sekitar tahun 1919. Setelah mengadakan musyawarah dengan para siswa sekolah-sekolah Muhammadiyah, antara lain: *Volkschool Moehammad-ijah Kauman*, *Standaardschool Moehammadijah Suronatan*, dan *al-Qismul Arqa*. Dari sinilah dibentuk perkumpulan yang bernama "Siswa Praja" (Persatuan Pelajar).⁵

Setelah itu, pada tahun 1926 di Malang dan Surakarta berdiri GKPM (Gabungan Keluarga Pelajar Muhammadiyah). Hizbul Wathan berdiri tahun 1933 yang di dalamnya berkumpul pelajar-pelajar Muhammadiyah.⁶ Lalu tahun 1947, berdirinya kantong-kantong pelajar Muhammadiyah untuk beraktivitas mulai mendapatkan resistensi dari berbagai pihak, termasuk dari Muhammadiyah sendiri. Hal ini dapat dilihat ketika tahun 1950, di Sulawesi tepatnya daerah Wajo didirikan IPM pertama kali, tetapi dibubarkan oleh Muhammadiyah setempat.⁷ GKPM berumur 2 bulan di Yogyakarta tahun 1954, juga dibubarkan Muhammadiyah. Tidak cukup di situ, GKPM yang baru didirikan kembali di Yogyakarta tahun 1956, namun juga dibubarkan oleh Muhammadiyah dalam hal ini Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah. Setelah GKPM dibubarkan, pada tahun 1956 didirikan Uni SMA Muhammadiyah yang berencana untuk mengadakan musyawarah se-Jawa Tengah. Akan

5 Ahmad Adaby Darban, *Sejarah Kauman* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah 2010), 57.

6 Dasar-Dasar Gerakan IRM dalam Materi Paradigma Baru Gerakan Konpiwil IRM, 1999.

7 Haedar Nashir, "IPM Gerakan Ideologis"..., 13.

tetapi, para aktivisnya diancam akan dikeluarkan dari sekolah Muhammadiyah. Hingga tahun 1957 berdiri IPSM (Ikatan Pelajar Sekolah Muhammadiyah) di Surakarta, masih mendapatkan resistensi dari Muhammadiyah.⁸ Pergumulan dan tarik ulur sejarah ini, menunjukkan bahwa IPM tumbuh kesadaran kolektif dari bawah untuk berserikat, dan bukan atas kesadaran elite semata.

Resistensi dari berbagai pihak, termasuk Muhammadiyah, terhadap eksistensi organisasi pelajar Muhammadiyah, sebenarnya merupakan refleksi sejarah dan politik di Indonesia saat itu. Kelahiran IPM tidak terlepas kaitannya dengan *background* politik umat Islam. Menurut Haedar Nashir, terdapat konteks sejarah atau sosiologis yang khusus dan bersifat ideologis di sekitar kelahiran IPM, dalam pernyataannya dikatakan:

“Ketika kekuatan-kekuatan organisasi Islam yakni tokoh-tokoh Muhammadiyah, Partai Syarekat Islam Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain mendirikan partai politik Islam Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) tahun 1945 di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1945, pada saat itu terkandung cita-cita ideologi politik Islam yang satu mewakili umat Islam. Setelah itu dan dalam spirit persatuan politik Islam itu dilahirkan “Deklarasi Panca Cita” yang mengandung semangat kesatuan umat Islam yang beromitmen bahwa ummat Islam bersatu dalam: *pertama*, umat Islam bersatu dalam satu partai Islam, yaitu Masyumi; *kedua*, satu gerakan mahasiswa Islam, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI); *ketiga*, satu gerakan pemuda Islam, yaitu Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII); *keempat*, satu gerakan pelajar Islam, yaitu Pelajar Islam Indonesia (PII); *kelima*, satu Kepanduan Islam, yaitu Pandu Islam (PI).⁹”

Kenyataannya, konsensus organisasi-organisasi Islam ini tidak dapat bertahan lama, karena pada tahun 1948 PSII keluar dari Masyumi diikuti oleh NU

8 Agung Danarta, “Dinamika IPM dari Masa ke Masa” (Dokumen Organisasi). (Yogyakarta: PP IPM, 31 Juli 1992).

9 Haedar Nashir, “IPM Gerakan Ideologis”..., 9.

(Nahdlatul Ulama) tahun 1952 yang membentuk dirinya menjadi Partai Politik sendiri. Sedangkan Muhammadiyah tetap mempertahankan Masyumi, hingga Masyumi membubarkan diri tahun 1959 atas tekanan politik rezim Soekarno.¹⁰

Resistensi terhadap upaya mendirikan wadah atau organisasi bagi pelajar Muhammadiyah sebenarnya merupakan refleksi sejarah dan politik di Indonesia yang terjadi pada awal gagasan ini digulirkan. Jika merentang sejarah yang lebih luas, berdirinya IPM tidak terlepas kaitannya dengan sebuah background politik ummat Islam secara keseluruhan. Ketika Partai Islam MASYUMI berdiri, organisasi-organisasi Islam di Indonesia merapatkan sebuah barisan dengan membuat sebuah deklarasi (yang kemudian terkenal dengan Deklarasi Panca Cita). Kesepakatan bulat organisasi-organisasi Islam ini tidak dapat bertahan lama, karena pada tahun 1948 PSII keluar dari Masyumi yang kemudian diikuti oleh NU pada tahun 1952. Sedangkan Muhammadiyah tetap bertahan di dalam Masyumi sampai Masyumi membubarkan diri pada tahun 1959. Bertahannya Muhammadiyah dalam Masyumi akhirnya menjadi mainstream yang kuat bahwa deklarasi Panca Cita hendaknya ditegakkan demi kesatuan umat Islam Indonesia. Deklarasi ini dilaksanakan di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta.¹¹

Pada tahun 1956, partai Masyumi, partai terbesar kaum muslim modernis, dikeluarkan arena kekuasaan Indonesia. Sekitar penghujung 1950-an para pemimpin Masyumi menjadi sasaran empuk kampanye PKI (Partai Komunis Indonesia) yang menyebut mereka sebagai antek-antek CIA, dinas rahasia AS (Amerika Serikat). Tidak lama setelah terjadi pemberontakan di luar Jawa 17 Agustus 1960, Presiden Soekarno yang saat itu tidak didukung oleh para perwira tinggi militer, memerintahkan Masyumi

10 MT Arifin, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah...*,

11 Kastolani dalam Amalia Destika, *Ikatan Pelajar Muhammadiyah 1961-1998* (Yogyakarta: UGM, 2010).

untuk membubarkan diri, dan sejak itu ditunyatakan sebagai "partai terlarang". Beberapa bulan berikutnya, sejumlah pemimpin senior Masyumi dijebloskan ke dalam penjara, termasuk yang tidak mempunyai keterkaitan dengan pemberontakan-pemberontakan tersebut. Selain itu, beberapa organisasi afiliasi Masyumi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pelajar Islam Indonesia (PII), juga tidak terlepas dari target propaganda PKI, dan terkena ancaman pembubaran.¹²

Muhammadiyah sebagai bekas anggota istimewa Masyumi menanggung luka yang sangat mendalam akibat Masyumi dibubarkan pada 13 September 1960.¹³ Bertahannya Muhammadiyah dalam Masyumi menjadi *mainstream* yang kuat bahwa "Deklarasi Panca Cita" hendaknya ditegakkan demi kesatuan umat Islam Indonesia. Akhirnya berpengaruh pada pembubaran organisasi pelajar Muhammadiyah. Selain itu, resistensi dari Muhammadiyah terhadap IPM juga disebabkan anggapan karena merasa cukup dengan adanya Angkatan Muda Muhammadiyah, seperti Pemuda Muhammadiyah dan *Nasyi'atul 'Aisyiyah*, yang dianggap cukup mengakomodasikan kepentingan para pelajar Muhammadiyah.¹⁴

2. Eksistensi PII di Sekolah Muhammadiyah

Dampak dari "Panca Cita" tersebut mengakibatkan elite pimpinan Muhammadiyah berkeberatan dengan gagasan mendirikan IPM, karena masih ingin mempertahankan eksistensi PII. Selain itu juga karena merasa cukup dengan adanya Pemuda Muhammadiyah, Hizbul Wathan, dan *Nasyiatul 'Aisyiyah*. Tetapi generasi muda terutama para elite Pemuda Muhammadiyah yang

¹² Robert F Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. (Princeton: Princeton Univesity Press, 2002), 171.

¹³ Tim Majelis Diktilitbang & LPI PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, (Jakarta: Kompas, 2010), 162.

¹⁴ Lihat *Dasar-Dasar Gerakan Tanfidz Muktamar 2000*.

merasa tidak terwakili oleh organisasi yang telah ada itu sekaligus memiliki kehendak untuk adanya organisasi khusus milik Muhammadiyah sendiri yang membina pelajar, maka dorongan yang kuat dan ditempa oleh keadaan yang tidak terelakkan.¹⁵

Sampai tahun 1960, organisasi otonom Muhammadiyah yang mewadahi anak muda yaitu Pemuda Muhammadiyah, Naswiatul Aisyiyah, dan Kepanduan Hizbul Wathan. Organisasi khusus yang bergerak di dunia pelajar belum didirikan. Aktivitas Pemuda Muhammadiyah tidak masuk ke sekolah, begitu juga Kepanduan Hizbul Wathan. Maka dari itu, sekolah menjadi lahan kosong yang memungkinkan organisasi lain selain Muhammadiyah bisa masuk ke sekolah-sekolah Muhammadiyah seperti PII (Pelajar Islam Indonesia). Dengan adanya organisasi-organisasi tersebut, maka para pelajar Muhammadiyah dilatih menjadi kader pelajar organisasi non-Muhammadiyah.

Hal ini sebagaimana diceritakan dalam tesis Untung Cahyono berdasarkan hasil wawancaranya dengan Ismed Wibowo, bahwa setiap milad Muhammadiyah, hari kemerdekaan dan hari-hari peringatan bersejarah, Muhammadiyah selalu menyelenggarakan maupun menjadi peserta aktif dalam kegiatan upacara dengan menampilkan sejumlah besar pasukan komponen persyarikatan. Pada Agustus 1959, Pasukan Genderang dan Terompet (PGT), Pasukan Pleton Inti (Tonti) dari masing-masing sekolah Muhammadiyah dan pasukan-pasukan lain yang bersimbol dan beridentitas Muhammadiyah turut serta dalam acara seremonial ulang tahun Republik Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Akan tetapi, ada barisan pelajar Muhammadiyah (SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta) yang justru bertanda Pelajar Islam Indonesia (PII). Pada saat itulah berkumpul, tokoh-tokoh Pemuda Muhammadiyah (PM) seperti Wirsyah Hasan, Ismed

15 Haedar Nashir, "IPM Gerakan Ideologis"..., 8.

Wibowo, Muflich Dahlan, Mohamad Djazman, Fachruurazi, Subcho Abdul Kadir dan lainnya menyaksikan pasukan pelajar Muhammadiyah beridentitas PII tersebut di depan gedung Muhammadiyah JL. KHA Dahlan 103.¹⁶

Setelah menyaksikan parade yang berlaga hingga akhir, para personil Pemuda Muhammadiyah bergegas menuju ruang sidang kantor Muhammadiyah memperbincangkan agenda rutin dan berbagai persoalan organisasi. Selain evaluasi program, dalam pertemuan itu muncul perbincangan mengenai eksistensi pasukan pelajar Muhammadiyah yang beridentitas PII. Pelaku sejarah Ismed Wibowo menuturkan bahwa dalam rapat tersebut diperbincangkan secara sangat serius tentang PII yang secara resmi menangani pelajar Muhammadiyah. Dengan bahasa Jawa, "Iho mau PII kok malah ngatur cah Muhammadiyah, opo awake dewe ora perlu gawe organisasi pelajar dewe? PII kan dudu Muhammadiyah." Dalam diskusi rapat tersebut dipimpin oleh Fachrurrazi pembicaraan tentang perlu tidaknya membentuk organisasi pelajar khusus Muhammadiyah.¹⁷

Berdasarkan permasalahan itu maka beberapa orang siswa SMA yang waktu itu menjadi *volunteer* di sekretariat Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Yogyakarta merasakan kegelisahan yang sama. Maka pada awal tahun 1960 para pelajar tersebut mengadakan diskusi intensif di kantor PP Pemuda Muhammadiyah Yogyakarta, salah satunya mendiskusikan masalah tersebut dan mendesak agar segera didirikan organisasi khusus pelajar sebagai hasil tindak lanjut dari Konpida Pemuda Muhammadiyah tahun 1959.¹⁸

16 Untung Cahyono, *Angkatan Muda Muhammadiyah...*, 120-121.

17 Hasil Wawancara Untung Cahyono dengan Ismed Wibowo, Salah Seorang Peserta Rapat di Kantor PP Muhammadiyah Setelah Menyaksikan Parade Pasukan Peserta Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-14 (Jumat, 25 Februari 2005). Lihat Untung Cahyono, "Angkatan Muda Muhammadiyah...",

18 Lutfi muqoddas dalam Amalia Destika, *Ikatan Pelajar Muhammadiyah*.

Para aktivis PM dan Muhammadiyah yang tidak sepakat dengan pendirian IPM, lambat laun menghormati, menghargai, dan akhirnya mendukung meski tidak selalu bersikap transparan. Ketika IPM memasuki dan semakin aktif di Sekolah Muhammadiyah, para fungsionaris PII (anak-anak Muhammadiyah sebelum ada PII) semakin meninggalkan kampus Muhammadiyah dan memilih organisasi lain. Secara psikologis, kesan "penggusuran PII" dari sekolah Muhammadiyah cukup terasa. Suasana tersebut sangat didasari sebagai konsekuensi politik yang tak terhindarkan.¹⁹

Perlu diketahui bahwa sebelum IPM dibentuk, para pelajar Islam dan termasuk di dalamnya para pelajar yang berasal dari kalangan Muhammadiyah dan sekolah Muhammadiyah, tidak sedikit yang bergabung dalam PII. Bahkan dalam suatu Sekolah Muhammadiyah, ketika IPM belum ada, namun PII telah ada dan membina pelajar aktif berorganisasi.²⁰ Wajar ketika gagasan pendirian IPM di sekolah-sekolah Muhammadiyah terjadi konflik psikologis dan persaingan primordialisme. Ada hal yang menarik adalah bahwa ternyata ada semacam kesepakatan bahwa para aktivis Pemuda Muhammadiyah perlu masuk ke berbagai lini organisasi pelajar maupun mahasiswa termasuk dalam HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).²¹ Yang perlu digaris bawahi adalah bahwa pembentukan PII maupun HMI sebenarnya juga dilakukan oleh sebagian besar para tokoh Muhammadiyah. Bahkan ketika HMI mau dibubarkan oleh Bung Karno, Kiai Badawi selalu menunjukkan pembelaan. Para aktivis PII, HMS Ibnu Juremi misalnya, yang merupakan tokoh Muhammadiyah sekaligus tokoh PII yang disegani diinternal PII maupun selanjutnya dalam IMM dan juga Pemuda Muhammadiyah.²²

19 Untung Cahyono, "Angkatan Muda Muhammadiyah...", 126.

20 *Ibid*, 82.

21 Dalam Amalia Destika, *Ikatan Pelajar Muhammadiyah...*,

22 Untung Cahyono, "Angkatan Muda Muhammadiyah...", 83.

3. Maraknya Ideologi Komunis

Kelahiran IPM di saat kondisi bangsa Indonesia awal tahun 1960-an hingga 1965-an mengalami cengkeraman politik Orde Lama Soekarno dan memasuki era Orde Baru rezim Soeharto yang semakin otoriter dan cenderung diktatorial. Lebih-lebih setelah Soekarno yang didukung Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) membentuk aliansi Nasakom (Nasionalis, Agamis, dan Komunis). Kehadiran IPM, semakin memperkuat barisan Muhammadiyah yang telah diperkuat oleh Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul 'Aisyiyah, dan Hizbul Wathan dalam membina generasi muda umat dan bangsa dari berbagai gerakan ideologi politik yang tidak sejalan dengan misi Muhammadiyah, kepentingan umat Islam, dan kepentingan nasional sebagaimana cita-cita awal kemerdekaan.²³

Sejak tahun 1956 ditandai dengan pergolakan di daerah-daerah yang disebabkan antara lain: pertama, masalah kebijakan ekonomi dan pembangunan yang tidak merata antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Kedua, kebijakan politik Soekarno yang terlalu lunak kepada PKI (Partai Komunis Indonesia) yang semakin berkembang dan masuk ke gelanggang politik nasional. Hal ini sejak setahun setelah melakukan kunjungan resmi ke Uni Soviet, Presiden Soekarno pada tanggal 21 Februari 1957 mengumumkan tentang perlunya semua kekuatan politik, termasuk PKI, untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Kabinet yang selama itu berkaki tiga, PNI, Masyumi, dan NU harus memberikan kesempatan kepada PKI untuk duduk di dalamnya. Masyumi, PSI, dan Partai Katolik menolak dengan tegas. Bahkan, sidang Tanwir Muhammadiyah Yogyakarta, 24-26 Agustus 1957 menugaskan HAMKA dan M. Bustami Ibrahim menulis risalah khusus untuk menghadapi paham ateis. Para pemimpin, ulama, dan cendekiawan muslim juga diminta pandangannya tentang

²³ Haedar Nashir, "IPM Gerakan Ideologis"... , 7.

paham ateisme.²⁴

Selanjutnya, pada Muktamar Alim Ulama di Palembang 2-12 September 1957 mengeluarkan sikap, mengharamkan pemerintahan dipegang PKI, yang kufur, penganut paham komunis, dan meminta supaya kabinet dibentuk tanpa PKI.²⁵ Kendati pada Muktamar ke-34 Muhammadiyah di Yogyakarta pada 18-23 November 1959 memilih M. Yunus Anies, seorang bekas militer menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah. Pada situasi seperti itu, sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pada tanggal 5 Maret 1960 Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, lalu membentuk DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) yang semua anggotanya dibentuk oleh Presiden. Melihat perkembangan demikian, Masyumi melakukan protes, kemudian melarang seluruh anggotanya duduk dalam dewan dan lembaga eksekutif. Sikap ini mengakibatkan Masyumi terisolasi dari kegiatan politik kenegaraan serta menguntungkan lawan politiknya yaitu PKI. Muhammadiyah sebagai anggota istimewa Masyumi juga menanggung akibatnya, lebih-lebih ketika Masyumi membubarkan diri tanggal 13 September 1960.²⁶

Dalam DPR GR ini partai Masyumi dan PSI tidak dilibatkan. Inilah awal Demokrasi Terpimpin yang diartikan sendiri oleh Soekarno sebagai "demokrasi murni yang berdasarkan suatu ideologi yang memimpin dengan menentukan tujuan serta cara mencapainya". Sementara Demokrasi Terpimpin Indonesia sebagai "kerakyatan yang dipimpin oleh ideologi Negara, yaitu Pancasila oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan untuk mufakat di antara semua golongan progresif".²⁷

²⁴ Tim Majelis Diktilitbang & LPI PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah...*, 154.

²⁵ *Ibid*, 155.

²⁶ Sholichin Salam, *Sejarah Partai Muslimin Indonesia* (Jakarta: Lembaga Penyelidikan Islam, 1970), 13 dan 162.

²⁷ Tim Majelis Diktilitbang & LPI PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah...*, 164.

Alhasil, PKI semakin memiliki kedudukan yang kuat. Dengan kedudukan itu, PKI melakukan beberapa langkah untuk mempengaruhi Presiden supaya membubarkan Muhammadiyah. Bahkan, PKI bersikeras mendesak Presiden agar Muhammadiyah dibubarkan. Dengan tuduhan Muhammadiyah adalah bagian dari Masyumi, sebagai partai politik terlarang. Namun, Ketua PP Muhammadiyah saat itu KH Ahmad Badawi yang membangun hubungan baik dengan pemerintah, lobi-lobi secara intens berhasil melobi Soekarno supaya Muhammadiyah dan HMI tidak dibubarkan.²⁸

Begitu usia Demokrasi Terpimpin memasuki tahun ketiga, pengaruh kekuatan PKI semakin menjadi-jadi. Mereka menempatkan presiden Soekarno sebagai penguasa tertinggi yang tidak dapat diganggu-gugat. Dengan berlindung di bawah kekuasaan itu, PKI semakin menjadi partai progresif dan revolusioner menancapkan pengaruhnya di kalangan wartawan, buruh, petani, nelayan, wanita, pemuda, dan mahasiswa. Begitu juga di lingkungan pegawai negeri dan ABRI. Melihat situasi itu, partai-partai lain semakin cemas dan berusaha melakukan pendekatan dengan presiden. Perlombaan terjadi antara PNI, NU, dan PKI yang masing-masing mewakili kepentingan `ideologi`nya: nasionalis, agama, dan komunis. Ketiganya memiliki organisasi ideologisnya masing-masing. PKI dengan Pemuda Rakyat dan CGMI, PNI dengan Pemuda Marheinis dan GMNI, dan NU dengan GP Ansor dan PMII, yang masing-masing menjadi kekuatan massa yang militan. Organisasi pemuda seperti HMI dan PII yang menjadi bulan-bulanan PKI, dengan dukungan dan pembelaan golongan Islam terutama PSII, Muhammadiyah, GEMUIS, dan ABRI berhasil mempertahankan eksistensinya dari pembubaran.²⁹

Pada situasi pertarungan ideologis inilah IPM harus terlahir. Karena itu, dalam dokumen resmi organisasi IPM,

²⁸ *Ibid*, 167.

²⁹ *Ibid*, 177

secara tegas dinyatakan bahwa kelahiran IPM adalah merupakan respons terhadap ideologi komunis. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar, sebagai berikut:

“Kelahiran IPM yang jatuh pada tanggal 18 Juli 1961 tentu tidak lahir pada ruang yang hampa. Dia lahir atas kesadaran kolektif di internal Muhammadiyah, bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah yang pada saat itu sudah berkembang perlu dibentengi ideologi Islam agar akidah mereka kuat atas berkembangnya ideologi komunis pada saat itu.”³⁰

Karena itu dapat disimpulkan bahwa berdirinya organisasi IPM yang berbasis pelajar dan Ortom Muhammadiyah didirikan sebagai bentuk respon terhadap penjagaan ideologi pelajar dari ideologi komunis yang berkembang pada saat itu. Karena itu perlu organisasi Muhammadiyah sayap pelajar yang fokus pada persoalan-persoalan pelajar dan dunianya. Selain itu, IPM berdiri karena sebuah keharusan bagi Muhammadiyah untuk menanamkan ideologi Muhammadiyah kepada kader-kader yang kebetulan saat itu Muhammadiyah telah memiliki lembaga-lembaga pendidikan (sekolah).³¹ Hingga pola training-training (perkaderan) pada periode tersebut selain materi kepemimpinan, keorganisasian, juga ada materi *security*. Materi *security* bertujuan supaya para anggota IPM bisa memprotek diri, dari berbagai *infiltrasi* ideologi, dan besar kemungkinan ada penyusupan-penyusupan. Dalam menghadapi komunis, IPM pada masa itu lebih menguatkan ideologi anggota, melalui training-training tersebut. Tantangan teknologi informasi dulu sudah ada, tapi tidak terlalu berat.³²

Hal ini menandakan bahwa, pada setiap periode sejarah, sebagaimana dijelaskan Kuntowijoyo bahwa

30 Materi Mukhtamar XVI Ikatan Remaja Muhammadiyah (Surakarta, 23-28 oktober 2008), 13.

31 *Ibid*,

32 Fahmi Muqoddas Tanggal 24 Mei 2010 di Nitikan Baru, Yogyakarta dalam Amalia Destika, *Ikatan Pelajar Muhammadiyah 1961-1998* (Yogyakarta: UGM, 2010)

hubungan antara elite dengan massa tidak sama. Era 1960-an adalah era ideologis, Kuntowijoyo mengatakan:

“Di sini yang menjadi persoalan menurut saya bukanlah gagal atau tidak gagal. Moh. Natsir dan Mohammad Roem telah berbuat dalam kapasitas tertentu dalam masa mereka. Kini periode sudah berganti. Persoalan pun sudah lain. Kita tidak bisa menyalahkan petani yang memberontak pada abad XIX, pada zaman mitos. Kita pun tidak bisa menyalahkan Masyumi yang mengusulkan negara hukum berlandaskan Islam pada periode ideologi, sehingga umat Islam menjadi tertuduh. Itu terjadi karena pada masa tersebut muncul Komunisme, dan sering terjadi konflik ideologis. Kalau saja tidak ada yang mengusulkan Islam, mungkin tidak akan lahir Pancasila sebagai jalan tengah.”³³

Senada dengan itu, Ridho Al-hamdi bahwa kelahiran IPM tidak terlepas dari semakin banyaknya sekolah-sekolah Muhammadiyah yang berkembang sehingga Muhammadiyah sangat memerlukan organisasi pelajar untuk membentengi akidah para pelajar Muhammadiyah dari serangan orang-orang komunis pada saat dulu (1960-an).³⁴

B. IPM Didirikan oleh Pemuda Muhammadiyah

Kebutuhan akan kehadiran organisasi pelajar Muhammadiyah di struktur organisasi Pemuda Muhammadiyah, sebenarnya sudah ternaungi dalam Departemen Pelajar dan Budaya. Departemen yang bertugas mengelola pelajar dan kegiatan seni budaya untuk kalangan pelajar. Karena dinamisnya aktivitas departemen ini, masyarakat maupun pelajar Muhammadiyah semakin menyadari bahwa mereka tidak dalam satu wadah organisasi khusus pelajar, seperti PII. Secara organisatoris, sangat dimaklumi jika terjadi perbedaan semangat berorganisasi antara yang mandiri dan yang berposisi sebagai asuhan. Pandangan kritis fungsionaris

³³ Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia* (Yogyakarta: Sholahuddin Press dan Pustaka Pelajar, 1994) 37.

³⁴ Ridho Al-Hamdi “Saatnya IRM Kembali Ke Pelajar” <http://ridhoalhamdi.blogspot.co.id/2007/12/saatnya-irm-kembali-ke-pelajar.html> (diakses 7 Juli 2016).

pemuda Muhammadiyah untuk membentuk IPM mendapat sambutan dan dukungan yang kuat baik dari para pimpinan Muhammadiyah, murid maupun orang tua murid. Rapat akhirnya menyetujui dan memutuskan perlunya dibentuk organisasi khusus untuk keluarga Muhammadiyah, baik yang sekolah di luar maupun di lingkungan sekolah Muhammadiyah. Penamaan organisasi inipun terasa sangat lancar setelah diusulkan dengan nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Namun, tidak cukup di situ, kelahiran IPM masih membutuhkan proses formal organisasi.³⁵

Sebelum itu, perlu dicatat bahwa berdirinya IPM tidak lepas dari dorongan M. Djazman Al-Kindi, yang pada saat itu sebagai Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah. Awal didirikannya IPM bermula dari bincang-bincang pasca pengajian di Gedung PP Muhammadiyah antara M. Djazman dengan relawan Sekretariat PP. Pemuda Muhammadiyah yaitu, Lutfi Muqoddas, Ziyad Masykur, Helmi Farid Ma'rif, Ismet Wibowo, serta anggota Pemuda Muhammadiyah dari Semarang. Lalu pasca Konpida Pemuda Muhammadiyah, pada awal tahun 1960 di Sekretariat PP Pemuda Muhammadiyah dibentuk beberapa seksi/urusan yang dipegang oleh beberapa pelajar yang menjadi *volunteer* di sekretariat PP Pemuda Muhammadiyah tersebut. Diantaranya yaitu, urusan pelajar yaitu Muhammad Lutfi Muqoddas, dan urusan kader yaitu Ismet Wibowo dan Ziyad Masykur.

Setelah mengalami proses kurang lebih setahun, proses formal organisasi pendirian IPM dapat terwujud. Akhirnya, mencapai titik terang dalam Konferensi Pemuda Muhammadiyah tahun 1958 di Garut, Jawa Barat. Konferensi ini memutuskan bahwa organisasi pelajar Muhammadiyah akan ditempatkan di bawah pengawasan Pemuda Muhammadiyah. Kebijakan tersebut diperkuat pada Mukhtamar ke-2 Pemuda Muhammadiyah pada tanggal 24-28 Juli 1960 di Yogyakarta, yakni dengan memutuskan untuk membentuk IPM (Keputusan II/ nomor 4).³⁶ Keputusan tersebut antara

³⁵ Untung Cahyono, "Angkatan Muda Muhammadiyah...", 84.

³⁶ Dasar-Dasar Gerakan Ikatan Remaja Muhammadiyah

lain adalah sebagai berikut: Pertama, Mukhtar meminta kepada PP Muhammadiyah Majelis Pendidikan bagian Pendidikan dan Pengajaran supaya memberi kesempatan dan mengerahkan kompetensi pembentukan IPM kepada Pemuda Muhammadiyah. Kedua, Mukhtar mengamanahkan kepada PP Pemuda Muhammadiyah untuk menyusun konsepsi IPM dan untuk segera dilaksanakan setelah mencapai persesuaian pendapat dengan PP Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran.³⁷

Selanjutnya PP Pemuda Muhammadiyah membahas dengan Majelis Pendidikan, kemudian dibicarakan dengan KHA. Badawi Djindar Tamimi selaku PP Muhammadiyah dan. Setelah ada kesepakatan antara PP Pemuda Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan dan Pengajaran PP Muhammadiyah pada tanggal 15 Juni 1961 ditandatangani peraturan bersama tentang organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian membentuk pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah.³⁸ Lutfi Muqoddas ditetapkan sebagai Ketua Umum yang berkedudukan di Yogyakarta, dan Sumarsono sebagai Wakil Ketua yang berkedudukan di Jakarta. Pada Maret 1961, PP Muhammadiyah memutuskan pembentukan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan ditetapkan pada tanggal 18 Juli 1961 sebagai tahun berdirinya IPM.³⁹

Setelah itu, komunikasi intensif antara PP Pemuda Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan dan Pengajaran PP Muhammadiyah dilakukan hingga akhirnya pada tanggal 15 Juni 1961 ditandatangani peraturan bersama tentang organisasi IPM. Pendirian IPM tersebut dimatangkan secara nasional pada Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Surakarta tanggal 18-20 Juli 1961. Sehingga pada tanggal

³⁷ Napak Tilas Sejarah Ikatan Remaja Muhammadiyah

³⁸ Pada masa itu, ada "dualisme kantor" PP KHA. Dahlan Yogyakarta dan PP Menteng Jakarta. Maka dari itu, untuk mempercepat proses pengembangan organisasi, maka pengurus inti pp ipm terdiri dari dua unsur Yogyakarta dan Jakarta. Amalia Destika, *Ikatan Pelajar Muhammadiyah ...*,

³⁹ Lutfi Muqoddas, dalam Amalia Destika, *Ikatan Pelajar Muhammadiyah ...*

5 Shafar 1381 H bertepatan dengan tanggal 18 Juli 1961 M ditetapkan sebagai hari kelahiran IPM. Saat itu pula ditetapkan Ketua Umum Herman Helmi Farid Ma'ruf dan Sekretaris Umum Muh. Wirsyam Hasan,⁴⁰ (Keduanya dari Kauman).⁴¹ Herman Helmi adalah putra ketiga Prof. Faried Ma'ruf tokoh Muhammadiyah. Sedangkan Wirsyam adalah putra Kyai Hasan (Betawi) dengan Dandanah. Dandanah adalah putri Kyai Dahlan dengan Siti Aisyah (istri ke-3).⁴² Kepemimpinan Herman dan Wirsan masih berada dalam pengawasan dan koordinasi Pemuda Muhammadiyah. Karena itu, perintisan dan pengembangan IPM ke berbagai daerah dilakukan bersama-sama dengan Pemuda Muhammadiyah dengan Surat Instruksi No.4.⁴³ Jadi fakta historis menyatakan bahwa IPM tidak dilahirkan oleh Muhammadiyah, tetapi dilahirkan oleh Pemuda Muhammadiyah.

Berdirinya IPM tahun 1961 sebenarnya merupakan keniscayaan sejarah yang tinggal menunggu waktu saja. Proses ini di internal Muhammadiyah melalui pergumulan yang panjang, yang dimulai dari prakarsa PP Pemuda Muhammadiyah dalam Konferensinya di Garut tahun 1958, kemudian dilanjutkan dalam Muktamarnya di Yogyakarta tahun 1960, lalu membuahkan komitmen dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan akhirnya berdirilah atau dilahirkanlah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Semangat dasarnya agar ada wadah khusus yang membina pelajar yang siap untuk menjadi pelopor, pelangsong, penyempurna perjuangan Muhammadiyah.⁴⁴ Kemudian, baru pada tanggal 4 februari 1962 peraturan berdirinya IPM disahkan oleh PP Muhammadiyah.⁴⁵

40 Dasar-Dasar Gerakan Ikatan Remaja Muhammadiyah...,

41 Napak Tilas Ikatan Remaja Muhammadiyah Panduan Muktamar IRM...,

42 Hasil Wawancara Untung Cahyono kepada Warsimah Istri Muh Wirsan Hasan dan Siti Hadiroh Ahmad (Adik Kandung Moh. Djazman) Salah Satu Ketua PP Aisyiyah periode 2005-2010 (senin, 25 juli 2005), dalam Untung Cahyono, "Angkatan Muda Muhammadiyah...",

43 Untung Cahyono, "Angkatan Muda Muhammadiyah...",

44 Haedar Nashir, "IPM Gerakan Ideologis"..., 5.

45 Agung Danarta, "Dinamika IPM dari Masa ke Masa".

Dari pergumulan sejarah yang penuh tarik-menarik itu sesungguhnya IPM lahir. sehingga gerakan organisasi otonom yang membina komunitas pelajar ini sesungguhnya sejak kelahirannya memiliki jiwa dan karakter yang bersifat ideologis, bukan sekadar organisasi pelajar biasa yang bersifat profesional atau teknis organisatoris. IPM lahir dalam dinamika ideologi yang sarat perjuangan, termasuk untuk meneguhkan kekuatan dan eksistensi Muhammadiyah agar memiliki organisasi pelajar milik sendiri dan tidak menggantungkan pada organisasi lain. Lebih-lebih setelah organisasi Islam yang lain keluar dari komitmen awal Masyumi dan Panca Cita, yang bergerak dalam ranah dan kepentingan sendiri. Dengan tetap menyadari dan berkomitmen untuk memelihara ukhuwah dengan seluruh kekuatan Islam lainnya, Muhammadiyah akhirnya berketetapan hati mendirikan Ikatan Pelajar Muhammadiyah.⁴⁶ Konteks sosial politik pada 18 Juli 1961 adalah sedang kerasnya pertarungan ideologis antara Islam dan komunis. Dimana IPM berada dalam epistem sosial yang ditandai dengan pertarungan ideologis terutama NASAKOM di akhir Orde Lama. Untuk menggarap basis-basis di berbagai kelompok masyarakat, komunis membentuk organ-organ yang dikhususkan untuk satu kelompok tertentu. Demikianlah, demi menghadang kampanye massif komunis di kalangan pelajar, maka dibentuklah IPM.⁴⁷

Dalam *Catatan Pribadi* Luthfi Muqoddas keharusan pendirian IPM dikarenakan beberapa alasan. *Pertama*, disadari bahwa potensi pelajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah cukup besar, tetap secara khusus belum ada kegiatan untuk menampungnya secara terstruktur dan terorganisir di Muhammadiyah. *Kedua*, banyak pelajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah tertarik mengikuti organisasi pelajar seperti Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU). Pada waktu itu PII memang sangat aktif dan dinamis dengan

⁴⁶ Haedar Nashir, "IPM Gerakan Ideologis" ..., 5.

⁴⁷ Ahmad Imam Mujadid Rais, "Pelajar Berkarya Untuk Bangsa: Kinerja Dan Prestasi IPM" dalam *Manifesto Gerakan Perlawanan Pelajar* (Yogyakarta: PPIPM, 2011).

berbagai pelatihan bagi pelajar dan menawarkan kegiatan yang menarik dan menampung jiwa remaja. Ditambah dalam PII juga tidak dibatasi interaksi antara pelajar putra dan pelajar putri, sedang di Muhammadiyah sesuai dengan putusan Tarjih ada batasannya. *Ketiga*, membentengi pelajar Muhammadiyah dari tarikan komunis dan yang kemudian muncul Nasakom di bidang politik. Di samping itu juga membentengi pelajar Muhammadiyah dari pengaruh-pengaruh adat yang dirasakan tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti *klenik*. *Keempat*, timbul pula pertanyaan tentang batasan usia pemuda untuk Pemuda Muhammadiyah/ Nasyatul Aisyiyah, apakah berlaku untuk mereka yang masih kelas 1-2 SLTP, karena HW dan PM terbesar berbasis di Wilayah. *Kelima*, ada kecemasan di kalangan pemuda, bahwa banyak pelajar Muhammadiyah baik yang di sekolah Muhammadiyah dan putra-putri keluarga Muhammadiyah yang mengikuti pendidikan di luar sekolah Muhammadiyah ditarik menjadi anggota kader organisasi lain. Karena sebab itu, Muhammadiyah bisa kehilangan kader-kader terbaiknya. Sebagian pelajar sekolah Muhammadiyah dan putra-putri warga Muhammadiyah yang tidak masuk HW juga kurang *sreg* masuk organisasi Pemuda Muhammadiyah / NA karena rentang usia yang lebar.⁴⁸

C. Konsolidasi Ideologis IPM (1961-1969)

Eksistensi IPM sebagai organisasi misi Muhammadiyah di kalangan pelajar memiliki fungsi sebagai pelopor, pelangsup, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah.⁴⁹ IPM memiliki karakter ideologis yang kuat, di saat Muhammadiyah tahun 1960-an sedang menghadapi persoalan ideologi yang sangat berat. Situasi yang menyebabkan terjadinya polarisasi kekuatan. Bahwa, tidak hanya persaingan kekuasaan pada lembaga pemerintahan, tetapi pada kehidupan bermasyarakat.⁵⁰ Di masa ini, IPM terlahir di masa

48 *Catatan Pribadi* Luthfi Muqoddas, tahun 2010.

49 Amalia Destika, *Ikatan Pelajar Muhammadiyah 1961-1998* (Yogyakarta: UGM, 2010).

50 Pada tahun 1950-an dan 1960-an Pancasila menjadi senjata ideologis, yang dipakai untuk melawan kaum Islamis militan yang dianggap tidak toleran dalam hal agama. Emmerson, Donald K. (ed.), *Indonesia*

pertentangan ideologis yang sangat kuat dalam kehidupan sosial-politik Indonesia.⁵¹ Dalam situasi itu IPM lahir dan berproses membentuk identitas dirinya. Gerakan IPM lebih terfokus pada upaya konsolidasi dan menggalang kesatuan pelajar Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia.⁵²

Tantangan IPM di masa awal, justru berasal dari dalam Muhammadiyah sendiri. Adalah tidak semua unsur Pemuda Muhammadiyah dan Muhammadiyah menerima pendirian IPM. Ada pemikiran dari Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PW PM) merasa kehilangan kader dari kelompok pelajar. Demikian juga, pengelola amal usaha pendidikan Muhammadiyah (sekolah-sekolah). Ada yang mendorong anak didiknya membentuk IPM, namun ada juga yang acuh. Ada yang beralasan bahwa tidak perlu ada IPM, karena cukup sudah ada Pemuda Muhammadiyah dan NA (Nasyiatul Aisyiyah). Selain masalah itu, kecenderungan beragama serba fikih di internal juga kuat juga mempengaruhi pandangan tidak pentingnya keberadaan IPM. Hal ini ditunjukkan pada putusan tarjih yang masa itu menginstruksikan untuk memisahkan organisasi perempuan dan laki-laki. Jika ada perempuan dan laki-laki dalam forum yang sama, maka harus memakai pembatas atau hijab. Apalagi NU juga membuat organisasi pelajar yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, (IPNU-IPPNU). Sehingga ada organisasi anak muda yang anggotanya terdiri dari laki-laki dan perempuan di Muhammadiyah masih aneh dan tabu.⁵³

Menjadi hal yang wajar, jika IPM di masa awal belum

Beyond Soeharto; Negara, Ekonomi dan Masyarakat. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 67. Embrio gagasan menjadikan Pancasila sebagai ideologi muncul tahun 1950-an. Saat itu terjadi konflik antara pemerintah pusat dan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Namun, proses penafsiran Pancasila sebagai ideologi baru berkembang pada masa Orde Baru. Dalam periode ini, Pancasila menjelma menjadi ideologi negara dan menjadikan slogan melalui proses indoktrinasi P4 disusul lahirnya peringatan "hari kesaktian Pancasila" (permulaan Orde Baru= 1 Oktober) Onghokham. "Pancasila Sebagai Kontrak Sosial". *Kompas*. Kamis, 6 Desember 2001.

51 Haedar Nashir, "IPM Gerakan Ideologis" ..., 4.

52 Pimpinan Pusat IPM, *Tanfidz Konpirwil*, (Yogyakarta: PPIPM, 2000).

53 Amalia Destika, *Ikatan Pelajar Muhammadiyah ...*,

melakukan gerakan yang massif. Selama ini IPM tidak ada kegiatan yang menonjol, IPM baru bisa mengadakan pengajian di sekolah-sekolah Muhammadiyah dan di komunitas pelajar. Masa ini kepengurusan IPM masih seputar membentuk pengurus pengajian. Memang ada sekolah di Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang yang telah membentuk IPM atas dukungan guru-guru mereka, akan tetapi pembentukkan pengurus daerah dan cabang belum begitu masif. Meskipun AD/ART sudah tersusun, tetapi masih ditetapkan di pimpinan pusat, belum disahkan dalam Muktamar dan baru dibentuk dalam dua kantor di Yogyakarta dan Jakarta, berjalan merangkak dan tertatih.⁵⁴ Hal-hal seperti cara berorganisasi, kematangan usia, dan pengalaman mengelola organisasi secara nasional masih kurang. Namun masalah-masalah yang dihadapi sebagai organisasi otonom Muhammadiyah yang baru cukup banyak, sehingga perkembangan dari tahun ke tahun masih sangat lambat. Konsep kaderisasi IPM pun belum jelas, serta belum sistematis. Meskipun demikian, arahnya jelas yaitu menampung kegiatan para pelajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah agar kelak menjadi kader Muhammadiyah.⁵⁵

Setelah sekitar 5 (lima) tahun, IPM baru dapat melaksanakan Muktamar I pada 18-24 November 1966 di Jakarta. Di tahun yang sama, SUPERSEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret) dikeluarkan Soekarno, maka 12 Maret 1966, Soeharto membubarkan PKI (Partai Komunis Indonesia).⁵⁶ Pada Muktamar I IPM mulai membicarakan ideologi sebagai identitas gerakan IPM, seperti: Muqadimah Anggaran Dasar sekaligus Anggaran Dasarnya, dan Khitah Perjuangan

54 Lutfi Muqoddas, dalam Amalia Destika, *Ikatan Pelajar Muhammadiyah ...*,

55 Waktu itu, aktivitas IPM masih terfokus ada pendirian pimpinan-pimpinan wilayah di seluruh Indonesia, untuk mempertahankan eksistensi. Pedoman organisasi juga masih berdasarkan pada Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sekitar tahun 1961-1966, Pimpinan Pusat IPM masih di bawah pengawasan PP. Pemuda Muhammadiyah. Simbol-simbol organisasi IPM belum seperti lambang, bendera, dan lain-lain juga belum ada. Amalia Destika, *Ikatan Pelajar Muhammadiyah...*,

56 Oey Hong Lee, *Indonesia Facing*, 36.

IPM. Dalam Mukhtamar tersebut yang menetapkan Ketua Umum Moh. Wirsyam Hasan.⁵⁷ Pasca Mukhtamar, dua tahun berselang eksistensi IPM pernah digoyang dalam Tanwir Muhammadiyah tanggal 19-21 September 1968. Akan tetapi, karena argumentasi PP. IPM dan dukungan AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah) lain, akhirnya eksistensi IPM tetap dapat dipertahankan.⁵⁸

Setelah menemukan identitasnya, di era ini para aktivis IPM ikut terlibat dalam mengantisipasi perkembangan politik Indonesia. Banyak aktivis IPM yang tergabung dalam KAPPI (Kesatuan Aksi Pelajar Pemuda Indonesia). Satu instruksi yang dikeluarkan Pimpinan Pusat IPM berkaitan dengan KAPPI ditunjukkan kepada daerah-daerah agar sebagai pemantapan eksistensi IPM. Realisasi selanjutnya merupakan serangkaian kegiatan penyusunan barisan yang sifatnya masih kuantitatif, sekaligus menjawab tantangan akan keadaan kritis yang menuntut peranan angkatan muda sebagai kekuatan moral untuk mendobrak kebobrokan dan penyelewengan dalam dunia politik, ekonomi dan akhlak.⁵⁹

Sampai pada Mukhtamar II IPM 27-30 Agustus 1969 di Palembang persoalan ideologi masih menjadi agenda utama. Selain menghasilkan kepemimpinan baru, yakni Muhsin Sulaiman sebagai Ketua Umum periode 1969-1972, Mukhtamar II ini menyempurnakan 'Khittah Perjuangan', 'Tafsir Khittah Perjuangan', 'Identitas', 'Tafsir Asas dan Tujuan' IPM.⁶⁰ Setelah Mukhtamar II, IPM mulai merumuskan gagasan pendidikannya dalam "Pedoman Pokok Pendidikan Kader IPM" pada "Seminar Kader" pada tanggal 20-23 Agustus 1969 di Palembang. Sejak inilah mulai dikenal istilah "Taruna Melati" sebagai istilah pelatihan (training) perkaderan IPM, juga Mabita (Masa

⁵⁷ Di samping itu, di dalam Mukhtamar IPM II di Palembang dikeluarkan memorandum yang menyatakan bahwa ipm dari tingkat pusat sampai daerah akan tetap merupakan komponen aktif kappi masih tetap dapat menjaga kemurnian perjuangannya.

⁵⁸ Agung Danarta, "Dinamika IPM dari Masa ke Masa".

⁵⁹ Pra Saran Umum IPM tahun 1975-1978 pada Mukhtamar IPM IV periode 1972-1975 di Ujung Pandang 1975, 1.

⁶⁰ Napak Tilas Ikatan Remaja Muhammadiyah dalam Buku Materi Mukhtamar IRM

Bimbingan Anggota) yang kemudian berubah menjadi Mabica (Malam Bimbingan Calon Anggota), dan Coaching Instruktur.⁶¹

Tema ideologi masih diangkat pada Muktamar III di Surabaya 1972. Muktamar menunjuk Abdul Shomad Karim sebagai Ketua Umum periode 1972-1975.⁶² Di forum ini IPM kembali membahas 'Tafsir Identitas IPM', 'Tafsir Khittah Perjuangan IPM', 'Tafsir Asas dan Tujuan IPM' serta 'Teori Perjuangan IPM'. Kemudian setahun berselang diadakan Konpiwil pada 1973 IPM merumuskan gagasan pendidikannya dalam Pedoman Perkaderan IPM sebagai pengganti pedoman hasil pada Muktamar II Palembang. Orientasi gerakan IPM diarahkan pada "memantapkan IPM sebagai organisasi dakwah dan partisipasi dalam pembangunan nasional".⁶³ Dilihat dari tema ini, nampaknya IPM secara resmi mendukung program pembangunan. Usaha yang dilakukan dengan cara membina generasi muda dengan program kegiatan pelajar yang positif di bidang peningkatan prestasi studi, keolahragaan, kesenian, kepramukaan, dan lain sebagainya.⁶⁴

Pada fase ideologis ini, IPM mulai menentukan lambang dan semboyan gerakannya. Di masa awal, Pimpinan Pusat IPM lebih memperhatikan bagaimana mengembangkan organisasi. Wajar jika IPM belum memikirkan masalah lambang. Walaupun pada perkembangannya, IPM menyadari bahwa hal itu penting sebagai simbol organisasi. Pada tahun 1964, IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) didirikan dan membuat lambang, maka IPM pun tergerak untuk membuat lambang. Akan tetapi ada kendala dana jika membuat kompetisi lambang antar sekolah. Oleh karena itu, lambang tersebut dibuat berdasarkan pembicaraan informil beberapa pengurus pasca pengajian Ahad pagi di PP. Muhammadiyah

61 Pada periode ini juga berhasil diciptakan lagu Mars IPM dan Himne IPM sebagai lagu resmi IPM. Lihat Surat Edaran Khusus tentang Muktamar III IPM nomor; A.4/PP.IPM-031/1972 tentang Pedoman Perkaderan 1969

62 Statemen konpiwil IPM tahun 1973 di Jakarta.

63 Keputusan-Keputusan Muktamar ke-3 Ikatan Pelajar Muhammadiyah tanggal 20-26 agustus 1972.

64 *Ibid*, 1.

Yogyakarta, yaitu Lutfi Muqoddas, Helmi Farid Ma'rif, Ziyad Masykur, Ismet Wibowo, dan Muflikh. Helmi Farid Ma'rif diberi tugas untuk menggambar lambang tersebut.⁶⁵

Karena IMM merupakan organisasi baru yang juga organisasi otonom Muhammadiyah, maka pengurus IPM merujuk pada "kakaknya" yang bentuknya sedikit diedit yang disepakati sebagai gambar pena dan komponen di dalamnya disesuaikan dengan IPM, seperti "kuntum melati" diganti menjadi buku sebagai ikon pelajar, yang digambar didalam lambang muhammadiyah, menggambarkan sebagai organisasi otonom Muhammadiyah. Kemudian slogan "*Fastabiqul Khoirot*" beberapa orang tersebut sepakat untuk juga menggantinya, atas usulan Ziyad Masykur untuk menggantinya dengan "*Nuun wal Qolami wa maa Yashthurun*". Akhirnya bisa disimpulkan makna dari lambang tersebut adalah, pena berarti alat yang digunakan untuk menulis, Al-Quran merupakan kitab suci ummat Islam untuk digali dan dipelajari, serta matahari yang bercahaya memberikan sinar dan kehidupan IPM. Dipilih warna kuning dan hijau sebagai warna lambang karena kuning, sebagai *value* emas, bahwa IPM itu dinamis, ke depan, dan hijau sebagai lambang keteduhan dan juga menandakan Muhammadiyah. Adapun tulisan IPM berwarna merah karena agar merah tidak selalu dihubungkan dengan PKI.⁶⁶

Pada fase ideologis inilah, gerakan IPM melalui training-training kepada pelajar ditanamkan identitas "kader dakwah" dengan menggunakan doktrin (paradigma) yang disebut dengan "Panca Kesadaran IPM": 1) kesadaran beragama, dengan menanamkan jiwa tauhid dan menerapkan muamalah; 2) kesadaran berilmu pengetahuan dengan menanamkan kesadaran belajar dan memperluas ilmu; 3) kesadaran beramal dengan memadukan akidah dan ilmiah

⁶⁵ Amalia Destika, *Ikatan Pelajar Muhammadiyah 1961-1998...*,

⁶⁶ Ketika itu beberapa pengurus tersebut sedang berdiri di depan PP Muhammadiyah pada Ahad pagi, sambil melanjutkan diskusi tersebut, yang akhirnya disetujui oleh pengurus yang lain. Hasil Wawancara dengan Lutfi Muqoddas, dalam Amalia Destika, *Ikatan Pelajar Muhammadiyah ...*,

yang harmonis; 4) kesadaran bermasyarakat dan bernegara; dan 5) kesadaran berorganisasi dalam arti memiliki kesadaran untuk mencapai maksud dan tujuan mempunyai kedisiplinan, kedinamisan, dan tanggungjawab yang tinggi serta rasa *ukhuwah islamiyah*.⁶⁷

Sekali lagi, konteks sosial politik pada 18 Juli 1961 adalah sedang kerasnya pertarungan ideologis antara Islam dan komunis. Untuk menggarap basis-basis di berbagai kelompok masyarakat, komunis membentuk organ-organ yang dikhususkan untuk satu kelompok tertentu. Demikianlah, demi menhadang kampanye massif komunis di kalangan pelajar, maka dibentuklah IPM. Maka ketika komunis runtuh dengan dibubarkannya PKI saat itu, maka apakah itu merupakan buah kinerja dan prestasi IPM? Mungkin kita bisa menjawab, bahwa saat itu IPM bukan semata sebagai factor determinan. Karena masih ada elemen masyarakat lainnya yang bersama-sama berjuang. Namun, bila merujuk pada visi dan misi IPM serta khittah perjuangan IPM, maka kita akan menyaksikan peran signifikan IPM dalam perjuangan saat itu. Satu konsep penting yang terumuskan dalam khittah perjuangan IPM adalah "Tauhid", yang secara substansi tidak akan bertemu dengan konsep komunis yang menafikan kekuatan Tuhan. Inilah yang menurut hemat penulis peran penting IPM dalam memperkuat aqidah basisnya melalui training-training, pelatihan kepemimpinan dan juga pengajian sistem jamaah.⁶⁸

Tauhid inilah yang sejatinya menjadi kekuatan dan motivasi pejuang-pejuang IPM. Tidak mengenal takut, tidak kenal kata menyerah. Karena mereka yakin dengan nilai yang diperjuangkan dan mereka yakin karena benar. Kekuatan ini dielaborasi lebih jauh dalam konsep "Tri tertib" di masa itu, tertib ibadah, tertib belajar dan tertib organisasi. Satu konsep yang terintegrasi sebagaimana konsep tauhid sebagai

67 Asnawi Syarbini, "Metode dan Sistem Perkaderan IPM" Sebuah kertas Kerja disampaikan pada seminar kader dan Konpiwil IPM se-Indonesia tanggal 22-25 Desember 1976 di Jakarta., 5. Lihat Hasil Seminar Palembang 1969

68 Ahmad Imam Mujadid Rais, "Pelajar Berkarya Untuk Bangsa...",

konsep yang utuh, yang satu.⁶⁹ Perkaderan IPM waktu itu, diarahkan pada bagaimana membina mental dan kesadaran beragama para pelajar, supaya terlindungi dari pengaruh ideologi komunis. Watak dasar IPM sebagai organisasi kader Muhammadiyah di kalangan pelajar waktu itu, memiliki karakter ideologis yang kuat.

69 *Ibid.*

Pena 4

DINAMIKA IPM DI ERA ORDE BARU (1966-1998)

Bab IV akan menelaah dinamika paradigma dalam IPM mulai dari di masa kelahiran pada masa Orde Baru (1966–1998). Di era ini, IPM mengalami dua fase, yaitu fase *developmentalis* (1969-1992) dan fase *pragmatis-inklusif* (1992-1998). Fase pertama adalah fase dimana IPM berdinamika dalam era orde baru tahap pertama, yakni (1966-1988) di saat pemerintah bersikap represif terhadap umat Islam. Sedangkan, fase kedua IPM berada di masa Orde Baru tahap kedua yang lebih akomodatif terhadap Islam, yakni (1989-1998).

A. Corak *Developmentalis* (1969-1992)

Pada dekade pertama rezim Orde Baru (1966-1988) corak gerakan IPM dapat disebut atau cenderung beraliran *developmentalis*.¹ Dengan meminjam analisis Foucauldian

¹ *Dua Dekade Pertama Rezim Orde Baru (1966-1988)* Orde Baru adalah rezim pemerintahan Indonesia yang dimulai dengan peristiwa simbolik penyerahan Surat Perintah Sebelas Maret (dikenal dengan Supersemar, 1966) dari Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia, kepada Mayor Jenderal Soeharto yang waktu itu memimpin Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (dikenal dengan Kostrad) untuk mengatasi keamanan, stabilitas pemerintahan dan revolusi, serta menjamin keselamatan personal dan otoritas [Soekarno] di tengah situasi tidak stabil pasca-peristiwa berdarah Gerakan 30 September (G30S). G30S merupakan kolaborasi antara kelompok perwira sayap kiri di lingkungan tentara, dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung,

Yudi Latif dalam *"Intelegensia Muslim dan Kuasa"*, maka posisi IPM di tengah dinamika bangsa Indonesia saat itu berada pada fase generasi ke-4 dan ke-5 sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

Fase Formatif	Periode	Wacana Intelektual
Generasi 1	1900an – 1910an	Wacana Marxisme dan Sosialisme, akhirnya muncul tawarab Sosialisme Islam
Generasi 2	1920an-1930an	Perpecahan ideo-politik, kemudian muncul wacana kemerdekaan indonesia, yaitu "Nasionalisme Islam" dan "Negara Islam".
Generasi 3	1940an-1950an	"revolusi kemerdekaan" dan "demokrasi konstitusional" menjadi tema intelaktual, sehingga muncul usaha mengawinkan "keislaman dan keidonesiaan".
Generasi 4	1050an-1960an	Konflik ideo-politik era demokrasi dipimpin serta pro dan anti demokrasi. Muncul ideologi pembaruan, sehingga melahirkan ideologi Islam.
Generasi 5	1970an-1980an	Rezim represif-developpme Orde Baru hegemonik di ruang publik. Sehingga muncul ideologi Islam antitesis, dari paham "akomodatif" dan "rejeksionisme".
Generasi 6	1980an-1990an	Modernisasi akhir Orde Baru dan globalisasi postmodern, keterbukaan sehingga muncul "revivalisme Islam" dan "liberalisme Islam"

Tabel 1. Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20

dan Partai Komunis Indonesia (PKI), diketuai oleh D.N. Aidit, yang mencoba melakukan kudeta tidak langsung terhadap pemerintahan yang sah dengan menculik dan kemudian membunuh enam jenderal dan satu perwira menengah, tetapi dapat digagalkan oleh Mayor Jenderal Soeharto dan pasukannya. Penjelasan lebih rinci tentang G30S dan Supersemar dan penilaian pengamat asing terhadap kedua peristiwa itu lihat antara lain Oey Hong Lee, *Indonesia Facing the 1980s* (Hull, England: Europress, 1979), 25-37; Adam Schwarz, *A Nation in Waiting, Indonesia in the 1990s* (St Leonards, Australia: Allen & Unwin, 1994), 19-20, 24-26.

Setelah kelahiran 1961, IPM berada di generasi keempat dan generasi kelima yang menunjukkan bahwa IPM berada di situasi bangsa yang dipimpin oleh rezim represif-developmental Orde Baru yang hegemonik di ruang publik. Sebagaimana Robert W. Hefner menjelaskan bahwa pada masa itu bangsa Indonesia menjadikan pembangunan sebagai panglima. Jika Indonesia ingin maju, maka gegap gempita persaingan ideologi dan politik harus segera di akhiri.² Karena itu, rezim Orde Baru Soeharto melakukan kebijakan penyeragaman ideologi dengan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal.

1. IPM dan Asas Tunggal

Sekitar pertengahan 1970-1980 rezim pemerintahan Soeharto semakin disibukkan untuk mengawasi batas-batas wacana ideologi.³ Sejak tahun 1975, Soeharto mengajak rakyat Indonesia untuk menjiwai Pancasila sebagai petunjuk moral (*moral code*). Ide tentang penyeragaman asas bagi segenap organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan itu, pertama kali disampaikan oleh Soeharto dalam pidato kenegaraan tahunan pada tanggal 16 Agustus 1982. Setelah melalui berbagai proses, khusus untuk organisasi kemasyarakatan akhirnya diwujudkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang keormasan dan diundangkan melalui Lembaran Negara Nomor 2638 tanggal 17 Juni 1985.⁴ Salah satu pasal dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap organisasi kemasyarakatan agar mencantumkan Pancasila sebagai asas organisasi dan tidak ada asas lain, selain itu. Setiap organisasi kemasyarakatan ketika itu diberi batas waktu hingga 17 Juni 1987 untuk menyesuaikan asasnya

2 Robert W. Hefner, *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi Indonesia* (Jakarta: ISAI dan The Asia Foundation, 2001).

3 Bouchier, David. *Pancasila Versi Orde baru: Asal Muasal Negara Organisasi (Integralistik)*. (Yogyakarta: Aditya Media dan Pusat Studi Pancasila UGM. 2007), 337.

4 M.Rusli Karim. *HMI MPO dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia*. (Bandung: Mizan, 1997), 127.

dan mendaftarkan diri ke Departemen Dalam Negeri.⁵

Dengan ketetapan MPR No. II/1968 mengklaim bahwa *Ekaprasetia Pancakarsa*⁶ atau lebih dikenal dengan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) disusun bukan sebagai tafsir atas pancasila, melainkan petunjuk perilaku (*code of practise*) kehidupan sosial dan politik bagi setiap warga, pejabat negara dan organisasi sosial dan lembaga negara di seluruh Indonesia.⁷ Ini namanya monopoli interpretasi Pancasila oleh negara.⁸

Melalui program 'penataran P4', program 'mata pelajaran PMP', dan program 'asas tunggal', terjadi proses apa yang dalam istilah Gramsci disebut hegemoni negara terhadap bangsa. Hegemoni menjadi lengkap dengan 'pemberian gelar bapak pembangunan' kepada Soeharto⁹ dan penerapan 'pendekatan keamanan' kepada para pembangkang.¹⁰ Dalam hegemoni, sebagai determinisme ideologi, simbolisasi diperlukan, termasuk simbolisasi penguatan otoritas melalui gelar 'bapak pembangunan'. Dengan memproyeksikan diri sebagai bapak pembangunan, Soeharto telah mengembangkan suatu

-
- 5 Djayadi Hanan. *Gerakan Pelajar Islam Indonesia di Bawah Bayang-Bayang Negara; Studi Kasus Pelajar Islam Indonesia 1980-1997*. (Yogyakarta: PB PII& UII Press. 2006), 8-9.
 - 6 Sebuah istilah bahasa Sansekerta yang diterjemahkan sebagai "Sumpah Tunggal dalam memenuhi Lima Aspirasi". Dalam Yayasan Proklamasi 1978..., 212.
 - 7 Douglas E. Ramage, *Politics in Indonesia...*, 346-347.
 - 8 Tujuh tahun sebelum program 'asas tunggal' bagi organisasi non-politik, Orde Baru telah secara sistematis melakukan indoktrinasi ideologi Pancasila melalui program 'penataran P4 dengan legitimasi konstitusional melalui sidang umum MPR, Maret 1978. Lalu mata pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) dimasukkan dalam kurikulum pendidikan'. Sejak Maret 1978, tentara, guru, politisi, dokter, pegawai negeri, bahkan mahasiswa yang belajar di luar negeri dituntut mengikuti penataran P4 untuk memahami Pancasila *a la* Orde Baru. Lihat Michael van Langenberg, "The New Order State: Language, Ideology, Hegemony" dalam Arief Budiman (ed.), *State and Civil Society...*, 121-149; Douglas E. Ramage, *Politics in Indonesia...*, 31-32; dan Adam Schwarz, *A Nation in Waiting...*, 36.
 - 9 Joseph A. Camilleri, *States, Markets and Civil Society...*, 380.
 - 10 Michael van Langenberg, "The New Order State"..., 132.

sistem patrimonial. Dalam hegemoni patrimonial, dituntut kontrol, termasuk 'pendekatan keamanan' kepada para pembangkang. Salah satu model pendekatan keamanan yang diterapkan untuk menghadapi pembangkang adalah pelabelan mereka sebagai 'anti-Pancasila'.¹¹

Dalam pelaksanaan program P4 Soeharto membentuk, Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) sejak Maret 1979. Tanggungjawab indoktrinasi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masyarakat pada umumnya berada di tangan BP7. Sebagian lain berada di tangan Menteri Penerangan dan Seksi Urusan Sosial Budaya Menteri Dalam Negeri. Adapun tugas untuk mem-Pancasila-kan mahasiswa dan pelajar di tangan Departemen Pendidikan.¹² Maka tidak lama setelah Daoed Joesoef mengambil alih Menteri Pendidikan pada maret 1978, Darji diangkat Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Tanggungjawab untuk Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang dapat disejajarkan dengan P4 bagi siswa sekolah yang ditangani oleh unit utama pengembangan kurikulum departemen, dilimpahkan hanya pada Darji. Buku teks yang dihasilkan tim Darji menjadi teks standar yang diwajibkan di semua sekolah.¹³

Sejak Agustus 1982 Soeharto mengumumkan bahwa "semua kekuatan politik harus menerima ideologi Pancasila sebagai asas tunggal".¹⁴ Semakin pemerintah menekankan keharusan bagi seluruh organisasi menerima

11 Penataan sosial, rezim Orde Baru melakukan proses produksi dan reproduksi sosial melalui: (1) penguasaan wacana yang menyangkut tema modernisasi, terutama pembangunan ekonomi; dan (2) penciptaan legalisme-konstitusionalisme atau pembuatan sub-wacana dan sub-praksis politik dengan acuan konstitusional. *Ibid*, 124, 130-131.

12 Antara april 1977 dan Juli 1978, Departemen Pendidikan mengadakan sejumlah revisi terhadap kurikulum universitas, yang menyebabkan diperkenalkannya kuliah Pancasila sebagai bagian dari kurikulum dasar yang diwajibkan di semua lembaga pendidikan tinggi

13 *Ibid*, 354.

14 *Ibid*, 374.

Pancasila sebagai satu-satunya asas, semakin besar pula tekanan yang dihadapi para ideolog untuk menentukan bentuk ideologi Pancasila.¹⁵ Penerapan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua Ormas dan Orpol ditanggapi dalam empat sikap oleh umat Islam. Pertama, menerima tanpa banyak persoalan, yaitu NU dan kelompok-kelompok lain yang memiliki hubungan dengan pemerintah atau partai pemerintah dengan alasan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Kedua, menerima tetapi menunggu undang-undang formal yang dibuat pemerintah, kebanyakan ormas Islam mengambil sikap kedua ini, termasuk Muhammadiyah. Ketiga, bersikap apatis, yaitu mereka yang pendidikan rendah dan selalu mendukung kehendak pemerintah. Keempat, menolak sama sekali kebijakan ini, yaitu HMI MPO dan PII (Pelajar Islam Indonesia).¹⁶ Posisi IPM berada pada pilihan kedua, yakni senafas dengan sikap Muhammadiyah.

Keberatan umat Islam terhadap pemberlakuan asas tunggal Pancasila terkait erat dengan beberapa pokok masalah. Pertama, menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dianggap bertentangan dengan agama (Islam) oleh sejumlah tokoh Islam. Tokoh yang mendukung argumen ini diantaranya adalah KH. Malik Ahmad (Muhammadiyah), KH. A.R. Fachruddin (Muhammadiyah), KH. Noer Ali (BKSP), Syafruddin Prawiranegara, Abdul Qadir Djaelani, Moh. Natsir.¹⁷ Kedua, menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal berarti bertentangan dengan UUD 1945, terutama pasal 29. Argumen ini antara lain dikemukakan oleh KH. Noer Ali dan Syafrudin Parawiranegara. Ketiga, konsep asas itu bersifat *a-historis* dan berarti mengkhianati perjuangan para tokoh pendiri

15 Sosronegoro, Herqutanto, dll. *Beberapa Ideologi dan Implementasinya dalam Kehidupan Kenegaraan (Bidang Politik dan Pemerintah)*. (Yogyakarta: Liberty. 1984), hlm. 93-123.

16 M. Rusli Karim, *HMI MPO dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia*. (Bandung: Mizan 1997), 127.

17 Deliar Noer. *Islam, Pancasila, dan Asas Tunggal*. (Jakarta: yayasan Pengkhidmatan. 1983).

bangsa.¹⁸ Tokoh-tokoh Islam yang keberatan ini umumnya menyepakati dan menerima Pancasila yang sesungguhnya adalah sebagai dasar negara, bukan sebagai asas.¹⁹

Bagi Muhammadiyah, jalan tengahnya adalah menggunakan "Falsafah Helm" AR Fakhruddin dalam memandang "asas tunggal".²⁰ Selanjutnya secara resmi Sidang Tanwir Muhammadiyah pada Mei 1983, merekomendasikan beberapa hal: Pertama, Muhammadiyah setuju memasukan Pancasila dalam Anggaran Dasar tanpa mengubah dasar Islam yang sudah ada. Kedua, sejak asas tunggal Pancasila menjadi isu nasional, maka yang membahas tingkat nasional adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Untuk itu, pimpinan daerah tidak diperkenankan membuat opini atau sikap sendiri terhadap hal ini. Ketiga, pembahasan selanjutnya akan dilakukan dalam forum Muktamar ke-41.²¹

Berdasarkan hasil Muktamar Muhammadiyah ke-41 tanggal 7-11 Desember 1985, Muhammadiyah memutuskan untuk mengganti asas pergerakannya dengan Pancasila, akan tetapi kata-kata "berakidah Islam" sebagai ciri khas identitas Muhammadiyah masih akan termaktub dalam Anggaran Dasar setelah penyesuaian dengan UU No. 8 tahun 1985. Keputusan berdasarkan pertimbangan bahwa keberadaan Muhammadiyah beserta semua amal usahanya masih sangat diperlukan

18 Hal ini dikemukakan Abdul Qadir Djaelani dalam Noor M.D. *Pancasila dalam Pandangan Tokoh-Tokoh Islam*. (Bogor, 1990).

19 Djayadi Hanan. *Gerakan Pelajar Islam di Barwah Bayang-Bayang Negara: Studi Kasus Pelajar Islam Indonesia Tahun 1980-1997*. (Yogyakarta: UII Press. 2006), hlm 132-133.

20 Ibarat berkendara di jalur helm, maka harus memakai helm , karena aturannya memang demikian. Namun, dengan menggunakan helm tidak akan mengubah hakikat diri sendiri Andi Wahyudi. Muhammadiyah dalam Gonjang-Ganjing Politik: Telaah Kepemimpinan Muhammadiyah Era 1990-an. (Yogyakarta: Media Pressindo. 1999), hlm 73-74.

21 Lukman Harun. *Muhammadiyah dan Asas Tunggal Pancasila*, sebagaimana dikutip dalam Andi Wahyudi. *Muhammadiyah dalam Gonjang-Ganjing Politik: Telaah Kepemimpinan Muhammadiyah Era 1990-an*. (Yogyakarta: Media Pressindo. 1999), hlm. 74.

dalam di pembangunan dengan semakin meningkatnya pergeseran nilai dan teknologi modern, demi tercapainya kehidupan bangsa yang diridhoi Allah.²² Sebagai salah satu organisasi otonom Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah-pun mengganti asas pergerakannya yang semula Islam menjadi Pancasila berdasar keputusan Muktamar IPM ke-7 di Cirebon.²³ Sejak itu, Pancasila secara resmi menjadi asas organisasi dan tercantum dalam Anggaran Dasar IPM.

2. Paradigma Tri Tertib: (Ibadah, Belajar dan Organisasi)

Kebijakan pemerintah Soeharto tentang asas tunggal dan pembangunan mempengaruhi wacana yang tumbuh di lingkungan IPM. Hal ini dapat dilihat ketika Muktamar V IPM pada 11-17 Juli 1979 mengangkat tema "generasi muda agamis dan pelajar modal pembangunan bangsa". Tema memang terlihat ideologis, namu ideologi developmentalis. Muktamar yang menetapkan Asnawi Syarbini sebagai Ketua Umum ini,²⁴ menetapkan beberapa hal antara lain: fungsi IPM sebagai organisasi ekstra dan intra sekolah; IPM sebagai organisasi pembina dan pengembangan pelajar yang agamis dan terpelajar sebagai modal pembangunan bangsa; dan partisipasi IPM dalam pembangunan nasional. Karena itu arah gerak IPM diarahkan untuk mendukung program-program pembinaan dan pembangunan generasi muda. Misalnya IPM meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan dan peredaran film serta media massa lain yang memuat unsur pornografi demi menjaga moralitas generasi muda. Orientasi program IPM adalah dakwah,

²² Djarnawi Hadikusuma. *Muhammadiyah dari Muktamar ke Muktamar. Kedaulatan Rakyat*. Selasa Pon 11 Desember 1990.

²³ Laporan Pertanggungjawaban PP IPM Perode 1983-1986 pada Muktamar VII IPM di Cirebon 26-30 April 1986.

²⁴ Panitia Muktamar ke-10 IRM "Tinta Emas: Goresan Sejarah dan Prestasi" *Panduan Konferensi Pimpinan Wilayah Ikatan Remaja Muhammadiyah Yogyakarta, 4-7 September 2001* (Yogyakarta: Mitra Komunika, 2001), 7.

studi, dan kepemimpinan.²⁵ Karena itu, dalam tubuh IPM berkembang paradigma "Tri Tertib", yakni "Tertib Ibadah, Tertib Belajar, dan tertib Organisasi"²⁶. Secara resmi pemikiran ini dapat ditemukan Tanfidz Keputusan Mukhtamar ke-6, dinyatakan bahwa:

"Target yang harus dilaksanakan PP IPM periode 1983-1986 ialah tercapainya Tri Tertib, yaitu tertib beribadah mahdho, tertib belajar, dan tertib berorganisasi. Usaha untuk menempuh Tri Tertib ini ditempuh melalui tiga tahapan, yang disebut dengan istilah pelaksanaan keputusan mukhtamar tahun pertama, kedua, dan ketiga.²⁷

Semangat ber-IPM waktu itu adalah dalam rangka berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana doktrin teologis yang diklaim sebagai ayat Muhammadiyah yakni QS. Ali Imran ayat 5. Bahwa ayat ini menjadi spirit berorganisasi dalam IPM, jadi logik ber-IPM adalah tertib berorganisasi, di samping juga tertib ibadah dan belajar.

Setelah "asas tunggal", hegemoni pemerintah kepada IPM, ketika Mukhtamar VI yang seharusnya di Purwakarta, Jawa Tengah dibatalkan karena tidak mendapat ijin pemerintah, yakni Menpora, Abdul Gaffur.²⁸ Sejak peristiwa itu nama "Ikatan Pelajar Muhammadiyah" mulai menjadi permasalahan di tingkat pusat. Akhirnya Mukhtamar VI diselenggarakan secara terbatas di Yogyakarta tanggal 30 September-2 Oktober 1983. Pada periode kepemimpinan Masyhari Makhasi dan Ismail TS Siregar ini, fokus gerakan

25 Tanfidz Keputusan Mukhtamar IPM V..., 9.

26 Paradigma "Tri Tertib" dijelaskan oleh Agus Sukaca, Ketua I PP IPM periode Khoirudin Bashory bahwa sekitar tahun 70 hingga 80-an terdapat stigma negatif yang dilekatkan kepada aktifis organisasi pelajar. Aktifis dipandang sebagai orang-orang yang suka membolos, prestasi akademik pas-pasan, pola hidup tak teratur, dan masa studinya panjang. Tak terkecuali aktifis IPM, yang kesemuanya pelajar di tingkat ranting, pelajar dan mahasiswa di tingkat cabang dan daerah, serta hampir semuanya mahasiswa di tingkat wilayah dan pusat.

27 Tanfidz Keputusan Mukhtamar IV..., 8.

28 Shodiq T. Sutaikrama. "Peta Bumi Gerakan Muhammadiyah" dalam *Muhammadiyah dalam kritik dan komentar*. (Jakarta:CV Rajawali 1986), 178-179.

IPM diarahkan pada pembinaan anggota dan konsolidasi organisasi sampai tingkat bawah. Pada periode inilah mulai dirumuskan "Sistem Perkaderan Ikatan" yang dikenal dengan "SPI Merah" yang dihasilkan melalui forum Seminar dan Lokakarya Perkaderan tahun 1985 di Ujung Pandang.²⁹

Selanjutnya, Muktamar VII tanggal 26-30 April 1986 di Cirebon, IPM membahas tema, "Memantapkan gerakan IPM dalam membangun akhlak mulia dan memupuk kreatifitas pelajar". Tujuan umum program nasional diarahkan pada terciptanya tradisi keilmuan dan kreatifitas di kalangan anggota yang dijiwai oleh akhlak mulia sehingga menjadi teladan di lingkungannya. Periode kepemimpinan 1986-1989 tidak kurang beberapa konsep dihasilkan, seperti Sistem Dakwah Pelajar yang berisi komponen: Mabica, Maperta, Pekan Dakwah, dan Latihan Da'i.

Pada periode kepemimpinan Khoiruddin Bashory ini masalah hegemoni dan sikap represif pemerintah semakin kuat. Saat itu, permasalahan nama IPM masih menjadi agenda penting. Karena belum ada "titik temu", maka berakibat pada kegagalan rencana penyelenggaraan Muktamar VIII di Medan, sehingga diganti menjadi kegiatan Muktamar Terbatas (Silaturahmi Pimpinan) di Yogyakarta tahun 1990.³⁰ Waktu itu tema "mengembangkan gerak IPM dalam membina akhlak dan kreatifitas pelajar menuju masyarakat utama". Meskipun demikian, IPM tetap fokus gerakan pembentukan karakter pelajar. Karena itu, arah paradigma IPM diarahkan pada dua hal: pertama, meningkatkan kualitas hidup anggota IPM dan pelajar dengan paradigma tertib ibadah, tertib belajar dan tertib berorganisasi. Kedua, mekanisme kepemimpinan dan keorganisasian yang mantap.³¹

29 Panitia Muktamar ke-10 IRM "Tinta Emas: Goresan Sejarah...", 8.

30 Tanfidz Keputusan Muktamar VII Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Cirebon Jawa Barat. (Yogyakarta: LP3M, 1986), 10.

31 Panitia Muktamar ke-10 IRM "Tinta Emas: Goresan Sejarah...", 10.

Istilah “Tri Tertib” diformalisasikan menjadi paradigma dari strategi perjuangan IPM dengan asumsi dasar. Pertama, IPM merupakan organisasi dakwah di kalangan pelajar. Sistem organisasi IPM harus mendorong pengamalan ajaran Islam dengan baik, khususnya pelaksanaan ibadah mahdhah yang tatacara dan waktu pelaksanaannya sudah ditentukan. Kedua, sebagai organisasi pelajar, IPM semestinya membina pelajar agar dapat menyelesaikan tugas utamanya yakni belajar. Ketiga, sebagai sebuah organisasi, IPM menjadi organisasi dengan sistem yang baik, semua aktifitas dan dinamikanya diarahkan menuju terwujudnya tujuan IPM.³²

Paradigma Tiga T, tentu muncul dengan epistem sosial. Ada ruang dan waktu sebagai titik pijak keluarnya. Dengan meminjam Yudi Latif, Paradigma Tiga T IPM berada pada fase formatif (1980-an dan 1990-an). Periode ini IPM dihadapkan pada modernisasi akhir dari Orde Baru. Pada masa itu, ruang publik mulai menunjukkan tingkat keterbukaan tertentu, dan ini menjadi katalis bagi pendalaman penetrasi fundamentalisme Islam bersifat global.³³ Masa itu, bisa jadi IPM hadir sebagai penjaga budaya-massa global dan nilai-nilai liberal Barat. Wajar IPM paradigmanya cenderung puritanisme Islam (Islam Murni)³⁴, penguatan kepribadian dan pengembangan

32 Agus Sukaca, “Paradigma Gerakan IPM: Tertib Beribadah, Tertib Belajar dan Tertib Berorganisasi” dalam *Manifesto Gerakan Perlawanan Pelajar*; (Yogyakarta: PPIP. 2011).

33 Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa...*, 137.

34 Menurut Haedar Nashir, perkaderan IPM di masa itu mengajarkan mata rantai pembaruan Islam seperti dipelopori Ibn Tamiyiyah, Muhammad bin Abdil Wahhab, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridla, Jamalauddin al-Afghani. Menariknya pembaruan Muhammadiyah yang dimaksud adalah “kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah” ini kebanyakan memaknai tajdid adalah pemurnian (purifikasi). Idiom “raja’a” (kembali) memiliki konotasi pada “marja” (tempat kembali), yang secara esensial berarti merujuk ke tempat asal. Dalam kenyataannya juga tidak terlepas dari kesadaran untuk kembali pada ajaran Islam yang murni setelah mengalami “pencemaran” yang menjauhkan Islam dari “tempat asalnya”, yakni sumber ajaran yang asli yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah yang shahih.”TBC” (tahayul, bid’ah, dan

individu.

B. Corak Pragmatis-Inklusif (1992-1998)

Dekade 1990-an, corak Orde Baru dari mekanisme politik tertutup ke mekanisme politik yang lebih terbuka. Jika pada dekade 1970-an dan 1980-an bercorak eksklusif, pola interaksi didominasi kalangan elite, dan proses kontrol negara sangat dominan. Adapun mekanisme politik bercorak lebih terbuka pada dekade 1990-an karena tuntutan *setting* sosial yang berubah, seperti bertambahnya penduduk yang berpendidikan tinggi dan kritis, kehidupan ekonomi yang lebih baik, dan kehidupan media massa yang lebih leluasa di ruang publik.³⁵

Selain itu, pada dekade 1990-an pemerintah mulai bersikap akomodatif,³⁶ terutama terhadap kalangan Islam setelah penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal.³⁷ Senada dengan itu, Pemikiran Islam era 1980-an mencerminkan Islam dan transformasi masyarakat,

khurafat” atau secara khusus syirik) sehingga memerlukan pemurnian (tandhif al-‘aqidah al-Islamiyyah). Haedar Nashir, “Memahami Islam Dalam Muhammadiyah” <http://muhammadiyahstudies.blogspot.co.id> (Diakses 22 Agustus 2016).

³⁵ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 138-39.

³⁶ Menurut Bahtiar Effendy, di balik fenomena akomodasi ini setidaknya ada dua alasan utama: yang pertama bersifat sosiologis, dan yang kedua bersifat politis. Alasan yang sosiologis adalah bahwa akses kepada pendidikan modern dan perkembangan ekonomi pada masa Indonesia merdeka, terutama selama era Orde Baru, telah mentransformasikan basis sosial komunitas umat Islam. Hal ini telah menyebabkan umat Islam memperoleh porsi besar dalam sektor menengah dan profesional yang pada awal kemerdekaan didominasi oleh golongan priyayi. Sebagai akibat mobilitas sosial ini, umat Islam tidak lagi dapat dipandang sebagai kelompok yang marjinal dan terbelakang, namun dipandang sebagai kelompok sosial-politik baru dengan keahlian baru dan aspirasi-aspirasi tertentu yang penyalurannya membutuhkan upaya-upaya struktural tertentu. Alasan yang politis adalah berupa munculnya kelompok cendekiawan Muslim baru yang telah mencoba membentuk format baru Islam politik di Indonesia. Format baru yang dimaksud adalah: (1) tidak ada kaitan formal antara Islam dan negara; (2) memilih pembentukan masyarakat Muslim daripada pembentukan negara Islam; dan (3) politik partisan, dengan parlemen sebagai satu-satunya wilayah bermain, bukan satu-satunya pendekatan politik. Lihat Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), 274-275.

³⁷ *Ibid*, 137.

sehingga tema-tema yang diangkat adalah tentang Islam dan pembangunan. Tahun 1970-an sampai 1980-an, corak pemikiran Islam dan artikulasi politik tampak konfrontatif dengan rezim penguasa yang represif, sementara era 1990-an justru sangat akomodatif. Perubahan rezim penguasa terhadap Islam mendukung perkembangan pemikiran Islam, sehingga corak pemikiran Islam tahun 1990-an menawarkan Islam substantif-progresif.³⁸

Menurut Izzul Muslimin, Ketua Umum IRM periode 1996-1998 pada tahun 1990-an menghadapi tiga dinamika penting. Pertama adalah proses "pemutusan generasi" atau "peremajaan IPM" yang terjadi sekitar tahun 1989 melalui Mukhtar VIII (terbatas dan rahasia) di Madrasah Muallimin Yogyakarta.³⁹ Kedua, adalah perubahan nomenklatur dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM), tahun 1992. Ketiga, perubahan pola gerakan dan kaderisasi IRM dari eksklusif ke inklusif.⁴⁰

1. Perubahan Nama IPM ke IRM

Sejak tahun 1975 pemerintah menegaskan bahwa organisasi pelajar yang diakui dan diperbolehkan eksis di sekolah-sekolah hanya OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah). Pada saat yang sama pemerintah Orde Baru mengontrol kekuatan mahasiswa dan pelajar. Seluruh pelajar di sekolah harus bergabung dengan (OSIS), sebagai satu-satunya wadah pelajar. Selama 17 (tujuh belas) tahun, sejak 1975-1992, IPM mampu mempertahankan nama organisasinya. Meski dengan berbagai macam halangan dari pemerintah, seperti tidak

38 Waryani Fajar Riyanto, *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan ...*, 134.

39 "Proses 'pemutusan generasi' atas kehendak PP Muhammadiyah waktu itu Ketua Umumnya adalah Pak AR Fachruddin meminta usia maksimal pengurus adalah 25 tahun. Akhirnya Khoirudin Bashori menyerahkan jabatan ketua umum kepada Jamaludin Ahmad." Menurut Izzul Muslimin, pemutusan generasi itu maksudnya supaya proses peremajaan usia IPM.

40 M. Izzul Muslimin, "Kekuatan IPM Ada Pada Dialektika Pemikiran": <http://www.ipm.or.id> (diakses 22 Agustus 2016)

diizinkan mengadakan Muktamar ataupun kegiatan yang berskala nasional.

Perubahan nomenklatur IPM menjadi IRM, dijelaskan oleh Izzul Muslimin sebagai respon atas tekanan Menpora waktu itu yang memaksa setiap organisasi pelajar mengubah nomenklatur pelajar. "Istilah pelajar waktu itu hanya bisa digunakan oleh OSIS. IPM bersama IPNU sama-sama mengambil jalan politik untuk menerima tekanan itu. Hal ini berbeda dengan PII yang menolak menerima tekanan. PII akhirnya menjadi gerakan 'bawah tanah.'" Sebenarnya di IPM pun sebagian besar menolak. Bahkan penolakan keras itu datang dari Pimpinan-Pimpinan Wilayah IPM dari berbagai provinsi, bahkan ada yang membawa celurit untuk menunjukkan protesnya.⁴¹

Tepatnya pada saat diselenggarakan Muktamar VIII (Terbatas) yang dikemas dengan acara "Silaturahmi Pimpinan" di Yogyakarta 1990. "Muktamar Terbatas" menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya yaitu: membentuk tim penjajagan eksistensi IPM dan mencari alternatif perubahan nama IPM untuk diserahkan kepada Konpiwil. "Muktamar Terbatas" memilih M. Jamaluddin Ahmad dan Zainul Arifin AU sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum periode 1990-1993.⁴² Pada periode itu, posisi IPM benar-benar menghadapi masa sulit. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Tanfidz Muktamar XVI:

"Tantangan paling berat adalah berhadapan dengan rezim yang berkuasa pada saat itu, Orde Baru, yang meminta IPM harus berasaskan Pancasila dalam setiap gerak perjuangannya. Perjalan itu akhirnya berujung pada tahun 1992, pemerintah "menenek" IPM harus berganti

⁴¹ Izzul Muslimin, "Kekuatan IPM Ada Pada Dialektika Pemikiran...",

⁴² Selain itu, Muktamar menghimbau kepada seluruh keluarga besar IPM dan Muhammadiyah agar melakukan shalat *tahajjud* dan *qunut nazilah*. Sedangkan untuk pemerintah, IPM meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI *via* PP Muhammadiyah Majelis P&K agar putri-putri Muslimah diberi kelonggaran mengenakan busana Muslimah di sekolah negeri. Tanfidz Keputusan Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1990, 6.

nama. Kebijakan pemerintah yang hanya mengizinkan OSIS sebagai satu-satunya organisasi kepelajaran di tingkat nasional membuat IPM yang notabene adalah organisasi pelajar berusaha keras untuk mempertahankan eksistensinya. Maka diadakanlah Tim Eksistensi IPM untuk melakukan kajian yang mendalam tentang permasalahan tersebut. Tim Eksistensi melihat persoalan dari dua segi. *Pertama*, masalah itu adalah tekanan luar biasa dari pemerintah untuk mengganti kata "pelajar" sehingga hal ini menyangkut hidup dan matinya IPM. Kedua, dikaitkan dengan perkembangan IPM baik secara vertikal maupun horizontal. adalah realitas empirik yang mendorong keinginan untuk memperluas obyek garapan dakwah IPM. Akhirnya Muhammadiyah. Keputusan nama oleh PP IRM ini tertuang dalam SK PP IPM yang selanjutnya disahkan oleh PP Muhammadiyah tanggal 18 November 1992 M.⁴³

Situasi IPM semakin tidak dapat mengelak untuk mempertahankan nama organisasinya adalah pada saat Konpiwil IPM 1992 Yogyakarta. Ketika sambutan pada waktu Konpiwil, Menpora Akbar Tanjung secara implisit menyampaikan kebijakan pemerintah pada IPM untuk melakukan penyesuaian tubuh organisasi. Setelah Konpiwil Pimpinan Pusat IPM diminta Departemen Dalam Negeri untuk mengisi formulir direktori organisasi disertai catatan agar pada waktu pengambilan formulir tersebut nama IPM telah berubah.

Karenanya Pimpinan Pusat IPM yang sebelumnya telah mengangkat "Tim Eksistensi" yang bertugas menyelesaikan masalah ini. Akhirnya diputuskan perubahan nama "Ikatan Pelajar Muhammadiyah" menjadi "Ikatan Remaja Muhammadiyah" dengan pertimbangan beberapa hal: pertama, keberadaan remaja sebagai kader persyarikatan, umat dan bangsa selama ini belum mendapat perhatian sepenuhnya dari persyarikatan Muhammadiyah. Kedua, perlunya pengembangan jangkauan sayap dakwah IPM. Ketiga, adanya kebijakan pemerintah RI tentang tidak diperbolehkannya penggunaan kata "pelajar" bagi organisasi

43 Materi Mukhtamar XVI Surakarta

berskala nasional. Keputusan pergantian nama oleh PP IPM ini tertuang dalam SK PP IPM Nomor VI/ PP.IPM/ 1992, yang selanjutnya perubahan tersebut disajikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 22 Jumadil Awal 1413 H/18 November 1992 M melalui SK No. 53/SK-PP/IV.B/1.b/1992 tentang pergantian nama (Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah). Dengan demikian secara resmi perubahan IPM menjadi IRM adalah sejak tanggal 18 November 1992.⁴⁴

Jika dilihat konteksnya, perubahan itu merupakan paksaan rezim penguasa otoriter, yang berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi.⁴⁵ Namun, menurut Arif Jamali Muis elite Pimpinan Pusat IPM berhasil mengemas apik "logika perubahan" nama IPM ke IRM. Sehingga tidak nampak perubahan itu adalah karena paksaan kebijakan politik rezim Orde Baru. Akhirnya ada semacam rekonstruksi tentang logika yang sebenarnya tentang perubahan nama IPM ke IRM. Padahal, logika sebenarnya ada semacam ketidakrelaan sebagian elite Pimpinan Pusat IPM dalam menyikapi perubahan IPM ke IRM. Perubahan nama ini dinilai hanya nomenklatur, tetapi jiwa dan ruh gerakannya tetap IPM. Sayang Pimpinan Pusat IPM tidak jujur, wacana yang didesimenasi ke tingkat bawah adalah "perubahan IRM sebagai pengembangan sayap dakwah". IPM sebagai pakaian terlalu kecil, perlu wadah yang lebih besar. Bungkusannya Rezim Soeharto, dikemas apik menjadi seakan-akan tuntutan zaman. Dan pada perjalanan berikutnya logika itu tertanam betul hingga tingkat ranting.⁴⁶ Namun generasi pelanjut hasil perkaderan masa IRM sangat idealis, tidak mau kalau perubahan hanya nama, tetapi harus disertai corak gerakan dengan rasa "remaja".

Pada awalnya memang IPM berusaha tetap konsisten dengan nama pelajar sebagaimana dijelaskan di atas. Selain itu, IPM juga berharap ada peninjauan kembali kebijaksanaan

44 Panitia Muktamar ke-10 IRM "Tinta Emas: Goresan Sejarah...",10.

45 Haedar Nashir, "IPM Gerakan Ideologis"..., 7.

46 Arif Jamali Muis, "Kajian SPI Biru" dalam Semiloknas Sistem Perkaderan IPM Yogyakarta.

pemerintah tersebut. Namun, sikap tersebut membawa dampak kerugian yang tidak sedikit bagi IPM. Akibatnya kegiatan IPM secara nasional sering dipersulit, hingga gagal dilaksanakan. Pada sisi lain, IPM memang merasa perlu untuk segera memperbaharui visi dan orientasi serta mengembangkan gerak organisasinya secara lebih luas dari ruang lingkup kepelajaran memasuki ke dunia keremajaan sebagai tuntutan perubahan dan perkembangan zaman.

Senada dengan itu, tesis Amalia Destika menyimpulkan bahwa pergantian nama IPM ke IRM merupakan *blessing in disguise* (rahmat tersembunyi). Karena menguntungkan organisasi, sehingga yang mengikuti organisasi ini tidak hanya para pelajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah saja, tetapi diikuti pula oleh para pelajar dari sekolah-sekolah lain yang masuk dalam kegiatan atau kepengurusan ranting di setiap kampung yang mayoritas penduduknya Muhammadiyah. Perubahan nama IPM ke IRM sebenarnya semakin memperluas jaringan dan jangkauan organisasi tidak hanya menjangkau pelajar, tetapi juga basis remaja yang lain seperti santri, anak jalanan, dan lain-lain.⁴⁷

Perubahan nama IPM menjadi IRM beriringan dengan suasana pada saat nama bangsa Indonesia tengah menyelesaikan PJPT I, dan akan memasuki PJPT II. Banyak kemajuan yang telah diperoleh bangsa Indonesia sebagai hasil PJPT I, diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dan pesat, stabilitas nasional yang semakin mantap, dan tingkat pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat yang semakin baik. Namun demikian ada beberapa pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan bangsa Indonesia pada PJPT II, antara lain, masalah pemerataan pembangunan dan kesenjangan ekonomi, demokratisasi, ketertinggalan di bidang IPTEKS, sumber daya manusia, dan penegakan hukum dan kedisiplinan. Inilah yang mempengaruhi orientasi program-program IPM, sehingga gerakan IPM lebih bercorak inklusif-pragmatis dengan memperluas medan dakwah ke

47 Tim Penyusunan dan Penerbitan Profil Muhammadiyah 2005. *Profil muhammadiyah 2005*. (Yogyakarta: PP Muhammadiyah. 2005), 159.

remaja yang identik dengan kemasyarakatan.⁴⁸

Pasca perubahan nama, maka "Muktamar IRM Pertama" dilaksanakan tanggal 3-7 Agustus 1993. Dengan pertimbangan nilai historis disebut dengan Muktamar IX yang bertemakan "Aktualisasi Gerak IRM dalam peningkatan kualitas remaja muslim menghadapi PJPT II". Muktamar berhasil menetapkan Anggaran Dasar, Khittah Perjuangan, Kepribadian IRM, Garis-Garis Besar Kebijakan IRM, serta Ketua Athailah A. Latief dan Sekretaris Arief Budiman masa jabatan 1993-1995. Dalam Muktamar menetapkan sasaran utama program jangka panjang yaitu:

"upaya menciptakan tradisi keilmuan yang berwawasan iptek dan tradisi berkarya kreatif yang dijiwai akhlak mulia dalam rangka membentuk sumber daya remaja yang potensial sehingga mampu menjadi modal utama bagi terbentuknya komunitas remaja yang islami dan menjadi pelopor di lingkungannya". Sasaran tersebut dilaksanakan secara bertahap, berencana dan berkesinambungan selama empat periode Muktamar.⁴⁹

Setahun setelah Muktamar IRM yang pertama tahun 1993, maka pada tahun 1994, pimpinan pusat IRM melakukan rekonstruksi SPI dengan mengadakan seminar dan lokakarya sistem perkaderan IRM di Malang, sehingga lahirlah SPI Biru sebagai SPI IRM pengganti SPI Merah (SPI IPM). Jika dilihat dari materi Agung Danarta yang disiapkan untuk Muktamar IPM tahun 1993, memang bidang-bidang yang ditawarkan ketika perubahan IPM ke IRM memang begitu banyak.

Saat itu IPM dihadapkan permasalahan muncul ketika masyarakat pelajar sedang mengalami kegairahan religiutas. Saat itu, banyak anggota dan kader-kader IRM meninggalkan IRM menuju kelompok kajian keislaman yang lebih menarik dan memenuhi keinginannya. Dalam masa ini IRM mulai menata diri dengan memberikan perhatian kepada aktifitas-aktifitas pragmatis-inklusif. Maka Muktamar IX menghasilkan

⁴⁸ Napak Tilas Sejarah IRM...,

⁴⁹ Tanfidz Keputusan Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah IX di Yogyakarta.

konsep-konsep yang lebih pragmatis yang sangat dibutuhkan oleh remaja. Selain itu, yang dahulunya kegiatan-kegiatan IRM difokuskan pada "pelajar", menjadi lebih inklusif karena dapat diikuti oleh pelajar dan remaja. Konsep-konsep tersebut antara lain: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Latihan Penelitian, Pembentukan KIR (Karya Ilmiah Remaja), dan Pengelolaan Studi Islami. Seluruh program-program diarahkan pada peningkatan kualitas hidup anggota IPM (pelajar dan remaja) pada umumnya. Dengan usaha peningkatan penghayatan hidup yang tertib ibadah, tertib belajar dan tertib berorganisasi.⁵⁰

Corak pragmatis-inkusif IRM semakin terlihat ketika Mukhtar X di Surakarta, tanggal 11-15 Maret 1996 karena disertai agenda pendukung acara yang sangat menarik yaitu BASIRA (Bakti Silaturahmi Remaja). BASIRA adalah kegiatan perkampungan kerja dan pelatihan kepemimpinan pelajar Muhammadiyah se-Indonesia. Pada Mukhtar X yang menetapkan Izzul Muslimin sebagai Ketua Umum ini, program-program diarahkan pada upaya pemantapan mekanisme gerakan yang kondusif bagi terciptanya tradisi keilmuan yang berwawasan iptek dan tradisi berkarya kreatif yang dijiwai akhlak mulia.⁵¹

Dinamika IRM periode 1996-1998 menunjukkan kemajuan positif, antara lain: Pertama, secara manajerial IRM telah berhasil melakukan upaya perampingan pengelola organisasi dalam kerangka mengupayakan efisiensi dan efektifitas kerja. Adanya perampingan tersebut memberikan nilai positif bagi peningkatan kinerja organisasi, kemudahan dalam penentuan keputusan serta konsentrasi kerja.

Kedua, dalam upaya memantapkan pelaksanaan program yang lebih real-fungsional-pragmatis, serta menyentuh permasalahan remaja, IRM telah berhasil melakukan pembentukan lembaga khusus yang merupakan tangan

50 Laporan Pertanggung Jawaban Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pada Mukhtar IX di Yogyakarta.

51 Tanfidz Keputusan Mukhtar Ikatan Pelajar Muhammadiyah X di Surakarta.

panjang pimpinan. Diantaranya yaitu LAPSI, Bina Mentari, Alifah, Bengkel Seni Ufuk dan Lembaga Dakwah.

Ketiga, dalam upaya lebih memberdayakan Pimpinan Ranting khususnya di lingkungan sekolah telah disusun konsep pembinaan ranting di sekolah meningkatkan peran organisasi yang fungsional di lingkungan anggota.

Keempat, Keberadaan IRM hingga saat itu semakin diterima dan diakui oleh berbagai pihak. Apalagi setelah perubahan nama, eksistensi IRM secara nasional mulai diperhatikan dan tidak dipermasalahkan lagi. Memang kemudian ada beberapa kendala kecil dengan keberadaan IRM di sekolah menengah Muhammadiyah yang justru dipersoalkan, karena bukan lagi bertitel kepelajaran. Namun hal ini karena kurangnya kesepahaman antara pihak pimpinan sekolah dengan pimpinan IRM.

Kelima, jaringan organisasi IRM yang tersebar hampir di seluruh propinsi yang ada di Indonesia (Kecuali Timor-Timur). Di samping itu, akses ekstern masuknya IRM ke dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), menjadi modal untuk lebih mengembangkan kiprah IRM dalam peran kebangsaan, namun di sisi lain perlu diperhatikan implikasi dan kecenderungan berubahnya visi politik IRM yang bisa mengarahkan pada politik praktis.

Keenam, semangat idealisme Islam yang lebih aplikatif melalui pengembangan keilmuan dan inovasi kreatif. Kondisi demikian juga berpengaruh dalam mewarnai arah gerak IRM, dari orientasi pembangunan komitmen ideologis, menuju ke orientasi tradisi keilmuan dan tradisi berkarya kreatif.

Ketujuh, perluasan lahan dakwah di IRM secara struktural telah diantisipasi dengan mengembangkan enam bidang sebagai sasaran gerak. Namun masih drasakan kurangnya pengembangan dalam bidang-bidang tersebut terutama pada bidang-bidang baru seperti bidang keterampilan, bidang wirausaha, serta bidang seni budaya.

Kedelapan, IRM telah mencanangkan gerakan kaderisasi nasional sebagai upaya pembudayaan peningkatan kualitas

dan kuantitas kader. Gerakan ini jelas memberikan nilai positif bagi persiapan kader baik yang formal maupun non formal, serta sistem rekrutmen yang baik dalam rangka proyeksi kader.⁵²

2. Kritik atas Paradigma “Tri Tertib”

Pasca perubahan IPM ke IRM dengan peluasan basis massa IRM dari “pelajar” ke “remaja” yang begitu kompleks probematikanya, Tri Tertib menjadi semboyan yang sangat monumental tahun 1980-an hingga 1990-an awal mulai mendapat kritik. Ketika IRM mulai bergeser ke paradigma yang lebih populis-sosialis, maka IRM merambah problem-problem riil di kalangan remaja maupun upaya pengembangan kreativitas, sehingga IRM semakin bercorak pragmatis sekaligus inklusif. Hal ini dapat ditemukan dalam tanfidz Muktamar IRM ke-14 tertuang kritik keras terhadap paradigma lama IPM yakni “Tiga T”:

“Tiga tertib ini adalah ruh gerakan dan merupakan cita-cita dan karakter khas yang dimiliki oleh setiap anggota IPM. Rumusan “*Tertib Ibadah, Tertib Belajar dan Tertib Berorganisasi*” sebenarnya merefleksikan pola paradigma pengembangan diri (bersifat personal) ini mendapati akarnya pada tradisi *developmentalisme* yang melihat sebab-musabab berbagai permasalahan sosial berasal dari kelemahan kultural, modal manusia yang lemah, kurang adanya *achievement* dan sebagainya. Pada masa sekarang ini paradigma pengembangan diri mengalami stagnasi karena sering tak berhasil mengatasi berbagai masalah sosial yang ada. Diperlukan suatu paradigma yang mampu melakukan perubahan pada tataran struktur dan sistem sosial, karena masalah-masalah sosial sering kali tidak disebabkan oleh kesalahan manusia ataupun kelemahan kulturalnya namun disebabkan adanya ketidakadilan yang akut di dalam struktur dan sistem sosial itu sendiri.”⁵³

52 Materi Muktamar XI Ikatan Remaja Muhammadiyah, Makassar 21-24 Mei 1998.

53 Tanfidz Muktamar XIV IRM..., 10

Oleh karena itu sudah waktunya IPM menyempurnakan paradigma gerakannya tidak hanya berkutat pada program-program pengembangan diri tapi juga memasuki ranah struktur dan sistem sosial yang berlaku. Gerakan IPM seharusnya segera dilemparkan dalam alam yang lebih sosialis-realis yang memandang berbagai permasalahan sosial khususnya berkaitan dengan dunia pelajar negeri ini sebagai akibat dari adanya ketidakadilan atau kesalahan relasi sosial yang berperan, bukan semata kesalahan pelajar-pelajar sendiri. Hal ini dapat ditemukan pernyataan Ridho Al-Hamdi berikut:

“Sejak era reformasi 1998, kondisi bangsa sudah mulai berubah. Dulu, perjuangan IPM (sebelum berganti menjadi IRM) masih di bawah tekanan pemerintah rezim orde baru. Karena itu, tidak banyak kebijakan yang bisa diperbuat oleh IRM, sehingga IRM hanya memiliki semboyan Tiga Tertib: Tertib Ibadah, Tertib Belajar, dan Tertib Organisasi. Kini, berbagai macam gerakan bisa berbuat dengan sebebas mungkin melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan rakyat. IRM pun harus kembali berpikir ulang, sudahkah gerakan yang berbasis pelajar ini memperjuangkan rakyatnya?”⁵⁴

Karena itu, Muktamar XI di Makassar pada 21-24 Mei 1998 IRM mengambil tema, “Mentradisikan Ilmu, Mengembangkan Karya, Menuju Prestasi”. Muktamar yang menghasilkan Ketua Umum Taufiqurrahman dan Sekretaris Umum Raja Juli Antoni. Gerakan IPM diarahkan pada “terciptanya tradisi keilmuan yang berwawasan iptek dan tradisi berkarya kreatif yang dijiwai akhlak mulia.” Pada Muktamar ini IRM menegaskan komitmennya sebagai gerakan *dakwah amar ma’ruf nahi munkar* tidak berpolitik praktis yang tercantum dalam “Deklarasi Makassar”. Sejak itulah IRM mulai mempunyai konsentrasi pada “Gerakan Advokasi Remaja”. Selain itu perintisan kerjasama dengan pihak Founding menjadi kerja-kerja periode ini seperti terlibatnya IPM dalam JPPR

⁵⁴ Ridho Al-Hamdi “Saatnya IRM Kembali Ke Pelajar” (pernah dimuat di SM)

dalam program Pemilu 1999. Di akhir periode inilah IRM mulai bergeser ke paradigma populis.

Corak inilah yang disebut dengan corak pragmatis-inklusif. Di satu sisi, IRM terus konsisten dengan paradigma Tri Tertib yang menekankan kualitas karakter individu, di lain sisi IRM mulai melakukan gerakan pragmatis dalam arti responsif terhadap problem-problem sensitif dan riil di kalangan remaja. Pada saat yang sama, IRM juga terus membina kreativitas pelajar dan remaja dengan berbagai bidang minat dan bakat. Hal itu dapat dilihat dari berbagai lembaga dan program yang populer di kalangan remaja. Inklusivitas dapat dilihat bagaimana IRM melakukan pendampingan dan advokasi yang memihak kepada kepentingan remaja dan pelajar.

Pena 5

DINAMIKA IPM PASCA REFORMASI (1998-2016)

Bab V akan menelaah dinamika paradigma dalam IPM pasca Reformasi (1998-2016). Secara historis, paradigma gerakan sosial berbasis pelajar seperti IPM, memang dibangun oleh berbagai rezim intelektual.¹ Selain dipengaruhi oleh dinamika internal Muhammadiyah dan situasi kebangsaan, paradigma IPM juga sangat dipengaruhi oleh wacana yang dibawa oleh para aktivisnya. Dalam bahasa Berger dan Luckmann, eksternalisasi wacana yang terus dikaji, didiskusikan, ditafsirkan serta dikontekstualisasikan mengalami obyektivasi kemudian mengalami sebagai internalisasi dalam tubuh IPM. Dialektika wacana selanjutnya mempengaruhi corak paradigma untuk menjawab persoalan sosial pelajar/pendidikan.² Menariknya, sejak reformasi inilah keran pemikiran, keterbukaan, kebebasan pendapat mulai dibuka. Akibatnya berbagai wacana gerakan sosial baru, pendidikan populer, dan lain-lain mulai masuk di tubuh IPM dan mempengaruhi orientasi gerak IPM. Karena itu, pada bab ini akan membahas dua kecenderungan corak gerakan IPM

1 Michael Foucault, 'Genealogy and Social Criticism' in *The Postmodern Turn: New Perspectives on Social Theory*, ed S. Seidman. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

2 Moh. Mudzakkir, "Unfinished Project Bagi Gerakan IPM" Azaki Khoirudin, *Nuun: Tafsir Gerakan Al-Qalam* (Jakarta: Al-Wasat Publishing, 2014)

pada 20 tahun terakhir, yakni: pertama, fase populis (1998-2008) dan corak cosmopolitan (2008-2016). Perlu digaris bawahi adalah bahwa tahun 1998 ada momentum reformasi, sehingga muncul wacana pengembalian nama IRM ke IPM, dikarenakan IRM dianggap nama produk Orde Baru. Adapun tahun 2008, adalah momentum perubahan nama IRM ke IPM.

A. Corak Populis (1998-2008)

Sebenarnya paradigma populis, telah mengantarkan IRM masuk pada Sebenarnya paradigma populis, telah mengantarkan IRM masuk pada wacana Gerakan Sosial Baru (GSB) dalam referensi gerakan sosial posmodernisme. Menurut Saud El-Hujjad, pada tahun 1987, IRM (waktu itu namanya masih IPM) pernah mengangkat isu gerakan tentang "sosialisme religius", sebagai bentuk pencarian model strategi gerakan untuk melawan kesenjangan sosial yang semakin parah akibat kebijakan Orde Baru yang tidak adil. Akan tetapi, model yang demikian kurang menemukan relevansi sosialnya di tingkat basis. Akhirnya, paradigma waktu itu, kembali pada paradigma *elite (developmentalism)* yang menekankan aspek internalisasi ideologis ke-Islaman dan militansi gerakan.³ Selanjutnya pasca reformasi adalah puncak IRM sebagai gerakan remaja dan pelajar yang bercorak populis.

1. Wacana Pengembalian Nama IRM ke IPM

Sebagaimana disinggung di atas, bahwa perubahan corak gerakan IPM selalu diawali perubahan politik. Hal ini dapat dilihat bahwa jelang reformasi Muktamar X 1996 IRM mulai merambah pada isu-isu populis. Karena waktu itu metodologi ANSOS (Analisis Sosial) mulai masuk di tubuh IRM melalui kegiatan pelatihan kader Truna Melati. Saat itu juga, gerakan penyadaran, pemberdayaan, dan advokasi menjadi *mainstream* gerakan IRM.⁴ Makna penting yang harus dipahami dari perubahan nama IPM ke IRM adalah dampaknya pada pergeseran paradigma

³ Saud El-Hujjad, "Membincang IRM dan Wacana Gerakan Sosial Baru" *Suara Muhammadiyah*-19-2002

⁴ Saud El-Hujjad, "Membincang IRM...",

gerakan dari pelajar yang *elite*, ke remaja yang "populis".⁵

Adalah Muktamar XI merupakan peristiwa bersejarah bagi aktivis IRM. Karena pada tanggal 21 Mei 1998 pembukaan Muktamar bersamaan dengan proses pergantian kepemimpinan nasional, yaitu pengunduran diri Presiden Soeharto. Muktamar yang diselenggarakan selama empat hari di Makassar pada 21-24 Mei 1998. Reformasi 1998, membawa dampak keraguan pada jati diri IRM, terutama kalangan Muhammadiyah dan IPM perihal nama IRM. Pertama, nama IRM adalah produk Orde Baru, karena Orde Baru telah runtuh maka selayaknya IRM kembali nama menjadi IPM. Kedua, basis massa gerakan IRM sejatinya adalah pelajar, karena itu lebih baik kembali ke identitas awal tersebut yaitu pelajar. Ketiga, banyak sekolah Muhammadiyah yang tidak mau menerima IRM karena dianggap bukan organisasi pelajar melainkan organisasi remaja.⁶

Selanjutnya, Pemuda Muhammadiyah juga memberikan rekomendasi supaya IRM kembali kepada nama asalnya, yaitu IPM. Kemudian dikuatkan pada Tanwir Muhammadiyah IRM harus kembali ke IPM mumpung bertepatan Reformasi. Di samping itu, sebagian pimpinan Muhammadiyah mengeluh bahwa IRM kurang memperhatikan pelajar khususnya pelajar Muhammadiyah. Kurang fokus dikarenakan gerakan yang meluas, yaitu remaja. Atas dasar itu, membuat pimpinan pusat IRM ingin mengubah nama IRM ke IPM. Pada akhirnya *review* paradigma gerakan pun dilakukan dari tahun 1998-2000. Akan tetapi, hasilnya sebagian besar Muktamirin tetap memilih IRM. Mayoritas aktivis IRM belum memiliki kesiapan, akhirnya diputuskan secara aklamasi pada acara Muktamar XII 2000 di Jakarta, tetap menggunakan IRM. Ironinya keputusan ini ditetapkan melalui *votting*, sehingga menyisakan ketidakpuasan sebagian kalangan aktivis IPM. Mereka yang tidak setuju

5 *Ibid*

6 Saud El-Hujjaj, "Membincang IRM...."

dengan perubahan IRM ke IPM adalah dikarena mereka produk perkaderan IRM dan kurangnya memahami sejarah. Meskipun demikian, karena perubahan itu juga diputuskan berdasarkan kesepakatan dan musyawarah dan, waktu itu, juga menyisakan ketidakpuasan, maka keputusan IRM pun juga demikian dan harus tetap dijalankan sebagai amanah organisasi.⁷ Akhirnya dibentuklah Tim Perumus peralihan IRM ke IPM. Mayoritas ditolak, karena mereka semua adalah produk kaderisasi masa IRM.⁸

Jalan tengahnya bahwa semua sepakat "nama tidak penting", yang penting karakter IRM adalah sebagai gerakan pelajar. Hal terpenting adalah perumusan paradigma IRM yang landasan gerakannya adalah pelajar. Maka dirumuskanlah Dasar-Dasar Gerakan IRM sebagai paradigma IRM sebagai gerakan beridentitas pelajar. Sebelum Muktamar dan Konpiwil ada pertemuan khusus, untuk membentuk paradigma IRM baru. Karena perdebatan substansi selesai, maka yang terpenting adalah mindset IRM, bukan remaja, melainkan pelajar.⁹ Karena itu, Muktamar XII IRM yang dilaksanakan secara bersamaan dengan Muhammadiyah, Aisyiah, dan Nasyiatul Aisyiah tanggal 8-11 Juli 2000 di Jakarta sampai berhasil meletakkan dasar-dasar konsep gerakan IPM. Meskipun nama masih IRM, namun konsep itu sudah didesain dan dipersiapkan untuk menjadi "gerakan pelajar". Maka ditetapkan antara lain: Dasar-Dasar Gerakan IRM (Paradigma Gerakan IRM), Kepribadian IRM, Kepribadian Kader IRM, hingga Perubahan Struktur Bidang IRM.¹⁰

Waktu itu IRM menemukan kata kunci yang disematkan pada identitas pelajar dengan merujuk

7 *Ibid*

8 Anjar Nugrogo, "Paradigma Gerakan IPM di Era Reformasi" FGD LAPSI

9 *Ibid*,

10 *Ibid*,

pada pemikiran Dawam Rahadjo. Maka ditemukanlah istilah yang melekat pada kata "pelajar", yakni identitas "kritis". Kaum terpelajar itu kritis, artinya tidak boleh acuh dengan problem sosial: ekonomi, politik, dan budaya. Pelajar harus memiliki kontribusi dan sumbangsih untuk melakukan perubahan. Karena IRM adalah gerakan, bukan sekedar organisasi administratif-birokratis, maka harus berkontribusi dan terlibat dalam perubahan sosial. Lalu IPM bersentuhan dengan pemikiran Kuntowijyo bahwa gerakan pelajar harus independen, dan menjadi kekuatan penyeimbang terhadap kekuatan negara menjadi *Civil Society*. Dari sini ditemukanlah dua kata kunci yang menjadi karakter gerakan IRM rasa pelajar, yakni "kritis" dan "transformasi sosial".¹¹

2. Gerakan Advokatif Tanpa Kekerasan (GATK)

Muktamar X tahun 1996, awal pergerakan IRM sebagai gerakan yang berparadigma populis di kalangan pelajar dan remaja. *Mainstream* gerakan IRM untuk menyemarakkan aktivitas-aktivitas sosial remaja dengan beragam bentuk dan macamnya: kelompok sastra, kelompok ilmiah remaja, kelompok jurnalis muda, kelompok terampil dan berjiwa kewirausahaan, kelompok seni dan teater, kelompok olah raga, dan lain sebagainya. Remaja dan pelajar ditampung dalam unit-unit kegiatan yang sekarang menjadi lembaga-lembaga pimpinan, seperti di tingkat pusat ada LaPSI (Lembaga Pengembangan Sumberdaya Insani), Bilik Remaja Bina Mentari (Biro Layanan Informasi dan Konsultasi Remaja Bina Mentari) *Alifah* (Elemen Remaja Kritis Gender), dan lain sebagainya.

Strategi yang digunakan pun mulai berpijak pada paradigma lebih populis, yakni kesadaran, pemberdayaan, dan advokasi. Hasil dari strategi ini memunculkan gerakan IRM yang sangat kuat di tingkat aktivitas dan pembelaan

11 Anjar Nugrogo, "Paradigma Gerakan IPM di Era Reformasi" FGD LAPSI

ketidakadilan sosial. Pelatihan SRATK (Studi Refleksi Aktif Tanpa Kekerasan) dan PSG (Pelatihan Sadar Gender) dilaksanakan dengan mungundang elemen-elemen lain di luar IRM. Di tingkat advokasi, IRM melakukan pendidikan anak korban konflik di Maluku. Meskipun hal ini sedikit ada masalah di tingkat kordinasi. IRM pernah melakukan *lobbying* dan negosiasi tentang peningkatan anggaran pendidikan nasional ke pemerintah sebagai wujud keprihatinan akan mahalnya biaya pendidikan. Semua ini mununjuk pada pemaknaan gerakan yang berparadigma populis yang berpihak kepada remaja dan pelajar yang tertindas harus diadvokasi, dibela dan diperjuangkan.¹²

Pada Mukttamar XII 2000 adalah pertama kali ada "Bidang Hikmah dan Advokasi" dalam struktur IRM. Pada saat itu, Mukttamar yang bertema "Meneguhkan Jati Diri, Merapatkan Barisan Menuju Indonesia Baru" ini menetapkan Raja Juli Antoni sebagai Ketua Umum dan Arif Jamali Muis sebagai Sekretris Jendral. Pada Mukrtamar ini pula penyusunan "kebijakan IRM jangka panjang tahap II ditetapkan selama empat (4) kali pelaksanaan Mukttamar dimulai dari periode Mukttamar XII sampai Mukttamar XV dimana masing-masing tahapan memiliki sasaran khusus dalam kerangka sasaran jangka panjang. Adapun Mukttamar XII diarahkan pada pengembangan program-program advokasi kepelajaran/keremajaan untuk memupuk kepekaan sosial politik, etos intelektual dan nilai-nilai moral kepada remaja/pelajar.¹³

¹² Panitia Mukttamar ke-10 IRM "Tinta Emas: Goresan Sejarah...", 12

¹³ Lihat Garis-Garis Besar Haluan kerja IRM yang tertuang dalam Sasaran Umum sebagai bagian dari Program Jangka Panjang IRM sekaligus menjadi visi besar IRM, sebagai berikut :Mukttamar XII : diarahkan pada penataan dan pemantapan gerak organisasi dengan mengusahakan kemandirian/otonomisasi dan pengembangan program-program advokasi kepelajaran/keremajaan yang muatanmuatannya antara lain adalah memupuk kepekaan social-politik, etos intelektual dan nilai-nilai moral kepada remaja/ pelajar; Mukttamar XIII : diarahkan kepada mentradisikan kesadaran kritis dikalangan pelajar dan remaja melalui pengembangan nilai-nilai advokasi, kaderisasi dan penguatan infrastruktur; Mukttamar XIV : diarahkan kepada pengembangan gerakan untuk mewujudkan

Mainstream gerakan IRM dalam menghadapi fenomena baru saat itu ditegaskan melalui perlawanan tanpa kekerasan (nir kekerasan).¹⁴ Kekerasan bisa muncul di mana saja, melalui individu, budaya, media massa, negara, teknologi, dan lain sebagainya. Kekerasan bisa muncul secara struktural, kultural, dan bahkan ideologi. Dampak dari kekerasan adalah adanya korban dan ketidakadilan. Massifnya kekerasan berakibat pada ketidaksadaran manusia akan kekerasan yang ia alami. Biasanya kekerasan ini muncul melalui hegemoni struktural dan kultural dalam masyarakat.¹⁵ Anjar Nugroho menambahkan penjelasan:

“Masa kepemimpinan 1998-2000 kami mengawali kerjasama founding yaitu Future Education dan proyek JPPR. Saat itulah pertama kali Muhammadiyah kerjasama dengan founding, dan itu dilakukan oleh IPM. Lembaga Alifa dapat proyek *Sadar Gender* dari Asia Foudation. Bendaharanya waktu itu adalah istri mas Raja Juli Antoni saat ini. Future Education dapat dana 2 Milyar, sehingga waktu itu energi IRM terfokus mengelola uang proyek itu bagaimana caranya harus dihabiskan dalam bentuk program-program kegiatan.”¹⁶

Pada periode ini semakin terlihat kerjasama dengan pihak Founding dengan beberapa agenda program di antaranya SRATK (Studi Refleksi Aktif tanpa Kekerasan), penerbitan *Buletin Retas* dan Pelatihan Sadar Gender. Gerakan Aktif Tanpa Kekerasan (GATK) merupakan contoh yang dilakukan oleh IPM pada periode 2000-2002.

gerakan IRM sebagai kekuatan transformative di masyarakat dengan mengusahakan pengayaan program-program alternative pemberdayaan; Mukhtamar XV : diarahkan kepada pengembangan gerakan menuju internasionalisasi gerakan dengan mengupayakan bentuk pemberdayaan yang dapat menguatkan daya saing yang antara lain bermuatan penguasaan IPTEK dan keterampilan professional. Lihat Tanfidz Mukhtamar XIII IRM..., 5.

14 *Ibid*

15 Saud El-Hujjaj, “Membincang IRM...,”

16 Anjar Nugrogo, “Paradigma Gerakan IPM di Era Reformasi” FGD LAPSI

Konsep gerakannya sederhana tetapi efektif. Gerakan ini melahirkan konsep “membela teman sebaya”, agar temannya tidak menjadi korban kekerasan.¹⁷ Menurut Irfan Amale, penggagas SRATK adalah Syifa’ul Arifin. Karena interaksi IPM dengan komunitas *Non Violent Community* di Solo dan PSKP UGM. Saat itu isu kekerasan muncul, Gerakan Aktif Tanpa Kekerasan (GATK) IRM muncul sebagai reaksi. Di Eropa gagasan Johan Galtung tentang *nonviolent* juga mulai populer dan masuk ke Indonesia Lalu IRM menggagas GATK dan SRTK. Penggerakannya Syifa’ul Arifin, Irfan Amale dan Raja Juli Antoni. Kemudian IRM menerbitkan buku yang berjudul *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan* yang diterbitkan Pustaka Pelajar. Studi Refleksi Aktif Tanpa Kekerasan dilakukan di 10 (Pimpinan Wilayah) dan didukung oleh The Asia Foundation. IRM juga menerbitkan *Majalah Retas, Resistensi Tanpa Kekerasan yang* sempat menjadi suplemen *Majalah HAI*, yang mana saat itu menjadi majalah paling berpengaruh di kalangan remaja Indonesia dengan oplah 50 ribu. Itulah yang menjadi embrio *Peace Generation*, sampai sekarang menjadi gerakan yang digawangi oleh Irfan Amale. Artinya gerakan-gerakan perdamaian di IPM di awal 2000an dan masih berpengaruh hingga kini. Karena ada beberapa asumsi SRATK yang terus aktif.¹⁸

3. Manifesto Gerakan Kritis-Transformatif

Wacana “kesadaran kritis” mulai muncul kepermukaan pertama kali ketika Mukhtamar XIII IRM 2002 di Yogyakarta¹⁹. Menurut Munawwar Khalil

17 Irfan Amalee, “Angkatan Muda Muhammadiyah Perlu Membuat Branding” Suara Muhammadiyah 16/101 (16 Agustus 2016), 16.

18 Keterangan Irfan Amale (20/9/2015)

19 Mukhtamar diselenggarakan di kampus terpadu UMY. Mukhtamar dihadiri oleh lebih kurang 500 orang peserta dari seluruh Indonesia. Mukhtamar berlangsung dari tanggal 10 hingga tanggal 13 Oktober 2002. Mukhtamar dibuka pada tanggal 10 Oktober dengan acara pembukaan diisi sambutan ketua umum PP IRM 2000-2002, Raja Juli Antoni serta pembukaan oleh ketua umum PP Muhammadiyah DR H A.Syafii Maarif. Dalam pidato sambutannya Raja Juli Antoni mengatakan bahwa IRM harus mampu menjadi subyek perubahan.

awalnya banyak yang pesimis dengan tema «kritis», karena dianggap terlalu mewah untuk berkembang di Indonesia akibat trauma rezim Orde Baru. Salah satu semangat dari membangun kesadaran kritis tersebut adalah memposisikan pelajar/remaja sebagai “subyek perubahan”. Hal ini berarti IRM ingin menempatkan pelajar dan remaja memiliki *bargaining position* di tengah perubahan dan heterogintas persoalan di masyarakat.²⁰

Pasca Orde Baru 1998, menurut Ridho Al-Hamdi, wacana gerakan sosial-kritis mempengaruhi sejumlah gerakan anak muda termasuk IPM/IRM saat itu. Pada setiap momentum kegiatan, terutama pada forum-forum ideologis, aktor-aktor IPM mulai menganalisa apa dan bagaimana peran IPM pada ranah publik di Era Demokrasi. Dari situlah IPM menemukan bentuk baru dengan gagasan kritis. Sejumlah ilmuwan yang ahli di bidang ini pun menjadi bahan rujukan seperti Mansour Fakih kelompok Insist Yogyakarta.²¹ Dalam kaitan ini Ridho secara langsung menyatakan:

“Para aktivis IPM dikenalkan dengan sejumlah pemikiran-pemikiran kritis seperti Madzhab Frankfurt dari Jerman, pendidikan kritis ala Paulo Freire, Erich Fromm, dan yang lain sebagainya. Wacana-wacana yang demikian diharapkan dapat menjadi paradigma gerakan IPM dalam menganalisa problem-problem sosial. Sekadar sebagai penjelasan, gagasan kritis merupakan sebuah konsep yang mencoba melakukan kritik atas ketimpangan yang terjadi pada masyarakat modern, dimana terjadi proses dehumanisasi

Pengkaderan selama ini harus diarahkan untuk membentuk anggota IRM menjadi pribadi yang dinamis dan tanggap terhadap perubahan. Sementara itu Dr Syafii Maarif mengatakan bahwa IRM saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Hal ini dilihat dengan banyaknya intelektual intelektual muda yang duduk di kepengurusan. Kader IRM harus bisa menjadi kader bangsa, umat dan persyarikatan. Lihat *Dari arena Muktamar IRM XIII* Suara Muhammadiyah Edisi 21 2002

20 Munawar, *Membangun Kesadaran Kritis Remaja*

21 Ridho Al-Hamdi, “Menuju Gerakan Pelajar Kreatif: Deklarasi Gerakan Komunitas IPM Berbasis Hobi”, *Manifesto Gerakan Perlawanan Pelajar* (Yogyakarta: PPIP, 2011), 200.

yang dilakukan oleh pemilik modal terhadap kaum buruh. Ketimpangan kelas inilah yang dikritik oleh Karl Marx agar mengeluarkan manusia dari ketertindasan kapitalisme.²²

Menurut Saud El-Hujjad, paling tidak, terdapat tiga ciri kesadaran kritis, *pertama*, sadar akan fenomena atau relasi yang tidak adil dalam masyarakat dan merasakannya. *Kedua*, memahami relasi struktural mengapa kekerasan atau ketidakadilan tersebut terjadi, dan memiliki agenda untuk mengatasi (perubahan). *Ketiga*, munculnya tindakan pribadi maupun kolektif untuk transformasi sosial. Pada titik inilah mainstream gerakan IRM dibangun, yaitu kritisisme dan transformasi sosial.²³

Secara sistematis Manifesto Gerakan Kritis-Transformatif dirumuskan oleh Amika Wardana dkk., sebagai tim perumus materi Muktamar ke-14 di Bandar Lampung 2004. Saat itu, pimpinan pusat IRM di bawah kepemimpinan Munawar Khalil (2002-2004). Secara konseptual, paradigma GKT berangkat dari hipotesa bahwa IRM harus mengambil peran pada problem-problem sosial. Karena selama ini IPM hanya terlibat pada persoalan-persoalan internal saja sehingga slogan yang muncul adalah tiga tertib: "Tertib Ibadah, Tertib Belajar dan Tertib Organisasi."

Paradigma GKT terkonstruksi dari tiga tahapan yakni, paradigma kritis, kesadaran kritis, dan gerakan kritis. Sebuah gerakan harus dibangun dari sebuah paradigma kritis yang kemudian melahirkan kesadaran kritis, ketika kesadaran kritis terbentuk baru melakukan gerakan kritis dalam bentuk aksi transformatif yang disebut dengan praksisme-kritis. Praksisme kritis dilakukan dengan tiga P, yaitu penyadaran, pemberdayaan dan pembelaan. Gagasan GKT terkesan ingin memposisikan IRM sebagai gerakan sosial yang memperjuangkan kepentingan

²² *Ibid*, 199.

²³ Saud El-Hujjad, "Membincang IRM...",

pelajar sebagai kelas sosial yang tertindas.

Sejak saat itu, dinamika gerakan IPM diwarnai oleh istilah serba kritis. Setiap kegiatan baik itu musyawarah, forum kaderisasi, maupun pelatihan-pelatihan lainnya pasti tidak terlepas dari kata "kritis". Keterangan Ridho Al-Hamdi menyatakan ketika perkaderan paripurna Taruna Melati Utama di Bandung, 2006, semua peserta diajak untuk mengkaji segala sesuatu dengan paradigma kritis, bahkan menganalisa apakah struktur IPM sudah mencerminkan karakter kritis atau tidak, apakah pendanaan IPM sudah sesuai dengan nilai-nilai kritis atau tidak, dan lain sebagainya. Wacana yang dikembangkan tidak terlepas dari terma-terma partisipatoris, kesadaran kritis, transformatif, perubahan sosial, dan sejenisnya.

Wacana tentang gerakan sosial baru (*new social movements*) juga muncul di IPM (dulu waktu masih IRM) pada periode 2002-2004. Menurut Moh. Mudzakkir, perbincangan tentang perlunya IRM mengkaji teori model gerakan *ala new social movements* telah mengemuka di forum-forum perkaderan IRM di tingkat pusat hingga wilayah. Maka saat itu, setiap PKTMU²⁴ wacana Islam Transformatif (Moeslim Abdurrahman), Pendidikan Kritis (*Critical Education*) ala Paulo Freire, globalisasi dan neoliberalisme, *New social Movements*, dan ditambah Analisis Sosial (Ansos) sebagai *tool of analysis* menjadi menu utama perkaderan IRM.²⁵ Lebih spesifik gagasan kritis-transformatif sintesis pendidikan kritis Freirean yang dibawa oleh Mansour Fakih dan Islam Transformatif

²⁴ Periode PP IRM 2004-2006 menyelenggarakan PKTMU empat kali yang dibagi menjadi berdasarkan regional. Yaitu regional Kalimantan, Jawa-Bali-Nusa Tenggara, Sumatera, dan terakhir Kawasan Indonesia Timur/KTI (yang terakhir kurang memenuhi syarat karena diselenggarakan mendadak plus karena disibukkan dengan berbagai persiapan Muktamar Medan). Dari semua PKTU tersebut, satu yang tidak bisa penulis ikuti (menjadi fasilitator) yaitu PKTMU KTI yang diselenggarakan di Jakarta.

²⁵ Moh. Mudzakkir, "Gerakan Sosial Baru (Pelajar)" dalam *Manifesto Gerakan Perlawanan Pelajar* (Yogyakarta: PPIPM, 2011), 150

Moeslim Abdurrahman.²⁶ Islam transformatif menurut Moeslim sebagai berikut:

“Islam Transformatif’, pada dasarnya adalah sebuah impian teologis, yakni bagaimana agar makna agama bisa diperebutkan oleh mereka yang terpinggirkan, bukan dalam adu otoritas tentang siapa yang boleh menafsirkan dan tidak boleh menafsirkan makna suci, tetapi bagaimana Islam boleh menjadi ruh pembelaan bagi mereka yang sengsara tatkala mereka yang menindas dengan kekuasaannya juga menggunakan pembenaran agama yang sama.”²⁷

Selain itu, saat itu dalam Muhammadiyah pada 9 Oktober 2003 muncul sayap anak muda yang tergabung dalam JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah) yang berangkat dari kesadaran menghidupkan kembali teologi al-Maun. JIMM memiliki “Tiga Pilar Paradigma”, yakni antara lain: hermeneutika²⁸, teori sosial kritis²⁹ dan gerakan sosial baru. Paradigma ini diharapkan dapat merubah tingkat kesadaran intelektual dan gagasan-gagasan revolusioner dalam rangka mengarungi gelombang besar globalisasi.³⁰ Wacana dan konteks sosial ini kemudian berdialektika dengan realitas yang ada dalam tubuh IRM, kemudian menjelma menjadi

26 *Materi Konpirwil Ikatan Pelajar Muhammadiyah* (Padang: PPIPM, 2013), 6.

27 Moeslim Abdurrahman, “Pengantar,” *Suara Tuhan Suara Pemerdekaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 11.

28 Hermeneutika sebagai alat analisis, diharapkan akan terjadi reproduksi makna atas wahyu ilahi yang termanifestasikan dalam al-Qur’an, “...sehingga makna-makna zaman baru kemudian bisa dikontrol dengan refleksi-refleksi Qur’ani;” Moeslim Abdurrahman, “Munculnya Kesadaran Kritis Ber-Muhammadiyah: Sebuah Pengantar,” x.

29 Teori sosial kritis sebagai alat analisis, untuk mendiagnosa adanya hegemoni kekuasaan yang menindas yang terdiseminasi ke pelbagai bidang, dan membangun kekuatan *counter-hegemony* yang menekankan pada penyadaran kaum tertindas dan pentingnya membangun perspektif teologi pembebasan. Moeslim Abdurrahman, “Munculnya Kesadaran Kritis Ber-Muhammadiyah,” xi.

30 Biyanto, *Tafsir Sosial Ideologi Keagamaan Kaum Muda Muhammadiyah Telaah terhadap Fenomena Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM)*

manifesto GKT sebagai gerakan populis ala IRM.

4. Kritik atas Paradigma GKT

Gagasan GKT pada perjalannya menemukan tantangan. Salah satu problem adalah GKT dianggap masih berada di atas langit. Para aktivis dan ideolog IPM seolah belum mampu menjadi "penafsir kreatif" atas gagasan tersebut. Gagasan ini ditolak oleh sebagian kalangan, gagasan GKT dinilai sekuler. Ada yang mengatakan, bahwa gagasan ini jauh dari realitas. Karenanya, gagasan GKT perlu dikontekstualisasikan secara lebih riil-implimentatif. Meminjam istilah yang sering dipopulerkan oleh Thomas Kuhn, GKT mengalami anomali sehingga tidak bisa menjawab masalah yang dihadapi. Perlu dilakukan revolusi ilmiah atau *shifting paradigm* agar alat bacanya kontekstual. Di sinilah teori dialektika GWF. Hegel, pemikir asal Jerman, menjadi benar. Ada tesa (sebuah ilmu), kemudian dipatahkan dengan anti-tesa (sebuah kritik) sehingga melahirkan sintesa (ilmu baru). Perlu sebuah gagasan baru, agar IRM dapat menginjakkan kakinya untuk melakukan aktivisme sejarah dan membela kepentingan kaum pelajar.³¹

Gagasan GKT ingin memposisikan IPM sebagai salah satu gerakan sosial yang memihak kelas sosial pelajar sebagai kaum tertindas. Dari sini terlihat, bahwa elite-elite IPM ingin membawa gerakannya seperti gerakan-gerakan perlawanan. Sebagaimana muncul buku "*Manifestasi Gerakan Perlawanan Pelajar*" pada milad ke-50 tahun IPM. Gagasan GKT mulai digelorkan pada setiap momentum kegiatan IPM, mulai dari musywil, musyda, musycab, musyran, hingga perkaderan Taruna Melati dan pelatihan-pelatihan informal lainnya. Namun, di tengah-tengah itu semua, gagasan GKT menuai kritik dari berbagai pihak³².

Dari proses refleksi, Ridho Al-Hamdi melihat

³¹ Ridho Al-Hamdi, "Menuju Gerakan Pelajar Kreatif...", 205.

³² *Ibid*, 203.

semacam ada ketidak-siapan aktivis-aktivis dengan kehadiran gagasan GKT. Hal ini dikarenakan aktivis IPM yang belum membaca rumusan GKT secara mendalam, atau problem bahasa yang terlalu berat. Begitu SPI Hijau yang kebanyakan belum dibaca tuntas, tetapi tiba-tiba mengkritik bahwa GKT dianggap tidak Islami dan tidak relevan dengan gerakan IRM, terutama IRM di daerah-daerah. Belum lagi, hampir mayoritas pimpinan IPM di berbagai level kepengurusan tidak paham dan tidak mampu menafsirkan gagasan GKT. Alhasil, gagasan GKT masih berada di atas langit. Belum ada penafsir kreatif yang mampu membawa gagasan ini ke tingkat basis.³³ Mereka belum ada penafsir kreatif yang mampu membawa gagasan ini ke tingkat basis massa.

Di sinilah, pada akhirnya GKT menemukan jalan buntu. Mimpi yang telah dibangun oleh para pendahulu IPM benar-benar hanya sekadar mimpi. Ibarat sebuah bangunan, pondasi yang telah dibuat seolah berhenti karena si pembuat bangunannya berganti orang. Karenanya, rumusan GKT perlu diuraikan secara lebih riil sehingga benar-benar membumi dengan realitas anak muda (baca: pelajar). Sebagaimana momentum perubahan nama dari IRM ke IPM pada Mukhtamar di Surakarta, 2008 yang mengangkat tema "gerakan pelajar baru".

Kekhawatiran Munawwar Khalil, bahwa "kesadaran kritis" hanya akan menjadi sebuah mitos tanpa disertai kemampuan melihat realitas akar rumput IPM pasca Mukhtamar XIII (tahun 2002 di Yogyakarta) nampaknya terjadi. Karena itu GKT muncul dalam epistem pengetahuan tertentu. *Pertama*, iklim Orde Baru yang membelenggu dan memenjara masyarakat dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi. Begitupun dalam dunia pendidikan, pelajar hanya diposisikan untuk patuh dan tunduk pada pendapat guru. Tapi seiring dengan era

³³ *Ibid*, 208.

reformasi, keran keterbukaan dibuka luas. Orang bisa bebas berpendapat, berorganisasi dan beraktivitas. Dalam posisi ini pulalah tema "kesadaran kritis" yang dipilih IPM merupakan respon dari kebangkitan *civil society* yang menyemaikan nilai-nilai demokrasi, keterbukaan dan keseimbangan (keadilan). Karena itupula pelajar bisu harus bersuara dan jangan membiarkan haknya sebagai manusia dirampas (pendidikan, politik, ekonomi, budaya) harus dibangun melalui advokasi. Karena itu kata kunci pelajar IPM adalah "kritisisme". *Kedua*, Kesadaran kritis yang menjadi jargon IPM merupakan sebuah paradigma yang terbuka. Artinya, dimungkinkan untuk ditinjau ulang, dikritisi bahkan diganti bila tak relevan dengan semangat zaman yang senantiasa berubah. Karena itu "kesadaran kritis" tidaklah akan dijadikan berhala idealisme tanpa jejak di bumi realitas, sebab IRM/IPM tidak akan pernah bersahabat dengan *status quo* yang mengabaikan perubahan yang diperlukan manusia untuk meningkatkan, melengkapi dan memperindah harkat hidup manusia.³⁴

Hal ini sama halnya dengan Omid Safi yang menolak menggunakan istilah "Muslim Kritis" (*Critical Muslem*). Para kritikus kerap diidentikkan dengan mereka yang tidak pernah berhenti mengeluh (gelisah terhadap problem), tetapi tetap duduk nyaman dan tidak berbuat apa-apa. Dengan demikian, istilah "progresif" dipilih karena tidak ada kata lain yang tidak mengandung masalah. Kata "progresif" oleh Omid Safi diatribusikan kepada kata "Muslim", bukan Islam. Pilihan ini dianggap lebih tepat. Karena bukan Islam yang tidak progresif, melainkan para pemeluknya (Muslim). Oleh sebab itu, "Muslim Progresif" tidak memusatkan perhatiannya pada gagasan tentang Islam di alam ide, melainkan pada keterlibatan langsung dari manusia muslim di alam nyata (aksi-praksis).³⁵

34 Munawwar Khalil, "Praksisme Kritis IPM", dalam *Manifesto Gerakan Perlawanan Pelajar* (Yogyakarta: PPIPM, 2011),150.

35 Omid Safi, *Progressive Muslims: On Justice, Gender, dan Pluralism*. (England: Oneworld Oxford, 2003).

Selama ini, kita mengagung-agungkan “teori kritis” dan “kesadaran kritis” sebagai alat baca masalah. Karena kritis ialah bersifat pembongkaran masalah. Karena terlalu kritis, dan semua masalah kita baca dengan kaca mata kritis, kita menjadi manusia “pencari kesalahan”. Dalam bahasa al-Quran kita melakukan analisa “*nahi munkar*” (menemukan hal-hal negatif). Namun, kita lupa bahwa kita tak cukup melakukan nahi munkar, tetapi juga *ta’muruna bil ma’ruf* dan *tu’minuuna billah*, yang memberikan spirit atau teologi positif.³⁶

B. Corak Kosmopolitanisme (2008-2016)

Pada tahun 2015, perjalanan IPM diibaratkan sebuah manusia, sudah mulai memiliki kematangan berpikir, bersikap dan bertindak. IPM telah menjadi organisasi kepemudaan (OKP) terbaik nasional berturut-turut sejak tahun 2006, 2011, 2013, dan 2015 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemempora RI). Prestasi ini membawa IPM pada percaturan dunia global, hingga dua kali meraih ASEAN TAYO Award (*Ten Accomplished Youth Organization in Asean*) di Bangkok 2011 dan di Brunei 2014. Selain kembali meraih OKP Terbaik Nasional, tahun 2015 mendapatkan Penghargaan Pemuda Indonesia (PPI) dalam bidang Sosiopreneurship (Kewirausahaan Berbasis Sosial) 2015.³⁷

Fase kosmopolitanisme IPM memiliki arti penting, karena kosmopolitanisme bukan sekedar perspektif yang mampu mengafirmasi pentingnya konsep kewarganegaraan dunia (*the world citizenship*), tetapi juga strategi dakwah yang berupaya untuk memenangkan pertarungan dalam konstalasi peradaban global.³⁸ Dalam situasi ini, ada beberapa peristiwa penting dalam dinamika dan perkembangan IPM. Pertama, kembalinya nama IRM ke IPM dengan wacana *back to school*

³⁶ *Ibid*

³⁷ Proposal Muktamar XX IPM Kalimantan Timur

³⁸ Hasnan Bachtiar, Haeri Fadly dan Moh. Nurhakim, *Visi Kosmopolitanisme Islam Di Lingkungan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah*

sejak Muktamar XVI IRM di Solo tahun 2008. Artinya ada penyempitan ruang gerak, dari remaja kembali ke pelajar. Kedua, prestasi gerakan IPM yang semakin menginternasional, juga didukung dengan percepatan dan perkembangan teknologi di era digital atau era android. Ketiga, memasuki abad kedua, Muhammadiyah kembali mereaktualisasikan spirit Islam berkemajuan yang berwatak kosmopolitan.

Situasi itu, tentu mempengaruhi corak gerakan dan bagaimana perkaderan IPM. Karena mau tidak mau, IPM adalah bagian dari warga dunia (*global citizenship*), yang tidak hanya sebagai warga lokal (*local citizenship*), tetapi dalam perjumpaan antara *local* dan *global citizenship*. Ini merupakan pergumulan identitas yang tidak mudah, antara *being a true Muslim* dan *being a member of global citizenship* sekaligus, yang berujung pada pencarian sintesis baru. Gerakan yang membentuk pelajar seperti apakah yang dapat memayungi dan memberikan jangkar spiritual (etika) bagi pelajar yang hidup dalam dunia baru dan dalam arus pusaran perubahan sosial yang global sifatnya.

1. Pengembalian Nama IRM ke IPM

Gejolak perubahan nama IRM menjadi IPM telah bergulir sejak runtuhnya rezim Orde Baru dengan mundurnya Soeharto sebagai presiden RI kedua. Seakan mendapatkan angin segar, para kader ideologis di era IPM berusaha memperjuangkan kembali nama IPM. Perdebatan perubahan nama pun mendapat ruang apresiasi, apalagi tuan rumah Muktamar IRM XI adalah Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai basis pendukung IPM yang ideologis. Meskipun akhirnya aktor-aktor strategis IRM belum berani melakukan perubahan huruf "R" menjadi "P". Sebab hal itu, bukan sekedar huruf, tapi mempunyai muatan kesadaran historis dan ideologis.³⁹

³⁹ Seiring dengan perubahan rezim dari otoriter menuju demokratis, kebebasan bersuara, berseikat, dan berpolitik semakin terbuka luas, termasuk di lingkungan IRM saat itu. Wacana-wacana alternatif dan kritis, baik itu dalam bidang teologis, ideologis maupun praksis gerakan pun mendapat ruang bersemi. Aktor-aktor strategis IRM saat itu mencoba mengintrodusir wacana Islam dan teologi pembebasan,

Gejolak untuk mengembalikan nama dari IRM menjadi IPM lumayan hangat pada Mukhtar XII di Jakarta tahun 2000. Pada perkembangan selanjutnya, terus menjadi wacana setiap Mukhtar, dan terus bergulir seperti "bola liar" tanpa ada titik terang. Barulah titik terang itu sedikit demi sedikit muncul pada Mukhtar XV IRM di Medan tahun 2006. Karena pada Mukhtar itu dibentuk "Tim Eksistensi IRM" yang bertugas mengkaji basis massa IRM yang nantinya akan berakibat pada kemungkinan perubahan nama.⁴⁰

Sebenarnya, perdebatan perubahan nama dari IRM menuju IPM pasca era Reformasi dari tahun 1998-2006 terus, meskipun dengan tingkat intensitas yang berbeda-beda. Menurut Moh. Mudzakir, perdebatan yang cukup panas terjadi di beberapa momentum, misalnya tahun 1998 pada forum Mukhtar Makassar sebagai titik awal, kemudian berlanjut pada Mukhtar tahun 2000 di Jakarta hingga harus melakukan voting dan dimenangkan oleh kelompok pro *status quo* (baca; IRM). Diskursus tentang identitas gerakan ini pun berlanjut pada tahun 2006 Mukhtar Medan, harus jujur diakui bahwa di dalam Tim Materi (Mukhtar) saat itu diam-diam telah mengarahkan materi-materi (basis massa, lokus gerakan, dan strategi gerakan) menuju persiapan transformasi dari IRM menjadi IPM, dan Moh. Mudzakir termasuk di dalamnya.⁴¹

Wacana *back to school* pada Mukhtar XV di Medan dimunculkan, karena ingin berubah IRM menjadi IPM,

gerakan anti-kekerasan, keadilan gender, pendidikan kritis, hingga pendidikan politik kebangsaan. Perkembangan wacana-wacana tersebut muncul di IRM tentu tidak bisa lepas dari pergulatan pemikiran aktor-aktor strategis yang berada di internal IRM sendiri, wacana yang berkembang di Muhammadiyah, dunia pergerakan, perguruan tinggi di tambah situasi nasional yang sedang berkejolak saat itu. Moh. Mudzakir, Gerakan Sosial Baru (Pelajar) Moh. Mudzakir, Gerakan Sosial Baru (Pelajar)..., 155.

40 Pimpinan Pusat IRM, *Materi Mukhtar XVI Ikatan Remaja Muhammadiyah* (Surakarta: PPIP, 2008)

41 Moh. Mudzakir, Gerakan Sosial Baru (Pelajar)..., 156.

walaupun dalam musyawarah yang berskala nasional ini belum bisa mengubah IRM menjadi IPM. Tetapi terbentuk tim eksistensi yang tugasnya mengkaji perubahan nama tersebut. Hingga titik puncaknya pada 2007 dengan munculnya Surat Instruksi PP Muhammadiyah tentang Perubahan Nomenklatur IRM menjadi IPM. Akhirnya pada Tanwir Muhammadiyah tahun 2007 di Yogyakarta, keluarlah Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 60/KEP/I.O/B/2007 tentang perubahan nomenklatur Ikatan Remaja Muhammadiyah menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah.⁴²

Peristiwa ini menggemparkan dunia persilatan IRM saat itu, pro dan kontra pun terjadi. IRM wilayah yang selama ini pro terhadap perubahan segera mengamini, tapi sebaliknya kelompok kontra mempertanyakan keputusan tersebut bahkan menuduh Pimpinan Pusat IRM saat itu melakukan jalan pintas dengan meminta fatwa (baca; intervensi) PP Muhammadiyah untuk menyelesaikan perdebatan yang berkepanjangan. Forum Rapat pleno diperluas pun diselenggarakan untuk mempertemukan PP Muhammadiyah, PP IRM, dan PW IRM, kesepakatan pun tercapai bahwa perubahan menjadi IPM final tapi melalui proses bertahap dengan beberapa persyaratan yang diajukan ke PP Muhammadiyah. Kesepakatan IRM dengan PP Muhammadiyah tentang nomenklatur tersebut dikawal dan dilegitimasi dalam forum Konpiwil pada tanggal 27-30 Januari 2008 di Makassar untuk mempersiapkan materi-materi perubahan nama. Akhirnya perubahan IRM menjadi IPM pun menjadi kenyataan pada Muktamar XVI di Surakarta.⁴³

Kembali ke Muktamar XV IRM yang penuh dinamika di Medan, 15-19 November 2006, telah menghasilkan empat poin penting yang menjadi *core* utama problematika yang dihadapi oleh pelajar. Empat problematika tersebut

42 Masmulyadi, "Mencari Corak Gerakan Ipm"..., 13.

43 Moh. Mudzakir, Gerakan Sosial Baru (Pelajar)...., 145.

adalah sebagai berikut⁴⁴: Pertama, problem agama yang meliputi; banyaknya pelajar yang belum memahami secara benar nilai-nilai utama (universal) ajaran Islam, abay terhadap masalah sholat lima waktu, malas mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta degradasi moral di kalangan pelajar akibat gempuran westernisasi. Kedua, problem pendidikan meliputi: tidak meratanya pendidikan di tanah air, komersialisasi pendidikan sebagai komoditas (berbisnis), rendahnya fasilitas pendidikan, pemadatan kurikulum pelajaran, serta kesehatan dan gizi bagi para pelajar yang rendah. Ketiga, problem budaya meliputi; (a) meluasnya pola pikir dan gaya hidup konsumerisme-hedonisme, tradisi menulis dan membaca yang lemah, dan senang menjadi penikmat teknologi daripada menjadi pencipta. *Keempat*, problem sosial-politik meliputi: pelajar tidak pernah menjadi pemegang kebijakan, kekerasan terhadap pelajar baik di sekolah maupun di keluarga dan masyarakat, dan menjadi obyek garapan dalam setiap momentum politik, misal Pilkada dan Pilpres.

Selain problem di atas, menurut Masmoeiyadi ada beberapa pandangan negatif dan meremehkan pelajar. Pertama, ada prasangka sosial yang telah tersebar luas di masyarakat bahwa pelajar belum memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman, serta belum bisa berpikir secara mandiri. Kedua, pelajar dianggap tidak bisa melawan terhadap segala kebijakan yang ada, serta tidak mampu menghimpun kekuatan. Misal di sekolah, siswa tidak berani mengkritik guru karena jika mengkritik akan dihukum atau dikeluarkan dari kelas. Ketiga, Pelajar hanya bisa melakukan perlawanan yang bersifat pribadi, emosional, argumentasinya tidak rasional, dan tidak sistematis. Keempat, Jika menyelesaikan masalah biasanya dengan jalur tawuran atau duel antarperson. Ototlah yang mereka gunakan, bukan rasio. Pandangan

⁴⁴ Tanfidz Mukhtamar XV IRM yang penuh dinamika di Medan, 15-19 November 2006

negative inilah yang membutuhkan perjuangan untuk mengubah mainset publik.

Akhirnya tibalah saatnya pada Muktamar XVI 2008 di Surakarta, menjadi togak sejarah dan momentum Muktamar terakhir menggunakan nama IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah). Pada forum tertinggi inilah IRM, akhirnya kembali ke nama aslinya yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Perubahan nama IRM ke IPM merupakan titik tolak untuk membuka ruang ijtihad gerakan baru. Senada dengan itu, Muktamar menggagas tema "Gerakan Pelajar Baru untuk Indonesia yang Berkemajuan". Berawal dari itulah kata "Berkemajuan" mulai digunakan dalam diskursus IPM. Selan itu, perubahan nama IRM ke IPM memiliki konsekuensi terhadap perubahan seluruh atribut IPM. Karena itu, pada Muktamar XVI dirumuskan perangkat organisasi mulai dari Muqaddimah Anggaran Dasar IPM, Kepribadian IPM, Janji Pelajar Muhammadiyah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Agenda Aksi.⁴⁵

Dinamika dalam forum Muktamar pun menghangat, dikarenakan ada satu hal yang dirasa belum tuntas dalam perubahan IRM ke IPM. Perubahan kata "Remaja" menjadi "Pelajar" atau huruf "R" menjadi "P" dinilai oleh sebagian aktivis IPM, hanya bersifat administratif, atributif, dan simbolis. Celah inilah yang dikritik atau ditolak keras oleh Pimpinan Wilayah IPM Jawa Timur pada waktu Muktamar di Solo yang memperjuangkan "IRM Harga Mati", artinya tetap saja menggunakan nama IRM. Akan tetapi, sebenarnya yang dimaksud dari sebagian aktivis IPM yang menolak perubahan nama adalah karena perubahan IRM ke IPM tidak substantif. Karena dasar alasan perubahan IRM ke IPM karena "surat sakti" (baca: nomenklatur) dari PP Muhammadiyah tidak cukup memuaskan para aktivis IPM. Harusnya perubahan IRM ke IPM disertai dengan perubahan pada aspek filosofis

45 Ridho Al-Hamdi, Logisai Framework GPK (catatan pribadi).

dan paradigmatik serta kajian mendalam. Di samping ada hal yang perlu dipertimbangkan adalah keberadaan ranting IRM di luar sekolah, terutama ranting masjid atau desa. Atas dasar itu, dapat disimpulkan bahwa spirit dari Muktamar Solo ialah restrukturalisasi gerakan” dan perumusan paradigma baru. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana IPM baru harus membangun masa depan gerakannya? Apa paradigma gerakan yang ditawarkan untuk basis massanya yaitu pelajar?

2. Gerakan Pelajar Kreatif: *Unfinished Paradigm*

Pasca perubahan nama IRM menjadi IPM pada Muktamar XVI di Solo 2008, selama periode 2008-2010 IPM fokus pada perubahan pada hal-hal yang bersifat administratif, seperti pedoman administrasi kesekretariatan dan keuangan, pembuatan seragam batik yang baru, bendera, kop surat, dan lain-lain. Hingga pada Muktamar XVII di Yogyakarta yang berlangsung 2 - 8 Juli 2010, bersamaan dengan Muktamar Seabad Muhammadiyah dan Aisyiyah merupakan momentum di mana IPM harus mencari formula paradigma terbaik untuk basis massanya, yaitu pelajar. Berdasarkan hasil evaluasi, maka dirasa perlu dirumuskan gagasan besar yang lebih *applicable* untuk pelajar. Sesuai dengan temanya “Gerak Melintas Setengah Abad Pelajar Muhammadiyah, Penguatan Komunitas untuk Gerakan Pelajar Kreatif”, IPM menemukan gagasan baru yaitu Gerakan Pelajar Kreatif (GPK) sebagai model dan alternatif baru gerakan IPM.

Adalah Ridho Al-Hamdi⁴⁶, ketua tim perumus perubahan nama IRM-IPM pada tahun 2008. Ridho juga sempat terlibat menjadi kontributor pertemuan tim materi di Kaliurang Yogyakarta, 2010, menjelaskan bahwa gagasan GPK merupakan usaha perumusan paradigma baru untuk merespon dinamika anak muda yang gandrung dengan *group*, komunitas, genk, dan berbagai

⁴⁶ *Mantan Ketua PP IPM 2006-2010 dan Ketua Tim Materi sekaligus Ketua Perumus Perubahan Nama IRM menjadi IPM pada Muktamar 2008 di Solo, Oktober 2008*

istilah yang mengindikasikan berkelompok. Komunitas sebagai tempat anak muda untuk mengaktualisasikan dan mengekspresikan dirinya. Dengan komunitas, pelajar bisa berkreasi dengan sedemikian bebas. Seolah mereka menemukan jati dirinya sebagai manusia merdeka di komunitas yang mereka sukai. Dengan komunitas, pelajar bisa melakukan segala macam kegiatan tanpa paksaan ataupun penindasan dari pihak yang lain. Karena komunitas bukan organisasi struktural, bukan pula untuk kepentingan politik. Di sinilah mereka menemukan rumah barunya. Atas dasar itulah, gerakan komunitas merupakan agenda utama dari "Gerakan Pelajar Kreatif" (GPK).⁴⁷

Sebuah komunitas dapat berjalan secara berkesinambungan jika anggotanya terdiri dari manusia-manusia yang memiliki hobi yang sama (*based on hobby*). Secara filosofis, hobi mengindikasikan adanya kreativitas. Sedangkan kreativitas itu sendiri adalah hasil pemikiran yang biasanya melahirkan sesuatu yang baru. Di sinilah fitrah manusia, yaitu menjadi pencipta kreatif terhadap segala sesuatu yang telah ada di muka bumi.⁴⁸ Atas dasar itu, bahwa ketika gagasan komunitas diaplikasikan di kalangan pelajar, gerakan IPM akan mendapatkan warna baru di tengah dinamika globalisasi yang secara perlahan-lahan mengikis identitas kaum muda. Sebuah zaman dimana segala sesuatu serba teknologisasi, komputerisasi, dan digitalisasi. Secara tidak sadar kita telah diberikan candu-candu baru berupa televisi, internet, handphone, game online, dan lain-lain. Karena itulah, keberadaan komunitas-komunitas kreatif dari kaum muda merupakan jalur alternatif untuk melawan segala bentuk penindasan.⁴⁹

Gagasan GPK terkesan belum matang secara filosofis-konseptual. Menurutnya GPK menjadi sebuah *grand design* gerakan IPM. GPK bertujuan menjadikan

47 Ridho Al-Hamdi, "Menuju Gerakan Pelajar Kreatif "..., 200.

48 *Ibid*, 201.

49 *Ibid*, 202.

IPM sebagai organisasi pelajar yang melahirkan kaum muda kreatif dan merdeka sesuai dengan maksud dan tujuan IPM. Sehingga IPM semakin diminati oleh anak-anak muda. Operanionalisasi gagasan GPK adalah terbentuknya sebuah komunitas.⁵⁰ Menurut Ridho Al-Hamdi, dengan paradigma GPK ini, program-program dan kegiatan IPM diarahkan pada pembentukan komunitas-komunitas *based on hobby*. Agar pelajar Muhammadiyah (khususnya) dan pelajar umum yang selama ini jauh dari IPM. Karena itu, GPK adalah kelanjutan dari Manifesto GKT atau dapat disebut "babak kedua dari GKT" karena konsep GKT masih belum bisa dirasakan oleh pelajar di tingkat bawah. Dengan konsep GPK ini, pelajar dapat merasakan kegiatan-kegiatan IPM yang bersifat komunitas dan menampung minat dan bakat para pelajar di sekolah. Singkatnya, GPK merupakan kelanjutan dari GKT. Ini merupakan kesinambungan gagasan dari model baru gerakan IPM.⁵¹ Sebaliknya, GPK merupakan kontinuitas GKT dengan memberikan alternatif jalan baru ketika proses kampanye gagasan GKT mengalami jalan buntu. Singkatnya, paradigma "Kritis-Transformatif" menjadi ruh utama gagasan Gerakan Pelajar Kreatif. Jadi logika yang dibangun bukan logika filosofis, tetapi logika praksis. Yaitu bagaimana GKT dapat di implementasikan lebih riil di lapangan, tidak terkesan kaku dan kuno sehingga mudah diterima dikalangan basis massa IPM, yaitu pelajar.⁵²

Dalam perjalanan setahun GPK mendapat kritik dari

⁵⁰ Secara harfiah, komunitas berasal dari bahasa Latin "*communitas*" yang berarti: kesamaan. Kemudian dapat diturunkan dari "*communis*" yang berarti: sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak. Secara definitif, komunitas merupakan kelompok sosial dari berbagai jenis lingkungan yang memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Mereka memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya (kemampuan secara materiil maupun non-materiil), kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang sama. *Ibid*, 200.

⁵¹ Ridho Al-Hamdi, Logisai Framework GPK (catatan pribadi).

⁵² Tanfidz Muktamar XVII IPM Bantul, 2010.

internal IPM sendiri dan juga alumninya. Kritik David Efendi misalnya dalam makalahnya yang berjudul "transformasi gerakan pelajar?"⁵³ secara tegas menyatakan bahwa GKT yang merupakan lintasan jauh ke depan, namun dikerdilkan kembali dengan persoalan militansi, lalu dilenyapkan dengan pragmatisme. Mukthamar XVII Yogyakarta 2010, menunjukkan menguatnya aliran *developmentalisme* dalam tubuh IPM. Ideologi semakin sirna dengan kemunculan ide pelajar kreatif—*recreational* yang dimanifestasikan dengan program berbasis komunitas tanpa bobot ideologi dan miskin kerangka rekayasa social (*social engineering*). IPM dinilai dinilai melembek dan kehilangan orientasi gerakan. Akibatnya, IPM sebagai gerakan secara paradigma mengalami transformasi, namun sejatinya *mindset* sebagian besar anggota tidak berubah. Malah IPM menghadapi persoalan internal yang tidak tuntas misalnya birokratisasi diri, elitisme, problem bahasa pergerakan dan sebagainya yang menjadi hambatan tersendiri bagi proses transformasi gerakan.⁵⁴

Permasalahan muncul terkait posisi GPK terhadap GKT. Apakah GPK merupakan pengganti GKT yang dengan demikian GPK menjadi paradigma gerakan baru IPM atau GPK hanya sekedar upaya untuk mengimplementasikan GKT agar lebih mudah dipahami di tataran *grassroot*? Akhirnya, evaluasi "tentang GPK pun dilakukan saat Konpiwil 2011 di Ternate. Di sana diputuskan, bahwa GPK ialah sebuah "strategi gerakan", artinya bukan sebagai "paradigma gerakan". Coba kita lihat kutipan dari Tanfidz Konpiwil 2011:

"Dengan melihat realitas tersebut, maka kita perlu memperjelas posisi Gerakan Pelajar Kreatif terhadap Manifesto Gerakan Kritis-Transformatif. GPK merupakan

53 Makalah ini disampaikan dalam Forum Perkaderan Taruna Melati Utama di Bengkulu tahun 2011

54 David Efendi, "Transformasi Gerakan Pelajar?: Dari Gerakan Kader, Advokasi, Media, sampai Model Perlawanan Sehari-hari Pelajar" dalam *Pelajar Bergerak: Menuju Indonesia Berkemajuan* (Jakarta: Al-Wasat, 2014).

bentuk strategi perjuangan IPM, sedangkan GKT merupakan paradigma gerakan IPM. Oleh karena itu, jelaslah perbedaan keduanya, bahwa GPK adalah strategi gerakan IPM dalam memperjuangkan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh IPM saat ini. Mengingat fungsi GPK sebagai strategi, maka istilah "Gerakan" menjadi tidak tepat digunakan. Oleh karenanya, mulai Konpiwil ini, GPK dipertegas dengan istilah "Strategi Kreatif" IPM.⁵⁵

Akhirnya, problem paradigma gerakan, kemudian dijadikan materi penting dalam Pelatihan Kader Taruna Melati Utama (PKTMU) di Bengkulu, 10-20 Mei 2011. PKTMU mengusung tema, "Menggagas Model Gerakan IPM Baru untuk Sinergisitas Nilai & Perjuangan". Pada forum perkaderan tertinggi inilah IPM merumuskan ulang sistem gerakannya yang disebut dengan "strukturasi gerakan IPM". Hal-hal seperti falsafah pergerakan, paradigma gerakan, falsafah perkaderan, sistem perkaderan, agenda aksi dirumuskan ulang di forum PKTMU 2011. Akhirnya, ide-ide dari TMU inilah yang memberikan dasar "strukturasi gerakan" bagi lahirnya paradigma gerakan baru.

3. Gerakan Pelajar Berkemajuan

Gerakan Pelajar Berkemajuan (GPB) adalah paradigma gerakan IPM yang muncul pada Mukhtamar ke-18 IPM di Palembang 2012 yang mengusung tema, "Membangun Kesadaran Kritis, Mendorong Aksi Kreatif, untuk Pelajar Berkarakter". IPM berhasil melakukan sintesis antara konsep "kritis" dan "kreatif", dengan pelajar berkarakter yang "berkemajuan" sebagai alternatif paradigma. Menariknya konsep GPB ini adalah hasil dari gugatan materi Mukhtamar XVII Jakarta yang dibawa oleh Awang Darmawan saat itu sebagai Ketua Umum PD. IPM Kota Makassar, yang menawarkan konsep "Gerakan Pelajar Berkemajuan". Artinya konsep GPB adalah representasi basis massa, bukan semata-mata konsep yang dibuat oleh pimpinan pusat IPM.

⁵⁵ Tanfidz Konpiwil IPM Ternate: 2011, 6-7.

Jika sejak tahun 2000an IPM sudah membicarakan paradigma, maka pada tahun 2012 IPM mendefinisikan paradigma sebagai “seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan atau masalah yang dihadapi” yang diadopsi dari pakar paradigma dari UGM yaitu Heddy Shri Ahimsa Putra.⁵⁶

Selain itu, paradigma GPB merujuk “Islam Berkemajuan” dalam dokumen Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar Muhammadiyah ke-46) di Yogyakarta pada 20-25 Rajab 1431 H/3-8 Juli 2010, dalam “Pandangan Islam yang Berkemajuan” kita melihat bahwa Muhammadiyah bergerak ke arah paradigma kosmopolitan. ⁵⁷Demikianlah, corak kosmopolitanisme Islam yang dikembangkan oleh Din Syamsuddin pasca-Muktamar ke-46 di Yogyakarta, yang oleh Ahmad Najib Burhani, disebut sebagai “Muktamar Budaya”⁵⁸ dan Muktamar ke-47 di Makassar sebagai “Muktamar Teladan” yang penuh etis dan moralitas utama. Islam kosmopolitan berangkat dari kesadaran bahwa Muhammadiyah adalah bagian dari warga dunia yang memiliki “rasa solidaritas kemanusiaan universal dan rasa tanggung jawab universal kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan dan pemisahan jarak yang bersifat primordial dan konvensional”.⁵⁹

Islam berkemajuan yang memiliki tiga gradasi utama, yaitu “Membebaskan, Memberdayakan, dan

56 Tanfidz Muktamar XVIII Palembang

57 PP. Muhammadiyah, *Tanfidz Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar Muhammadiyah ke-46) di Yogyakarta 20-25 Rajab 1431 H/3-8 Juli 2010*, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2010).

58 Ahmad Najib Burhani, “Islam Murni” vs “Islam Progresif” di Muhammadiyah: Melihat Wajah Islam Reformis di Indonesia,” Martin van Bruinessen (Ed.) *Conservative Turn, Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*, (Bandung: Mizan, 2014).

59 PP. Muhammadiyah, *Tanfidz Muktamar Satu Abad Muhammadiyah...*, 18.

Memajukan”, kemudian dijadikan tiga pilar utama Gerakan Pelajar Berkemajuan yaitu “Pencerdasan, Pemberdayaan dan Pembebasan”. Inilah yang membedakan dengan tiga tertib (belajar, ibadah, dan organisasi), yang kemudian dilanjutkan dengan paradigma Gerakan Kritis-Transformatif (GKT) dengan tiga cirinya, yaitu “Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pembelaan”.⁶⁰ *Pertama*, pencerdasan bermakna IPM menjadikan *idea* sangat sentral bagi upaya transformasi sosial. IPM menjadi “gerakan ide”, “gerakan iqra’”, “gerakan ilmu” sebagaimana spirit al-Qalam ayat 1. *Kedua*, pemberdayaan sebagai mobilisasi sumber daya untuk melakukan perubahan secara bersama-sama masyarakat pelajar dengan spirit al-Ashr. *Ketiga*, pembebasan sebagai upaya membebaskan kaum pelajar yang dari segala bentuk penindasan (intelektual) sebagaimana spirit al-Maun.

Pada momentum Muktamar ke-18 2012 ini Gerakan IPM mesti dikembalikan pada khittah gerakan pelajar. gerakan yang memainkan posisi sentral pelajar sebagai subjek perubahan. Di sinilah IPM mesti menegaskan dirinya sebagai Gerakan Pelajar Berkemajuan (GPB) sebagai paradigma gerakan ilmu (pelajar).

GPB mengembangkan pandangan dan misi Islam yang berkemajuan sebagaimana spirit awal kelahiran Muhammadiyah tahun 1912 dan IPM tahun 1961. GPB membawa ideologi kemajuan yang melahirkan pencerahan bagi kehidupan pelajar. Pencerahan (*tanwir*) sebagai wujud dari Islam yang berkemajuan adalah jalan Islam yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan dimana penggunaan akal pikiran dan ilmu pengetahuan sebagai instrumen kemajuan, Sehingga GPB berorientasi pada pencerdasan, pemberdayaan dan pembebasan pelajar. (Tanfidz Muktamar XVII 2012).

Paradigma GPB selanjutnya diuji secara intelektual, yaitu PKTMU 2013 di Makassar yang secara eksplisit mengusung tema, “*Membumikan Gerakan Ilmu untuk*

60 Materi Konpiwil IPM Padang: 2013, 6.

Pelajar Berkemajuan”. Dalam diskursus pelatihan TMU, IPM menemukan konsep “paradigma” menurut Heddy Shri Ahimsa-Putra. Menurut Ahimsa, paradigma, terdiri unsur-unsur sebagai berikut: a. Asumsi Dasar; b. Etos / Nilai-nilai; c. Model d. Masalah; e. Konsep-konsep Pokok f. Metode-metode Penelitian ; g. Metode-metode Analisis; h. Hasil Analisis; dan i. Representasi. Sembilan (9) unsur ini dapat digunakan dalam membentuk paradigma pelajar berkemajuan, sebagai manifestasi gerakan ilmu di kalangan pelajar. Unsur-unsur paradigma menurut Ahimsa dijadikan rumus penyusunan paradigma GPB yang disahkan pada Konpiwil 2013 di Padang, Sumatra Barat. Spirit dari GPB ialah gerakan ilmu (iqra’, pelajar), yang menjadikan Islam Berkemajuan sebagai dasar kemajuan peradaban.

Tidak cukup di situ, uji intelektual juga dilakukan ketika Seminar dan Lokakarya Sistem Perkaderan IPM di Yogyakarta yang saat itu IPM mengundang Ahimsa Putra untuk membantu IPM berbicara paradigma barunya. Terahir pada Muktamar XIX IPM di Jakarta tahun 2014, merupakan muktamar penegasan identitas IPM sebagai Gerakan pelajar Berkemajuan. Hal itu dapat dilihat dari tema “Spirit Keilmuan untuk Gerakan Pelajar Berkemajuan”.

Jika pada fase populisme IPM, banyak yang menyebut IPM cenderung sebagai gerakan sosial dan sekuler, bahkan SPI Hijau ada yang menyebut SPI Kafir “bagi yang tidak paham”. Maka corak kosmopolitanisme IPM hadir dengan visi Islam Berkemajuan yang menjadikan al-Qur’an dan Sunnah sebagai alat baca memahami realitas yang begitu kompleks. Logika GKT ternyata berbeda, bahkan berlawanan dengan logika GPB. Paradigma GKT mengidentikkan dimensi religius dan dimensi sosial—yaitu, kesalihan agama tidak substansial jika tidak dibarengi dengan kepedulian sosial. Sementara paradigma GPB menarik batas antara dimensi rohani (iman) dan dimensi sosial (amal salih). Bagi GKT kepedulian sosial merupakan kriteria bagi kesalihan agama, sedangkan bagi GPB

dimensi agama dan dimensi sosial merupakan dua hal yang berbeda—meskipun tidak terpisah—yang masing-masing memiliki kriteria dan ukuran.

Dalam bahasa populer kontemporer GKT cenderung memilih ideologi “kiri” (populis), yaitu kesadaran strukturalis terhadap ketimpangan sosial. GKT memandang bahwa peradaban selalu dikuasai kelompok kuat (penguasa, kaya, pandai, dan sebagainya), moralitas GKT selalu berpihak kepada kelompok lemah (miskin, tertindas, bodoh, dan lemah). Logika GKT status quo cenderung sebagai “tersangka” secara moral, terkait berbagai persoalan kelompok lemah. Sistem yang baik akan menghasilkan realitas kehidupan yang baik, sistem yang buruk akan menghasilkan kehidupan yang buruk. Sehingga kata kunci dari GKT adalah “kritisisme” dan “keadilan”.

Sementara GPB mengajarkan bahwa iman dan amal salih, keduanya berbeda dalam dimensi dan konstruksinya. Kepedulian sosial mengandung nilai dan kebaikan agama, namun kebaikan agama tetap dapat dicapai meskipun tanpa kepedulian sosial. Logika GPB ini akan memiliki konsekuensi kepada keterbukaan kesempatan untuk meraih kebaikan, yang mengutamakan kapasitas dan kemampuan usaha individu, apresiasi dan perlindungan kepada hasil kinerja dan prestasi personal. Dalam upaya untuk menyelesaikan persoalan dan memperbaiki situasi, GPB tidak berorientasi pada sistem dan tidak mendorong intervensi atau rekonstruksi sistem-sistem alternatif, melainkan lebih kepada upaya untuk menghilangkan atau mengurangi persoalan dan ketidakadilan yang secara kongkrit. Sehingga kata kunci GPB adalah “daya kreatif” dan “peradaban”. Baik GKT dan GPB, ketiganya ada sangkut-pautnya dengan *at-Takatsur* tentang perlawanan dan pencegahan terhadap “hedonisme”. GKT berpijak pada Islam Transformatif, sedangkan GPB berpijak pada Islam Berkemajuan. Keduanya saling membutuhkan untuk membangun irama dakwah *amar ma’ruf nahi mungkar* Muhammadiyah.

Substansi penting yang paradigma Gerakan Pelajar-Berkemajuan". Jika selama ini perkaderan IPM menggunakan SPI Hijau identik dengan metodologi ANSOS (Analisis Sosial) sebagai pendekatan problem sosial, maka kini IPM memasukkan pendekatan baru, yaitu Appreciative Inquiry (AI). Bila selama ini (ANSOS) berbasis pada motif untuk keluar dari masalah, pendekatan *Appreciative Inquiry (AI)* terfokus pada pencarian 'kekuatan positif' organisasi untuk membangun visi yang harus diraih bersama. Aktivitas diawali dengan mengapresiasi (menerima realitas) apa yang terbaik dalam masyarakat, penciptaan impian masyarakat, perancangan tindakan, dan melakukan tindakan yang berbasis pada inti positif. Lebih dari itu, AI bukan sekedar berpikir positif, apalagi berpikir positivistic. Namun AI ialah tentang "the generative" yang membangkitkan kreativitas atau menciptakan inovasi sosial dengan "daya kreatif".

Tabel. Relasi Sosial Politik dan Paradigma Pemikiran

Era	ORDE BARU		REFORMASI	
	Tahap I (1966-1988)	Tahap II (1988-1998)	Tahap I (1998-2008)	Tahap II (2008-2015)
Dinamika Politik	Pancasila sebagai Asas Tunggal (1986)	Perubahan Nama IPM ke IRM (1992)	Kegagalan Pengembalian Nama IRM ke IPM (1998)	Keberhasilan Pengembalian Nama IRM ke IPM (2008)
Periode	Developmentalis	Pragmatis-Inklusif	Populis	Kosmopolitan
Paradigma	Tri Tertib (Ibadah, Belajar, dan Organisasi)		Manifesto GKT (Gerakan Kritis Transformatif)	GPB (Gerakan Pelajar Berkemajuan)
Epistem Sosial	Local Citizenship		Think Globaly, Act Localy	Global Citizenship

Teologi	Ali Imran (104)	Ali Imran (110)	Al-Ma'un	Al-'Ashr
Wacana Islam	Islam Murni	Islam Modernis	Islam Transformatif	Islam Berkemajuan
SPI	SPI Merah	SPI Biru	SPI Hijau	SPI Kuning

Pena 6

KODIFIKASI SISTEM PERKADERAN IPM

Bagian VI ini akan mengkaji genealogi perubahan sistem perkaderan IPM sepanjang sejarah, sebelum menemukan gagasan (pemikiran) pendidikan dalam sistem perkaderan IPM. Dalam sejarah IPM, tercatat telah beberapa kali melakukan proses rekonstruksi terhadap sistem perkaderannya. Kajian konstruksi sosial semacam ini disebut oleh Foucault dengan istilah "genealogi".¹ Menurut Foucault, pada dasarnya gagasan dan praktik pendidikan merupakan produk konstruksi sosial yang berakar pada agenda politik dan sosial yang akan terus berubah seiring perubahan masyarakat. Karena itu genealogi pemikiran pendidikan dalam sistem perkaderan IPM tidak terlepas dari perubahan politik Indonesia dan dinamika internal Muhammadiyah dan IPM. Sebagaimana sosiologi pengetahuan menurut Berger dan Luckmann yang mengarahkan perhatian pada pembentukan kenyataan oleh masyarakat (*social construction of reality*).² Oleh sebab itu, genealogi pemikiran pendidikan dalam sistem perkaderan IPM tidak dapat dilepaskan dari diskursus dinamika paradigma pemikiran yang berkembang dalam. Karena itu penting untuk memahami formasi paradigma IPM pada periode tertentu

1 Michael Foucault, 'Genealogy and Social Criticism' in *The Postmodern Turn: New Perspectives on Social Theory*, ed S. Seidman, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), 39-45.

2 Peter L Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, 21.

untuk membaca konteks lahirnya masing-masing sistem perkaderan IPM.³

Di masa awal, sebenarnya dalam IPM belum ada istilah sistem perkaderan, tetapi yang dikenal adalah pedoman perkaderan. Sebelum dirumuskan sistem perkaderan IPM, telah berjalan aktivitas perkaderan melalui training-training dalam IPM di banyak tempat. Secara genealogis, aktivitas perkaderan di IPM merupakan kelanjutan dari kegiatan perkaderan Muhammadiyah di masa itu.⁴ Kerasnya pertarungan ideologis antara Islam dan komunis, juga nasionalis berimplikasi pada perkaderan IPM yang menekankan membina mental dan kesadaran beragama supaya terlindungi ideologi komunis.⁵

Usaha penyusunan sistem perkaderan IPM format awal telah dimulai pada tahun 1969, 1973, dan 1976. Pertama, Pedoman Pokok Pendidikan Kader (P3K) yang dirumuskan pada "Seminar Kader" pada tanggal 20-23 Agustus 1969 di Palembang. Sejak inilah mulai dikenal istilah "Taruna Melati" sebagai nama pelatihan khas IPM dan "Coaching Instruktur" sebuah pelatihan untuk menyiapkan pengelola pelatihan Taruna Melati.⁶ Pada masa itu, training-training dalam IPM menggunakan doktrin yang disebut dengan "Panca Kesadaran IPM", yakni: kesadaran beragama, kesadaran berilmu, kesadaran beramal, kesadaran bernegara, dan kesadaran berorganisasi.⁷

Kedua, Pedoman Pendidikan Kader (PPK) ditetapkan pada Konpiwil 1973 sebagai pengganti pedoman hasil pada

³ Michael Foucault, "Genealogy and social criticism".

⁴ Menurut James L. Peacock, pelatihan perkaderan Muhammadiyah mulai diselenggarakan sejak aksi pembersihan PKI pada 1965-1966 dengan tujuan untuk memperkukuh solidaritas dan membina kader yang terinspirasi dari sistem "sel" khas komunis. Pelatihan yang pesertanya adalah kaum remaja, sampai tengah baya dengan sistem indoktrinasi. Lihat James L. Peacock, *Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), 99-100.

⁵ Ahmad Imam Mujadid Rais, "Pelajar Berkarya untuk Bangsa...", 90.

⁶ Pedoman Perkaderan 1969 Surat Edaran Khusus tentang Mukhtamar ke-3 IPM nomor; A.4/PP/IPM-031/1972.

⁷ Asnawi Syarbini, "Metode dan Sistem Perkaderan IPM...", 2.

Muktamar II di Palembang. Saat itu dibentuk BPK (Badan Pembina Kader) tingkat pusat; membentuk instruktur tingkat pusat; membuat buku pedoman training perkaderan; pedoman PKT (Perkampungan Karya Tauladan).⁸ Program-program perkaderan antara lain: Mabita (Masa Bimbingan Anggota) tingkat pimpinan ranting atau kelompok, Taruna Melati tingkat Pimpinan Cabang, Perkampungan Karya Tauladan (PKT) Dasar tingkat Pimpinan Daerah, Perkampungan Karya Tauladan (PKT) Lanjutan tingkat Pimpinan Wilayah dan Coaching Instruktur PKT Tingkat Lanjut tingkat Pimpinan Pusat.⁹

Ketiga, Metode dan Sistem Perkaderan IPM yang dirumuskan dalam seminar kader IPM di Tomang Jakarta tahun 1976.¹⁰ Pedoman ini dapat ditemukan dalam kertas kerja yang ditulis oleh Asnawi Syarbini¹¹ berjudul "Metode dan Sistem Perkaderan IPM" yang disampaikan dalam Seminar Kader dan Konpiwil pada 22-25 Desember 1976 di Jakarta. Menurut Asnawi Syarbini.¹² Training sebagai metode

-
- 8 Salah satu training yang bersifat penerapan atau praktek amaliyah adalah "Perkampungan Karya Tauladan IPM".Perkampungan Karya Tauladan IPM dimaksud untuk memperkenalkan anggota-anggota IPM dengan masyarakat, khususnya masyarakat di desa, sekaligus melatih mereka berkarya/beramal untuk masyarakat. Ini berarti mempersiapkan pemimpin-pemimpin Umat/Masyarakat, yang benar-benar berakar pada masyarakat, bukan pemimpin-pemimpin senior yang membesarkan dirinya dengan omong kosong yang hanya berdasarkan kepemimpinannya pada kepentingan sendiri, 80 % negeri kita terdiri dari desa-desa yang terlupakan pembinaannya. Maka tepat sekali kalau Muhammadiyah mempunyai program "Pembangunan Masyarakat Desa" (Pemas). Seiring dengan itu, sesuai dengan dengan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-2 di Palembang, yaitu akan meningkatkan gerakannya di bidang pedesaan dengan "Perkampungan Karya Tauladan". Pimpinan Pusat IPM, *Pedoman Perkampungan Karya Tauladan*, 2.
- 9 Keputusan-Keputusan Muktamar ke-3 Ikatan Pelajar Muhammadiyah Tanggal 20-26 Agustus 1972.
- 10 Surat Keputusan Konpiwil 1976 Nomor: A.1/PP/IPM/JKT/173/1977
- 11 Ketua Umum PP IPM, satu periode dengan M. Busyro Muqoddas periode 1985-1987, kini sebagai Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten.
- 12 Menurut Asnawi Syarbini, metode dan sistem perkaderan adalah

dan sistem perkaderan, sedangkan "Taruna Melati" menjadi istilah resmi "latihan kepemimpinan IPM" dimaksudkan untuk menciptakan kader dakwah amar makruf nahi munkar yang bergerak di ranah pelajar dan masyarakat, sesuai dengan paham keagamaan Muhammadiyah. Menurut keterangan Busyro Muqaddas, ketika itu IPM mengundang Kasman Singodimejo untuk menjadi narasumber. Karakter kader IPM adalah yang memiliki kemurnian tauhid, dan mampu melakukan revolusi ideologis pro-kemanusiaan.¹³ Karena itu, materi yang ditekankan adalah teknik komunikasi sebagai tulang punggung kemampuan memimpin, *problem solving*, *network planning*, dan *diction making*, sebagai faktor penting dalam pelatihan kepemimpinan dalam Taruna Melati. Selain TM, yaitu PKT (Perkampungan Karya Tauladan) yang merupakan sistem perkaderan yang mengharuskan kader-kader berbaur dan berkiprah di masyarakat desa.¹⁴ Hingga tahun 1976, IPM belum memiliki pedoman utuh. Pelatihan demi pelatihan untuk pembinaan sudah berdasarkan pedoman IPM, tetapi belum disebut dengan sistem perkaderan IPM. Pada akhirnya IPM mulai memiliki sistem perkaderan IPM tahun 1985 yang disebut dengan SPI Merah, SPI Biru tahun 1994, SPI Hijau tahun 2002, dan SPI Kuning tahun 2014.

A. SPI Merah (1986)

Sebelum tahun 1986 IPM sebenarnya telah memiliki pedoman perkaderan sebagaimana disebut di atas. Pelatihan

suatu proses usaha mempersiapkan personil (dari potensi yang ada), baik personil pimpinan maupun personil inti, menurut rencana yang sistematis dan intensif sesuai dengan sasaran (obyek perkaderan) dalam hal ini perkaderan IPM. Asnawi Syarbini, "Metode dan Sistem Perkaderan IPM...", 5.

¹³ M Busyro Muqaddas, 21 Desember 2015

¹⁴ Sidang komisi B tentang kaderisasi memutuskan dua hal: pertama, PKT (Perkampungan Karya Tauladan) masih tetap digunakan sebagai sistem kaderisasi dalam IPM. Kedua, mengamanahkan kepada PP IPM untuk mengadakan Seminar Kader seambatlambatnya 6 (enam) bulan sesudah Muktamar IV di Ujungpandang dengan mengundang perwakilan wilayah, untuk menciptakan sistem dan metode kaderisasi yang lebih berkualitas. KLihat eputusan Induk Konferensi Pimpinan Wilayah IPM se-Indonesia tanggal 27-29 Desember 1976 di Tomang, Jakarta Barat

demi pelatihan untuk pembinaan pelajar sudah berdasarkan pedoman-pedoman perkaderan IPM, namun belum secara utuh dan sistematis.¹⁵ SPI Merah muncul setelah berakhirnya konflik ideologis terutama antara Nasionalis, Agamis, dan Komunis (NASAKOM). Persoalan ideologis berakhir ketika Rezim Orde Baru mengeluarkan kebijakan yang pro dan kontra yaitu "Asas Tunggal Pancasila" yang pada akhirnya IPM menerimanya sebagai asas organisasi tahun 1986 sebagaimana dijelaskan bab III. Pada masa ini ialah fase developmentalisme IPM dengan didukung konsep "Tri Tertib" sebagai paradigma kader IPM. Menurut Subhan Purnoadji "SPI Merah" merupakan kodifikasi sistem perkaderan yang pertama kali. Sebelum periode itu bukan berarti tidak ada perkaderan, walaupun belum ada yang menyebutnya SPI, tetapi konsep dan praktik perkaderan 1980-an memperoleh kritikan dari golongan minoritas di IPM untuk direkonstruksi, karena sudah tidak sesuai dengan semangat zaman.¹⁶

Kritikan tersebut ditindak-lanjuti dalam 'Seminar Perkaderan' di Ujungpandang 23 Agustus-2 September 1985. Pada seminar ini dirumuskan sistem perkaderan yang dikenal sebagai "Buku Kuning", namun dalam perjalanan disebut sebagai "SPI Merah" karena dinilai doktrinal. SPI merah merupakan pedoman perkaderan pertama kali yang dirumuskan IPM secara komprehensif. SPI Merah disusun oleh "Departemen Pengkaderan dan Dakwah" yang digawangi oleh Haedar Nashir, Siti Noordjannah Djohantini, Agus Sukaca, Agus Kusnadi, dan Yoesoef A. Hassan. Komponen SPI Merah terdiri dari: Pedoman Umum, Pendidikan Khusus Ipmawati (Diksusti), Taruna Melati, Latihan Instruktur, Teknik Evaluasi, dan Kurikulum Perkaderan IPM. Waktu itu, penyusunan kerangka perkaderan IPM disertai kerangka acuan dan petunjuk pelaksanaan seminar perkaderan. Hasil seminar itu dibukukan dan disahkan pada Konpiwil 1986 di Yogyakarta

¹⁵ Subhan Purno Aji, "Falsafah dan Genealogi Perkaderan IPM", dalam www.pelajar-berkemajuan.blogspot.co.id, diakses tanggal 20 Oktober 2011.

¹⁶ *Ibid.*

21-22 Februari 1986.¹⁷

Sistem perkaderan pada periode ini sangat dipengaruhi oleh konteks sosial saat itu. Pada aras nasional, represi negara Orde Baru terhadap organisasi masyarakat Islam pada khususnya sedang mencapai puncaknya. Represi ini ditandai oleh kebijakan monoloyalitas. Kebijakan ini mengharuskan setiap ORSOSPOL (Organisasi Sosial dan Politik), termasuk Muhammadiyah dan seluruh Ortomnya (IPM), mengubah asasnya menjadi Pancasila. Saat itu hampir sebagian besar ORSOSPOL berbasis Islam menggunakan Islam sebagai asasnya. Kebijakan seperti ini merupakan bagian dari depolitisasi massa dan kebijakan massa mengambang (*floating mass*) yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Kebijakan ini yang paling merasakan adalah umat Islam, sebab sejak Orde Baru berkuasa, politik Islam nyaris diberangus dari pentas politik nasional.¹⁸

Derita politik inilah yang, setidaknya secara psikologis, dirasakan oleh aktivis IPM pada masa itu. Represi ideologis negara membuat sebagian orientasi gerakan pelajar Islam pada masa itu, termasuk IPM, menjadi semakin militan. Oleh karena itu, tak mengherankan jika sistem perkaderan IPM pada masa itu "bercorak doktriner", sehingga disebut "SPI Merah". Tetapi di atas itu semua, sistem perkaderan IPM pada masa itu menjadi penanda kematangan gerakan "IPM sebagai organisasi kader" sebagaimana pada bab II. Sebab sistem perkaderan merupakan institusionalisasi pemikiran gerakan IPM pada zamannya. SPI Merah memiliki muatan yang dogmatis, kurang dialogis, eksklusif dan kurang mencerminkan sebuah sistem pemikiran seorang kader.¹⁹

Hal ini dapat ditemukan dari keterangan Agus Sukaca, salah satu perumus SPI Merah menyatakan bahwa SPI Merah terinspirasi dari situasi 1961 sangat keras pertentangan

17 Pimpinan Pusat IPM, *Laporan Pertanggung Jawaban PP IPM Periode 1983-1986*, disampaikan pada Muktamar VII IPM 26-30 April 1986 Cirebon, 29.

18 Subhan Purno Aji, "Falsafah dan Genealogi Perkaderan IPM".

19 Saud, El Hujjaj, "SP IRM: Memilih Mitos atau Realitas?...", 4.

antara Islam dan Komunisme, hingga ancamannya adalah fisik (bunuh-membunuh). Hingga 1965 adalah puncak pertarungan ideologi begitu kuat. Wajar ketika itu, menurut Agus Sukaca metode andragogi dinilai tidak relevan, karena tidak memunculkan militansi yang kuat, sehingga metode yang banyak digunakan adalah pedagogi. Hampir dapat dipastikan bahwa setelah mengikuti perkaderan peserta seakan-akan bersiap perang (jihad). Situasi sejarah itu, mempengaruhi perkaderan IPM hingga 1980-an. Karena itu, SPI Merah memang sangat ideologis.

Secara metodologi, SPI Merah menggunakan metode pedagogi melalui indoktrinasi.²⁰ Selain itu, pola pelatihan pada era itu selain mengajarkan materi kepemimpinan, keorganisasian, juga ada materi *security*. Karena ketika itu masa-masa di mana pertarungan ideologi ketika itu sangat kuat, terutama masuknya ideologi komunis. Materi *security* itu bagaimana para anggota IPM bisa memprotek diri, dari berbagai *infiltrasi* ideologi, dan besar kemungkinan ada penyusupan-penyusupan. Dalam menghadapi komunis, IPM pada masa itu lebih menguatkan ideologi anggota, melalui pelatihan-pelatihan.²¹

Singkatnya, dapat disimpulkan bahwa paradigma pendidikan SPI Merah adalah konservatif-doktrinal dikarenakan orientasi purifikasionis yang dicirikan oleh

20 Adalah Jamaluddin Ahmad, Ketua Umum PP. IPM periode 1990-1993, menceritakan bahwa pelatihan perkaderan IPM “taruna melati” peserta dibangun untuk shalat tahajud berjamaah. Kemudian setelah tahajud ada sesi refleksi atau muhasabah seperti yang dilakukan oleh Ari Ginanjar. Keterangan M. Jamaluddin Ahmad tanggal 20 Agustus 2016.

21 Menurut pengalaman Agus Sukaca dalam SPI Merah, instruktur digambarkan seperti raja, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Namun pada. Saat evaluasi dan refleksi biasanya instruktur dan peserta ikut menangis, lalu di akhir pelatihan baru maaf-maafan. Sisi positifnya, mereka adalah militansinya luar biasa. Pertama kali pengurus datang langsung membentak-bentak peserta, pokoknya dicari semua kesalahan, yang terlambat dihakimi, termasuk yang terlambat langsung disuruh *push up*. Agus Sukaca, “Membedah SPI Merah” Seminar dan Lokakarya Nasional Sistem Perkaderan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Yogyakarta, 22-25 Desember 2013.

"*shari'ah-mindedness*". Bagi kaum konservatif, mereka yang menderita, yakni orang-orang miskin, buta huruf, kaum tertindas dan sengsara, karena salah mereka sendiri. Kaum konservatif sangat melihat pentingnya harmoni dalam masyarakat dan menghindarkan konflik dan kontradiksi.²²

B. SPI Biru (1994)

SPI Biru lahir di era 1990-an, di saat sikap negara Orde Baru terhadap umat Islam mulai memasuki tahap yang lebih akomodatif. Setidaknya tidak serepresif pada era sebelumnya. Kecenderungan sikap politik umat Islam lebih mengurangi sikap "ideologis"-nya dan lebih pragmatis karena memilih berkompromi terhadap negara. Perubahan sikap rezim penguasa terhadap Islam, turut mendukung perkembangan pemikiran Islam, sehingga corak pemikiran Islam tahun 1990-an menawarkan Islam yang kontekstual.²³ Kala itu telah berdiri ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Konteks ini dapat menjelaskan banyak hal tentang posisi Islam atas negara. Islam kota seperti Muhammadiyah jelas merupakan pihak yang dapat menikmati horizon baru, hubungan yang semakin dekat dan akomodatif.

Selain itu, pada tahun 1990-an dalam tubuh IPM menghadapi tiga dinamika penting. Pertama adalah proses "pemutusan generasi" atau "peremajaan usia pengurus IPM" yang terjadi sekitar tahun 1989 melalui Muktamar VIII (terbatas dan rahasia) di Madrasah Muallimin Yogyakarta. Pada waktu itu ada pemangkasan generasi di IPM melalui kebijakan PP. Muhammadiyah. Kedua, adalah perubahan nomenklatur dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM), tahun 1992. Ketiga, perubahan basis masa "pelajar" menjadi "remaja" berefek pada perubahan pola gerakan dan kaderisasi IRM dari eksklusif (pelajar) ke inklusif (remaja).²⁴

²² Topatimasang, Roem, dkk, *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis*. Yogyakarta: Insist Press, 2010), 27.

²³ Waryani Fajar Riyanto, *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan*, 134.

²⁴ M. Izzul Muslimin, "Kekuatan IPM Ada Pada Dialektika Pemikiran", dalam <http://www.ipm.or.id>, diakses 22 Agustus 2016.

Sebenarnya ada dua logika tentang perubahan SPI Merah ke SPI Biru. Menurut Arif Jamali Muis, sebenarnya SPI Biru merupakan respons dari perubahan nama IPM ke IRM (pelajar menjadi remaja) akibat tekanan rezim Orde Baru. Pertama, logika ketidakrelaan sebagian elit pimpinan pusat IPM terhadap perubahan IPM ke IRM yang menganggap perubahan nama IPM ke IRM hanya nomenklatur, tetapi jiwa dan ruh tetap IPM. Kedua, logika ketidakjujuran elite pimpinan pusat IPM. Wacana yang didesimenasi ke tingkat bawah adalah "perubahan IRM sebagai pengembangan sayap dakwah", padahal logika sebenarnya adalah karena paksaan rezim Orde Baru. Alasan direkayasa, seakan-akan IPM sebagai organisasi pelajar pakaianya terlalu kecil, perlu wadah yang lebih besar. Dengan kata lain diperlukan perluasan lahan dakwah dari pelajar ke remaja. Bungkus rezim Soeharto, dikemas apik menjadi seakan-akan perubahan nama adalah tuntutan zaman. Ironinya wacana itu benar-benar tertanam betul hingga tingkat ranting. Di sinilah ketidakjujuran aktivis IPM terhadap alasan perubahan IPM ke IRM.²⁵

Di saat yang sama, terjadi diskursus SPI Merah yang mendapat serangan kritik dari kalangan di IRM/IPM. SPI Merah dinilai terlalu eksklusif, doktriner, kurang dialogis, dan terlalu menekan jiwa kritis kader. Bahkan, SPI Merah dinilai tidak relevan lagi dengan perkembangan keilmuan dalam dunia pendidikan. Menurut Agung Y. Achmad, salah satu perumus SPI Biru, era itu di tubuh IPM mulai banyak intelektual muda yang sedang gandrung dengan gagasan-gagasan Islam kontemporer. Selain itu setting politik, wacana keislaman dan perkembangan zaman adalah bagian yang tidak terpisah dari variabel-variabel yang mewarnai SPI Biru.²⁶

Menurut Taufan Agasta perubahan SPI Merah ke SPI biru, memang terjadi pertarungan antara kubu konservatif dan pro perubahan (inklusif). Pada saat Seminar dan Lokakarya Nasional (Semiloknas) SPI di Malang berlangsung keras.

²⁵ Arif Musthofa Albuni dan Arif Jamali Muis, "Membedah SPI Biru" Seminar dan Lokakarya Nasional Sistem Perkaderan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Yogyakarta, 22-25 Desember 2013.

²⁶ Keterangan Agung Y. Achmad, tanggal 11 Oktober 2016.

Bahkan sempat terjadi insiden pemukulan antar peserta. Bisa jadi karena peserta dari kubu konservatif berasal dari salah satu pimpinan wilayah yang tercatat menjadi tempat dirumuskannya SPI sebelumnya, yakni SPI Merah yang notabene memang dianggap berhasil merekrut kader militan dalam jumlah yang signifikan.²⁷

Alhasil, sekitar tahun 1993-an gerakan perubahan "SPI Merah" menuai hasil dengan ditanfidzkannya sistem perkaderan baru atau yang lebih dikenal dengan sebutan "SPI Biru" tahun 1994.²⁸ Pertentangan terjadi antara golongan mayoritas yang konservatif dengan kalangan minoritas yang berupaya agar dilakukan rekonstruksi SPI Merah. Kemenangan diraih oleh kalangan minoritas, sehingga berdasarkan hasil Semiloknas SPI di Malang, lahirlah SPI Biru pada tahun 1994. SPI Biru ini dirumuskan oleh Arif Mustafa Al Buny (ketua), Sri Lestari Linawati (sekretaris) dan anggotanya terdiri dari Kusnadi Ali Pataka, Agung Y Ahmad, Hafidz Sirotuddin, Enjang Tedi, Amar Ma'ruf F, M. Taufan Agasta, dan Imam Ghozali Jazuli.

Kalau demikian, apa yang membedakan antara SPI Merah dan SPI Biru? sejatinya SPI Biru hanya pengayaan SPI Merah. SPI Biru tidak mengubah substansi SPI Merah. Paradigma yang ditanamkan dalam perkaderan sama dengan SPI Merah yaitu paradigma "Tri Tertib (Ibadah, Belajar dan Organisasi)". Ketidakjalasan SPI Biru, berdampak pada tidak dijalankan pedoman sesuai dengan konsep. SPI biru memang berhasil dalam membedakan perkaderan, pengaderan, dan

²⁷ Menurut Agasta, yang waktu menjadi peserta TMU TMU pertama kali dilaksanakan di Bangunjiwo Bantul. Taufan jadi peserta mewakili PW IRM DIY 1994. Disebut TMU pertama karena sebelumnya tingkatan pelaruhan kader IPM hanya sampai pada TM III. Ada peserta yang sangat keras dalam pemikiran keagamaan, namun setelah mengikuti TMU, pemikirannya banyak berubah menjadi lebih terbuka. Mungkin juga agak liberal dalam pemikiran setelah kira-kira sepuluh hari berinteraksi dengan teman lain yang pemikirannya terbuka, tetapi mumpuni juga dalam kajian filsafat dan agama. Hal ini dikarenakan kurikulum SPI Biru yang akomodatif terhadap keilmuan dan kebebasan berfikir. Keterangan Taufan Agasta tanggal 10 Oktober 2016.

²⁸ Subhan Purno Aji, "Falsafah dan Genealogi Perkaderan IPM".

kekaderan.²⁹ Menurut Arif Mustofa Albuni kurikulum SPI Biru ini mirip kurikulum IAIN terutama ilmu Tarbiyah. Karena pada saat itu kebanyakan aktivis IPM, ditingkat pusat adalah mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga. SPI Biru memang mengurangi aspek-aspek indoktrinasi. Jika dahulu kader dibekali materi problem solving, maka dalam SPI Biru mulai diajarkan analisis SWOT, yaitu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau program.³⁰

Menurut Izzul Muslimin, SPI Biru jauh berbeda dengan SPI Merah. SPI Biru lebih akademis dan terbuka dikarenakan ada pengaruh pemikiran Amin Abdullah yang waktu itu baru pulang dari Turki.³¹ Amin Abdullah, sering sekali diundang Pimpinan Pusat IRM, terutama Agung Danarta waktu itu ketua I bidang kaderisasi, sehingga aktivis IRM banyak yang mengidolakan Amin Abdullah. Setelah perubahan nama IPM ke IRM dilengkapi dengan perubahan SPI Biru, maka bidang dan lembaga semakin variatif. Hal ini dikarenakan SPI Biru memiliki semangat bahwa kader itu bisa masuk darimana saja, dan dikader lewat apa saja. Makanya waktu itu dibuat seperti kreditpoint. Misalnya menjadi panitia kegiatan, maka dianggap bagian dari perkaderan, sehingga perkaderan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Arief Budiman (12 September 2016).

³¹ Dalam konteks wacana keislaman, menurut Anjar Nugroho, di akhir 1990-an di tubuh IRM sudah masuk pemikiran Nurcholish Madjid, yaitu Islam Liberal atau "Liberalisasi Islam". Bahkan Anjar menyebutkan, visi keislaman di era IRM saat itu sangat Nurcholish Madjid dengan "Islam Liberal"-nya. Bacaan dalam forum-forum perkaderan SPI Biru seputar perkaderan IPM antara lain: Islam Doktrin dan Peradaban karya Nurcholish Madjid). Wacana perkaderan dikatakan bercorak *Islamic Studies* ala IAIN. Kebetulan sebagian besar pengurus PP IRM berasal IAIN, akibatnya wacananya dominan IAIN, nuansa ilmu sosialnya kurang. Anjar Nugroho juga menyebut beberapa karya lain misalnya: *Cakrawala Islam* (M. Amin Rais), *Intelektual intelegensia* dan perilaku politik bangsa; *Risalah Cendekiawan Muslim* (M. Dawam Rahardjo), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah* (Budhy Munawar Rachman), dan *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi* (Kuntowijoyo). Anjar Nugroho, "Membongkar Paradigma IPM di Era Reformasi".

tidak semata-mata pelatihan saja. Pada sisi ini sebenarnya semangat SPI Biru, bahwa perkaderan bukan hanya proses klasikal ketika pelatihan, tetapi suatu interaksi total dalam ber-IPM. Semula perkaderan SPI Merah sangat eksklusif, menjadi sangat terbuka saat SPI Biru.³² Konsep perkaderan berjenjang seperti Taruna Melati, Pelatihan Instruktur, Pendidikan Khusus Irmawati (Diksusti) yang ada dalam SPI Merah dikembangkan ke dalam pelatihan lainnya yang non-struktural. Melalui pelatihan dan kegiatan-kegiatan itu bisa jadi kader inti atau kader pratama.

Menurut Saud El-Hujjad, keunggulan SPI Biru adalah, komprehensif, terukur dan banyak mengadopsi perkembangan dalam "ilmu pendidikan" (tarbiyah). Sifatnya yang mencakup semua itulah yang membuatnya sangat luas dan kurang sistematis. Selain itu juga setelah dievaluasi dalam even TMU di Tawangmangu terdapat celah empiris dan teoretis, seperti antara target, tujuan, materi dan metode perkaderan banyak ditemui inkonsistensi. Kurang menerapkan model pendidikan orang dewasa dan partisipatoris.³³ Oleh karena itu, SPI ini pun segera diminta untuk dievaluasi dan menjadi amanat PP IRM periode 2000-2002 untuk dirumuskan ulang.³⁴

Setidaknya ada dua kelemahan SPI Biru. Pertama, terlalu banyaknya proses jenjang perkaderan dari satu ke yang lain, seperti dari TM I ke TM II, kemudian ke PD I dan PI I, kemudian Diksusti I dan seterusnya. Proses penjenjangan yang demikian, memiliki kelemahan yang mendasar, yaitu habisnya gerakan hanya terletak pada proses penyiapan kader dari satu pelatihan, ke pelatihan ke pelatihan yang lain. Kedua, rumitnya pemahaman sistem perkaderan lantaran bagian-bagian yang cukup signifikan dalam perkaderan tidak dijelaskan dan dipraktekkan secara konsisten. Misalnya metode pendidikan orang dewasa, tetapi materinya bersifat ceramah dan doktrinal, juga tidak banyak memberikan

³² M. Izzul Muslimin (12 Oktober 2016).

³³ Saud El Hujjaj, "SP IRM: Memilih Mitos atau Realitas?"

³⁴ Subhan Purno Aji, "Falsafah dan Genealogi Perkaderan IPM".

apresiasi yang luas pada peserta dan lain sebagainya.³⁵

C. SPI Hijau (2002)

SPI Hijau lahir di awal era Reformasi tahun 1998 atas kegagalan pengembalian nama IRM ke IPM. Nama IRM dianggap produk Orde Baru, karena itu harus dikembalikan nama asalnya, yakni IPM. Secara umum, SPI Hijau dipengaruhi oleh perkembangan nasional pasca reformasi 1998, sehingga SPI ini lebih mencerminkan situasi lebih demokratis, terbuka dan partisipatif. SPI Hijau merupakan titik kulminasi dari perubahan paradigma gerakan IRM dari paradigma "gerakan panggung" menjadi "gerakan sosial" atau "gerakan elite" ke "gerakan populis" yang dibantali oleh Manifesto Gerakan Kritis Transformatif (Manifesto GKT).³⁶

Kehadiran SPI Hijau merupakan kritik terhadap konsep perkaderan sebelumnya yaitu SPI Biru. Pada tahun 1998, SPI Biru mendapatkan gugatan dari kelompok-kelompok minoritas IPM (saat itu IRM) ditingkat struktur elite. Ada semacam kritik terhadap SPI Biru yang dianggap tidak cukup menampung remaja. SPI Biru jika dilihat dari kaca mata sistem, maka akan nampak sangat sempurna. Akan tetapi jika ditelusuri ke aspek komponen perkaderan, akan terlihat sangat gemuk, tidak fokus, dan kurang sistematis. Akinatnya muncul variasi perkaderan formal IPM (yang kurang memperhatikan panduan SPI), dan banyak pimpinan di tingkat lokal melakukan rekreasi (inovasi) model perkaderan.³⁷

Menurut Anjar Nugroho, Wakil Ketua IRM Periode 1998-2000, sebelum SPI Hijau dirumuskan, sejak 1998 telah digagas terlebih dahulu paradigma gerakan yang disebut "Dasar-Dasar Gerakan IRM". Karena sesungguhnya SPI ialah kurikulum yang berisi materi yang didalamnya terkandung pesan atau tujuan. Tujuan IPM selanjutnya diturunkan ke dalam sistem perkaderan, sehingga perubahan SPI tidak hanya perubahan nama saja, melainkan disertai paradigma.³⁸

³⁵ Saud, El Hujjaj, "SP IRM: Memilih Mitos atau Realitas?", 3.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Saud, El Hujjaj, "SP IRM: Memilih Mitos atau Realitas?", 6.

³⁸ Saud El-Hujjad adalah yang membawa wacana ilmu sosial

Pada forum perkaderan tingkat nasional Taruna Melati Utama di Tawangmangu, Solo, ditemukan beberapa koreksi empiris dan teoritis terhadap SPI Biru. Diantaranya adalah penjenjangan yang tidak konsisten antara tujuan, materi, target, metode perkaderan yang kurang menerapkan belajar orang dewasa dengan menggunakan *participatory training*, dan tidak terdapat garis besar penjabaran materi.³⁹ Dalam forum ini dibahas "strukturasi gerakan IRM", yakni sebuah kerangka pikir (*mode of thought*) yang dimulai dari Falsafah, Tujuan, Filsafat Perkaderan IPM, dan Sistem Perkaderan IPM.⁴⁰

SPI Hijau secara umum sangat berbeda dengan SPI sebelumnya. Subhan Purnoaji, menyebut SPI Hijau sebagai perubahan yang revolusioner. Seolah ada diskontinuitas dari SPI sebelumnya, bahkan SPI Hijau mendapat predikat sebagai "SPI Kafir" dari kecenderungan umum sistem perkaderan Muhammadiyah. Bagaimana tidak, baik dari segi *mode of thought*, target, metode materi dan pasca perkaderan jauh berbeda, atau malah tidak ada kelanjutan dari SPI sebelumnya. Sebagai contoh adalah materi ANSOS (Analisis Sosial) dimasukkan dalam materi TM III.⁴¹ Sejak saat itulah IPM mengenal "gerakan sosial baru", dan "gerakan advokasi" di tubuh IPM.⁴² Awalnya materi-materi tersebut tidak familiar di lingkungan Muhammad-iyah/IPM. Materi ini banyak digunakan oleh aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bergerak di bidang advokasi. Hingga istilah "instruktur" yang selama ini menjadi ciri khas pengelola

termasuk ANSOS. Ia mengambil S1 UIN Sunan Kalijagadan S2 Ilmu Politik UGM.

39 M. Izzul Muslimin "Kekuatan IPM Ada Pada Dialektika Pemikiran", dalam <http://www.ipm.or.id>, diakses tanggal 22 Agustus 2016.

40 Saud, El Hujjaj, "SP IRM: Memilih Mitos atau Realitas?", 5.

41 Subhan Purno Aji, "Falsafah dan Genealogi Perkaderan IPM".

42 Menurut Anjar Nugroho, Saud El-Hujjaj adalah orang yang membawa wacana ilmu sosial termasuk ANSOS dalam perkaderan IPM. Saud waktu itu adalah Ketua Bidang KPSDM (Kaderisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia) periode 2000-2002. Anjar Nugroho, "Paradigma Gerakan IPM di Era Reformasi".

pelatihan Taruna Melati, diubah dengan konsep “fasilitator” karena lebih demokratis.⁴³

SPI Hijau banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran kontemporer seperti pemikiran Paulo Freire, tokoh pendidikan asal Brazil-Amerika Latin. Secara metodologis, SPI Hijau mempunyai kedekatan dengan gagasan dan praktik pendidikan/ pelatihan yang digagas oleh INSIST, yakni lembaga kajian dan pendidikan yang digawangi oleh Mansour Fakih di Yogyakarta. Maka, tak mengherankan jika membaca SPI Hijau serasa membaca buku *Pendidikan Populer* terbitan INSIST.⁴⁴ Melalui buku inilah pendidikan kritis yang merupakan aliran pendidikan untuk pemberdayaan dan pembebasan berkembang di IRM. Dalam perspektif kritis, pendidikan adalah melakukan refleksi kritis, terhadap ‘ideologi dominan’ ke arah transformasi sosial. Karena itu, IRM waktu itu menemukan dua kata kunci ideologinya, yaitu “kritisisme” dan “keadilan”.

Menurut Saud El-Hujjad, selain Mansour Fakih, yang mempengaruhi praksisme gerakan IPM sebagai model gerakan kritis adalah Moeslim Abdurrahman sebagai landasan penting untuk mengelaborasi gerakan kritis-transformatif IPM. Pendorong utama gerakan kritis adalah Kang Moeslim melalui TMU Tawangmangu, sedangkan Mansour Fakih mengantarkan atau merapikan metodologinya. Bahkan Mansour Fakih bersedia membantu mendesain metodologinya, hingga menginap 2 (dua) hari mendampingi pelatihan TMU di Tawangmangu. Termasuk ada romo Wahono yang mengisi materi contoh gerakan *new left* melalui LSM Pandjilaras. Sedangkan paradigma “Islam Transformatif” secara teoritik diperdalam oleh Kang Moeslim dengan praksisme teologi al-Ma’un Kiai Dahlan.⁴⁵

43 Subhan Purno Aji, “Falsafah dan Genealogi Perkaderan IPM”.

44 Ibid.

45 Pernah suatu ketika, rapat di PP IRM soal materi TM U di Tawangmangu. Hampir semua tidak setuju dengan masuknya materi ANSOS dan lain-lain yang sudah saya susun. Karena banyak yang tidak menyetujuinya, akhirnya saya sampaikan kepada teman-teman PP IRM untuk menyusun ulang dan saya pamit tidak ikut serta dalam pelaksanaan TMU. Walhasil, karena teman-teman juga tidak ingin ambil resiko, akhirnya materi disetujui dalam

Dalam SPI Hijau, proses penjenjangan ini dipersempit. Dalam SPI Hijau terbagi dalam tiga kategori: perkaderan formal dan perkaderan non-formal. Perkaderan formal terdiri atas formal utama, formal pendukung dan formal pelengkap. Perkaderan formal utama adalah proses rekrutmen dan seleksi anggota menjadi kader melalui Taruna Melati I hingga Taruna Melati Utama. Perkaderan Formal Pendukung adalah proses yang keberadaannya wajib kifayah bagi kader dalam rangka kontinuitas perkaderan yang pelaksanaannya melalui Pelatihan Fasilitator dan Pendamping I dan II. Sedangkan formal pelengkap adalah pendalaman pengetahuan dalam rangka memenuhi target perkaderan di masing-masing jenjang. Perkaderan formal pelengkap ini sifatnya elastis, bisa dalam bentuk kursus kader ataupun sekolah kader.

Rangkaian terpenting dari proses pelatihan perkaderan adalah *follow up*. *Follow up* dilakukan sebagai usaha pemenuhan target pelatihan yang belum tercapai, pada saat pelatihan perkaderan berlangsung. *Follow up* dalam SPI Makassar dibuat lebih bervariasi, yaitu bisa dalam bentuk kursus kader, sekolah kader, penugasan kader, praktek lapangan atau advokasi kasus, pendampingan masyarakat atau kelompok marginal, dan lain sebagainya.⁴⁶ Sejak Semiloknas SPI di Makassar dan ditanfidzkannya pada 2002, SPI Hijau menjadi rujukan perkaderan IRM.

D. SPI Kuning (2014)

SPI Kuning lahir pasca perubahan nama IRM kembali menjadi IPM pada Muktamar XVI IPM di Surakarta. Ada beberapa alasan yang mengharuskan IPM melakukan perubahan atau rekonstruksi SPI-nya. Pertama, pasca perubahan nama IRM ke IPM, terjadi penyempitan ruang gerak, yakni dari basis masa remaja menjadi pelajar yang didukung dengan wacana *back to school*. Artinya SPI Hijau adalah produk IRM, walaupun pada Muktamar 2006 di Medan ditegaskan basis masa IRM adalah remaja dan pelajar, namun

TMU harus dilaksanakan. Keterangan Saud El-Hujjad tanggal 27 Oktober 2016.

⁴⁶ Saud, El Hujjaj, "SP IRM: Memilih Mitos atau Realitas?...", 5.

pada Mukttamar 2008 dalam AD/ART ditegaskan basis masa IPM adalah "pelajar". Kedua, sejak dirumuskan tahun 2002, SPI Hijau sudah lebih 10 (sepuluh) tahun. Sudah saatnya IPM melakukan evaluasi terhadap konsep dan pelaksanaan SPI Hijau.

Setelah dilakukan dua kali Seminar dan Lokakarya Nasional (Semiloknas) SPI di Yogyakarta (2013) dan di Gresik (2014), IPM berhasil menyusul SPI baru.⁴⁷ Pertanyaanya apakah yang membedakan SPI Kuning dengan SPI Hijau? Berdasarkan evaluasi kritis Semiloknas I di Yogyakarta IPM melakukan kajian terhadap 3 (tiga) SPI sebelumnya. SPI Merah menghadirkan salah satu perumusanya, yaitu Agus Sukaca yang mana saat itu menjadi "sekretaris tim perumus". SPI Biru menghadirkan Arif Mustofa Al-Buni, ketua tim perumus dan Arif Jamali Muis sebagai representasi pelaksana SPI Biru. SPI Hijau menghadirkan Saud El-Hujjad, selaku ideolog dan perumus SPI Hijau. Dari pemaparan tiga sesi kajian terhadap SPI, semua pembicara menyarankan bahwa SPI harus direkonstruksi.

Setidaknya ada beberapa pertimbangan mengapa SPI Hijau harus diubah. Pertama, SPI Hijau kurang memperhatikan aktor, pelaksana, atau fasilitatornya. Meskipun dalam konsep SPI sudah ada panduan Pelatihan Fasilitator Pendamping (PFP) I sampai III, tetapi level pusat sampai daerah sangat jarang menitik beratkan pada pelatihan fasilitator (sesuai SPI). Terjadi paradok, ketika TM I sampai TM U sudah memakai SPI Hijau, tetapi pengelolanya masih menggunakan SPI Biru. Memang ada beberapa daerah dan wilayah, TM-nya sudah menggunakan model SPI Hijau, tetapi PFP-nya masih menggunakan model pelatihan instruktur lengkap dengan materi-materi dan model-model indoktrinasi.

Kedua, SPI Hijau dinilai kurang memperhatikan persoalan militansi, loyalitas, dan semangat perjuangan. Hal ini sering dianggap *absurd*, tidak ada jalan keluar alias *deadlock* dan justifikasi ini diamini aktifis sendiri. Tetapi, jika ditinjau dari materi-materinya, memang terjadi "diskontinuitas" dari

47 Pimpinan Pusat IPM, *Sistem Perkaderan IPM (Kuning)*, 10.

SPI sebelumnya (Biru dan Merah). Aspek ritus ibadah dan religiusitas kurang mendapatkan tempat, bahkan religiusitas dan ritual ibadah yang menurun. SPI Hijau dinilai terlalu aktivis maksudnya ialah aktivis LSM dan orientasi sosialnya menonjol. Selain itu, timbul beberapa anggapan bahwa SPI Hijau ini hanya cocok diterapkan di Jawa yang sudah maju didukung dengan akses bacaan dan sumber daya manusia yang memadai. Anggapan lainnya, SPI Hijau adalah SPI kota, dan tidak untuk orang di desa.⁴⁸

Ketiga, SPI hijau dilahirkan di masa IRM, yang mempunyai basis massa berbeda dengan IPM. Basis menentukan struktur gerakan. Sejauh ini, teman-teman IPM tidak terlalu mengutak-atik paradigma gerakan, tetapi hanya merubah strategi dan taktik gerakan. Tetapi kini, IPM *back to school* (pelajar), sehingga terdiri pergeseran remaja ke pelajar. Pengembalian identitas dari IPM ke IRM, disambut oleh IPM dengan perumusan paradigma baru yang menunjukkan jati diri pelajar. Percobaan itu pernah dilakukan dengan ijtihad merumuskan "Gerakan Pelajar Kreatif" (GPK) sebagai paradigma. Namun setelah dievaluasi GPK bukan sebuah paradigma, sehingga diubah menjadi "Strategi Kreatif".

Hal yang penting dalam SPI Kuning adalah kemampuan IPM menyerap pikiran-pikiran baru yang berkembang di Muhammadiyah, yaitu pandangan Islam yang berkemajuan.⁴⁹ Hal substansi penting yang membedakan paradigma SPI Hijau dan SPI Kuning? Jika SPI Hijau identik dengan metodologi ANSOS sebagai pendekatan problem sosial, maka SPI Kuning memasukkan pendekatan baru, yaitu *Appreciative Inquiry* (AI). Bila selama ini Analisis Sosial (ANSOS) berbasis pada motif untuk keluar dari masalah, pendekatan *Appreciative Inquiry* (AI)⁵⁰ terfokus pada pencarian 'kekuatan positif' organisasi untuk membangun visi kolektif. Aktivitas diawali

⁴⁸ Pimpinan Pusat IPM, *Sistem Perkaderan IPM (Kuning)*, 9-10.

⁴⁹ Haedar Nashir, 'Pembaruan Konsep dan Konsistensi Pelaksanaan SPI ' dalam *Sistem Perkaderan IPM* (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2014).

⁵⁰ David Efendi, "Praktik Mempekerjakan AI (Appreciative Inquiry)", Makalah Diskusi LaPSI 14 Februari 2016.

dengan mengapresiasi (menerima realitas) apa yang terbaik dalam masyarakat, mencipta impian, merancang tindakan, dan melakukan tindakan yang berbasis pada inti positif atau daya kreatif.

Logika inilah yang membedakan antara SPI Hijau dan SPI Kuning. SPI Hijau lebih kental dengan cara berpikir ANSOS dan teologi al-Maun dalam Islam Transformatif yang dimanifestasikan dalam Gerakan Kritis-Transformatif (GKT), maka SPI Kuning lebih menekankan AI sebagai pendekatan, dan teologi al-'Ashr dalam Islam Berkemajuan/Islam Progresif yang diaktualisasikan dalam Gerakan Pelajar Berkemajuan (GPB). SPI Kuning menggunakan pendidikan *hadhari* berbasis integratif-interkoneksi M. Amin Abdullah sebagai paradigma perkaderan yang membawa spirit Islam berkemajuan berkemajuan.

Tabel Dinamika Perubahan Sistem Perkaderan IPM

SPI	SPI Merah (1986)	SPI Biru (1994)	SPI Hijau (2002)	SPI Kuning (2014)
Dinamika Politik	Pancasila sebagai Asas Tunggal (1986)	Perubahan Nama IPM ke IRM (1992)	Kegagalan Pengembalian Nama IRM ke IPM (1998)	Keberhasilan Pengembalian Nama IRM ke IPM (2008)
Wacana Islam	Islam Murni	Islam Modernis	Islam Transformatif	Islam Berkemajuan
Paradigma Pendidikan	Indoktrinasi	AMT (Achievement Motivation Training): David McClelland	Pendidikan Kritis: Paulo Freire	Pendidikan <i>Hadhar</i> (Integratif-Interkoneksi): Amin Abdullah
Pendekatan Masalah	Problem Solving	Analisis SWOT	Analisis Sosial	Apresiatif Inquiry
Metode	Pedagogis	Pedagogis-Andragogis	Andragogis	Pedagogis-Andragogis-Heutagogis
Pengelola	Instruktur	Instruktur	Fasilitator	Fasilitator
Ideologi Pendidikan	Konservatif	Liberal	Radikal	Progresif

Pena 7

DISKURSUS FILSAFAT PERKADERAN IPM

PERBINCANGAN tentang praktik perkaderan IPM selama ini masih berkuat pada masalah hilir. Hal ini berakibat pada terbaikannya hulu perkaderan. Karena itu, diperlukan pembahasan mendalam terhadap perkaderan IPM pada aspek filosofis atau level hulu-filosofis. Kebanyakan dan sering tidak tersadari bahwa permasalahan yang muncul pada tingkat hilir itu, sebenarnya merupakan akibat dari masalah hulu yang tidak terselesaikan. Jadi, untuk meminimalisir permasalahan pada level hilir yang bersifat praksis, maka permasalahan tingkat hulu harus segera dituntaskan terlebih dahulu. Karena jika masalah hulu ini selesai, maka masalah teknis dan praktis akan mengikuti sesuai dengan dinamika dan inovasi manusia sesuai dengan konteks waktu dan tempat. Atas dasar itu, maka filsafat dapat menjadi pendobrak, pembebas, dan pembimbing. Maksudnya ialah, falsafah perkaderan IPM dapat diperankan untuk mendobrak penjara tradisi dan kebiasaan yang melenceng dari tujuan perkaderan IPM. Selain mendobrak, juga membebaskan dari ketidaktahuan. Terutama dalam menyelenggarakan perkaderan IPM, serta yang terpenting lagi adalah membimbing kemana arah (desain) perkaderan akan dilakukan.

Perkaderan tidak bisa menafikan pemaknaan terhadap pendidikan. Membahas pendidikan tidak bisa melewatkan perdebatan tentang manusia (kemanusiaan). Dan ketika mengupas manusia dan segala dimensinya maka kita tidak

bisa melepaskan filsafat sebagai alat baca".¹ Subhan Filsafat perkaderan IPM adalah dimensi terdalam dari seluruh proses kaderisasi. Falsafah perkaderan IPM dikerucutkan pada tiga masalah dalam filsafat, yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Masalah ontologi berusaha menguak apa yang terdalam dalam suatu kenyataan. Sementara masalah epistemologis berusaha mencari bagaimana dan dengan cara apa dalam memperoleh pengetahuan. Dan masalah aksiologis berusaha mempertanyakan apa yang seharusnya dari suatu entitas tertentu.² Karena itu, menurut Moh. Mudzakkir untuk memudahkan pembahasan filsafat perkaderan IPM, perlu melakukan refleksi filosofis dengan mendasarkan diri pada tiga landasan filsafat, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis.

Pertama, landasan ontologis mencoba bertanya tentang kerangka pandang yang sifatnya mendasar? Apa itu objek perkaderan? Serta apa yang menjadi objek perkaderan dan bagaimana hubungan subjek dan objek perkaderan IPM. Kedua, landasan epistemologis yang melontarkan pertanyaan tentang bagaimana kita mengetahui, mengerti dan memahami persoalan mendasar dalam perkaderan? Bagaimana prosedur dan mekanisme untuk membongkar problematika perkaderan tersebut? Serta cara berfikir seperti apa yang mampu menjawab tantangan perkaderan tersebut. Ketiga, landasan aksiologis yang mempertanyakan kegunaan pengetahuan tentang perkaderan. Apa yang akan dilakukan setelah mengetahui berbagai macam persoalan perkaderan? Serta strategi dan metode apa yang digunakan untuk menyukseskan agenda-agenda perkaderan tersebut? Ketiga landasan tersebut diharapkan mampu memberikan dasar pijakan bagi aktor-aktor kreatif IPM untuk merefleksikan kembali perjuangan mereka, agar mendapatkan dasar filosofi perkaderan yang kukuh.

Sebab, gagasan pendidikan tidak terlepas dari landasan

1 Moh Mudzakkir, "Membaca Gerakan Pelajar Muhammadiyah: Perspektif Filosofis"....,

2 Subhan Purno Aji, "Falsafah dan Genealogi Perkaderan IPM"....,

pemikiran filosofis. Abd. Rachman Assegaf menjelaskan bahwa gagasan filosofis menjadi dasar dan sumber gagasan pendidikan.³ Suatu gagasan pendidikan itu terbangun dari paradigma pendidikan, sedangkan paradigma pendidikan dibangun dari filsafat.⁴ George R. Knight menyatakan bahwa gagasan pendidikan dibangun atas filsafat. Menurutnya pendidikan adalah proses disengaja dengan suatu tujuan spesifik yang meniscayakan untuk berpijak pada "pandangan filosofis". Dengan demikian filsafat adalah kerangka dasar yang melandasi praktik pendidikan.⁵ Dengan menggunakan logika terbalik, tesis ini akan mencari gagasan pendidikan bukan dari filsafat, tetapi berdasarkan paradigma dan praktik pendidikan dalam sistem perkaderan IPM.⁶ Dengan pembagian filsafat George R. Knight digunakan untuk membaca perkembangan filsafat perkaderan dalam IPM, yakni SPI Merah, SPI Biru, SPI Hijau, dan SPI Kuning. Dengan kerangka George R. Knight SPI Merah akan dianalisis perspektif perenialisme, SPI Biru perspektif esensialisme, SPI Hijau progresivisme, sedangkan SPI Kuning perspektif rekonstruksionisme.

A. Madzhab SPI Merah: Perenialisme

Ditinjau dari aspek kurikulum, SPI Merah menerapkan pola "kurikulum konvensional". Adapun yang dimaksud dari kurikulum konvensional adalah penyajian kurikulum yang ditentukan secara baku bagi peserta perkaderan. Dalam kurikulum baku tersebut meliputi jenis materi, metode dan evaluasi yang disusun dalam suatu satuan yang terpadu dan terkait. Para pelaksana (instruktur dan penceramah) berpegang pada kurikulum baku.⁷ Kurikulum baku semacam

3 Abd. Rachman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif* (Jakarta: PT Radjagrafindo Persada, 2011), 175

4 Muarif, *Liberalisasi Pendidikan*, 66

5 George R. Knight, *Filsafat Pendidikan Isu-Isu Kontemporer & Solusi Alternatif*; (terj.) oleh Mahmud Arif, (Yogyakarta: Idea-/Press, 2004), 39

6 *Ibid.*

7 Materi SPI Merah diklasifikasikan ke dalam empat jenis kategori yang merupakan satu kesatuan: (1) Kelompok Materi Al Islam, (2) Kelompok Materi ke-IPM-an dan ke Muhammadiyah, (3) Kelompok

ini nampaknya dekat dengan filsafat perenialis. Menurut Imam Barnadib, perenialisme memandang hal yang terpenting dalam kurikulum adalah isi (*content*) materi yang tepat dan benar. Maka dalam pendidikan, peran utama dipegang oleh pendidik.⁸

Dari segi metode, SPI Merah menggunakan dua metode yang bertentangan, yakni pedagogi dan andragogi. SPI Merah menerapkan metode pedagogis dan andragogis secara fleksibel sesuai dengan jenis komponen dan jenjang perkaderan. Namun dalam praktiknya, SPI Merah sangat dominan menggunakan metode pedagogis. Metode pedagogis ini pada prinsipnya menekankan pada pembentukan, pengisian, penerusan materi atau bahan yang telah direncanakan secara lebih sepihak dari pelatih (instruktur) atau penceramah kepada peserta.⁹ Dalam perspektif perenialis Kemampuan untuk mendisiplinkan diri menjadi tujuan pendidikan, maka menegakan disiplin adalah suatu cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁰ Hal ini juga senada dengan doktrin "Tri Tertib" yang beraliran *developmentalisme*. "Tri Tertib" karena penekanannya pada aspek kesalehan atau disiplin individu dengan doktrin, namun kurang mempertimbangkan aspek sosial budaya.

Dalam kaitan itu, maka pedagogi menjadi pendekatan yang efektif untuk pendisiplinan diri. Ciri-ciri metode pedagogis antara lain: bersifat indoktrinasi, bahan/materi yang disajikan merupakan paket yang direncanakan. Peserta adalah penerima, sedangkan instruktur/penceramah adalah pemberi, sehingga yang pertama pasif yang kedua aktif. Metode yang diterapkan bersifat sepihak, dari instruktur atau penceramah untuk peserta. Instruktur adalah yang menangani langsung pengelolaan perkaderan. Tim instruktur terdiri atas: Master of Training (MOT), Imam of Training

Materi Keorganisasian, Kepemimpinan, dan Ketrampilan; dan (4) Kelompok Materi Pengetahuan Umum. Pimpinan Pusat IPM, Sistem Pengkaderan IPM Hasil Seminar di Ujung Pandang, 1985, 11.

8 Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan; Sistem dan Metode*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit FIP IKIP, 1987), 4.

9 Pimpinan Pusat IPM, *Sistem Pengkaderan IPM*, 13.

10 *Ibid.*

(IOT) dan anggota Instruktur.¹¹ Hal ini SPI Merah melahirkan kecenderungan “proses pengajaran oleh instruktur dan penceramah” (*teaching*) dibandingkan dengan sebagai “proses pembelajaran oleh peserta didik” (*learning*).

Dalam perenialisme anak didik adalah landasan pengembangan disiplin mental.¹² Penerapan disiplin mental dalam SPI Merah dijelaskan oleh Agus Sukaca bahwa metode indoktrinasi dilakukan dalam tiga tahapan. Pertama, peserta di-*down*-kan mentalnya dengan metode pengosongan, semua dapat dicari alasan dari kesalahan peserta. Kedua, metode pengisian, dengan berbagai materi-materi ideologis. Ketiga, peserta dipompa semangatnya, sehingga selesai pelatihan peserta memiliki motivasi atau militansi yang luar biasa. Maka dari itu, alumni SPI Merah memiliki militansi gerakan yang kuat, semangat luar biasa seakan-akan akan tempur ke medan jihad.¹³ Peserta benar-benar diposisikan sebagai obyek oleh instruktur, selain obyek transfer ideologi, juga obyek kemaraha. Sedikitpun peserta tidak diberi ruang untuk membantah instruktur, bahwa instruktur adalah semua benar. Hal ini yang disebut Paulo Freire pendidikan yang melahirkan sebagai “budaya bisu”.¹⁴

Perenialisme lebih dekat dengan model tekstualitas salafi yang berusaha memahami ajaran dan nilai-nilai dalam Al-Quran dan al-Sunnah yang kurang mempertimbangkan dinamika obyektif historisitas masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari materi-materi SPI Merah misalnya tauhid, sunnah dan bid’ah, dinul Islam, jihad Islam, thaharah, dan shalat. Materi ibadah adalah bagaimana melakukan shalat dengan sesuai “Majelis Tarjih”. Masalah aqidah itu kaitannya dengan

11 Pimpinan Pusat IPM, *Sistem Pengkaderan IPM*, 13.

12 Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan*, 50.

13 Agus Sukaca, “Membedah SPI Merah”.

14 Kebudayaan bisu menurut Paulo Freire adalah “kondisi kultural sekelompok masyarakat yang ciri utamanya adalah ketidakberdayaan dan ketakutan umum untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya sendiri”, sehingga “diam” nyaris dianggap sakral, sikap yang sopan dan harus ditaati, lihat Paulo Freire, *Politik Pendidikan; Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, *et.al.*, xxii

tauhid yang murni sebagaimana pada Muqaddimah AD dan Kepribadian Muhammadiyah. Meskipun istilah TBC (takhayul, bid'ah, dan khurafat) itu pada masa itu belum populer di masyarakat, tetapi IPM telah berdakwah dan memberantasnya.¹⁵ Kondisi ini dipengaruhi dinamika dalam Muhammadiyah periode pertengahan waktu itu, muncul tendensi menuju konservatisme.¹⁶

Senada dengan itu, menurut Jamaluddin Ahmad, perkaderan SPI Merah memang sangat menekankan aspek ritual ibadah, misalnya pentingnya shalat tahajud dalam pelatihan. Bahkan shalat tahajud pernah menjadi kebijakan organisasi yang harus dilaksanakan secara nasional yang diputuskan pada Muktamar Terbatas.¹⁷ Dapat dikatakan bahwa kecenderungan "keagamaan" cenderung puritan, terutama menyangkut prinsip-prinsip pendidikan yang kental tentang moral-keagamaan dengan doktrin atau paradigma disiplin positif yang ada dalam "Tri Tertib" (Ibadah, Belajar dan Organisasi).¹⁸ Dalam kajian perenialisme, tugas pendidikan adalah melestarikan warisan nilai dan budaya manusia, termasuk di dalamnya agama.¹⁹ Dalam hal ini SPI Merah konservatif terhadap warisan Tarjih yang waktu itu terlalu berorientasi fiqih.

15 Menurut Mulkhan, pembentukan Majelis Tarjih setelah masa KHA Dahlan menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuhnya konservatisme pemikiran keagamaan, baik dalam teologi maupun *fiqh*. Tentu hal ini mempengaruhi bagaimana orientasi, materi dan model-model perkaderan di Muhammadiyah, khususnya IPM Abdul Munir Mulkhan, *Islam Murni Dalam Masyarakat Petani* (Yogyakarta: Benteng, 2000).

16 Terutama sejak 1942 sampai akhir 1980-an bercorak skolastik (dogmatis dan juristik). Tema-tema keagamaan lebih menekankan pada purifikasi keyakinan atau Islam Murni. Muhammadiyah periode pertengahan ini diwakili oleh 'ulama, seperti Ki Bagus Hadikusuma, A.R. Sutan Mansur, Ahmad Badawi, Faqih Usman, A. R. Fakhruddin, dan Djarnawi Hadikusumo, memiliki pengaruh yang penting dalam diskursus keagamaan dalam Muhammadiyah, baik pada aspek teologis (*aqidah*). Ahmad Nur Fuad, "Kontinuitas dan Diskontinuitas...", 9.

17 Pimpinan Pusat IPM, *Tanfidz keputusan Silaturahmi Pimpinan*, 6.

18 Arif Mahmud, *Pendidikan Islam Transformatif*, (Yogyakarta, Pelangi Aksara, 2008), 111.

19 Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 40.

Secara teologis paradigma konservatif merujuk pada teologi determinasi, bahwa masyarakat pada dasarnya tidak dapat mempengaruhi perubahan sosial. Tuhan menentukan di dalam kondisi orang atau kelompok masyarakat yang miskin, bodoh dan tertindas. Pendidikan konservatif memandang bahwa kesalahannya terletak masyarakat, mungkin karena malas, tidak mau belajar atau tidak punya etos kerja dan tidak punya perangkat perangkat lainnya yang dapat mengubah nasibnya. Paulo Freire menyebut paradigma semacam ini dibangun atas "kesadaran magis". Itulah sebabnya paradigma konservatif dalam memperjuangkan nasib rakyat enggan melakukan konflik.²⁰ Hal ini dapat dilihat bagaimana aktivis IPM menjadi pendukung pembangunan Orde Baru, menerima Pancasila sebagai asas tunggal, setelah itu mengubah nama IPM ke IRM supaya tidak terjadi konflik untuk mempertahankan eksistensi IPM.²¹

Dalam SPI Merah sasaran gerak IPM diarahkan "membina masyarakat pelajar untuk diarahkan menjadi pelajar muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, dan berguna bagi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah." Pembinaan dan pendidikan itu dilakukan dengan mempertebal iman, menertibkan peribadatan, mempertinggi akhlak, meningkatkan ilmu pengetahuan, memperbesar darma bakti kepada masyarakat dengan spirit "Tri tertib". Segala usaha tersebut tidak menyalahi asas dan tujuan IPM dengan mengindahkan hukum serta falsafah Negara yang sah, yakni Pancasila sebagai asas tunggal.²²

B. Madhab SPI Biru: Esensialisme

SPI Biru dilihat dari tujuan perkaderan adalah sama dengan SPI Merah baik secara redaksi maupun substansi. Pencapaian tujuan IPM diarahkan "terbentuknya kader-kader IPM yang memiliki sikap, pemikiran, pengetahuan,

20 Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 5

21 Topatimasang, Roem, dkk, *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis*. Yogyakarta: Insist Press, 2010), 27.

22 Pimpinan Pusat IPM, Sistem Pengkaderan IPM Hasil Seminar Ujung Pandang 1985, 15.

perilaku dan kecakapan sehingga menumbuhkan kegemaran berdakwah Islamiyah sesuai dengan Kepribadian IPM dalam rangka mencapai tujuan Ikatan Remaja Muhammadiyah." Pertanyaannya, lalu apa yang membedakannya dengan SPI Merah?

Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa SPI Biru hadir di saat IPM mengalami perubahan basis masa dari "pelajar" ke "remaja". Jadi SPI dibangun dari logika remaja. Sejak itulah, gerakan IPM lebih pragmatis dan inklusif untuk menyambut era "remaja". Program-program IPM semua mengarah ke remaja, sehingga meluas dan tidak fokus. Bidang-bidang sebagai ujung tombak juga semakin banyak. Selain itu lembaga-lembaga juga semakin variatif sesuai dengan kompleksitas masalah dan dinamika remaja. Imbasnya pun ke perkaderan, sehingga SPI Biru meskipun spiritnya sama dengan "Tri Tertib", tetapi varian perkaderan begitu banyak sekali yang mencakup segala hal yang menarik dan dibutuhkan untuk pengembangan bakat pelajar. Hal ini nampaknya dekat dengan aliran esensialisme William C. Bagley bahwa minat-minat yang kuat dan tahan lama tumbuh dari upaya-upaya belajar awal yang memikat atau menarik perhatian bukan karena dorongan dari dalam jiwa. Motivasi diciptakan oleh instruktur yang mampu memompa semangat peserta didik, sehingga memiliki militansi yang kuat.

Sejak SPI Biru ini, ada perubahan jenjang kaderisasi. Dalam perkaderan formal utama pertama kali ada TMU (Taruna Melati Utama), yang mana sebelumnya hanya sampai TM III. Adapun dalam perkaderan formal pendukung ada beberapa perkaderan seperti: Diksusti (Pendidikan Khusus Ipmawati), Pelatihan Dai, Mabica (Malam Bina Calon Anggota), Fortasi (Forum Ta'aruf dan Orientasi Siswa).²³ Dalam SPI Biru perkaderan terbagi ke dapan tiga kategori, yaitu formal utama, formal pendukung, dan formal pelengkap. Perkaderan Formal Utama disebut Taruna Melati (TM), meliputi: Taruna Melati Kesatu (TM I), Taruna Melati Kedua (TM II), Taruna Melati

²³ M. Izzul Muslimin "Kekuatan IPM Ada Pada Dialektika Pemikiran": <http://www.ipm.or.id> (diakses 22 Agustus 2016).

Ketiga (TM III), dan Taruna Melati Utama (TM U). Sedangkan Perkaderan Formal Pendukung, meliputi : Pendidikan Khusus Irmawati (tingkat I, II, dan III), Pelatihan Instruktur (tingkat I dan II), dan Pelatihan Da'i (tingkat I, II, dan III) serta Perkaderan Formal Pelengkap.²⁴

Kegemukan dan terlalu luasnya SPI Biru terlihat di sini, meskipun spirit paradigma dalam SPI Biru sama dengan SPI Merah, namun SPI Biru sangat pragmatis dan bahkan liberal. Kata liberal dapat bermakna bebas-variatif (tidak konsisten pelaksanaan). SPI Biru sebagai sistem sangat lengkap dan terlalu gemuk, namun pelaksanaan terlalu bebas dan inkonsisten. Selain itu, liberal juga bermakna fokus pada pengembangan *minat bakat* dan kreatifitas remaja dan pelajar. Dalam perspektif Mansour Fakhri pendidikan liberal berasumsi bahwa masalah di masyarakat tidak ada kaitannya dengan persoalan politik dan ekonomi dan budaya. Meskipun demikian, paradigma liberal selalu berusaha untuk menyesuaikan pendidikan dengan keadaan ekonomi dan politik di luar dunia pendidikan dengan cara memecahkan masalah-masalah yang ada dalam dunia pendidikan.²⁵ Hal inilah yang dilakukan oleh SPI Biru, seluruh pelatihan perkaderan didesain untuk menyesuaikan dengan realitas remaja dan berbagai pengembangan diri melalui berbagai pelatihan yang ada dalam SPI.

Senada dengan Muhaimin, perspektif esensialisme kurikulum bersifat *subject centered*, dimana pendidik

24 Pelatihan tersebut antara lain: "Masa Bimbingan Calon Anggota (Mabica), Masa Pembekalan Anggota (Mapeta), Kajian Dienul Islam I, Kajian Dienul Islam II, Pelatihan Kader Mubaligh, Pelatihan Manajemen Dakwah, Pelatihan Manajemen Masjid, Pendidikan Kesehatan Mental Remaja, Pendidikan Keluarga Sakinah, Pelatihan Keterampilan Remaja Putri, Pelatihan Penelitian tingkat Dasar dan Lanjut, Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Remaja, Pelatihan Motivasi Berprestasi, Pendidikan Wawasan Remaja, Pelatihan Manajemen Diskusi, Pelatihan Jurnalistik I-III, Pelatihan Teknologi Tepat Guna, Pelatihan Motivasi Bisnis dan Kewirausahaan, Pendidikan Wawasan Seni, Workshop Seni, Pelatihan Manajemen Kepemimpinan, Penataran Kepemimpinan, Refreshing Kepemimpinan, dan Job Training Administrasi."

25 Mansour Fakhri, *Ideologi Dalam Pendidikan: Sebuah Pengantar Ideologi-Ideologi Pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2008), xiii-xiv.

sebagai pusat pembelajaran yang lebih ditekankan demi mengembangkan *mind* peserta didik.²⁶ Sedangkan dalam SPI Biru masih berpusat pada pendidik (instruktur), namun tujuannya adalah mengembangkan kemampuan peserta didik. Karena sejatinya SPI Biru dibangun dengan logika remaja. Corak ideologis dan orientasi perenialisnya memang masih, tetapi mulai menjadi inklusif ke dunia remaja yang gaul, kreatif, dan mandiri. Izzul Muslimin menyebut perkaderan di era SPI Biru sangat variatif, inklusif dan tidak formalistik. Contohnya kader yang tidak pernah ikut pelatihan "Taruna Melati" diakui menjadi kader, karena komitmen dan kualitas kepemimpinan.²⁷ Dari sisi ini, SPI Biru lebih liberal-pragmatis. Namun, esensialisme ini mirip dengan perenialisme. Bedanya, kalau perenialisme bercorak *regresif* (kembali kepada yaitu nilai keabadian: agama) corak doktriner dan ideologis kuat seperti dalam SPI Merah, sedangkan esensialisme lebih bercorak *konservatif*, yakni sikap untuk mempertahankan nilai-nilai budaya manusia.²⁸

Dalam perspektif paradigma liberal, tidak ada masalah dalam sistem di tengah masyarakat, namun masalahnya terletak pada mentalitas, kreativitas, motivasi, dan ketrampilan peserta anak didik. Freire menyebut pola pikir ini dibangun atas kesadaran naif yang melihat `aspek manusia` menjadi akar penyebab masalah. Dalam kesadaran ini `masalah etika, kreativitas, 'need for achievement` dianggap sebagai penentu perubahan sosial.²⁹ Oleh karena itu, *man power development* adalah sesuatu yang diharapkan akan menjadi pemicu perubahan. Solusinya adalah memperbaiki manusiannya dengan bekal keterampilan dan kecakapan hidup. Hal ini dapat dilihat apresiasi SPI Biru yang mengutamakan prestasi kreatifitas kegiatan dan banyaknya perkaderan pelengkap yang variatif dibuat sangat bebas sesuai dengan minat

²⁶ Muhaimin, *Wacana Pengembangan*, 50.

²⁷ M. Izzul Muslimin, "Kekuatan IPM Ada Pada Dialektika Pemikiran", dalam <http://www.ipm.or.id>, diakses 22 Agustus 2016.

²⁸ Muhaimin, *Wacana Pengembangan*, 51-52.

²⁹ Mansour Fakhri, *Ideologi Dalam Pendidikan: Sebuah Pengantar Ideologi-Ideologi Pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2008), vii.

dan bakat remaja. Achievement Motivation Training (AMT) digunakan sejak SPI Biru, berasal dari David McClelland adalah "contoh terbaik pendekatan liberal." Berbagai pelatihan pengembangan komunitas (*Community Development*). Namun bagi esensial-isme pendidikan adalah membantu manusia untuk menjadi dirinya sendiri (*be him self*) menjadi *esensial-self* yang mem-bedakan dirinya dengan makhluk-makhluk lain. Untuk itu perlu diadakan kebiasaan-kebiasaan melalui pelatihan-pelatihan sejak anak didik masih muda.³⁰ Sebab itu beragam pelatihan dimasukkan SPI Biru, sehingga menjadikan SPI Biru gemuk. Rigitnya SPI Biru itu satu sisi memang baik bagi sistem perkaderan, tetapi SPI Biru telah memberikan ruang-peluang seluas-luasnya berkreativitas pada pelaksanaannya. Secara konseptual SPI Biru rigit, kaku, sangat lengkap antara materi dan metode. Akan tetapi, SPI biru paling tidak konsisten dalam pelaksanaannya di lapangan. Salah satu kritik adalah kerijitan SPI Biru memang susah dilaksanakan atau memang sengaja tidak melaksanakannya dengan baik.³¹

C. Madzhab SPI Hijau: Progressivisme

Sebelum SPI Hijau, dalam sistem perkaderan IRM, belum pernah membahas filsafat perkaderan IRM dalam buku pedoman. Namun, sejak SPI Hijau, dalam pendahuluan buku SPI Hijau yang berjudul "Perkaderan IRM: Mitos atau Realitas?", membahas filsafat perkaderan IRM perspektif tiga kerangka pemikiran filsafat, yaitu: ontologis, epistemologis, dan aksiologis.

Secara ontologis perkaderan IRM adalah *tarbiyah* (*education*). Selanjutnya *tarbiyah* menuntut adanya transformasi kesadaran nilai kader secara seimbang antara tiga pokok kebutuhan manusia, yaitu: penalaran (*aqliyah*), spiritualitas atau keimanan (*ruhiyah*), dan kesehatan badan (*jasadiyah*). Secara epistemologi perkaderan adalah

³⁰ Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan*, 79.

³¹ Arif Jamali Muis, Membedah SPI Biru. Seminar dan Lokakarya Nasional Sistem Perkaderan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Yogyakarta, 22-25 Desember 2013.

menumbuhkan kesadaran nilai kader: keislaman, keilmuan, kekaderan, kemanusiaan dan kebudayaan. Secara aksiologis perkaderan adalah adanya "perubahan" kader baik dari segi *personality*, kerangka pemikiran, dan tindakan. Semua ini dalam rangka menjunjung tinggi nilai Islam sebagaimana tujuan IRM dan Muhammadiyah, Nilai Dasar Perjuangan (NDP) atau orientasi ideologis gerakan IPM. Kalau diperas dari substansi paradigma gerakan IRM untuk diterjemahkan ke dalam orientasi ideologis gerakan IRM, maka akan ditemukan dua kata kunci, yaitu "kritisisme" dan "keadilan sosial".

Buku SPI Hijau sepenuhnya dirumuskan dengan paradigma pendidikan kritis Freirean. Karena itu, tidak lengkap ketika membaca SPI Hijau tetapi tidak membaca pemikiran Paulo Freire atau *Pendidikan Populer* Masour Fakih dkk. Bagi mazhab Freirean, hakekat pendidikan ataupun pelatihan adalah demi membangkitkan kesadaran kritis. Pendidikan merupakan arena perjuangan politik. Sikap kritis terhadap realitas yang timpang dan tidak adil serta kepekaan terhadap lingkungan ini dalam SPI Hijau nampaknya ada kedekatan dengan aliran progresivisme. Menurut progresivisme, kurikulum dibangun dari pengalaman personal dan sosial peserta didik. Hal demikian dilakukan agar peserta didik memiliki keterampilan, alat dan pengalaman sosial dengan melakukan interaksi dengan lingkungan dan akhirnya memiliki kemampuan menyelesaikan masalah, baik personal maupun sosial.³² Jadi baik SPI Hijau maupun progresivisme sama-sama memandang bahwa pendidikan berangkat dari realitas yang dialami peserta didik. Jika pandangan konservatif, pendidikan bertujuan untuk menjaga *status quo*, sementara bagi kaum liberal untuk perubahan moderat, maka paradigma kritis menghendaki perubahan struktur secara radikal dalam realitas sosial politik dimana kader berada.

SPI Hijau dibangun atas paradigma yang tertuang dalam "Manifesto Gerakan Kritis-Transformatif" IRM. Visi gerakan IRM adalah melakukan kritik terhadap sistem dominan sebagai pemihakan terhadap remaja dan pelajar tertindas

³² Muhaimin, *Wacana Pengembangan*, 43.

untuk mencipta sistem sosial baru dan lebih adil. Dalam GKT, IRM harus mampu menciptakan ruang untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas dan kritis untuk transformasi sosial. Dengan kata lain, filsafat perkaderan IRM adalah 'memanusiakan' kembali manusia yang mengalami dehumanisasi karena sistem dan struktur yang tidak adil. Sejalan dengan progresivisme yang melihat peserta didik sebagai makhluk yang aktif dan kreatif. Pendidikan progresif menekankan pada "*learning by doing*", belajar melalui pengalaman, belajar aktif, belajar secara kelompok serta *problem solving*.³³ Berbeda dengan progresivisme yang menggunakan *problem solving*, dalam SPI Hijau menggunakan ANSOS (Analisis Sosial) sebagai metode dan teknik "hadap masalah" menjadi salah satu kegiatan yang strategis untuk merespon sistem dan diskursus yang dominan. Dalam SPI Hijau peserta dikondisikan bagaimana menghayati visi dan misi mereka, serta kesadaran kritis peserta sangat diperlukan jika akan meletakkan peserta belajar sebagai subyek dan pemonitor proses dan metode untuk transformasi sosial.³⁴

Bagi prorogresivisme merupakan proses penggalian pengalaman terus-menerus. Pendidikan merupakan usaha terus menerus merekonstruksi (menyusun ulang) pengalaman hidup.³⁵ Dalam SPI Hijau, pendidikan bagaimana mengembangkan paradigma berpikir kritis (kritisisme). SPI Hijau mengajarkan untuk melawan ketidakadilan dan *status quo*. SPI Hijau mengajarkan pendidikan kerakyatan (populer). Bagi John Dewey norma harus timbul dari masyarakat sendiri yang selalu berubah dinamis sesuai kondisi zaman. Pendidikan dalam aliran progresivisme berakar pada pragmatisme.³⁶ Namun dalam SPI Hijau pendidikan berangkat dari al-Qur'an (teologi al-Ma'un) yang dipahami secara pragmatis-fungsional, sehingga mampu memecahkan problem sosial. Pendidikan kritis yang dianut oleh SPI HIjau, bertemu dengan

33 *Ibid.*, 82-86.

34 Mansour Fakih dkk, *Pendidikan Populer...*, 15; Mansour Fakih, "Pendidikan Yang Membebaskan...", 5.

35 *Ibid.*, 203.

36 George R. Knight, *Filsafat Pendidikan*, 80-81.

dengan paradigma Islam transformatif pemikiran Moeslim Abdur-rahman dengan teologi al-Ma'un Kiai Dahlan sebagai landasan teologis.

Perhatian progresivisme banyak difokuskan pada dinidik (*child-centered school*) dan menekankan kurikulum yang mengutamakan aktivitas (*activity-centered curriculum*).³⁷ Adapun dalam SPI Hijau juga mengutamakan aktivitas peserta, karena itu pendidik hanya menjadi fasilitator yang sama-sama belajar. Bagi John Dewey dalam Rachman Assegaf, menurut progresivisme, penguasaan pengetahuan yang baku (kurikulum baku SPI Merah dan SPI Biru), sebagaimana aliran perenialisme dan esensialisme adalah tidak diperlukan. Karena tidak responsif terhadap problem aktual baik untuk individu maupun masyarakat. Pendidikan progresif menempatkan perhatian pada 'bagaimana cara berpikir' (*how to think*: bukan pada 'apa yang dipikirkan' (*what to think*). Dalam SPI Hijau bagaimana peserta diajarkan 'bagaimana cara berpikir dan berbuat kritis'. Oleh sebab itu, dalam SPI Hijau materi filsafat sebagai alat pemecah problem sosial diajarkan. Titik temu antara SPI Hijau dan progresivisme adalah pendidikan berpusat pada peserta didik (*child centered*), tidak tergantung pada *text book* atau metode pengajaran tekstual, tetapi kontekstual. Pendidikan progresivisme juga tidak menggunakan hukuman fisik atau menakut-nakuti sebagai pembentuk sikap disiplin sebagaimana SPI Merah dan Biru. Namun SPI Hijau lebih demokratis, partisipatoris dan humanis.³⁸

D. Madzhab SPI Kuning: Rekonstruksionisme

Filsafat perkaderan dalam SPI Kuning tidak jauh berbeda dengan SPI Hijau. Karena sejatinya SPI Kuning ialah kontinuitas dari SPI sebelumnya. Secara ontologis perkaderan dalam SPI Hijau adalah *tarbiyah (education)*, sedangkan dalam SPI Kuning selain "tarbiyah, juga "dakwah". Tarbiyah sebagai titik awal (penumbuhan potensi), sedangkan *da'wah*

³⁷ Abd. Rachman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam*, 204.

³⁸ George R. Knight, *Issues and Alternatives in Educational Philosophy*, Cet. XII, (Michigan: Andrews University Press, 1982), 82-83.

(mengajak, mengubah) yang memiliki daya transformatif (*action*). Selanjutnya, epistemologi perkaderan ialah "Islam Berkemajuan". Secara filosofis, perkaderan IPM terinspirasi dari pesan Kyai Ahmad Dahlan: *Dadiyo kijahi sing kemadjoen, ojo kesel anggomu nyambut gawe kanggo Moehammadijah. Pertama*, kata "kiyai" mengandung makna kedalaman religiusitas-spiritual manifestasi kesadaran ketuhanan. *Kedua*, kata "berkemajuan" mengandung makna berpikir ke depan atau progresif dan keluasan pandangan. *Ketiga, ojo kesel anggomu nyambut gawe kanggo Moehammadijah*" memiliki makna etos kerja dan militansi perjuangan. Secara kultural mayoritas basis massa IPM ialah pelajar Indonesia, sementara Islam bersifat universal tidak hanya di Arab. Bukan Islam Arab, tetapi Islam Indonesia. Oleh sebab itu, perkaderan IPM tidak mungkin mengabaikan budaya lokal sebagai basis kultural, baik dalam menerjemahkan nilai Islam agama dan ilmu pengetahuan memiliki fungsi dalam kehidupan nyata. Secara sosiologis, masyarakat Indonesia terdiri dari beragam ras, suku, budaya, dan agama. Keberagaman sering melahirkan konflik yang mengancam persatuan (integrasi) bangsa. Secara teologis, tidak ada agama maupun budaya manapun yang membenarkan perilaku agresif terhadap orang lain. IPM perlu menata kembali struktur materi perkaderan yang lebih integratif dan interkoneksi sesuai dengan perkembangan paradigma masyarakat dan tubuh IPM sendiri.³⁹

Apakah pemikiran pendidikan (landasan filosofis) yang mendasari konsep pendidikan dalam SPI Kuning? Pembacaan perspektif rekonstruksionisme akan membantu menemukan pemikiran filosofis pendidikan SPI Kuning.

Pertama, pandangan ontologi aliran rekonstruksionisme memandang bahwa realita itu bersifat universal, yang mana realita itu ada dimana dan sama di setiap tempat.⁴⁰ Sementara SPI Kuning dengan memandang realitas bersifat kosmopolitan, bahwa siapapun yang hidup dimanapun berada adalah warga

39 Pimpinan Pusat IPM, *Sistem Perkaderan IPM (Kuning)*, 13.

40 Mohammad Noor Syam, *Filsafat Kependidikan dan Filsafat Kependidikan Pancasila* (Surabaya : Usaha Nasional, 1998), 306.

dunia, maka harus memiliki kesadaran berpikir lokal bertindak global, sekaligus berpikir global bertindak lokal.

Kedua, perspektif epistemologi rekonstruksionisme aliran ini lebih merujuk pada pendapat aliran pragmatisme (*progressive*) dan perennialisme. Karenanya, baik indera maupun rasio sama-sama berfungsi membentuk pengetahuan, dan akal dibawa oleh panca indera menjadi pengetahuan. Adapun dalam SPI Kuning menggunakan epistemologi Islam Berkemajuan berbasis integrasi-interkoneksi keilmuan yakni *hadlarah nash* (sumber teks al-Qur'an dan al-Sunnah: bayani), *hadlarah 'ilm* (sumber sains alam dan sosial: burhani), dan *hadlarah falsafah* (sumber dari filsafat dan intuisi: irfani).

Ketiga, perspektif aksiologi aliran rekonstruksionisme memandang masalah nilai berdasarkan azas-azas supernatural yakni menerima nilai natural yang universal, yang abadi berdasarkan prinsip nilai teologis.⁴¹ Jalaluddin dan Abdullah Idi menyatakan secara aksiologis manusia adalah pancaran (emanasi) Tuhan.⁴² SPI Kuning nilai-nilai universal bersumber dari prinsip tauhid murni yang bersifat universal.

Menurut George R. Knight, filsafat pendidikan rekonstruksionisme memandang bahwa masyarakat dunia sedang dalam kondisi krisis. Peradaban yang mengalami kehancuran. Pendidikan formal menjadi agen utama dalam rekonstruksi tatanan sosial. Metode pengajaran didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis yang bertumpu pada "kecerdasan 'asali'" untuk merenungkan solusi bagi persoalan-persoalan umat manusia. Pendidikan formal bagian tak terpisahkan dari solusi sosial dalam krisis dunia, maka harus mengajarkan perubahan sosial.⁴³ Sementara SPI Kuning berangkat dari keyakinan teologi al-Ashr bahwa kondisi umum kemanusiaan sedang mengalami kehancuran baik dalam hal ekonomi, politik dan budaya, maka harus dilakukan sebuah rekonstruksi

⁴¹ Imam Barnadib, *Dasar-Dasar Kependidikan Memahami Makna dan Perspektif Beberapa Teori Pendidikan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), 69.

⁴² Jalaluddin dan Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat dan Pendidikan* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 98.

⁴³ George R. Knight, *Filsafat Pendidikan*, 185-190

masyarakat dengan menjadikan iman, amal shaleh, serta wasiat kebenaran dan kesabaran sebagai pilar rekonstruksi peradaban atau masyarakat baru. Namun, dalam SPI Kuning digunakan dalam format perkaderan di luar sekolah. Walaupun ada kesamaan semangat kembali ke sekolah pasca perubahan IRM ke IPM. Jika rekonstruksionisme bertumpu pada kecerdasan asali, maka SPI Kuning bertumpu pada "kecerdasan irfani" yang Amin Abdullah menyebutnya sebagai "spiritualitas ihsan yang berkemajuan" atau "keberagamaan intersubjektif" sebagai dasar terwujudnya "etika global".

Titik temu SPI Kuning dengan aliran rekonstruksionisme adalah keduanya sama-sama berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup peradaban baru.⁴⁴ Dan inilah spirit penting dari "SPI Kuning" yaitu Islam berkemajuan sebagai etos pembangunan peradaban maju. Menurut Zuhairini, pada dasarnya aliran rekonstruksionalisme sepaham dengan aliran perennialisme dalam hendak mengatasi krisis kehidupan modern. Hanya saja jalan yang ditempuhnya berbeda dengan apa yang dipakai oleh perennialisme. Rekonstruksionisme ingin "merombak tata susunan lama, dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang sama sekali baru".⁴⁵ Untuk itu dalam SPI Kuning menggunakan metodo-logi *Appreciative Inquiry* (AI) sebagai pendekatan penyelesaian problem sosial budaya, politik, dan ekonomi. Dalam AI bertumpu pada kekuatan positif untuk melakukan "inovasi sosial" menuju tatanan sosial baru. Karena itu, kader SPI Kuning memiliki peran dan visi untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat. Tujuan pendidikan rekonstruksionisme adalah mengembangkan 'insinyur-insinyur sosial' di era globalisasi, maka senada dengan SPI Kuning "kader terampil yang mampu menganalisis dan menyelesaikan problem-problem" di era globalisasi.

Aliran rekonstruksionisme mengisi kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat masa

44 Teguh Wangsa Gandhi HW, *Filsafat Pendidikan Madzhab-Madzhab Filsafat Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 189.

45 Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 29.

depan. Kurikulum banyak berisi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia, yang termasuk di dalamnya masalah-masalah pribadi para peserta didik sendiri; dan program-program perbaikan yang ditentukan secara ilmiah untuk aksi kolektif. Semua itu dilakukan untuk "rekonstruksi masyarakat dan penciptaan tatanan dunia baru secara menyeluruh".⁴⁶ Dalam SPI Kuning materi disesuaikan dengan problem-problem masyarakat dan isu-isu yang berkelanjutan: misalnya pendidikan anti korupsi, anti kekerasan, sosiopreneur, jihad literasi, dan konservasi ekologi, serta pembangunan berkelanjutan.

Tabel. Dinamika Filsafat Perkaderan IPM

SPI	SPI Merah (1985-1994)	SPI Biru (1994-2002)	SPI Hijau (2002-2014)	SPI Kuning (2014-)
Corak	Doktrinal	Pragmatis	Partisipatoris	Dialogis
Paradigma	Konservatif	Liberal	Kritis	Progresif
Filsafat	Perenialis	Esensialis	Progresif	Rekonstruksi Sosial

⁴⁶ Abd. Rachman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam*, 206.

Pena 8

PROFIL KADER IPM

Sejatinya perkaderan adalah untuk mewujudkan tujuan IPM. Perkaderan menumbuhkan cara berpikir dan membentuk karakter kader. Karena itu, berbicara tentang “profil kader IPM”, tentu dipengaruhi oleh tujuan IPM sebagai acuan atau cita-cita sosial IPM. Dalam sejarahnya, tujuan IPM menagali perubahan beberapa kali mengikuti dinamika zaman yang terus berubah, maka tujuan IPM pun terkena hukum perubahan sesuai dengan semangat zaman. Sejauh ini, tujuan tujuan IPM pertama yang penulis ketahui adalah “Terbentuknya pelajar Muslim yang Berakhlak mulia, Cakap, Percaya pada diri sendiri, dan berguna bagi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.”. Isi tujuan IPM tersebut cenderung berorientasi pada “pembentukan karakter” pelajar. Kemudian mengalami perubahan dalam Anggaran Dasar IPM tahun 1992, yaitu “Terbentuknya pelajar Muslim yang berakhlak mulia, dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Utama, adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa ta’ala.¹ Tujuan dibuat pasca Muhammadiyah dan IPM menerima “pancasila sebagai asas tunggal”, sehingga Muhammadiyah

¹ Agung Danarta, “Profil Pelajar Cita IPM: Sebuah Kajian Analitis Terhadap Rumusan Resmi Organisasi” dalam dokumentasi “Pelatihan Kader Pelajar Muhammadiyah” IPM Daerah Istimewa Yogyakarta (Gedongkuning, 3-12 Juli 1992) Lihat pula Anggaran Dasar IPM dalam “Buku Pegangan Anggota IPM” PD IPM Kabupaten Karangayar 1991, 26

mengganti tujuannya menjadi "Masyarakat Utama".

Selanjutnya, dalam Anggaran Dasar hasil Mukhtamar 2002, 2004 yang sepertinya berubah sejak perubahan nama IPM ke IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah), yaitu "Terbentuknya remaja muslim yang berakhlak mulia dan berilmu dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat utama adil dan makmur yang diridhai Allah SWT"². Dalam redaksi, selain "remaja Muslim" yang "berakhlak mulia" ada penambahan "berilmu" yang mendakan etos tradisi keilmuan dan corak yang lebih inklusif dan pragmatis. Kemudian, dalam Anggaran Dasar tahun 2006 sedikit ada perubahan, yakni "Terbentuknya remaja muslim yang berakhlak mulia, berilmu dan terampil, dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Di sini ada penambahan selain, berakhlak mulia dan berilmu, juga pelajar harus terampil dan memiliki skill untuk kehidupannya.

Sejak Mukhtamar XVI IPM 2008 di Solo, yaitu Mukhtamar kembalinya nama IRM ke IPM. Di sini lah, tujuan IPM terahir mengalami perubahan, yaitu "Terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil, dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya". Tampak yang berubah adalah selan istilah remaja muslim menjadi pelajar muslim, yang berubah adalah susunan yang awalnya berakhlak mulia, berilmu, dan terampil, kemudian direkonstruksi menjadi berilmu, berakhlak mulia, dan terampil. Dari sini terlihat bahwa IPM ingin meletakkan ilmu menjadi posisi sentral, sedangkan akhlak mulia dan terampil adalah manifestasi dari kaum berilmu. Tujuan-tujuan tersebut sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:

² Tanfidz Mukhtamar XIII IRM Yogyakarta, 10-13 Oktober 2002 16

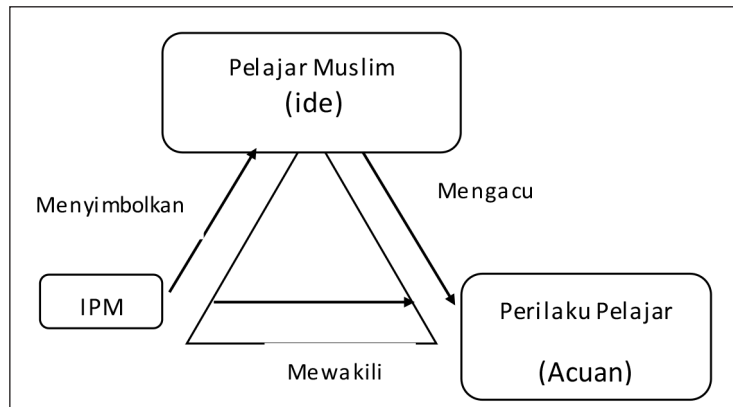
Tabel 6. Dinamika Tujuan IPM

No.	Muktamar	Tahun	Rumusan Maksud dan Tujuan IPM
1.	Munas I Jakarta	1966	Terbentuknya pelajar Muslim yang Berakhlak mulia, Cakap, Percaya pada diri sendiri, dan berguna bagi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.
2.	Muktamar VIII Yogyakarta	1989	Terbentuknya pelajar Muslim yang berakhlak mulia, dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Utama, adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala.
3.	Muktamar XIII Yogyakarta	2002	"Terbentuknya remaja muslim yang berakhlak mulia dan berilmu dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat utama adil dan makmur yang diridhai Allah SWT"
4.	Muktamar XV Medan	2006	Terbentuknya remaja muslim yang berakhlak mulia, berilmu dan terampil, dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
5.	Muktamar XVI Solo	2008	"Terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil, dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya".

Dengan pemahaman terhadap maksud dan tujuan IPM, maka pada dasarnya IPM dibentuk guna mempersiapkan pelajar dengan nilai-nilai Islam, pengetahuan (ilmu, saintifik), dan keterampilan (softskill) mereka melalui proses pendidikan diri sehingga dapat beraktualisasi sebagai kader kemanusiaan, bangsa, umat, dan persyarikatan di kalangan pelajar. Dengan kualifikasi kader yang seperti tersebut, diharapkan akan dapat memberikan efek yang besar bagi pencapaian tujuan IPM

Berpijak dari tujuan IPM sebagai dasar tujuan perkaderan IPM merupakan "konsep umum" yang menjadi bayangan mental atau ide-ide tentang dunia nyata. Secara struktural terdiri atas tiga bagian, yaitu ide (alam pikiran kader tingkat

pelajar yang ideal untuk menciptakan tujuan Muhammadiyah), acuan (gejala kemana ide mengacu), dan simbol (istilah untuk mengkomunikasikan ide kepada orang lain). Berdasarkan struktur konsep tersebut, maka ide pembentukan kader IPM sebagai berikut:

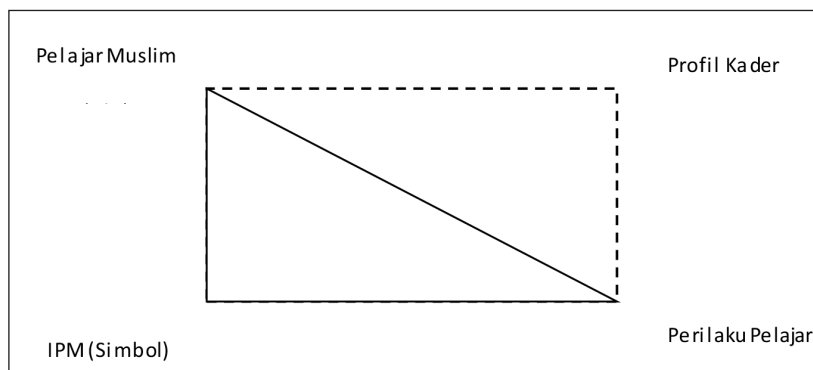


Gambar 2. Skema Segitiga Kader

Dari konsep segitiga sebagai acuan tersebut, tercermin adanya ide yang dijalin ke dalam satu acuan menggunakan simbol. Dari segitiga tersebut, istilah atau ide tidak identik dengan gejala nyata yang diwakilinya. Konsep-konsep itu, memiliki acuan yang dapat diamati oleh masyarakat, dan sebab itu adalah simbol tertentu yang memungkinkan dikomunikasikan dengan orang lain, karena itu, maka meskipun tidak identik antara ide dan perilaku pelajar sebagai acuan, namun dapat diupayakan agar simbol atau ide itu mampu menciptakan paradigma tentang karakter umum yang merupakan diri sifat tertentu dari istilah dan ide dalam benak orang yang diajak komunikasi.

Dalam konteks ide, acuan dan simbol, kader (Perancis: *Cadre*) berarti elite, ialah bagian yang terpilih, yang terbaik karena terlatih, berarti jantung suatu organisasi. Kalau kader suatu organisasi lemah, maka seluruh kekuatan organisasi juga lemah. Kader berarti pula inti tetap dari suatu resimen. Daya juang resimen ini sangat tergantung dari nilai kadernya, yang merupakan tulang punggung, pusat semangat dan wawasan masa depannya. Maka jelaslah bahwa hanya orang-

orang yang bermutu itulah, yang terpilih dan berpengalaman dalam medan pertempuran, yang taat dan berinisiatif, yang dapat disebut kader. Dalam bahasa Latin, kader (*quadrum*) berarti empat persegi panjang atau kerangka. Dengan demikian kader dapat kita definisikan sebagai kelompok manusia yang terbaik karena terpilih, yaitu merupakan inti dan tulang punggung (kerangka) dari kelompok yang lebih besar dan terorganisir secara permanen.³ Hal tersebut dapat dilihat dari *quadrum* (kerangka, persegi panjang berikut) proses konseptualisasi di bawah ini.



Gambar 3. Skema Bujur Sangkar Kader

Proses konseptualisasi, mulai dengan ransangan indera yang dihasilkan oleh perilaku pelajar sebagai acuan nyata kemudian menghasilkan paradigma tentang profil kader. Paradigma-paradigma kemudian diproses oleh otak untuk mengetahui karakter kader IPM. Paradigma (persepsi) akan menghasilkan abstraksi yang kebalikan kepada ide. Berdasarkan pemikiran ini, maka proses konseptualisasi kader IPM akan mencakup abstraksi dari seperangkat abstraksi yang memiliki beberapa unsur umum sebagai karakteristik.

Dengan kerangka sosiologi pengetahuan Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, yang berasumsi bahwa "manusia dalam masyarakat," dan "masyarakat dalam manusia" menunjukkan bahwa "realitas" dan "pengetahuan" adalah

³ MPK PP Muhammadiyah, Sistem Perkaderan Muhammadiyah....

dialektis,⁴ sehingga realitas adalah dibentuk oleh masyarakat (*social construction of reality*).⁵ Teori ini menjadi asumsi dasar penelitian ini bahwa wacana, dan paradigma dalam IPM adalah hasil konstruksi sosial oleh masyarakat IPM.⁶ Berdasarkan pendekatan Berger dan Luckmann, rumusan konseptual tentang dimensi sosial pengetahuan yang berkembang di masyarakat berawal dari proses eksternalisasi (*externalization*) ide berupa wacana kemudian beranjak ke dalam proses obyektivasi (*objectication*) dan berahir menuju proses internalisasi (*internalization*).⁷ Pendekatan sosiologi pengetahuan (*sociology of knowledge*) Berger dan Luckmann akan *membantu menemukan*: apa sebabnya “pemikiran pendidikan” dapat diterima sebagai dalam masyarakat IPM? bagaimana pemikiran yang telah menjadi “kenyataan” dipertahankan dalam masyarakat IPM ? bagaimana “pemikiran pendidikan” bisa hilang dan berganti di tubuh IPM? Eksternalisasi pengetahuan (rezim kebenaran) yang menghegemoni wacana dalam tubuh IPM, diobyektivasi menjadi paradigma gerakan (Tri Tertib, GKT dan GPB) dan diinternalisasi melalui proses perkaderan (SPI Merah, Biru, Hijau dan Kuning) melalui proses (habitualisasi) kepada dalam seluruh anggota, kader, dan pimpinan IPM, sehingga mampu membentuk karakter pelajar. Karena itu, perubahan wacana (paradigma) gerakan, berpengaruh pada pemikiran pendidikan dan karakter/ profil kader IPM yang dicita-citakan. Atas dasar itu tesis ini menjelaskan empat karakter kader berdasarkan empat sistem perkaderan dalam IPM, yakni generasi militan, generasi kreatif, generasi kritis dan generasi berkemajuan.

A. Generasi Militan

SPI Sebagaimana dijelaskan di atas bawa SPI Merah termasuk pada paradigma “pendidikan konservatif” dan

4 Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 2012), 19.

5 *Ibid*, 22.

6 Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Ibid.*, 72

7 *Ibid*, 52

aliran filsafat esensialis-perennialis. Karena corak SPI Merah cenderung-doktrinal dalam menanamkan ajaran aqidah Islamiyyah, sehingga cenderung puritan. Berdasarkan orientasi tujuan SPI Merah yakni, "terbentuknya kader-kader IPM yang memiliki sikap, pemikiran, perilaku, dan kecakapan memimpin dan berda'wah Islamiyah sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah dalam rangka mencapai tujuan IPM". Ada 4 (empat) kata kunci dalam tujuan perkaderan SPI Merah tersebut yaitu "sikap, pemikiran, perilaku, dan kecakapan" untuk berdakwah Islamiyah. Kader IPM diproyeksikan ke dalam sebagai tenaga penggerak organisasi Penerus kepemimpinan, tenaga inovator/ pencari ide-ide baru, dan data base organisasi. Untuk ke luar, diproyeksikan sebagai pelopor, pelangsup, dan penyempurna gerak Muhammdiyah, sebagai pemersatu pelajar Islam, serta sebagai pelopor kekuatan moral dan subjek dakwah Islamiah.

Dalam SPI Merah karakter generasi yang diidealkan disebut dengan "identitas". Adapun identitas generasi SPI Merah yang menjadi sasaran dalam pengembangan perkaderan pada umumnya meliputi lima aspek antara lain: Pertama, dimensi sikap yakni aspek kejiwaan dan watak seperti semangat, motivasi, kesungguhan, keberanian, kesadaran, tanggung jawab dan aspek-yang didasari aqidah Islam yang kuat, dan kepribadian Muhammadiyah. Kedua, dimensi pemikiran, yakni aspek nalar atau intelektualitas seperti kecerdasan berfikir, ketajaman pengamatan, ketepatan analisa, daya kritis dan lain-lainnya, sehingga mampu membentuk nalar kritis, logis, mampu berpikir dari segi kepentingan organisasi, dan mampu merumuskan ide dan mengomunikasikannya. Ketiga, dimensi pengetahuan, yakni penguasaan pengetahuan dan informasi seperti keluasan wawasan, perbendaharaan ilmu keagamaan, keorganisasian dan kemuhammadiyahhan serta bidang-bidang ilmu pengetahuan dan informasi, mengetahui dasar-dasar pengetahuan keislaman, memiliki dasar-dasar pengetahuan umum dan kemasyarakatan/kebangsaan, menguasai kaidah-kaidah, pengetahuan dan kebijaksanaan organisasi serta menguasai prinsip-prinsip kepemimpinan. Keempat, dimensi perilaku, yakni aspek tingkah laku atau tindakan sehari-

hari seperti moral lisan atau perkataan, perbuatan, disiplin, hubungan antar sesama, kreatifitas, sopan santun, berakhlak mulia, sehingga melahirkan perilaku taat terhadap kebijaksanaan dan peraturan organisasi, kelima, dimensi kecakapan, yakni aspek kemampuan berketrampilan (skill) seperti ketrampilan memimpin, memecahkan masalah, manajemen, menjadi da'i, berolahraga, berkomunikasi dan, mampu mengambil keputusan, mampu menjalankan tugas, teliti dan pandai menghadapi setiap kasus, dan terampil dan berdaya cipta.⁸

Analisis atas tujuan SPI Merah, ditemukan dalam Agung Danarta. Menurutnya, secara umum pelajar yang dicita-citakan IPM adalah pelajar Muslim yang sebenar-benarnya, dimana di dalamnya mengandung sifat akhlak mulia dan memiliki potensi untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah Swt. Secara terperinci, pelajar Muslim yang dicita-citakan IPM adalah pelajar yang memiliki sifat: 1) tebal imannya; 2) tertib dan benar ibadahnya; 3) tinggi akhlak mulianya; 4) tinggi ilmu pengetahuannya; 5) terbiasa tertib belajar untuk meningkatkan prestasi study/ akademik dan berkreasi; 6) terbiasa berpikir logis, kritis, runtut dan benar, 7) memiliki kemampuan berkreasi positif dalam karya keilmuan, kepemimpinan, berdakwah dan karya kreatif lainnya; 8) bijaksana; 9) lincah beramal kebajikan; 10) terbiasa tertib berorganisasi; 11) mampu berfungsi sebagai subyak dalam aktivitas dakwah; dan 12) berfungsi sebagai pelopor, pelangsunng dan penyempurna gerak Muhammadiyah."⁹

Agung Danarta memberi benang merah bahwa kader yang dicita-citakan SPI Merah menjadi dua kata kunci yakni "berakhlak mulia" dan "fungsional" (pragmatis). Berakhlak mulia yakni sesuai dengan kriteria identitas kader dalam SPI Merah, mulai dari sikap, pemikiran yang dibangun dari

8 Pimpinan Pusat IPM, *Sistem Pengkaderan IPM*, 11.

9 Agung Danarta, "Profil Pelajar Cita IPM: Sebuah Kajian Analitis Terhadap Rumusan Resmi Organisasi" (Makalah Pelatihan Kader Pelajar Muhammadiyah (PKPM) Pimpinan Wilayah IPM DIY, 3-12 Juli 1992), 3.

habituasi disiplin positif Tri tertib (tertib belajar, tertib ibadah, dan tertib organisasi).

Pada TM I tujuan perkaderan diarahkan pada "terbentuknya kader Ikatan dan atau kader pimpinan yang memiliki kesadaran mengkaji islam serta memiliki kesadaran dan pengetahuan dalam menjalankan misi organisasi." Pada TM II diarahkan untuk "Terbentuknya Kader Ikatan dan atau Kader Pimpinan yang memiliki kemantapan beraqidah, memiliki tanggung jawab dan kecakapan dalam menjalankan misi organisasi." Adapun TM III diarahkan kepada "Terbentuknya kader Ikatan atau kader Pimpinan yang memiliki keteguhan dalam memilih Muhammadiyah sebagai gerakannya serta memiliki wawasan keilmuan dan etika pemimpin dalam menjalankan misi Muhammadiyah."

SPI Merah terdiri dari tiga komponen, yaitu "Taruna Melati (I II dan III), Pendidikan Khusus Ipmawati (Diksusti) I, II, dan III, serta Latihan Instruktur (LI) I, II, dan III. Taruna Melati (TM) merupakan Komponen Umum dalam Sistem Pengkaderan IPM, sedang Pendidikan Khusus Ipmawati (Diksusti) dan Latihan Instruktur (LI) merupakan Komponen Pendukung. Menurut Agus Sukaca muatan ideologi terdapat pada TM1-TM2-TM3, sedangkan pengembangan wawasan pada Diksusti, sedangkan pembentukan keterampilan ada di Pelatihan Instruktur.

Dalam Taruna Melati suasana dibuat mencekam, jadi ketika training malam hari ada orang yang melempar batu krikil di atas genteng, padahal itu dilakukan oleh instruktur. Lalu mengatakan ke peserta "kita berhadapan dengan massa PKI". Waktu tidurnya juga sedikit, makan juga dibikin serba kekurangan. Sehingga suasana mencekam, serba kekurangan, dan menimbuklan militansi kuat. Wajar jika kader yang dicitakan dalam SPI Merah adalah "generasi militan".

B. Generasi Kreatif

Sejatinya tujuan dari SPI Biru, sama dengan SPI sebelumnya, yaitu SPI Merah, dan ruh gerakannya adalah "Tri Tertib". Namun, ada realitas yang berbeda dari SPI Merah dan SPI Biru. Pertama, di era SPI Merah pemerintah Orde Baru

yang cenderung diktator-represif-hegemonik, sedangkan era SPI Biru cenderung terbuka dan akomodatif. Kedua, SPI Biru didesain pasca perubahan IPM ke IRM, yang berakibat pada perluasan basis massa IPM, dari "pelajar" ke "remaja", sehingga mempengaruhi orientasi gerakan IPM cenderung inklusif ke dunia pelajar dan pragmatis-fungsional-aplikatif sesuai dengan dunia remaja yang makin kompleks.

Menurut Arif Jamali Muis, hakikat SPI Biru itu sama SPI Merah. Ruh atau spirit SPI Biru adalah SPI Merah, yakni semangat paradigma "Tri Tertib". Kalau ingin membaca dan memahami SPI Biru, sesungguhnya harus membaca SPI Merah. SPI Biru menggunakan metode pedagogis-sekaligus-andragogis. Arif Jamali Muis menambahkan bahwa tujuan SPI Biru, membentuk "kader ideologis, tajam menganalisis, sudah terbuka terhadap wacana sosial yang berkembang" tetapi belum fokus, tidak jelas, alias kader yang serba bisa dalam bahasa poritif dapat disebut dengan "generasi kreatif". Hal ini dikarenakan spirit SPI Biru adalah remaja, sehingga perkaderan formal pelengkap sangat variatif, sehingga SPI Biru dinilai tidak fokus orientasinya.

Senada dengan itu, Taufiqurrahman Ketua Umum PP. IRM 1998-2000 menambahkan bahwa pola kegiatan dan program IRM masa itu diarahkan pada pengembangan kreativitas pelajar dan remaja. Misalnya dalam perkaderan utama "Taruna Melati" dalam SPI Merah hanya jenjang I sampai III, maka di SPI Biru jenjang dipertinggi menjadi empat tingkatan, yaitu TM I hingga Utama. Pada tingkat TM I, perkaderan diarahkan pada terbentuknya kader Ikatan dan atau kader pimpinan yang memiliki kesadaran mengkaji Islam serta kesadaran dan pengetahuan dalam menjalankan misi organisasi. TM II diarahkan pada terbentuknya kader Ikatan atau kader pimpinan yang memiliki kemantapan beraqidah, serta memiliki tanggungjawab dan kecakapan dalam menjalankan misi organisasi. Adapun TM III diproyeksikan pada terbentuknya kader Ikatan dan atau kader pimpinan yang memiliki wawasan ke-Islaman yang luas serta memiliki kecakapan manjerial dan etika kepemimpinan dalam menggerakkan misi organisasi TM Utama diarahkan pada

terbentuknya kader Ikatan dan atau kader Pimpinan yang memiliki keteguhan dalam memilih Muhammadiyah sebagai gerakannya, memiliki wawasan keilmuan yang luas dalam menggerakkan misi organisasi serta terbentuknya instruktur yang mampu mengelola perkaderan tingkat tiga.

Ada beberapa aspek yang dikembangkan dari SPI Biru: pertama, sikap, aspek kejiwaan dan watak, antara lain: aspek semangat, motivasi, kesungguhan, keberanian, kesadaran, tanggung jawab dan aspek-aspek mental serta sikap lainnya. Kedua, pemikiran, yaitu aspek nalar atau intelektualitas, antara lain: kecerdasan berpikir, ketajaman pengamatan, ketepatan analisa, kepekaan daya kritis, dan lain-lain. Ketiga, pengetahuan, penguasaan pengetahuan dan informasi, antara lain: keleluasaan wawasan, perbendaharaan ilmu keagamaan, keorganisasian dan kemuhammadiyahannya, serta bidang-bidang ilmu pengetahuan dan informasi lainnya. Keempat, perilaku, yaitu aspek tingkah laku atau tindakan sehari-hari, antara lain : moral, lisan atau perkataan, perbuatan, disiplin, hubungan antar sesama, kreatifitas, sopan santun, dan lain-lain. Kelima, kecakapan, aspek kemampuan berketrampilan (*skill*), antara lain: ketrampilan memimpin, memecahkan masalah, manajemen berkomunikasi, dan ketrampilan yang bersifat teknis lainnya.¹⁰

Aspek penting dari SPI Biru adalah aspek follow up (tindak lanjut dengan penugasan). Dalam TM I follow up-nya adalah bakti masyarakat dengan titik tekan pada pembinaan dan pengembangan masjid ditempat peserta tinggal sebagai pusat peribadatan, pembinaan masyarakat, dan informasi. Membentuk dan mengelola kelompok pengajian selamalamanya minimal 2 bulan. Sedangkan pada TM II adalah bakti masyarakat dengan titik tekan pada pembinaan dan pengembangan aktifitas remaja di tingkat desa/kelurahan dimana peserta tinggal dan atau lainnya. Dilaksanakan secara bekerjasama dengan Pimpinan Muhammadiyah setempat dan pemerintah desa, selama minimal 2 bulan. Lalu TM III yaitu bakti masyarakat dengan titik tekan pada pembinaan

10 Pimpinan Pusat IRM, *Sistem Pengkaderan IRM*, 12.

dan pengembangan kegiatan remaja di tingkat daerah. Melakukan penelitian realitas masyarakat ditingkat kabupaten atau kotamadya selama 6 bulan. Adapun TMU, tindak lanjutnya adalah melakukan penelitian tentang langkah dan gerak IRM serta prospektif perkembangan dan perannya dalam masyarakat di wilayah masing-masing. Mengelola perkaderan tingkat tiga di wilayah-wilayah. Karena meluasnya basis massa, orientasi program yang makin melebar memenuhi tuntutan masalah remaja yang beragam, serta SPI yang terlalu tebal dan tidak fokus, maka kader-kader SPI Biru disebut oleh Arif Jamali sebagai kader yang serba bisa, namun tidak fokus. Generasi ini dapat disebut dengan "generasi kreatif" atau terampil di segala bidang dan keterampilan.

C. Generasi Kritis

Sejak jargon "kesadaran kritis" masuk ke tubuh IRM tahun 2000, lalu 2002 SPI Hijau dirumuskan, maka IPM menegaskan dirinya sebagai Gerakan Kritis Transformatif (GKT). Manifesto GKT terkonstruksi dari tiga elemen, yakni paradigma kritis, kesadaran kritis, dan gerakan kritis. Sebuah gerakan harus dibangun dari sebuah paradigma kritis yang kemudian melahirkan kesadaran kritis. Ketika kesadaran kritis terbentuk, baru melakukan gerakan kritis dalam bentuk aksi transformatif yang disebut dengan praksisme-kritis.¹¹ Dalam tanfidz Muktamar XIV Bandar Lampung 2004, kata kritis dimaknai sebagai sikap sadar, peka, peduli, dan berani melawan ketidakadilan dalam realitas sosial. (Aksi) Sedangkan transformatif berarti perubahan yang sistematis, partisipatoris

11 Paradigma kritis adalah paradigma yang bertujuan melakukan perubahan struktural dan kultural secara mendasar dalam realitas sosial; ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kesadaran kritis adalah kesadaran yang dapat melihat bahwa struktural dan kultural sebagai sumber masalah dari realitas sosial. Sedangkan, gerakan kritis adalah gerakan yang dilakukan secara sadar, peka, peduli, dan berani melawan segala bentuk ketidakadilan dalam realitas sosial. Adapun aksi transformatif adalah melakukan perubahan yang sistematis meliputi aspek diri (personal) dan struktur serta sistem sosial yang ada, dilakukan dengan partisipatoris demi kondisi masa depan yang lebih baik. Gerakan kritis transformatif memiliki tiga kesatuan pondasi utama yang menjadi landasan yaitu penyadaran, pemberdayaan, dan pembelaan.

demi kondisi yang lebih baik. Manifesto GKT memiliki tiga pilar penting yaitu: "Penyadaran, Pemberdayaan dan Pem-belaan" yang semua itu didasari dengan sikap kritis.

Paradigma kritis membentuk karakter pelajar, remaja atau generasi kritis.¹² Karakter kritis tersebut meliputi beberapa klasifikasi: Pertama, sadar terhadap Realitas sosial. Karakter sadar mengisyaratkan adanya suatu kesadaran bahwa dunia dan realitas sosial bukanlah tatanan tertutup, *given* (apa adanya) dan tidak bisa diubah. Dunia dan realitas sosial merupakan hasil kreasi manusia yang tentu saja dapat diubah oleh manusia. Karakter ini mensyaratkan adanya kesadaran sebagai bagian dari dunia dan realitas sosial. Kesadaran ini akan mendorong lahirnya tanggung jawab terhadap realitas dan hasrat untuk menciptakan dunia dan realitas sosial dengan kondisi yang lebih baik.

Kedua, peka terhadap realitas sosial. Karakter peka berarti bahwa individu IPM mampu memahami berbagai kontradiksi sosial, politik, ekonomi, budaya, agama dan relasi masing-masing kelompok sosial dan suatu realitas. Pemahaman ini membawa kepada pengertian tentang adanya permainan dan tarik-menarik berbagai macam kepentingan antar kelompok dalam suatu realitas. Karakter peka ini artinya kemampuan mengurai adanya berbagai kontradiksi, relasi pelaku dan tarik-menarik kepentingan dari suatu fenomena (baca: peristiwa) dalam suatu realitas sosial.

Ketiga, peduli terhadap realitas sosial. Karakter peduli merupakan realisasi dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai bagian dari suatu realitas sosial. Peduli menunjukkan hasrat, ketetapan hati dan komitmen serta konsisten bahwa realitas harus diubah dan terus diubah demi kondisi yang lebih baik. Peduli menjadi ruh bahwa ia harus terlibat dalam aksi perubahan realitas tersebut.

Keempat, aksi/tindakan nyata, yang merupakan bagian terakhir dari rangkaian tradisi kritis. Namun karakter ini sangat penting seolah sebagai simpul terakhir yang tidak

12 Pimpinan Pusat IRM, *Tanfudz Muktamar XIV 2004*, 14.

boleh lepas. Rangkaian tradisi kritis dan indikator kritis sebelumnya tidak ada artinya tanpa adanya karakter terakhir ini. Karakter Aksi/Tindakan adalah bentuk keterlibatan yang sebenarnya dalam proses perubahan realitas untuk kondisi yang lebih baik. Karakter ini mensyaratkan adanya pilihan keberpihakan yang jelas, keberpihakan kepada kelompok/golongan yang dirugikan /tertindas dalam suatu relasi dari realitas. Keberpihakan menjadi kunci utama dan pintu untuk melakukan aksi/tindakan yang sebenarnya.

Kelima, kesadaran perlunya kolektivitas. Karakter ini memberi arti bahwa suatu aksi perubahan sosial tidak bisa dilakukan sendirian. Aksi tersebut harus melibatkan semua komponen yang ada dalam suatu komunitas sosial. Karakter ini juga memberi arti bahwa IPM bukan satu-satunya organisasi/gerakan yang menginginkan perubahan. Kesadaran ini mendorong suatu bentuk kerja sama dengan lembaga/gerakan sejenis untuk merubah realitas sosial.

Keenam, visioner dan pelopor, karakter yang menunjukkan sifat IPM yang melihat realitas sosial dan membayangkan (baca : memprediksi) apa yang terjadi di masa mendatang. Sifat ini menjadi dasar analisis realitas sosial yang dilakukan. Pemahaman yang dihasilkannya diharapkan memberikan pilihan pemihakan, pilihan aksi dan prioritas program gerakan yang harus diselesaikan.

Dalam SPI Hijau TM I, merupakan proses pembentukan karakter kader (*character building*), yaitu, *siddiq, tabligh, amanah, fathonah*, sebagai upaya penanaman nilai-nilai dasar pergerakan dan perjuangan Ikatan sebagaimana dalam tujuan IPM dan Muhammadiyah. TM II sebagai proses pembentukan karakter kader (*character building*), yaitu, *siddiq, tabligh, amanah, fathonah*, sebagai upaya pembentukan kader kreatif serta pendalaman nilai-nilai dasar pergerakan dan perjuangan Ikatan dalam rangka mendukung tujuan IPM dan Muhammadiyah. TM III adalah proses pembentukan konstruksi metodologi berfikir kritis dan kemampuan analisis sebagai upaya pembentukan kader kritis yang bertindak berdasarkan nilai-nilai moral kader dan dasar pergerakan dan perjuangan Ikatan dalam rangka mendukung

tujuan IPM dan Muhammadiyah. Adapun TMU menjadi proses perumusan pemikiran kader mengenai masalah IPM dan Ke-Islaman serta pembangunan isu strategis berkait dengan gerakan IPM dalam kancah lokal, nasional dan internasional rangka mendukung tujuan IPM dan Muhammadiyah.

Pada TM I dan TM II, materi lebih banyak dikelompokkan pada hal-hal yang mendukung pada target, yaitu pembentukan karakter kader (*character building*). Sedangkan TM III materi dikelompokkan pada usaha pengelolaan metodologi berpikir dan analisa masalah. TM Utama lebih bersifat penjaringan isu dan masalah nasional dan lokal, kemudian melakukan tindakan perubahan dari masalah tersebut (*intellectual exercise*). Untuk menjembatani tidak adanya penyeragaman, maka dalam setiap training diwajibkan ada materi lokal, sebagai penyediaan ruang kreasi kader-kader di tingkat lokal.

Munawwar Khalil menggambarkan citra diri dan kualifikasi kader SPI Hijau sebagai berikut. Bila praksisme kritis IPM tersebut dihubungkan dengan perkaderan, maka akan melahirkan citra diri kader yaitu "Banyak berfikir, banyak bicara dan banyak bekerja". Mungkin pencitraan ini akan berbeda dengan semboyan yang sering dipakai pendahulu maupun aktivis Muhammadiyah selama ini dengan jargonnya "Sedikit bicara banyak bekerja". Pada level operasional kader IPM juga bisa didorong agar memiliki kualifikasi: unggul, konsisten dan peduli. Aktivis IPM diharapkan memunculkan kader yang memiliki keunggulan komparatif (akhlak dan ilmu), apalagi sebagai organisasi yang berbasis pelajar dan remaja diharapkan mampu menjadikan *steakholder*-nya sebagai insan pelajar yang pandai, cakap, terampil sekaligus berakhlak mulia. Di samping itu dalam pergaulan sosialnya juga konsisten dalam pengertian mampu memegang dan melaksanakan amanah serta jujur. Tetapi kedua kualifikasi di atas tidaklah membuat kader IPM eksklusif dan individualistik tapi justru malah membuatnya memiliki *social care* yang tinggi terhadap sesama. Dengan keunggulan komparatif menjadikan kader IPM siap pakai atau dibutuhkan kapan dan dimana saja. Begitupun sikap konsisten dalam wujud satunya kata dan perbuatan menjadikannya dapat dipercaya oleh

siapapun. Dan kepekaan yang tinggi terhadap situasi sosial masyarakat sekitarnya menjadikan kader IPM dicintai siapa saja, yang disebut sebagai generasi kritis-transformatif.¹³

D. Generasi Berkemajuan

SPI Kuning adalah sistesis atau gabungan antara tiga SPI sebelumnya yaitu SPI Merah, Biru dan Hijau yang semuanya memiliki karakteristik yang berbeda. SPI Merah cenderung doktriner sehingga melahirkan "generasi militan". SPI Biru bercorak doktriner sekaligus liberal-pragmatis sehingga melahirkan "generasi kreatif". SPI Hijau partisipatoris melahirkan "generasi kritis". Keragaman tersebut diramu, sehingga melahirkan SPI Kuning yang integratif-interkoneksi, sehingga SPI Kuning menjadikan Generasi Berkemajuan menjadi cita-cita sosialnya dengan karakter "progresif".

Dalam SPI Kuning paradigma "Gerakan Pelajar Berkemajuan" ditanamkan menggunakan pendidikan *hadhari* berbasis kurikulum intergrasi-interkoneksi, yang terdiri dari *hadlarah nash*, *hadlarah ilm*, dan *hadlarah falsafah*.¹⁴ Karena itu dalam kurikulum SPI Kuning terdiri dari tiga bilik kelompok materi, yaitu materi ideologis, metodologis, dan wawasan (isu-isu kontemporer). SPI Kuning mangawinkan pendekatan indoktrinasi pedagogi SPI Merah dan SPI Biru, dengan partisipatoris andragogi SPI Hijau, dengan dialogis-sistemik. Perumusan kurikulum SPI Kuning ini diharapkan dapat membentuk karakter "Generasi Progresif" yang

¹³ Munawwar Khalik, "Praksisme Kritis IPM".

¹⁴ Pendidikan *hadhari* dapat dipahami sebagai pendidikan berkemajuan yang dilandasi oleh nilai-nilai ke-Islaman. *Hadhari* semakna dengan madani yang berarti *urbanized*, *citified*, dan *civilized*, atau dengan kata lain pendidikan berkemajuan dan berperadaban. Konsep pendidikan *hadhari* memandang perlu menempatkan etika Islam yang bersumber dari nilai-nilai Al-Qur'an dan al-Hadist untuk menjiwai seluruh pembedangan ilmu alam, sosial, dan humaniora. Secara epistemologi, pendidikan *hadhari* terdiri dari Tiga lapis wilayah keilmuan Islam: *Hadharah al-nash*: kemajuan peradaban yang bersumber dari nash. *Hadharah al-ilm*: kemajuan peradaban yang bersumber dari ilmu, yakni ilmu-ilmu kealaman (*natural sciences*) dan ilmu-ilmu kemasyarakatan (*social sciences*); dan *hadharah al-falsafah*: kemajuan peradaban bersumber dari etika dan falsafah. Lihat Abd. Rachman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam...*, 24-27.

memiliki 3 corak berpikir, yaitu keberagamaan subyektif (*al-'aql al-lahuty al-siyasy, fideistic subjectivism*), keberagamaan obyektif (*al-'aql a-tarikhy al-'ilmy, rationalistic-objectivism*) dan keberagamaan intersubyektif (*al-'aql al-jadid al-istitla'iy, intersubjective rationality*).

Pertama, keberagamaan subyektif dicirikan pola pikir normatif (dogmatis-teologis), pasti (*qat'iy*: absolut), apologis-defensif, absolutis-non dialogis, cikal bakal *truth claim* (klaim kebenaran), dan tidak ada dialog antara lokal, nasional dan global. Corak seperti ini ada dalam SPI Merah dan SPI Biru (sedikit), dengan doktrin ajaran "Tri Tertib". Kedua, keberagamaan obyektif bercirikan empiris (apa adanya), menggunakan metode keilmuan (sains). Corak demikian ini adalah dalam SPI Hijau yang bercorak kritis dengan paradigma "kritis-transformatif". Ketiga, keberagamaan intersubyektif yakni sintesis dua corak (subyektif dan obyektif), dunia keagamaan bersifat "subyektif-cum-obyektif" atau "obyektif-cum-subyektif", yang melahirkan sikap empati dan simpati kepada orang atau kelompok lain yang berbeda, inklusif-partnership-dialogis. Generasi ini mampu menawarkan nilai seperti *verstehen* (memahami secara mendalam eksistensi dan aspirasi kelompok lain), *emphathy, symphaty, respect, non-violence, altruism, benevolence, compassionate, inclusive, partnership, dialogical*. Inilah seperangkat tata nilai sebagai lahirnya etika global, sebagai modal dasar "generasi progresif" atau "berkemajuan" yang hidup di era globalisasi.

Berdasarkan pemikiran di atas, SPI Kuning adalah sintesis dari tiga SPI sebelumnya yaitu Merah, Biru, dan Hijau. SPI Kuning menyatukan tiga karakter beragama di atas, yakni karakter beragama subyektif-obyektif-intersubyektif. Amin Abdullah menyebutnya sebagai "Spiritualitas Ihsan yang Berkemajuan" yang menampilkan karakter generasi "etis agamis" sebagai alternatif era saat ini.

Atas dasar logika tersebut, maka karakter pelajar yang ingin dibentuk dalam SPI Kuning adalah "pelajar muslim yang kreatif dalam menganalisis dan menangani problem-peoblem kemanusiaan pelajar di era globalisasi dengan dikuasainya berbagai pendekatan ilmu (sain), dilandasi etika Islam yang

obyektif, dan dilandasi al-Qur'an dan al-Sunnah. Semua tindakannya dilakukan untuk kemanusiaan tanpa memandang etnis, suku, ras, golongan, dan agama".

Dua kata kunci penting ciri generasi progresif adalah kemampuan merawat daya-kreatif dengan etos kolaboratif dan etos berbagi (*sharing*). Era *sharing* ditandai dengan munculnya ruang-ruang publik baru baik *digital* maupun *non-digital*. Dalam konteks inilah "Generasi Berkemajuan" menemukan ruang diri yang selalu kontekstual dengan semangat zaman.¹⁵ Dalam konteks inilah "Generasi Berkemajuan" menemukan ruang diri yang selalu kontekstual dengan semangat zaman.¹⁶ Tahapan tujuan SPI Kuning dapat digambarkan dalam table berikut:

Tujuan Umum SPI Kuning	Pelajar muslim yang kreatif dalam menganalisis dan menangani problem-peoblem kemanusiaan pelajar di era globalisasi dengan dikuasainya berbagai pendekatan ilmu (sain), dilandasi etika Islam yang obyektif, dan dilandasi al-Qur'an dan al-Sunnah. Semua tindakannya dilakukan untuk kemanusiaan tanpa memandang etnis, suku, ras, golongan, dan agama				
Filosofis Islam	Syahadat	Shalat	Zakat	Puasa	Haji
Jenjang	Fortasi	TM1	TM2	TM3	TMU
Output	Mengenal IPM dan Muh.	Karakter yang sesuai dengan nilai-nilai keIslaman.	Pelajar inisiatif, jiwa social (kritis), mampu memimpin organisasi dan masyarakat.	Analisor, Transformator, & Advokad.	Creator konsep dan membangun wacana global.

Tabel Tujuan SPI Kuning

Perubahan SPI sebagai sebuah sistem dan kurikulum pendidikan lazimnya selalu direkonstruksi dalam interval

¹⁵ Fauzan Anwar Sandiah, "Menggerakkan Daya Kreatif Mendorong Generasi Berkemajuan", Draft awal Materi Muktamar XX di Samarinda, 2016.

¹⁶ Fauzan Anwar Sandiah, Makalah: Menggerakkan Daya Kreatif Mendorong Generasi Berkemajuan

waktu lebih-kurang sepuluh tahun sekali. *Pertama*, perkaderan adalah proses pendidikan atas realitas yang akan selalu mengikuti perubahan hukum (alam maupun sosial). Dengan demikian, kurikulum perkaderan harus mengikuti proses perubahan tersebut. Jika tidak, produk perkaderan akan melahirkan konservatisme, militanisme, dan eksklusif pada hukum perubahan. *Kedua*, perkaderan merupakan penanaman nilai, doktrin, atau paham agama dan ideologi gerakan. Melalui perkaderan, rangkaian nilai, doktrin dan ideologi gerakan tersebut direvitalisasi dan dikontekstualisasi ke dalam masalah sosial kekinian atau kontemporer.¹⁷

Wacana yang diinternalisasi dalam IPM menjadi paradigma berpikir kader-kader IPM yang dibina dengan pedoman SPI Merah (1986), SPI Biru (1994), SPI Hijau (2002) dan SPI Kuning (2014). Dari kajian pemikiran pendidikan dalam sistem perkaderan IPM, maka SPI Kuning harus mampu menjawab pemikiran pendidikan saat ini. Dalam SPI Kuning terkandung gagasan pendidikan aliran rekonstruksionisme (rekonstruksi sosial) dengan "Generasi Progresif" sebagai model pemikiran dan karakter kader masa kini. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana karakter "Generasi Progresif" itu? Apa indikator "Progresif" itu? Selama ini, dalam Muhammadiyah generasi progresif diwakili oleh kelompok JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah) pengusung gagasan "Islam Transformatif" berbasis "Teologi al-Ma'un" yang memiliki tiga pilar keilmuan sebagai paradigma untuk menganalisis perubahan sosial, yaitu hermeneutika, ilmu sosial kritis dan gerakan sosial baru.¹⁸

Untuk mengkaji karakteristik "Generasi Progresif", gagasan Muslim Progresif dari Omid Safi penting untuk dipertimbangkan. Menurut Omid Safi generasi muslim progresif dituntut senantiasa progres, berpikir dan bergerak maju ke depan sebagaimana zaman dan realitas yang berubah. "Generasi Progresif" mampu melihat fenomena perubahan

17 Saud, El Hujjaj, "SP IRM: Memilih Mitos atau Realitas?" *Buletin Transformasi* Edisi II tahun IV/2003, 6-9.

18 Hasnan Bachtiar, "Generasi Muhammadiyah Progresif", dalam <http://islambergerak.com>, diakses 2 Desember 2016.

disertai faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan, baik itu faktor ekonomi, sosial, politik dan stuktur budaya. Karena tidak jarang progresif dimaknai dengan kemajuan yang melahirkan kebebasan yang justru menciptakan liberalisme.

Makna progress oleh Omid Safi dirumuskan sebagai "sesuatu dianggap maju apabila ia memberikan perubahan ke arah yang "lebih baik", lebih bermanfaat, dan lebih berdaya guna bagi kehidupan umat manusia dan dunia secara lebih luas".¹⁹ Menurut Omid Safi "lebih baik" jika memenuhi dua kata kunci, yaitu keadilan (al-'adl) dan kebaikan (al-ihsân), yang kemudian diterjemahkan pada "tiga agenda", yakni keadilan sosial, kesetaraan jender, dan pluralism.²⁰

Muslim Progresif mempunyai fleksibilitas dalam memahami Islam dibandingkan dengan muslim liberal. Karena Muslim Progresif mempunyai mindset yang jauh ke depan, daripada sekedar mengeksploitasi nilai keliberalan sendiri, meskipun bisa juga muslim progresif masuk ke ranah liberal. Tetapi tolak ukur Muslim Progresif sebenarnya terletak pada orientasi ke masa depan (futuristik), mengenai apa yang akan di capai Islam di kemudian hari. Di sinilah persamaan gagasan Omid Safi dengan gagasan pendidikan rekonstruksionisme. Omid Safi menawarkan gagasan Muslim Progresif sebagai penengah wacana Islam yang berorientasi liberal. Di sini terdapat kesamaan dengan wacana "Islam Berkemajuan" Muhammadiyah yang ingin melampaui atau menjadi "penengah" dari berbagai wacana keislaman.

Bagi Omid Safi, generasi progresif tidak boleh elitis, juga bukan hanya sebatas kritikus yang gelisah melihat ketidakadilan. Karena itu Omid Safi tidak memakai istilah "Muslim Kritis" (Critical Muslim). Sebab kritikus identik dengan generasi yang hanya berkeluh kesah dan mengkritisi, tetapi tidak berbuat apa-apa.²¹ Di sinilah alasan pergeseran

19 Ali Murfi, "Muslim Progresif Omid Safi dan Isu-Isu Islam Kontemporer", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. XII, No. 2, Desember 2015, 235.

20 Omid Safi, "What is Progressive Islam?", dalam *International In statute for the Study of Islam in the Modern World*. Vol.13, Desember 2003, 6.

21 Ali Murfi, "Muslim Progresif Omid Safi...", 236.

paradigma IRM ke IPM, yakni pergeseran pola pikir "Gerakan Kritis-Transformatif" yang hanya fokus pada masalah-masalah aktual dan kekinian dengan semangat teologi al-Ma'un dengan agenda menciptakan "kesadaran kritis dan keadilan sosial" menuju "Gerakan Pelajar-Berkemajuan" yang tidak hanya peka terhadap problem-problem kekinian, tetapi juga berorientasi kepada masa depan dengan semangat teologi al-'Ashr dengan agenda untuk menciptakan "keadilan dan kebaikan". Jika SPI Hijau, kader IPM disebut sebagai "Agent of al-Ma'un", maka SPI Kuning kader IPM diarahkan pada pembentukan "Generasi Berkemajuan" sebagai "Agent of al-'Ashr". Selain memperjuangkan keadilan (al-'adl), Generasi Progresif juga terlibat aktif dan produktif untuk melakukan kebaikan (al-ihsân).

Rumusan tujuan SPI Kuning, senafas dengan gagasan Omid Safi bahwa generasi progresif berpijak pada pola pikir al-Quran. Namun gagasan Omid Safi hanya terkait dengan tiga agenda besar, yaitu keadilan sosial, kesetaraan gender, dan pluralisme. Sedangkan dalam gerakan berkemajuan IPM tidak memiliki fokus agenda yang jelas, hanya fokus pada isu pendidikan dan pelajar seperti: literasi dan sosiopreneurship (kewirausahaan berbasis sosial) yang tujuan akhirnya adalah keadilan (al-'adl) dan kebaikan (al-ihsan).

Omid Safi menggunakan metode *multiple critique* sebagai paradigma Muslim Progresif sebagai metode kritik ganda juga merupakan sebuah pendekatan beragam arah (a *multi-headed approach*) yang didasarkan atas kritik simultan terhadap beragam komunitas dan wacana dimana kita terlibat di dalamnya.²² Generasi Progresif IPM menggunakan pendekatan intergratif-interkoneksi M. Amin Abdullah yang bertumpu pada al-Qur'an dan al-Sunnah (hadlarah al-nash), disertai dengan pendekatan sains (hadlarah al-'ilm) dan filsafat dan etika global (hadlarah al-falsafah).

Untuk menjadi "muslim progresif sejati", menurut Omid

²² Omid Safi, "Modernism: Islamic Modernism" dalam *Encyclopedia of Religion*, Second Edition, eds. Lindsay Jones et al., (Farmington Hills: Mc Millan 2005), 2.

Safi harus mampu menguasai metode *multiple critique* dengan syarat antara lain: pertama, keterlibatan utuh dalam tradisi keislaman. Kedua, hindari sikap apologis. Ketiga, penyelarasan antara visi dan aksi. Keempat, menyandarkan pada aspek humanisme. Kelima, keterbukaan pada sumber pengetahuan sekunder. (Saf, 2003: 5-15). Adapun untuk menjadi "Generasi Progresif" atau "Generasi Berkemajuan" dapat digali dari teologi al-'Ashr. Pertama, berpikir masa depan dan melampaui zaman (berpikir ke depan melampaui zaman, *futuristik*, progresif, imajinatif dan berkemajuan: *wal-'Ashr*). Kedua, memiliki tauhid murni (*alladzina aamanu*). Ketiga, memiliki daya kreatif dengan melembagakan amal shaleh (*wa amilu as-shalihah*). Keempat, bersikap suka *sharing* (berbagi) dan kolaboratif dengan sesama (*tawasau bil haq*). Kelima, memiliki daya tahan, kesabaran, kerja keras dan menghargai sesama (*tawasau bis shabr*).

Sebenarnya, terma progresif maupun berkemajuan sama-sama mengandung problem, karena kata "progress" atau "berkemajuan" mengandung makna (maju menuju), sehingga memunculkan pertanyaan "maju menuju ke mana?"; makna itu juga berkonotasi elitis dalam arti orang "progresif" dan "berkemajuan" lebih baik, lebih cerdas, lebih maju dibandingkan orang-orang non-pro-gresif.²³ Terlepas dari itu semua, terma "Generasi Berkemajuan" atau "Muslim Progresif" dimaksudkan sebagai sebuah konsep yang memayungi bagi orang-orang yang menginginkan ruang terbuka dan aman untuk keterlibatan dan survive di era globalisasi dan masyarakat kosmopolitan.

Karakter Kader dalam SPI

SPI	Implikasi SPI terhadap Karakter Kader			
	MERAH	BIRU	HIJAU	KUNING
Arah Perkaderan	Militan	Kreatif	Kritis	Progresif

²³ Ali Murfi, "Muslim Progresif Omid Safi...", 240.

Generasi	Baby Boom	Generasi X	Generasi Y	Generasi Z
Lahir	1946-1964	1965-1976	1977-1997	1998-2010
Aliran Pendidikan	Perenialis	Esensialis	Progresif	Rekonstruksionis

Pena 9

PENUTUP: DEMI MASA

Demi Masa! Sesungguhnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) telah mengalami pergulatan tiga zaman, sejak era Orde lama, Orde Baru, dan Reformasi. Genealogi pemikiran pendidikan dalam sistem perkaderan, tidak terlepas dari *setting* historis berdirinya IPM dan dinamika gerakan IPM. Sebagaimana Kuntowijoyo, menyatakan bahwa suatu pemikiran pasti dipengaruhi pemikiran sebelumnya dan konteks sejarahnya.¹ Atas dasar itu, kelahiran IPM merupakan kontinuitas sejarah Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Karena itu IPM tampil sebagai aktor sejarah gerakan dakwah sayap Muhammadiyah di kalangan pelajar. Selanjutnya IPM berfungsi untuk membina dan mendidik kader Muhammadiyah terutama di amal usaha pendidikan.

Dalam perpektif genealogis perjalanan IPM mengalami dinamika, transformasi dan diskontinuitas dalam corak paradigma gerakannya.² Hal ini disebabkan kondisi sosial politik dan hegemoni wacana yang berdialektika dalam tubuh IPM. Sebagaimana pendekatan sejarah pemikiran bahwa dinamika paradigma IPM dipengaruhi oleh: (1) suasana intelektual dan fenomena sosial politik, pemikiran ilmiah,

1 Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Edisi Kedua (Yogyakarta, PT Tiara Wacana Yogya, 2003), 191-192.

2 Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, 7.

teologi, nilai, dan asumsi; (2) kekuatan ide yang membentuk arah dan tujuan hidup manusia, seperti pemikiran tentang kebangsaan, negara, konstitusi, dan agama; (3) asal-usul konsep-konsep tertentu sejak awal hingga kontemporer.³

Sejarah dan dinamika IPM sepanjang masa, dapat dilihat melalui analisis table di bawah ini.

Tabel. Kepemimpinan IPM

No.	Era	Periodesasi	Tahun	Ketua Umum
1.	Orde Lama	Ideologis (1961-1969)	1961-1966	Herman Helmi Farid Ma'ruf
			1966-1969	Muh. Wirsyam Hasan
2.	Orde Baru I	Developmentalis (1969-1992)	1969-1972	Muhsin Sulaiman
			1972-1975	Abdul Somad Karim
			1975-1978	Gafaruddin
			1979-1983	Asnawi Syarbini
			1983-1986	Masyhari Makhasi
			1986-1989	Khoruddin Bashory
3.	Orde Baru II	Inklusif (1992-2000)	1990-1993	M. Jamaluddin Ahmad
			1993-1995	Athallah A. Latief
			1996-1998	Izzul Muslimin
			1998-2000	Taufiqurrahman

³ Waryani Fajar Riyanto, *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan Biografi Intelektual M. Amin Abdullah (1953-...)* *Person, Knowledge, and Institution*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2013), 38.

4.	Reformasi I	Populis (2000-2008)	2000-2002	Raja Juli Antoni
			2002-2004	Munawar Khalil
			2004-2006	AI Mujadid Rais
			2006-2008	Moh. Mudzakkir
5.	Reformasi II	Kosmopolitan (2008-2015)	2008-2010	Deni Wahyudi Kurniawan
			2010-2012	Slamet NAE/ Danik Eka R.
			2012-2014	Fida'Affif
			2014-2016	M. Khoirul Huda

Kelahiran IPM juga merupakan *counter of hegemoni* terhadap ideologi dan gerakan komunis/PKI. Di samping itu, maraknya kesatuan aksi terutama di kalangan muslim juga ikut membentuk pengalaman historis IPM. Di fase sejarah yang demikian itu, perkaderan IPM sudah dilakukan walaupun belum memiliki sistem perkaderan, hingga dirumuskan pada seminar perkaderan di Tomang (1969), maka wajar jika di masa awal, gerakan dan perkaderan IPM bercorak ideologis.

Babak berikutnya IPM memasuki fase gerakan yang bercorak *developmentalis* (1976-1992). Hal ini dikarenakan pada masa rezim represif-hegemonik Orde Baru I, IPM menjadi pendukung pembangunan nasional yang dicanamngkan pemerintah yang dipimpin presiden Soeharto. Situasi kebangsaan mulai *move on* dari persoalan ideologis, karena dianggap sudah selesai dengan munculnya kebijakan "Pancasila sebagai Asas Tunggal". Maka tema yang diangkat adalah isu-isu pembangunan yang waktu itu relevan dengan wilayah gerak IPM yang mulai aktif dalam dunia pelajar dan pendidikan. Aktivitas IPM diarahkan pada penanaman kepemimpinan (*leadership*), dakwah Islamiyah dan pembentukan akhlak, sehingga dalam IPM muncul

“Tri Tertib” (Ibadah, Belajar, dan Berorganiasi) sebagai paradigma gerakannya. Sebagai pendukung pembangunan, maka program IPM juga diarahkan pada tradisi keilmuan dan kreatifitas pelajar sebagai penerus perjuangan Muhammadiyah. Dalam situasi demikian, SPI Merah (1985) lahir sebagai pedoman pendidikan kader kepada anggota IPM.

Selanjutnya, memasuki era Orde Baru II yang lebih akomodatif, sehingga gerakan IPM lebi menampilkan corak pragmatis-inklusif (1992-1998). Pada masa ini IPM meghadapi tantangan yakni larangan Departemen Dalam Negeri tentang penggunaan kata pelajar, sehingga terpaksa IPM mengubah namanya menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM). Sejak itulah terjadi pelebaran sayap dari pelajar ke dunia remaja, yang menimbulkan kerancuan pada obyek dakwah IPM, yakni antara pelajar yang identik dengan pendidikan/keilmuan atau remaja identik dengan masyarakat yang lebih kompleks. Sebenarnya doktrin gerakan IPM masih konsisten berorisntasi pembentukan karakter individu dengan “Tri tertib”, namun lebih terbuka dengan penekanan tradisi keilmuan dan kreatifitas pelajar serta pembentukan akhlak. Pada waktu itu wacana “Islam Liberal” sudah muncul dan modernisasi Islam. Pada suasana kebatinan yang demikian, SPI Biru lahir tahun 1994 sebagai pengganti SPI Merah.

Perkembangan berikutnya adalah ketika IPM memasuki era Reformasi tahun 1998, yang ditandai runtuhnya rezim Orde baru Soeharto. Pada fase ini IPM memasuki fase paradigma baru yang lebih bercorak populis (1998-2008). Era ini kembali kerancuan orientasi antara pelajar dan remaja. Di satu sisi, IPM mulai mapan dengan identitas “remaja” dengan dakwah yang lebih luas, di lain sisi nama IRM adalah produk Orde Baru. Karena Orde Baru sudah tumbang, maka nama IPM harus dikembalikan ke asalnya. Namun, akhirnya perdebatan perubahan nama, berujung pada votting dan dimenangkan oleh kubu IRM, sehingga nama IRM tetap. Dalam hal diskursus, waktu itu muncul wacana trend masyarakat madani (civil society), pendidikan kritis, gerakan sosial baru, dan “Islam Transformatif”. Orientasi IPM tertuju pada dunia

masyarakat, public, dan sosial, sehingga lahirlah "Manifesto Gerakan Kritis-Transformatif" dengan "SPI Biru" yang menjadi mainset gerakan populisme IPM.

Fase terakhir adalah fase pasca perubahan nama IRM menjadi IPM tahun 2008 yang mengusung wacana *back to school* (kembali ke sekolah/pelajar). Artinya corak populisme IPM akan bergeser kembali ke paradigma elitis yakni pelajar. Ditambah pada masa ini IPM memasuki era Reformasi II yang ditandai revolusi teknologi, informasi dan komunikasi yang luar biasa dan spektakuler. Masyarakat IPM mau tidak mau, memasuki revolusi globalisasi bahwa kita semua adalah menjadi warga dunia. Karena itu pada era ini, IPM cenderung bercorak kosmopolitan (2008-2015). Dalam konteks wacana Muhammadiyah sedang mereaktualisasi "Islam Berkemajuan", sehingga lahirlah di IPM "Gerakan Pelajar Berkemajuan" dan SPI Kuning sebagai pedoman kaderisasi anggotanya.

Sebagaimana perpektif Berger dan Luckmann bahwa pemikiran dalam IPM itu adalah hasil dari para aktivisnya berdialektika dengan dinamika masyarakat, yang terjadi melalui proses eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Eksternalisasi wacana dan diskusus dominan dalam masyarakat kemudian terobyektivasi dalam IPM paradigma gerakan IPM, lalu paradigma ini diinternalisasi dalam perkaderan IPM melalui SPI. Dari dinamika paradigma gerakan itulah, muncul SPI Merah (1985), SPI Biru (1994), SPI Hijau (2002) dan SPI Kuning (2014).

Tabel Relasi Perubahan Paradigma dan Rekonstruksi Perkaderan IPM

Era	ORDE BARU		REFORMASI	
	Tahap I (1966-1988)	Tahap II (1988-1998)	Tahap I (1998-2008)	Tahap II (2008-2015)
Periode	Developmentalis	Pragmatis-Inklusif	Populis	Kosmopolitan

Paradigma	Tri Tertib (Ibadah, Belajar, dan Organisasi)		Manifesto GKT (Gerakan Kritis Transformatif)	GPB (Gerakan Pelajar Berkemajuan)
Epistem Sosial	Local Citizenship		Think Globaly, Act Localy	Global Citizenship
Teologi	Ali Imran (104)	Ali Imran (110)	Al-Ma'un	Al-'Ashr
Wacana Islam	Islam Murni	Islam Modernis	Islam Transformatif	Islam Berkemajuan
SPI	SPI Merah	SPI Biru	SPI Hijau	SPI Kuning

Dinamika paradigma gerakan sosial berbasis pelajar seperti IPM, dalam sejarahnya dibangun oleh berbagai rezim intelektual.⁴ Selain dipengaruhi oleh dinamika Muhammadiyah dan situasi kebangsaan, paradigma IPM juga sangat dipengaruhi oleh wacana yang dibawa oleh para aktivisnya. Dalam bahasa Berger dan Luckmann, eksternalisasi wacana dalam IPM terus dikaji, didiskusikan, ditafsirkan serta dikontekstualisasikan, lalu mengalami obyektivasi kemudian mengalami sebagai internalisasi dalam tubuh IPM. Dialektika wacana selanjutnya mempengaruhi corak paradigma untuk menjawab persoalan sosial pelajar/pendidikan.⁵

Pilihan atas paradigma yang dirumuskan IPM beragam coraknya sesuai dengan konteks zamannya. Paradigma inilah yang kemudian mempengaruhi corak dan orientasi pendidikan dalam sistem perkaderan IPM. Melalui bab ini, akan dibuktikan bahwa pada setiap zaman selalu ada "diskursus yang dominan" atau 'rezim kebenaran' (*regime of truth*) yang terjadi di tubuh IPM. Rezim ini menentukan mana yang benar dan mana yang

⁴ Michael Foucault, 'Genealogy and Social Criticism' in *The Postmodern Turn: New Perspectives on Social Theory*, ed S. Seidman. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

⁵ Moh. Mudzakkir, "Unfinished Project Bagi Gerakan IPM" dalam Azaki Khoirudin, *Nuun: Tafsir Gerakan Al-Qalam* (Jakarta: Al-Wasat Publishing, 2014)

salah, bukan hanya mengenai kebenaran moral, melainkan juga kebenaran epistemologis. Dengan analisis genealogis perspektif Michael Foucault berfungsi untuk membongkar rezim (intelektual) di sepanjang sejarah perjalanan IPM.

Dari pengumpulan sejarah yang meliputi perkembangan dan perubahan orientasi gerakan IPM, ternyata sangat berpengaruh kepada "genealogi pemikiran" yang terlembaga (terinstitusio-nalisasi) menjadi Sistem Perkaderan Ikatan (SPI). Pada empat fase sejarah IPM mengalami dinamika dan perubahan paradigma gerakan. Pada empat fase itu pula, IPM melahirkan empat SPI yang dikenal dengan SPI Merah (Makassar, 1985), SPI Biru (Malang, 1994), SPI Hijau (Makassar, 2002), dan SPI Kuning (Yogyakarta, 2014). Berdasarkan analisis wacana (Foucault), filsafat pendidikan (Knight) dan sosiologi pengetahuan (Berger dan Luckmann), dapat diperoleh tiga kesimpulan sebagaimana berikut:

Pertama, dinamika perubahan orientasi pendidikan dalam SPI mengalami empat kali rekonstruksi. Perubahan SPI selalu diawali dari perubahan politik, diikuti perubahan corak paradigma gerakan dan sistem perkaderan IPM. Perubahan sistem perkaderan tidak hanya berubah warnanya, tetapi disertai perubahan orientasi pendidikan. Dengan perspektif Foucault, ternyata ada relasi wacana (rezim intelektual) dan sosial politik yang menghegemoni pengetahuan dalam tubuh IPM dengan wacana yang berkembang dalam IPM dan perubahan sistem perkaderannya. Dalam perspektif Berger dan Luckmann bahwa pengetahuan itu dibangun oleh masyarakat (social construction of reality). Hegemoni wacana sebagai proses eksternalisasi mengalami proses obyektivasi di kalangan aktivis dan pimpinan, kemudian menjadi habitus dan membentuk pola pikir dan tindakan kader-kader IPM. Wacana diinternalisasi dalam tubuh IPM menjadi paradigma yang menjadi mainset dalam kader-kader IPM yang dibina dengan pedoman SPI Merah (1986), SPI Biru (1994), SPI Hijau (2002) dan SPI Kuning (2014). Pada akhirnya pemikiran dapat diterima menjadi "kenyataan" dipertahankan dan berganti di tubuh IPM. Pertama, SPI Merah muncul setelah berakhirnya pertikaian ideologis khususnya antara Nasionalis,

Agamis, dan Komunis (NASAKOM). Rezim Orde Baru mengeluarkan kebijakan yang pro dan kontra yaitu "Asas Tunggal Pancasila" yang pada akhirnya IPM menerimanya sebagai asas organisasi tahun 1986. Pada masa ini ialah fase developmentalisme IPM dengan paradigma "Tri Tertib" menjadi mindset kader-kader IPM. Selain itu, pemikiran "Islam Murni" tumbuh subur di kalangan Muhammadiyah dan perkaderan-perkaderan IPM, wajar jika pendidikan kader IPM cenderung konservatif, didukung dengan indoktrinasi sebagai metode pelatihan menambah corak konservatisme IPM. Kedua, SPI Biru terlahir pasca perubahan nama IPM ke IRM tahun 1992. Perubahan ini atas tekanan Orde Baru, dan memaksa IPM untuk merekonstruksi konsep gerakannya dari yang bercorak "pelajar" (eksklusif) ke "remaja" (inklusif). Sejak inilah IPM memasuki fase gerakan yang inklusif-pragmatis. Selain itu, wacana "Islam Liberal dan Modernisasi Islam" berkembang, sehingga mewarnai pemikiran dalam pelatihan-pelatihan IPM. Paradigma SPI Biru nampaknya lebih dekat dengan pendidikan liberal didukung dengan metode AMT (Achievement Motivation Training) dalam pelatihan. SPI Biru terlalu gemuk dan tidak fokus tujuannya. Aneka ragam jenis pelatihan yang pragmatis untuk remaja menjadikan SPI Biru tidak jelas orientasinya. Ketiga, SPI Hijau lahir di awal era Reformasi tahun 1998 atas kegagalan pengembalian nama IRM ke IPM. Nama IRM dianggap produk Orde Baru, karena itu harus dikembalikan nama asalnya. Mayoritas kader-kader produk pendidikan IRM, karena itu ketika voting dimenangkan oleh kubu IRM. Era Reformasi itu juga sedang dibukanya keran demokrasi, keterbukaan pemikiran. Pada saat yang sama sedang mencuat kepermukaan tentang wacana "Islam Transformatif" (Moeslim Abdurrahman) yang bertemu dengan madzhab pendidikan kritis Paulo Freire. Maka dari itu, tahun 2002 dirumuskannlah SPI Hijau dengan paradigma pendidikan kritis serta memasukkan materi ANSOS (Analisis Sosial) sebagai pisau analisis masalah. Karena itu, corak atau paradigma gerakan IPM di masa ini cenderung populis. Keempat, SPI Kuning lahir pasca perubahan nama IRM kembali menjadi IPM. Di masa ini IPM berada di era

keterbukaan yang didukung dengan revolusi informasi dan teknologi, sehingga tantangan globalisasi semakin nyata. Pada saat yang sama Muhammadiyah memasuki abad kedua sedang mereaktualisasi gagasan "Islam Berkemajuan" bertemu dengan pendidikan hadhari berbasis paradigma integratif-interkoneksi Amin Abdullah sebagai respons terhadap globalisasi yang melahirkan kesadaran sebagai warga dunia. Dalam epistem sosial yang demikian, SPI Kuning dirumuskan untuk menjawab tantangan masyarakat global dan kosmopolitan. Jika SPI Hijau memasukkan ANSOS sebagai metodologi, maka SPI Kuning memasukkan Appreciative Inquiry (AI) sebagai metode inovasi sosial.

Kedua, gagasan pendidikan dalam sistem perkaderan IPM dianalisis menggunakan filsafat pendidikan George R Knight, yaitu perenialisme, esensialisme, progresivisme dan rekonstruksi-onisme. Pertama, SPI Merah menggunakan metode pedagogik melalui indoktrinasi, serta kurikulum konvensional (baku). Peserta adalah penerima, sedangkan instruktur/penceramah adalah pemberi, sehingga peserta pasif dan instruktur aktif. Peneliti menyimpulkan bahwa SPI Merah dekat dengan gagasan pendidikan aliran perenialisme, karena penekanannya pada aspek kesalehan individual dengan doktrin "Tri Tertib", kurang mempertimbangkan aspek sosial budaya. Nilai-nilai perenialisme sangat mengaruhi konstruksi pendidikan konservatif. Kedua, SPI Biru setelah dibaca dengan pers-pektif aliran esensialisme. Walaupun unsur perenialis karena secara substansi SPI Biru hakikatnya sama dengan SPI Merah yaitu pembentukan paradigma "Tri Tertib", namun SPI Biru lebih pragmatis-liberal karena dibangun dengan logika remaja dan memahami al-Qur'an secara esensial-fungsional. Fokus utama SPI Biru adalah mendidik keterampilan dan kreativitas remaja dan pelajar melalui pelatihan dan pengembangan komunitas (community development) dan lembaga, agar mampu menghadapi persoalan hidupnya. Ketiga, SPI Hijau termasuk aliran pendidikan progresivisme. Hakikat perkaderan SPI Hijau ialah tarbiyah (pendidikan: penumbuhan). Pendidikan SPI Hijau sejatinya untuk menumbuhkan kesadaran kritis. Dimensi

progresif dalam SPI Hijau terletak pada penanaman sikap kritis terhadap ketidakadilan. Kritisisme mengandung dekat dengan pro-gresivisme, sedangkan keadilan dekat dengan humanisme. Bagi progresivisme, penguasaan pengetahuan baku (kuri-kulum baku SPI Merah), sebagaimana aliran perenialisme-esensialisme (SPI Merah dan SPI Biru Biru) tidak diperlukan. Karena tidak responsif terhadap problem aktual baik untuk individu maupun masyarakat. SPI Hijau dapat dikatakan pendidikan hadap masalah. Keempat, SPI Kuning dekat dengan aliran rekonstruksionisme. Dalam SPI Kuning, hakikat perkaderan adalah "tarbiyah dan dakwah", selain menum-buhkan kesadaran kritis, juga mampu berdakwah mere-konstruksi masa depan masyarakat ke arah yang lebih baik. Pada dasarnya rekonstruksionalisme sepaham dengan pere-nnialisme dalam mengatasi krisis kehidupan modern. Namun ingin "merombak tata susunan lama, dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang baru". SPI Kuning bertujuan menciptakan 'insinyur-insinyur' yang mampu menciptakan inovasi sosial. Kurikulum SPI Kuning berisi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat masa depan.

Ketiga, karakter kader yang dicita-citakan IPM tentu berhubungan dengan dinamika perubahan sistem perkaderan IPM dan orientasi gagasan pendidikan. Dalam pendidikan SPI Merah diarahkan pada pembentukan "Generasi Militan", SPI Biru untuk "Generasi Kreatif", SPI Hijau melahirkan "Generasi Kritis", sedangkan SPI Kuning diarahkan pada pembentukan "Generasi Progresif" atau dalam IPM disebut "Generasi Berkemajuan". Pertama, Generasi Militan dibentuk dari pendidikan pedagogi yang menekankan metode indoktrinasi dengan konsep instruktur yang dikenal dengan metode pengosongan, pengisian, pemompaan semangat sehingga melahirkan militansi yang luar biasa. Kedua, Generasi Kreatif, yakni "kader ideologis, tajam menganalisis, sudah terbuka terhadap wacana sosial yang berkembang". Hal ini karena SPI Biru sebenarnya memiliki tujuan yang sama dengan SPI Merah, namun tidak fokus dengan tujuan, akhirnya melahirkan

yang serba bisa (kreatif), namun tidak fokus. Ketiga, Generasi Kritis dilahirkan dari pendidikan kritis SPI Hijau yang lebih demokratis dan partisipatoris. SPI Hijau menggunakan pendekatan andragogi dengan konsep fasilitator, sehingga melahirkan generasi kritis memiliki ciri-ciri sadar, peka, dan peduli terhadap realitas sosial, tindakan nyata, dan pelopor. Keempat, Generasi Progresif dicita-citakan oleh SPI Kuning dengan pendekatan integratif-interkonektif. Generasi global (kosmopolitan) yang terampil dalam menganalisis dan menangani problem-problem kemanusiaan di era globalisasi dengan berbagai pendekatan ilmu (sains: hadlarah al-'ilm), dilandasi etika Islam yang obyektif (hadlarah al-falsafah) dan al-Qur'an dan al-Sunnah (hadlarah al-nash). Semua tindakannya dilakukan untuk kemanusiaan tanpa memandang etnis, suku, ras, golongan, dan agama. Generasi progresif memiliki ciri-ciri antara lain: berpikir ke depan (futuristik dan berkemajuan), tauhid murni, melembagakan amal shaleh, bersikap suka sharing dan kolaboratif, serta toleran dan cinta sesama makhluk.

Adapun beberapa saran-saran dan rekomendasi dari penulisan buku ini adalah pertama, diperlukan penelitian aksi sebagai langkah lanjut dari tawaran bangunan konseptual *pemikiran pendidikan* perspektif hasil penelitian ini, baik untuk pengujian internal yang menyangkut komponen-komponen asosiatif, normatif, dan teoritiknya, maupun pengujian eksternal, berupa antara lain relevansinya dengan kondisi Indonesia. Untuk pengujian internal yang menyangkut komponen asosiatif, diperlukan pemetaan yang seksama tentang kondisi *pemikiran pendidikan* Islam Indonesia kontemporer, baik yang tradisional maupun modern. Kedua, untuk pengujian internal yang menyangkut komponen normatif, teoritik, diperlukan kajian terus menerus yang mempergumulkan perkembangan konsep *pemikiran pendidikan* pengalaman Barat dan kontemporer dengan nilai-nilai Islam dan pengalaman historis Muslim dalam formasi sosial masyarakatnya. Karena tesis ini menggunakan pemikiran pendidikan sekuler untuk membaca pemikiran pendidikan dari organisasi pelajar berbasis Islam, maka

diperlukan kajian berikutnya yang menggunakan pemikiran pendidikan yang bersumber dari filsafat Islam baik klasik maupun kontemporer. Ketiga, Perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang kelahiran IPM dan kaitannya dengan ideologi komunis (PKI). Supaya generasi pelanjut mengetahui apa komunisme itu, dan mengapa harus dibendung oleh IPM.

Tabel. Kesimpulan

SPI	Genealogi SPI		Pemikiran Pendidikan		Karakter Kader
	Wacana Islam	Pendekatan	Paradigma	Filsafat	
MERAH	Islam Murns	Indoktrinasi: Problem Solving	Pendidikan Konservatif	Perenialis	Generasi Militan
BIRU	Islam Modernis	AMT (Achievement Motivation Training): David McClelland + Analisis SWOT	Pendidikan Liberal	Esensialis	Generasi Kreatif
HIJAU	Islam Transformatif:	Pendidikan Kritis + ANSOS: Paulo Freire	Pendidikan Radikal (Kritis)	Progresif	Generasi Kritis
	Teologi Profetik	Appreciative Inquiry (AI): David Cooperrider			
KUNING	Islam Berkemajuan:	Appreciative Inquiry (AI): David Cooperrider	Pendidikan Hadhari (Berkemajuan)	Rekonstruksi Sosial	Generasi Berkemajuan

Sumber Pena

- Abdullah, M. Amin, "Filosofi dan Paradigma Pendidikan Muhammadiyah", Said Tuhuleley, *Reformasi Pendidikan Muhammadiyah Suatu Keniscayaan*. Yogyakarta: Pustaka SM, 2003.
- Abdullah, M. Amin, "Ihsan dan Tasawwuf Dalam Pemikiran Islam Klasik dan Kotemporer: Ke arah Spiritualitas *Ihsan* yang Berkemajuan", Makalah disampaikan dalam Pengajian Ramadhan 1434 H., Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, 3 Ramadhan 1434 / 11 Juli 2013.
- Abdullah, M. Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif- Interkoneksi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdurrahman, Moeslim. *Islam Sebagai Kritik Sosial*, Erlangga: Jakarta, 2003.
- Adam Schwarz, *A Nation in Waiting, Indonesia in the 1990*, Australia: Allen & Unwin, 1994.
- Ahimsa-Putra, Heddy Shri, "Paradigma Profetik Mungkinkah? Perlukah?", Makalah disampaikan dalam Sarasehan yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana UGM, di Yogyakarta, 10 Februari 2011.
- Al-Hamdi, Ridho. "Saatnya IRM Kembali Ke Pelajar" *Suara Muhammadiyah, 2006*
- Al-Hamdi, Ridho. "Menggagas Gerakan Pelajar Transformatif", <http://ridhoalhamdi.blogspot.co.id>. Diakses 7 Juli 2016.

- Al-Hamdi, Ridho. "Menuju Gerakan Pelajar Kreatif: Deklarasi Gerakan Komunitas IPM Berbasis Hobi", *Manifesto Gerakan Perlawanan Pelajar*. Yogyakarta: PPIPM, 2011.
- Al-Hamdi, Ridho. "Saatnya IRM Kembali ke Pelajar", <http://ridhoalhamdi.blogspot.co.id>. Diakses 7 Juli 2016.
- Al-Hamdi, Ridho. "Selamat Datang Gerakan Pelajar Baru IPM", <http://ridhoalhamdi.blogspot.co.id>. Diakses 7 Juli 2016.
- Al-Hamdi, Ridho. "Selamat Tinggal IRM, Selamat Berjuang IPM", <http://ridhoalhamdi.blogspot.co.id>. Diakses 7 Juli 2016.
- Ali, Mohamad, *Reinvensi Pendidikan Muhammadiyah*, Jakarta: Al-Wasat, 2010.
- Anonim. "Dari arena Muktamar IRM XIII" *Suara Muhammadiyah* Edisi 21 2002.
- Anwar Sandiah, Fauzan, "IPM dan Sejarah Ideologi" dalam *Ideologi Gerakan IPM*. Yogyakarta: PPIPM, 2016.
- Arifin, MT. *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah dalam Bidang Pendidikan: Reformasi Gagasan dan Tekni*, Surakarta: Bagian Penalaran, Lembaga Pembinaan Mahasiswa UMS, 1985.
- Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, Jakarta: Serambi, 2003.
- Assegaf, Abdur Rachman. *Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkoneksi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- B. Hari Juliawan "Genealogi Michel Foucault", *Majalah Basis* Nomor. 11-12, Tahun ke-64, 2015, 54-55.
- Bouchier, David. *Pancasila Versi Orde baru: Asal Muasal Negara Organik (Integralistik)*, Yogyakarta: Aditya Media dan Pusat Studi Pancasila UGM. 2007).
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Darban, Ahmad Adaby. *Sejarah Kauman: Mengungkap Identitas Kampung Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.

- Destika, Amalia. "Ikatan Pelajar Muhammadiyah 1961-1998", Yogyakarta: UGM, 2010.
- Effendi, David, "Transformasi Gerakan Pelajar?: Dari Gerakan Kader, Advokasi, Media, sampai model Perlawanan sehari-hari Pelajar", Ditulis untuk diskusi di forum Taruna Melati Utama Bengkulu, 2011.
- Effendi, David. "Apa dan Bagaimana? Urgensi Perubahan Nomenklatur IPM-IRM-IPM", www.pelajarberkemajuan.blogspot.com. Diakses 8 Juli 2016.
- Effendi, David. "Praktik Mempekerjakan AI (*Appreciative Inquiry*)", Makalah Diskusi LaPSI 14 Februari 2016.
- El Hujjaj, Saud, "SP IRM: Memilih Mitos atau Realitas?", *Buletin Transformasi Edisi II tahun IV/2003*, 6-9.
- El-Hujjad, Saud. "Membedah SPI Hijau" Disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Sistem Perkaderan IPM di Yogyakarta, 22-25 Desember 2013.
- El-Hujjaj, Saud, "Membincang IRM dan Wacana Gerakan Sosial Baru" *Suara Muhammadiyah-19-2002*.
- El-Hujjaj, Saud, "SP IRM: Memilih Mitos Atau Realitas?", Makalah disampaikan Pelatihan Kader Paripurna Taruna Melati Utama di Bandung, 2006.
- Eyerman, R. & Jamison, A. *Social Movements: A Cognitive Approach*, Pennsylvania: the Pennsylvania State University Press, 1991.
- Fuad, Ahmad Nur, "Kontinuitas dan Diskontinuitas Pemikiran Keagamaan Dalam Muhammadiyah (1923-2008): Tinjauan Sejarah Intelektual", Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2010.
- George R. Knight, *Filsafat Pendidikan Isu-Isu Kontemporer & Solusi Alternatif*, (terj.) oleh Mahmud Arif. Yogyakarta: Idea-/Press, 2004.
- Hadjid, KRH. *Pelajaran KHA Dahlan; 7 Falsafah Ajaran & 17 Kelompok Ayat Al-Qur'a*, Yogyakarta: UMM Press, 2005.
- Hanan, Djayadi, *Gerakan Pelajar Islam Indonesia di Bawah Bayang-Bayang Negara; Studi Kasus Pelajar Islam*

- Indonesia 1980-1997*. Yogyakarta: PB PII& UII Press, 2006.
- Hanneman Samuel, *Peter Berger: Sebuah Pengantar Ringkas*, Depok: Kepik, 2012.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi Indonesia*. Jakarta: ISAI dan The Asia Foundation, 2001.
- Imam Mujadid Rais, Ahmad. "Membangun Kesadaran Kritis: Voter Education" *Buletin Transformasi Edisi II tahun IV/2003*, 13-15.
- Jainuri, Ahmad. *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal*, LPAM: Surabaya, 2002.
- Jalaludin Idi & Abdullah. *Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat, dan Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- James H Mc. Millah dan Sally Schumacher, *Research in Education: A Conceptual Introductiob*, New York: Longman, 1987.
- John Dewey, *Democracy and Education*, New York: The MacMillan Company.
- Karim, M. Rusli, *HMI MPO dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1997.
- Khalil, Munawwar, "Meretas Arah Kebijakan IRM Pasca Muktamar XIII: Membangun Kesadaran Kritis Remaja", Disampaikan dalam Rakernas PP IRM, 21 Februari 2003 di Tawamangu, Solo, Jawa Tengah.
- Khutbah Iftitah Konferensi Pimpinan Wilayah Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, tanggal 25-26 Desember 1973.
- Kuntowijoyo, "Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah", dalam Amin Rais dkk (ed.). *Pendidikan Muhammadiyah dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: PLP2M, 1985.
- Kurniawan, Deni Wahyudi, "Reposisi Peran Gerakan Pelajar Muhammadiyah: Langkah setelah perubahan nama, IRM-IPM 2006-2010", *Manifestasi Gerakan Perlawanan Pelajar*, Yogyakarta: PPIPM, 2011.

- Kurzman, Charles, "The Humanity of Human Life" dalam buku *Modernist Islam: A Sourcebook* terbitan. Oxford: Oxford University Press, Inc., 2002.
- Latif, Yudi, *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*,. Bangung: Mizan, 2005.
- Lisa M Given (ed.), *The Sage Encyclopedia of Quantitative Research Methods*, California: Sage Publication Inc., 2008.
- M. Sukriyanto AR., "Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan: Perspektif Pendidikan dan Kebudayaan", Makalah Disampaikan dalam Pengajian Ramadhan 1446 h, di UMY, Ahad, 21 Juni 2015.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*, Jakarta: Mizan, 2009.
- Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan Muhammadiyah*, Yogyakarta: MPK PPM, 2015.
- Mashuda, Muhammad Masyhuri, "Kesadaran Kritis Remaja atau Remaja Kritis Kesadaran", *Buletin Transformasi Edisi II tahun IV/2003*, 13-15.
- Masmulyadi, "Menapak Jalan "Kritis Transformatif: Mendekap Realitas Sosial dengan Normativitas Wahyu", www.ipm.or.id. Diakses 25 Agustus 2016.
- Michael Foucault, 'Genealogy and Social Criticism' in *The Postmodern Turn: New Perspectives on Social Theory*, ed S. Seidman. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Muarif. *Modernisasi Pendidikan Islam: Sejarah dan Perkembangan Kweekschool Moehammadijah 1923-1932*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.
- Mudzakkir, Moh., "Gerakan Sosial Baru (Pelajar)", *Manifestasi Gerakan Perlawanan Pelajar*, Yogyakarta: PPIPM, 2011.
- Mudzakkir, Moh., "Membaca Gerakan Pelajar Muhammadiyah; Perspektif Filosofis", Azaki Khoirudin (ed.). *Pelajar*

Bergerak menuju Indonesia Berkemajuan (Jakarta: Al-Wasat, 2014).

- Mudzakkir, Moh., "Unfinished Project" bagi Gerakan IPM", Makalah disampaikan dalam Bedah Materi Mukhtamar XVIII, di PWM Jawa Timur, 2012.
- Muis, Arif Jamali. "Membedah SPI Biru", Disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Sistem Perkaderan IPM, Yogyakarta, 22-25 Desember 2013.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Islam Murni dan Masyarakat Petani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Mulkhan, Abdul Munir, "K.H. Ahmad Dahlan 1968-1923" dalam Djoko Marihandono, *K.H. Ahmad Dahlan Perintis Modernisasi di Indonesia*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Boeah Fikiran Kijahi H.A. Dachlan*, Jakarta: Global Base Review & STIEAD Press, 2015.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Warisan Intelektual K.H. Ahmad dahlan dan Amal Muhammadiyah*, Yogyakarta: PT. Percetakan Persatuan, 1990.
- Muslimin, M. Izzul, "Kekuatan IPM Ada Pada Dialektika Pemikiran", <http://www.ipm.or.id>. Diakses 22 Agustus 2016.
- Nashir, Haedar, "Aktualisasi Islam yang Berkemajuan", Makalah Disampaikan pada Tanwir 'Aisyiyah di Kampus STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta 2012.
- Nashir, Haedar. "IPM Gerakan Ideologis", *Manifestasi Gerakan Perlawanan Pelajar*, Yogyakarta: PP IPM, 2011.
- Nashir, Haedar. "Pembaruan Konsep dan Konsistensi Pelaksanaan SPI", Prolog dalam *Sistem Perkaderan IPM*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2014.
- Nugroho, Anjar. "Membongkar Paradigma IPM di Era Reformasi", <https://www.youtube.com/watch?v=HRzpATaV8s4>, Diakses 2 September 2016.
- Oey Hong Lee, *Indonesia Facing the 1980*, England: Europress, 1979.

- Peacock, James L. *Purifying the Faith: the Muhammadiyah Movement in Indonesian Islam*, California: The Benjamin/Cumming Publishing Company, 1978.
- Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Pimpinan Cabang IPM Rawamangun. *Pedoman Instruktur TC IPM TM*, Jakarta: PC IPM Rawamangun, 1982.
- Pimpinan Daerah IPM Karangayar. *Buku Pegangan Anggota IPM (MABICA)*, Karangayar: PDIPM, 1991.
- Pimpinan Daerah IPM Kulonprogo. *Panduan Mabica Ikatan Remaja Muhammadiyah*, Kulonprogo: PT Kurnia Kalam Semesta, 1993.
- Pimpinan Pusat IPM. "Buku Panduan Konferensi Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah", Surabaya, 15-17 Januari 2016.
- Pimpinan Pusat IPM. "Buku Panduan Muktamar VII IPM di Cirebon", 26-30 April 1986.
- Pimpinan Pusat IPM. "Kompilasi Materi Muktamar XIV IRM", Lampung, 11-14 Desember 2004.
- Pimpinan Pusat IPM. "Laporan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Periode 1983-1986", Disampaikan pada Muktamar VII IPM di Cirebon, 26-30 April 1986.
- Pimpinan Pusat IPM. "Laporan Kegiatan Pelatihan Kader Paripurna Tingkat Nasional Taruna Melati Utama", Kendal, 15-24 Agustus 2007.
- Pimpinan Pusat IPM. "Pedoman Pokok Pendidikan Kader IPM", Hasil Seminar Kader IPM di Palembang 1969.
- Pimpinan Pusat IPM. *Ideologi Gerakan IPM*, Yogyakarta: PPIPM, 2016.
- Pimpinan Pusat IPM. *Pedoman Pengelolaan Ranting IRM dan Forum Ta'aruf dan Orientasi Siswa (Fortasi)*, Yogyakarta: PP IPM, 2000.
- Pimpinan Pusat IPM. *Sistem Pengkaderan IPM (SPI Merah)*, Yogyakarta: PP IPM, 1986.

- Pimpinan Pusat IPM. Sistem Perkaderan IPM (SPI Kuning), Yogyakarta: PP IPM, 2014.*
- Pimpinan Pusat IPM. *Tanfidz Keputusan Muktamar XIX IPM di Jakarta*, Yogyakarta: PP IPM, 2014.
- Pimpinan Pusat IPM. *Tanfidz Keputusan Muktamar XVI IRM di Surakarta*, Yogyakarta: PP IPM, 2008.
- Pimpinan Pusat IPM. *Tanfidz Keputusan Muktamar XVII IPM di Bantul*, Yogyakarta: PP IPM, 2010.
- Pimpinan Pusat IPM. *Tanfidz Keputusan Muktamar XVIII IPM di Palembang*, Yogyakarta: PP IPM, 2012.
- Pimpinan Pusat IPM. *Tanfidz Keputusan Silaturahmi Pimpinan IPM di Yogyakarta*, Yogyakarta: PP IPM, 1990.
- Pimpinan Pusat IRM. "Kompilasi Materi Muktamar XIV IRM", *Lampung, 11-14 Desember 2004*.
- Pimpinan Pusat IRM. "Panduan Konferensi Pimpinan Wilayah Ikatan Remaja Muhammadiyah", Yogyakarta, 4-7 September 2001.
- Pimpinan Pusat IRM. *Sistem Perkaderan IRM (SPI Biru). Yogyakarta, PP IRM: 1994.*
- Pimpinan Pusat IRM. *Sistem Perkaderan IRM (SPI Hijau). Yogyakarta, PP IRM: 2002.*
- Pimpinan Pusat IRM. *Tanfidz Keputusan Muktamar IRM X di Surakarta*, Yogyakarta: PP IPM, 1996.
- Pimpinan Pusat IRM. *Tanfidz Keputusan Muktamar XIV IRM Lampung*, Yogyakarta: PP IPM, 2004.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Laporan Majelis Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015", Disampaikan pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 Makassar 3-7 Agustus 2015.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Indonesia Berkemajuan: Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan Yang Bermakna*. Materi Tanwir Samarinda 2014.
- Purno Aji, Subhan. "Falsafah dan Genealogi Perkaderan IPM", www.pelajarberkemajuan.blogspot.com. Diakses 26 Maret 2016.

- Pusat Sejarah dan Transisi ABRI. *Peranan Pelajar dalam Perang Kemerdekaan*, Jakarta: Badan Penerbit Alda, 1985.
- Rahardjo, M. Dawam, *Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa, Risalah Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, 1993.
- Rais, Ahmad Imam Mujadid, 'Pelajar Berkarya Untuk Bangsa: Kinerja dan Prestasi IPM', *Manifesto Gerakan Perlawanan Pelajar*, Yogyakarta: PPIPM, 2011.
- Rais, M. Amien. *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*. Bandung: Mizan, 1998.
- Safi, Omid. *Progressive Muslims: On Justice, Gender, dan Pluralism*. England: Oneworld Oxford, 2003.
- Sarbini, Asnawi. "Peremajaan Pimpinan" Kertas Kerja Regional Meeting se-Jawa dan NTB PW IPM di PP Muhammadiyah Yogyakarta 16-17 Oktober 1976.
- Setiawan, Bukik. "Menggerakkan Organisasi Pelajar dengan Appreciative Inquiry", <https://www.youtube.com/watch?v=Bx8x2YX2Q1Y>. Diakses 5 September 2016.
- Soedja'. *Islam Berkemajuan: Kisah Perjuangan K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Masa Awal*, Jakarta: Al-Wasat, 2009.
- Sukaca, Agus. "Membedah SPI Merah", Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Sistem Perkaderan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Yogyakarta, 22-25 Desember 2013.
- Sukaca, Agus. "Paradigma Gerakan IPM: Tertib Ibadah, Tertib Belajar dan Tertib Organisasi", dalam *Manifestasi Gerakan Perlawanan Pelajar*. Yogyakarta: PP IPM, 2011.
- Syarbini, Asnawi. "Metode dan Sistem Perkaderan IPM", Kertas Kerja disampaikan pada Seminar Kader dan Konpiwil IPM se-Indonesia tanggal 22-25 Desember 1976 di Jakarta.
- Tim Majelis Diktilitbang & LPI PP Muhammadiyah. *1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*. Jakarta: Kompas, 2010.

Topatimasang, Roem, dkk. *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis*, Yogyakarta: Insist Press, 2010.

Waryani Fajar Riyanto, *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan Birografi Intelektual M. Amin Abdullah (1953-...) Person, Knowledge, and Institution*. Yogyakarta: Suka-Press, 2013.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1985.

Sang Pena

A. Identitas Diri

Nama : Azaki Khoirudin, M.Pd.
TTL : Lamongan 25 November 1989
Alamat Rumah : Jl. Sunan Giri IV No. 72 Gresik
Jawa Timur, Kode Pos 61121
Alamat Kantor : Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Jl. KH. Ahmad Dahlan 103
Yogyakarta INDONESIA
No. Telp. Email : 085799945696, azakikhoirudin@
gmail.com
Pekerjaan : Guru SMP Muhammadiyah 12 GKB
Nama Ayah : Sujadi
Nama Ibu : Supiyatun
Status : Menikah
Nama Istri : dr. MH. Muflihatul Ulfa
Nama Anak : Adzkia Irfani Mafaza

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan

Formal

2016 S-2 Program Magister UIN Sunan
Kalijaga
2013 S-1 Program Sarjana Universitas
Muhammadiyah Surakarta

2008	SMA Muhammadiyah 1 Gresik
2005	SMP Muhammadiyah 19 Lamongan
2002	MI Muhammadiyah 08 Sekaran
1996	TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kebalankulon

2. Pendidikan Pondok Pesantren

2013	Pondok Hajjah Nuriyah Shabran UMS
------	-----------------------------------

1. Workshop

2016	Halaqah Ulama dan Tokoh Muda Islam Indonesia "Penguatan Toleransi dan Gerakan Mengatasi Ekstrimisme" tanggal 31 Juli – 3 Agustus 2016 di R Hotel Rancamaya Bogor the Wahid Foundation.
2016	Halaqah Penyusunan Buku Fikih Terorisme pada 3-5 Mei 2016, MAARIF Institute for Culture and Humanity bekerjasama dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah
2014	Halaqah Fikih Kebhinnekaan, 24-26 Februari 2015, di Hotel Alia - Jl. Cikini Raya No.32 Jakarta Pusat (depan Taman Ismail Marzuki oleh MAARIF Institute for Culture and Humanity
2014	Tadarus Pemikiran Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah "Membawa Muhammadiyah ke Percaturan Pemikiran Global", Malang.
2015	Silatul Fikri Centre for Dialogue and Cooperation among Civilization (CDCC) Jakarta, Megamendung-Bogor.

2014 Workshop "Internasionalisasi
Pemikiran dan Gerakan
Muhammadiyah" Fakultas Agama
Islam UMS dan Jaringan Intelektual
Muda Muhammadiyah, Surakarta.

C. Riwayat Organisasi

1. Organisasi

2015-2020 Anggota Majelis Pendidikan Kader
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
2014-2016 Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat
Ikatan Pelajar Muhammadiyah

D. Riwayat Fasilitasi, Seminar, dan Diskusi

1. Fasilitasi

2016 Fasilitator Pelatihan Kader Paripurna
Taruna Melati Utama, Palembang
2013 Fasilitator Pelatihan Kader Paripurna
Taruna Melati Utama, Makassar.

2. Seminar

2015 Pemakalah pada Indonesian Literature
Series Jabatan Pengajian Melayu
National University of Singapore,
24 Oktober 2015 di Taman Warisan
Melayu Singapura. "The Al-'Asher
Theology of KH. Ahmad Dahlan: The
Ethics and Spirit of Muhammadiyah
Civilisation"
2014 Pemakalah pada "Workshop
Internasionalisasi Pemikiran dan
Gerakan Muhammadiyah" Fakultas
Agama Islam UMS dan Jaringan
Intelektual Muda Muhammadiyah,
Surakarta, "Teologi Al-Ashr: Etos dan
Ajaran Kiai Dahlan yang Terlupakan".

E. Karya Tulis, Buku, Makalah, dan Artikel Opini

1. Buku

- | | |
|------|---|
| 2016 | Etika Muhammadiyah dan Spirit Peradaban (Zakiyuddin Baidhawiy dan Azaki Khoirudin), Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. |
| 2016 | Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan: Catatan Kritis Muktamar Teladan ke-47 Muhammadiyah Makassar 2015 (Editor dan Kontributor), Surakarta: Muhammadiyah Press. |
| 2016 | Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia: Agenda Muhammadiyah ke Depan (Editor dan Kontributor: Alpha Amirrachman, Andar Nubowo, & Azaki Khoirudin), Jakarta: Mizan. |
| 2015 | Teologi Al-'Ashr: Etos dan Ajaran KHA Dahlan yang Terlupakan, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. |
| 2015 | Internasionalisasi Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah (Kontributor) Surakarta: Fairuz Media. |
| 2015 | Kiprah Pencerahan di Perlintasan Zaman: Karya Unggulan Muhammadiyah (Editor) Jakarta: Centre for Dialogue and Cooperation among Civilization (CDCC). |
| 2015 | Pelajar Bergerak menuju Indonesia Berkemajuan (Editor dan Kontributor) Jakarta: Al-Wasat. |
| 2015 | Mercusuar Peradaban: Manifesto Gerakan Pelajar Berkemajuan, Bojonegoro: Nun Pustaka. |

- 2015 Pendidikan Insani (Editor dan Kontributor), Bojonegoro: Nun Pustaka.
- 2014 Pendidikan Akhlak Tasawuf, Bojonegoro: Kamil Publishing
- 2014 Mewujudkan Impian Masyarakat Berkemajuan (Dian Berkah & Azaki Khoirudin), Bojonegoro: Nun Pustaka.
- 2013 Nuun-Tafsir Gerakan Al-Qalam, Jakarta: Al-Wasat.
- 2012 Fajar Baru: Mempertajam Gerakan Pelajar Muhammadiyah yang Mulai Tumpul, Bojonegoro: Ilmi Publisher.

2. Jurnal

- 2016 Kontinuitas dan Diskontinuitas Pendidikan Kader Pondok Hajjah Nuriyah Shabran 1982-2014, Jurnal Muhammadiyah Studies, Vol.1. No.1
- 2015 Islam (Yang) Berkemajuan, Unfinished Paradigm, Jurnal Tajdida, Vol. 14, No. 1
- 2015 Rekonstruksi Metafisika Seyyed Hossein Nasr dan Pendidikan Spiritual, Jurnal Afkaruna Vol.7, No. 1
- 2013 Muhammadiyah dan Kelas Menengah: Sejarah Muhammadiyah Gresik Kota Baru 1992-2012, Jurnal Tajdida Vol. 11, No. 1

3. Artikel Koran

- 2016 "Dualisme Sistem UN", Seputar Indonesia.
- 2016 "Trilogi Pembangunan Berkelanjutan", Seputar Indonesia.

Sejarah dan Dnamika IPM 1961-2016

- | | |
|------|---|
| 2015 | "Janji Pendidikan Jokowi",
Kedaulatan Rakyat. |
| 2015 | "Pendidikan Budi Pekerti", Majalah
Matan. |
| 2015 | "Muhammadiyah dan Pesantren",
Seputar Indonesia. |
| 2015 | "Trisula Baru Muhammadiyah",
Kedaulatan Rakyat. |
| 2015 | "Islam Nusantara dan Islam
Berkemajuan", Solopos. |
| 2014 | "Kurikulum Jalan Tengah", Republika. |
| 2012 | "Strategi Kebudayaan
Muhammadiyah", Suara
Muhammadiyah. |

Yogyakarta, 4 November 2016

